

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Panjang Jangka Pembangunan Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan. . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pemerintahan. . .

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batam yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Arah. . .

13. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja yang dijabarkan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi.
14. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Permasalahan Pembangunan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
16. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Pasal 2

RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, dan Program Pembangunan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	:	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	:	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 4. . .

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Daerah yang memuat Visi, Misi, dan Program Wali Kota.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. hasil. . .

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal akhir periode RPJMD dan belum tersusun RPJMD periode berikutnya, maka RPJMD Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada program pembangunan RPJMD yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2025

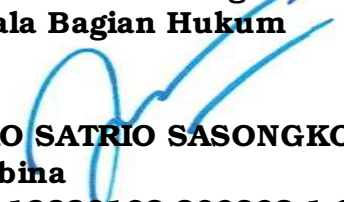
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: 4,18/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahunan, khususnya tujuan, sasaran dan program RPJMD dan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan RPJMD Kota Batam 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 136

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, partisipatif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun provinsi Kepulauan Riau.

RPJMD ini disusun dengan mengacu pada **VISI: BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA**, dimana visi tersebut menjadi cita-cita yang akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional dan pintu gerbang perdagangan internasional memiliki tantangan dan peluang pembangunan yang tinggi. Oleh karena itu, RPJMD ini menempatkan penguatan daya saing ekonomi berbasis industri, investasi, dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan layanan publik yang tetap memperhatikan sisi lingkungan dan kebudayaan sebagai prioritas utama. Strategi pembangunan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, DPRD Kota Batam, BP Batam, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Kota Batam. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa perencanaan ini dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap dokumen RPJMD ini dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam, serta menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga upaya kita bersama dapat membawa Kota Batam menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

WALI KOTA BATAM

dto

AMSAKAR ACHMAD



DAFTAR ISI

BATANG TUBUH			
KATA PENGANTAR			
DAFTAR ISI		i	
DAFTAR GAMBAR		ii	
DAFTAR TABEL		v	
BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I	8
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	13
	1.5 Sistematika Penulisan	I	14
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II	1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	34
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	52
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	63
	2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah	II	119
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	119
	2.2.2 Kerangka Pendanaan	II	155
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II	170
	2.3.1 Permasalahan Daerah	II	170
	2.3.2 Isu Strategis	II	191
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	2
	3.1.1 Visi RPJMD Kota Batam	III	2
	3.1.2 Misi RPJMD Kota Batam	III	5
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	10
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	III	20
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	20
	3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	33
	3.2.3 Dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap Arah Nasional	III	68
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	73
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	148
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	148
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	IV	149
BAB V	PENUTUP	V	1
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	8
Gambar II.1	Peta Administrasi Kota Batam	II	3
Gambar II.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Batam	II	4
Gambar II.3	Peta Topografi Kota Batam	II	5
Gambar II.4	Peta Bentang Alam Kota Batam	II	6
Gambar II.5	Peta Daerah Aliran Sungai Kota Batam	II	8
Gambar II.6	Gambar Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II	12
Gambar II.7	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Batam	II	14
Gambar II.8	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Batam	II	16
Gambar II.9	Indeks Kualitas Air Kota Batam Tahun 2020-2024	II	22
Gambar II.10	Indeks Kualitas Udara Kota Batam Tahun 2020-2024	II	23
Gambar II.11	Indeks Kualitas Lahan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	24
Gambar II.12	Indeks Ketahanan Pangan Kota Batam Tahun 2021-2024	II	26
Gambar II.13	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	27
Gambar II.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024	II	28
Gambar II.15	Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Batam Tahun 2021-2024	II	29
Gambar II.16	Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024	II	31
Gambar II.17	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	32
Gambar II.18	PDRB Per Kapita Kota Batam Tahun 2020-2024 (ribu/kapita/tahun)	II	39
Gambar II.19	Indeks Gini Kota Batam Tahun 2020-2024	II	40
Gambar II.20	Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2020-2024	II	42
Gambar II.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2020-2024	II	43
Gambar II.22	Usia Harapan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024	II	44
Gambar II.23	Jumlah Penerima Bantuan Pangan dan Program Keluarga Harapan di Kota Batam Tahun 2020-2024 (KPM)	II	47
Gambar II.24	Angka Ketergantungan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	52
Gambar II.25	Indeks Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2021-2024	II	54
Gambar II.26	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	55
Gambar II.27	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	55
Gambar II.28	Kunjungan Wisatawan Kota Batam (Jiwa) Tahun 2020-2024	II	56



Gambar II.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batam Tahun 2020-2024	II	57
Gambar II.30	Laju Inflasi Kota Batam Tahun 2020-2024	II	63
Gambar II.31	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	65
Gambar II.32	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	121
Gambar II.33	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	122
Gambar II.34	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)	II	129
Gambar II.35	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	130
Gambar II.36	Komponen Pendapatan Transfer Kota Batam Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)	II	130
Gambar II.37	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Batam Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)	II	131
Gambar II.38	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II	132
Gambar II.39	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	132
Gambar II.40	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	133
Gambar II.41	Perkembangan Belanja Kota Batam Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	135
Gambar II.42	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	136
Gambar II.43	Komposisi Struktur Belanja Operasi Kota Batam Tahun 2020-2024	II	137
Gambar II.44	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kota Batam Tahun 2020-2024	II	138
Gambar II.45	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	141
Gambar II.46	Target Komposisi PAD Kota Batam Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah)	II	161
Gambar II.47	Target Belanja Modal Kota Batam Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah)	II	164
Gambar II.48	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kota Batam Tahun 2025-2030	II	165
Gambar II.49	Permasalahan Daerah Kota Batam	II	171
Gambar II.50	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia Tahun 2024	II	173
Gambar II.51	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia	II	174



Gambar II.52	Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam dengan Kota di Indonesia Tahun 2024	II	176
Gambar II.53	Pengeluaran Perkapita (Juta/Tahun) Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia Tahun 2024	II	180
Gambar II.54	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia	II	181
Gambar II.55	Isu Global yang Sesuai dengan Kondisi Batam	II	192
Gambar II.56	Isu Nasional yang Sesuai dengan Batam	II	194
Gambar III.1.	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2025-2029	III	6
Gambar III.2.	Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita	III	7
Gambar III.3.	Tema Pembangunan Per Tahun Kota Batam Tahun 2025-2030	III	25
Gambar III.4.	Pengembangan Kewilayahan di Kepulauan Riau Pada RPJMN 2025-2029	III	72
Gambar III.5.	Peta Sebaran <i>Core Business</i> di Kawasan Bareleng	III	75
Gambar III.6.	Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang	III	78



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Batam	II	2
Tabel II.2	Kelas Ketinggian Kota Batam berdasarkan Kecamatan	II	4
Tabel II.3	Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam	II	7
Tabel II.4	Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung Kota Batam	II	9
Tabel II.5	Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budidaya Kota Batam	II	10
Tabel II.6	Perhitungan Demografis Kota Batam berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2024	II	18
Tabel II.7	Perhitungan Ketersediaan Air di Kota Batam	II	19
Tabel II.8	Perhitungan Daya Dukung Lahan (DDL) Bangunan berdasarkan Pemanfaatan Ruang	II	20
Tabel II.9	Jumlah Timbunan Limbah B3 di Kota Batam Tahun 2021-2024	II	24
Tabel II.10	Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Batam	II	30
Tabel II.11	Data Kependudukan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	32
Tabel II.12	Proyeksi Penduduk Kota Batam Tahun 2025-2029	II	34
Tabel II.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024	II	37
Tabel II.14	Indikator Kemiskinan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	41
Tabel II.15	Perkembangan Indikator IPM Kota Batam Tahun 2020-2024	II	43
Tabel II.16	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.17	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Batam Tahun 2024	II	46
Tabel II.18	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Batam Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.19	Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.20	Upaya Pelestarian Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	50
Tabel II.21	Indikator Pembangunan Gender Kota Batam Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.22	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kota Batam Tahun 2020-2024	II	58
Tabel II.23	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kota Batam Tahun 2020-2024	II	59
Tabel II.24	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Batam Tahun 2020-2024	II	60
Tabel II.25	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Batam Tahun 2020-2024 (km)	II	61



Tabel II.26	Indikator Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batam Tahun 2020-2024	II	62
Tabel II.27	Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	65
Tabel II.28	Komponen Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	66
Tabel II.29	Realisasi Investasi Kota Batam Tahun 2023-2024	II	68
Tabel II.30	Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Batam Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.31	Jumlah Tindak Pidana Kota Batam Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.32	Indeks Daya Saing Daerah Kota Batam Tahun 2022-2024	II	70
Tabel II.33	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	72
Tabel II.34	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.35	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batam Tahun 2020-2024	II	76
Tabel II.36	Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kota Batam Tahun 2020-2024	II	79
Tabel II.37	Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2020-2024	II	80
Tabel II.38	Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Batam Tahun 2020-2024	II	82
Tabel II.39	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2020-2024	II	83
Tabel II.40	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam Tahun 2020-2024	II	85
Tabel II.41	Indikator Kinerja Urusan Pangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	85
Tabel II.42	Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	86
Tabel II.43	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024	II	88
Tabel II.44	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020-2024	II	89
Tabel II.45	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Batam Tahun 2020-2024	II	90
Tabel II.46	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020-2024	II	91
Tabel II.47	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	92
Tabel II.48	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2020-2024	II	93



Tabel II.49	Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam Tahun 2020-2024	II	94
Tabel II.50	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2020-2024	II	94
Tabel II.51	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2020-2024	II	95
Tabel II.52	Indikator Kinerja Urusan Statistik Kota Batam Tahun 2020-2024	II	96
Tabel II.53	Indikator Kinerja Urusan Persandian Kota Batam Tahun 2020-2024	II	96
Tabel II.54	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	97
Tabel II.55	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	98
Tabel II.56	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	99
Tabel II.57	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	100
Tabel II.58	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Batam Tahun 2020-2024	II	101
Tabel II.59	Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kota Batam Tahun 2020-2024	II	102
Tabel II.60	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	103
Tabel II.61	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kota Batam Tahun 2020-2024	II	104
Tabel II.62	Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	106
Tabel II.63	Indikator Kinerja Urusan Fungsi Pengadaan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	107
Tabel II.64	Indikator Kinerja Urusan Fungsi Kepegawaian Kota Batam Tahun 2020-2024	II	108
Tabel II.65	Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II	109
Tabel II.66	Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kota Batam Tahun 2020-2024	II	110
Tabel II.67	Indikator Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal	II	110
Tabel II.68	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II	112
Tabel II.69	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II	113



Tabel II.70	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II	115
Tabel II.71	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan Rakyat Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II	116
Tabel II.72	Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2020-2024	II	117
Tabel II.73	Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial Kota Batam Tahun 2020-2024	II	118
Tabel II.74	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Batam Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	121
Tabel II.75	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	123
Tabel II.76	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	126
Tabel II.77	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam, 2020-2024	II	127
Tabel II.78	Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	127
Tabel II.79	Realisasi Belanja Daerah Kota Batam, 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	140
Tabel II.80	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)	II	142
Tabel II.81	Neraca Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)	II	148
Tabel II.82	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi <i>Year-on-Year</i> Kota Batam Tahun 2025-2030	II	157
Tabel II.83	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. Tahun 2030 Kota Batam (dalam Rupiah)	II	167
Tabel II.84	Permasalahan Perurusan Kota Batam	II	185
Tabel II.85	<i>Highlight</i> Intervensi RPJMN 2025-2029 terhadap Kota Batam	II	197
Tabel II.86	Sinkronisasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu RPJMD Kota Batam	II	208
Tabel II.87	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Kota Batam Tahun 2021-2024	II	210
Tabel II.88	Muatan Rencana Pola Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041	II	213
Tabel II.89	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Batam	II	223
Tabel III.1.	Uraian Pokok Visi	III	2
Tabel III.2.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029	III	13
Tabel III.3.	Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2030	III	26
Tabel III.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029	III	29
Tabel III.5.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batam	III	31
Tabel III.6.	Pemetaan Program Unggulan Kepala Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Batam 2025-2029	III	33



Tabel III.7.	Keterkaitan Misi, Tujuan/sasaran, Outcome, Program Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029	III	36
Tabel III.8.	Dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap Highlight Indikasi Intervensi RPJMN	III	68
Tabel III.9.	Dukungan Kota Batam terhadap Program Strategis Nasional	III	70
Tabel III.10.	Kawasan Prioritas Kota Batam	III	80
Tabel III.11.	Dukungan Kota Batam terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi	III	82
Tabel IV.1.	Program Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 Per Urusan	IV	2
Tabel IV.2.	Program Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 Per Perangkat Daerah	IV	83
Tabel IV.3.	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Batam Tahun 2025-2030	IV	148
Tabel IV.4.	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029	IV	150



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

BAB 1

PENDAHULUAN

MEMUAT LATAR BELAKANG PENYUSUNAN DOKUMEN, DISERTAI DENGAN LANDASAN HUKUM YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYUSUNAN DOKUMEN. SELAIN ITU JUGA MEMUAT HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN LAINNYA YANG MEMILIKI KETERKAITAN SUBSTANSI. MENGURAIKAN MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD DAN MENJELASKAN SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RPJMD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Letaknya yang hanya berjarak sekitar 20 kilometer dari Singapura, menjadikan Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Kawasan ini telah dikenal sebagai pusat industri manufaktur, logistik, dan pariwisata. Keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) memperkuat daya tarik Batam bagi investor asing, khususnya di sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata, dan alih kapal. Infrastruktur transportasi yang modern, seperti Bandara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar, turut memperkokoh posisi Batam sebagai pusat logistik dan distribusi nasional.

Sebagai kota kepulauan, Batam memiliki karakter geografis khas yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dikelilingi perairan. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terus berkembang, seperti Jembatan Bareleng yang menghubungkan beberapa pulau utama, mencerminkan karakter kota yang dinamis dan progresif. Keberagaman penduduk Batam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menciptakan harmoni budaya yang kaya. Selain sektor industri, sektor pariwisata juga menjadi penopang utama karakter Kota Batam, dengan potensi pantai eksotis, resort mewah, dan destinasi wisata bahari yang terus dikembangkan.

Keunikan Batam terletak pada perpaduan antara modernitas dan pesona alam. Meskipun menjadi pusat industri, Batam tetap mempertahankan keindahan alamnya, seperti hutan mangrove, pantai berpasir putih, dan terumbu karang yang terjaga. Batam juga menjadi jembatan budaya antara Indonesia dan negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, melalui berbagai program kerja sama lintas negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Kombinasi inilah yang membuat Batam unik dan menjanjikan untuk terus berkembang.

Pembangunan daerah merupakan pilar penting dalam menjalankan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memperbaiki kondisi masyarakat serta memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Pasal 258 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan

untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Meskipun dibagi berdasarkan rentang waktu, esensi dari perencanaan pembangunan daerah adalah kesatuan yang berkelanjutan, di mana RPJPD menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD, dan RPJMD menjadi panduan untuk dokumen turunan lainnya. Kesatuan ini tidak hanya berlaku di antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga berhubungan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan keterkaitan ini memungkinkan pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, dan kota yang bersinergi dan terkoordinasi.

Dengan dilantikannya Amsakar Achmad sebagai Wali Kota dan Li Claudia Chandra sebagai Wakil Wali Kota periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 maka penyusunan RPJMD Kota Batam untuk lima tahun ke depan resmi dimulai. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan dalam enam tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir dan (6) Penetapan. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga menjadi pedoman penting dalam proses ini, yang menetapkan penggunaan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan RPJMD Kota Batam memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program

pembangunan yang terukur. RPJMD memastikan arah pembangunan yang jelas dan terfokus berdasarkan potensi daerah serta aspirasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Lebih lanjut, RPJMD Kota Batam menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Keterlibatan pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Melalui indikator kinerja yang jelas, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dipantau secara berkala, sehingga Pemerintah Kota Batam mampu mengidentifikasi capaian serta perubahan kebijakan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

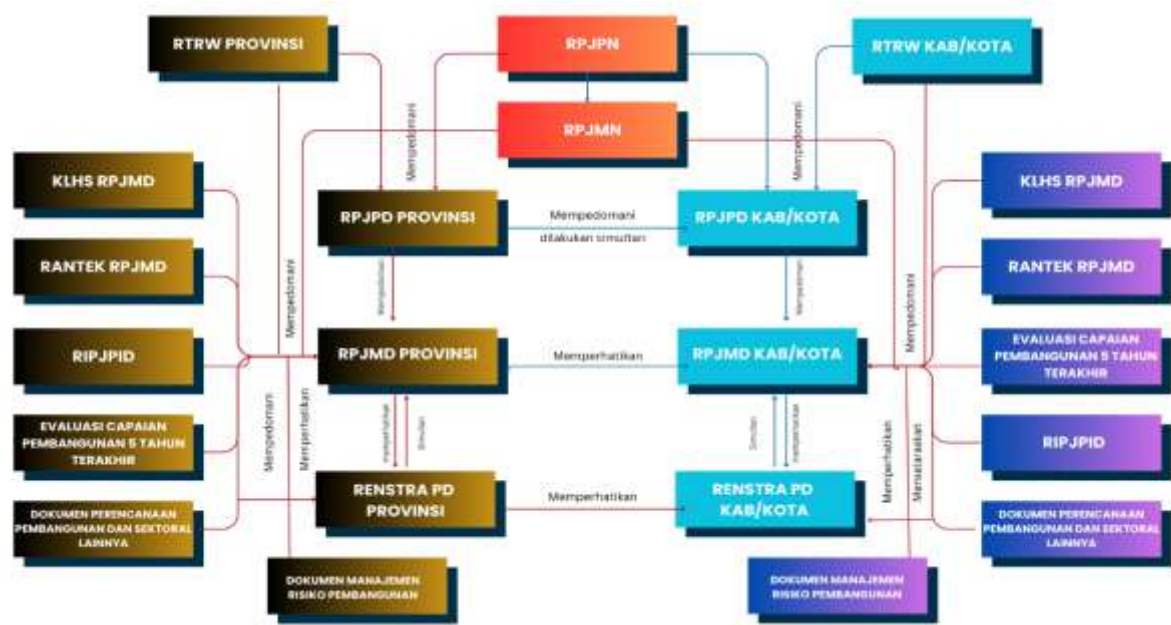
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130); dan
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Batam merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar keterkaitan RPJMD Kota Batam dengan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dirancang untuk mendukung visi dan

misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari upaya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. RPJMN sebagai dokumen strategis nasional memuat prioritas pembangunan nasional yang harus diadopsi oleh daerah dalam menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Fokus RPJMN 2025-2029, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia, menjadi acuan utama bagi Batam dalam menetapkan agenda pembangunannya.

Sebagai kota yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, Kota Batam juga menempati lokasi prioritas karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menjadikan Batam tidak hanya berperan sebagai pusat pertumbuhan regional, tetapi juga sebagai gerbang interaksi ekonomi internasional. Dalam RPJMN, Pemerintah Pusat telah menempatkan Batam sebagai salah satu simpul penting dalam strategi pengembangan kawasan industri berdaya saing global, penguatan konektivitas maritim, serta pengembangan pusat logistik internasional. Posisi ini menuntut penguatan peran Batam sebagai motor penggerak ekonomi, baik melalui industrialisasi modern, percepatan investasi, maupun integrasi perdagangan internasional.

Salah satu *highlight* intervensi RPJMN terhadap Kota Batam sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah pemenuhan layanan dasar, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, maupun pelayanan publik lainnya. Penguatan layanan dasar tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki peran sentral dalam merealisasikan rencana strategis ini. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi investasi, dan penguatan sektor-sektor unggulan Kota Batam sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Batam, Bintan, dan Karimun. Dalam Perpres tersebut, Batam diidentifikasi sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis industri, logistik, dan perdagangan internasional, yang harus didukung oleh pengelolaan kawasan dan tata ruang yang terpadu.

Dengan demikian, RPJMD Kota Batam harus menjadi panduan yang komprehensif untuk memastikan semua rencana pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, selaras dan saling melengkapi dalam mendukung target nasional dan kebutuhan lokal.

Selain itu, RPJMN juga menggarisbawahi pentingnya pengentasan kesenjangan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 akan berkontribusi melalui program-program yang mendukung pemerataan akses pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kota Batam. Sinergi antara RPJMN dan RPJMD menjadi kunci untuk memastikan Batam tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai daerah yang inklusif dan berdaya saing, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

b. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan RPJMD Kota Batam mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Keterpaduan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pembangunan di Kota Batam diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

c. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan implementasi periode pertama RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045, di mana RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi dan misi jangka panjang yang terkandung dalam RPJPD. RPJPD Kota Batam sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, menetapkan arah dan tujuan pembangunan yang lebih makro dan jangka panjang, sementara RPJMD berfokus pada pencapaian sasaran jangka menengah dalam lima tahun. RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang mendukung tujuan jangka panjang dalam RPJPD, dalam upaya transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata kelola. Dengan kata lain, RPJMD menjadi instrumen yang lebih konkret dan terukur dalam mewujudkan visi

besar yang telah direncanakan dalam RPJPD, sekaligus menjadi jembatan dalam memastikan kesinambungan pembangunan kota dalam jangka panjang.

d. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 memiliki korelasi dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Batam Tahun 2021-2041, di mana keduanya saling mendukung dalam merencanakan dan mengatur arah pembangunan fisik dan pengembangan wilayah kota. RTRW Kota Batam menyediakan landasan hukum dan teknis mengenai pemanfaatan ruang, termasuk zonasi kawasan industri, pemukiman, ruang terbuka hijau, serta kawasan wisata, yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Batam. Menurut Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023, panduan tata kelola perencanaan daerah yang mengintegrasikan aspek pembangunan sektoral dengan tata ruang wilayah, rencana pembangunan daerah di Kota Batam harus selaras, efektif, dan mudah diimplementasikan dalam kerangka ruang yang sudah ditetapkan. Penyelarasan antara RTRW dan RPJMD dilakukan agar program-program pembangunan sesuai dengan kebijakan tata ruang. RPJMD Kota Batam berfokus pada pencapaian program-program pembangunan yang selaras dengan ketentuan dalam RTRW, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen operasional yang mengimplementasikan prinsip-prinsip ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, untuk memastikan pertumbuhan Batam yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

e. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di Kota Batam.

f. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

g. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Batam harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dikarenakan KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

h. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Batam

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kota Batam. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi

RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

i. Hubungan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Sektoral (Renstra BP Batam)

RPJMD Kota Batam dan Renstra BP Batam memiliki hubungan saling melengkapi. Kedua dokumen tersebut terintegrasi secara perencanaan, implementasi, dan evaluasi, terutama dalam pengembangan kawasan ekonomi, pelayanan publik dan investasi di Kota Batam. Diharapkan kebijakan/perencanaan BP Batam dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arah pembangunan jangka menengah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang menerjemahkan visi, misi, program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih guna memastikan kesinambungan dan konsistensi kebijakan pembangunan di tingkat daerah hingga tingkat nasional.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional

RPJMD 2025–2029 diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional. Hal ini mencakup integrasi program-program prioritas daerah dengan sasaran strategis nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan demikian, pembangunan di Kota Batam akan sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

2. Memberikan Ruang Optimal bagi Pembangunan Daerah

RPJMD juga bertujuan untuk memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi, inovasi, dan pengembangan lokal. Ini berarti bahwa perencanaan pembangunan di Kota Batam harus mempertimbangkan karakteristik daerah, termasuk potensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Memberikan Gambaran Menyeluruh Profil Daerah

RPJMD memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi umum daerah, mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, sekaligus mengoperasionalkan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan.

4. Menjadi Acuan Pembangunan Perangkat Daerah

RPJMD berperan sebagai acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat lebih terarah, terukur, dan selaras antar-Perangkat Daerah.

5. Menjadi Pedoman Arah Pengembangan Wilayah

RPJMD menjadi pedoman dalam memberikan arah pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sehingga mampu menjamin konsistensi kebijakan pembangunan jangka menengah dengan rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum penyusunan, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kota Batam secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan

misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang meliputi Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan Perangkat Daerah. Penyusunan indikator tersebut sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

MEMBERIKAN GAMBARAN MENYELURUH MENGENAI PROFIL KOTA BATAM SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN YANG MELIHAT DARI GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERKAHIR DISERTA DENGAN GAMBARAN KONDISI KEUANGAN KOTA BATAM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN. SERTA, MENYAJIKAN PERMASALAHAN SERTA ISU PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI KOTA BATAM



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Batam berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Batam tumbuh pesat sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa, sekaligus diperkuat statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Gambaran Umum Daerah Kota Batam menyajikan profil kewilayahan, demografi, sosial-ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan, disertai realisasi serta struktur keuangan lima tahun terakhir (2020–2024) dan proyeksi keuangan lima tahun mendatang (2025–2030). Uraian ini dilengkapi analisis permasalahan dan isu strategis pada level global, nasional, dan regional dengan tetap mengacu pada dokumen RTRW serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai koridor penataan ruang dan keberlanjutan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada sub bab Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat penyajian aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Penyajian data-data dan informasi melalui pendekatan analisis deskriptif dan analisis diagnostik yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi adalah dua komponen penting dalam menggambarkan kondisi umum suatu daerah. Aspek geografi membantu memahami karakteristik fisik wilayah yang berpengaruh pada pola ruang, tata guna lahan, serta potensi dan kendala pembangunan. Sedangkan aspek demografi memberikan gambaran tentang kapasitas sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Aspek Geografi

Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, secara geografis Kota Batam mempunyai luas 1.034,732 (seribu tiga puluh empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) km² yang terdiri dari



454 buah pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kota Batam dibagi menjadi 12 kecamatan terdiri dari 64 kelurahan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Batam memiliki batas-batas:

- Utara : Selat Singapura,
- Selatan : Kabupaten Lingga,
- Barat : Kabupaten Karimun,
- Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

Tabel II.1.

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Batam

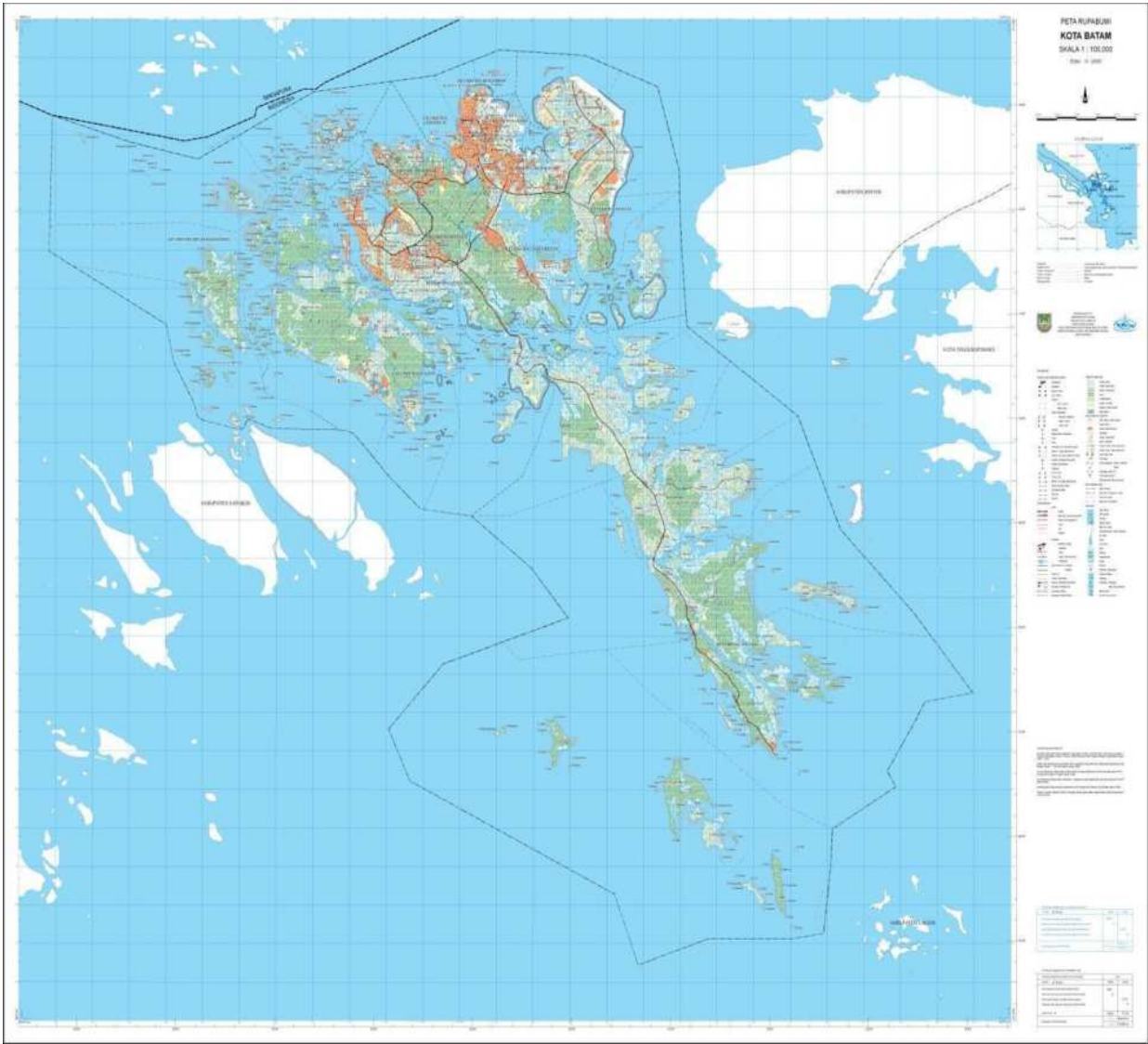
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Belakang Padang	68,55	6
2	Bulang	158,93	6
3	Galang	353,24	8
4	Sungai Beduk	105,97	4
5	Sagulung	54,95	6
6	Nongsa	108,37	4
7	Batam Kota	38,54	6
8	Sekupang	68,53	7
9	Batu Aji	41,82	4
10	Lubuk Baja	11,16	5
11	Batu Ampar	10,96	4
12	Bengkong	13,71	4
Kota Batam		1.034,732	64

Sumber : Perda RPJPD Kota Batam 2025-2045

Posisi Kota Batam secara geografis memiliki letak yang strategis, yaitu pada kawasan perbatasan Indonesia dan Singapura serta berada di jalur pelayaran dunia internasional. Oleh karena itu, Kota Batam ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan alih kapal. Wilayah Kota Batam berbatasan dengan Selat Singapura di bagian Utara, Kabupaten Lingga di bagian Selatan, Kabupaten Karimun di sebelah Barat, dan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang di bagian Timur. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan jarak sekitar 25 Km, sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor, Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km.

Gambar II.1.

Peta Administrasi Kota Batam

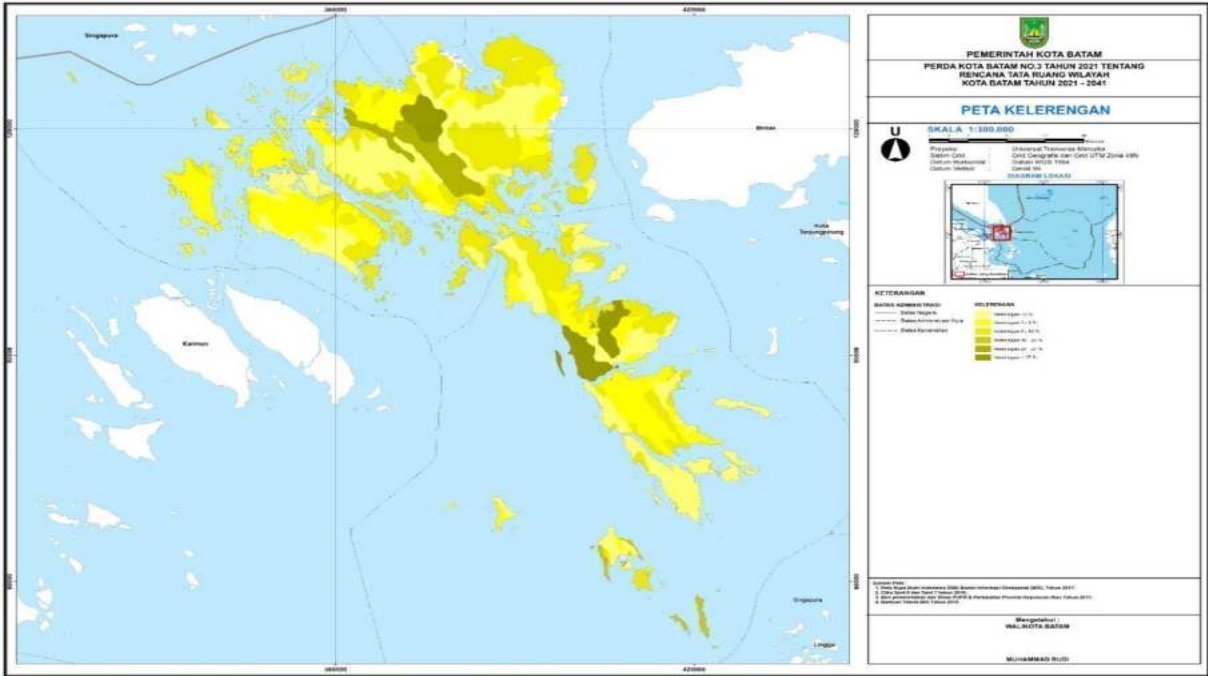


Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

B. Topografi

Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran permukaan muka bumi dan dimensinya. Representasi grafis tersebut sekurang-kurangnya dapat berupa bentuk kemiringan lereng (kelerengan) dan ketinggian daratan. Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 5 mdpl hingga 25 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang.

Gambar II.2.
Peta Kemiringan Lereng Kota Batam



Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

Tabel II.2.
Kelas Ketinggian Kota Batam Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Persentase
1	Belakang Padang	10	8,33
2	Bulang	5	4,17
3	Galang	5	4,17
4	Sungai Beduk	5	4,17
5	Sagulung	5	4,17
6	Nongsa	15	12,50
7	Batam Kota	20	16,67
8	Sekupang	5	4,17
9	Batu Aji	10	8,33
10	Lubuk Baja	25	20,83
11	Batu Ampar	10	8,33
12	Bengkong	5	4,17
Kota Batam (Rata-rata)		10	100,00

Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan kemiringan tanah di wilayah Kota Batam, memiliki nilai yang bervariasi dari 0-25 mdpl. Dataran yang terdekat dengan permukaan laut berada di Kecamatan Bulang, Galang, Sungai Beduk, Sagulung, Sekupang dan Bengkong yaitu sebesar 4,17 persen dan

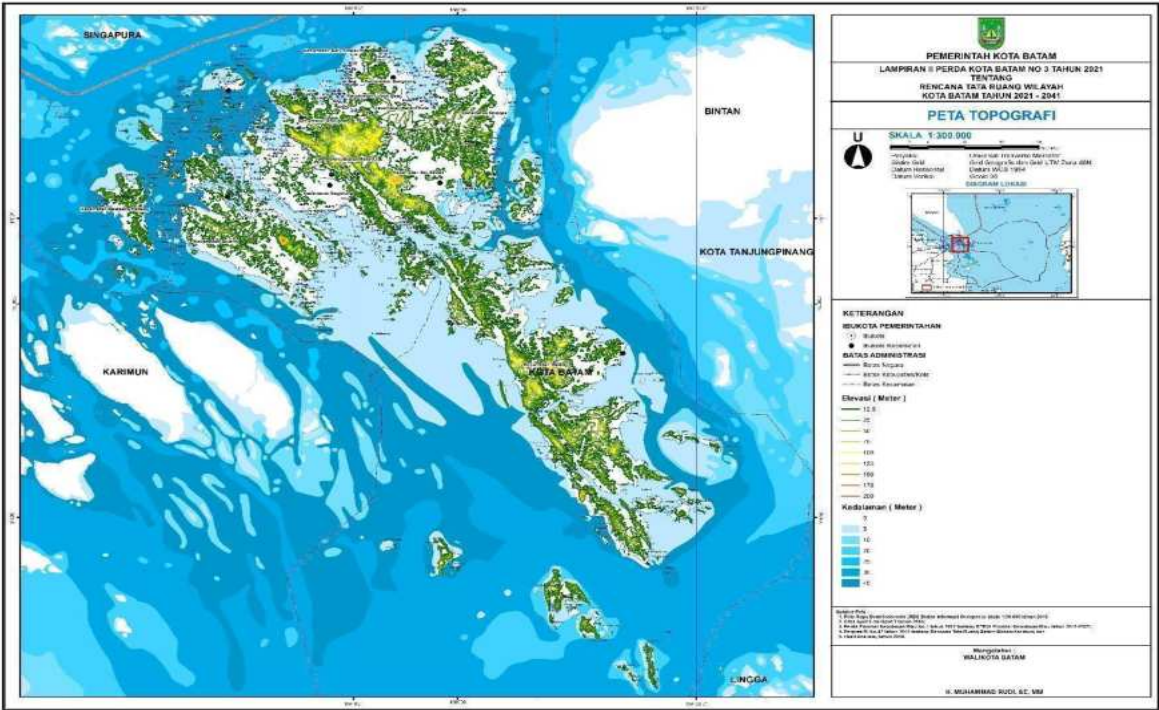
memiliki nilai sama yaitu 5 mdpl. Kecamatan yang memiliki kemiringan tanah yang cukup tinggi ada pada Kecamatan Lubuk Baja dengan tinggi 25 mdpl sebesar 20,83 persen. Kemudian terdapat Kecamatan Batam Kota sebesar 20 mdpl sebesar 16,67 persen. Selanjutnya ada Kecamatan Nongsa sebesar 12,50 persen dengan ketinggian 15 mdpl, lalu ada Kecamatan Belakang Padang, Batu Aji, dan Batu Ampar sebesar 8,33 persen yang memiliki tingkat kemiringan yang sama yaitu 10 mdpl.

C. Kelerengan

Kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi kemiringan lereng akan berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Berdasarkan RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041, diketahui bahwa kelas lereng yang terdapat di Kota Batam berkisar antara 0% sampai dengan di atas 40%. Kelas lereng di Kota Batam didominasi oleh kelas landai (2 – 15%) yang biasanya digunakan untuk kegiatan perkotaan ataupun permukiman.

Gambar II. 3

Peta Topografi Kota Batam



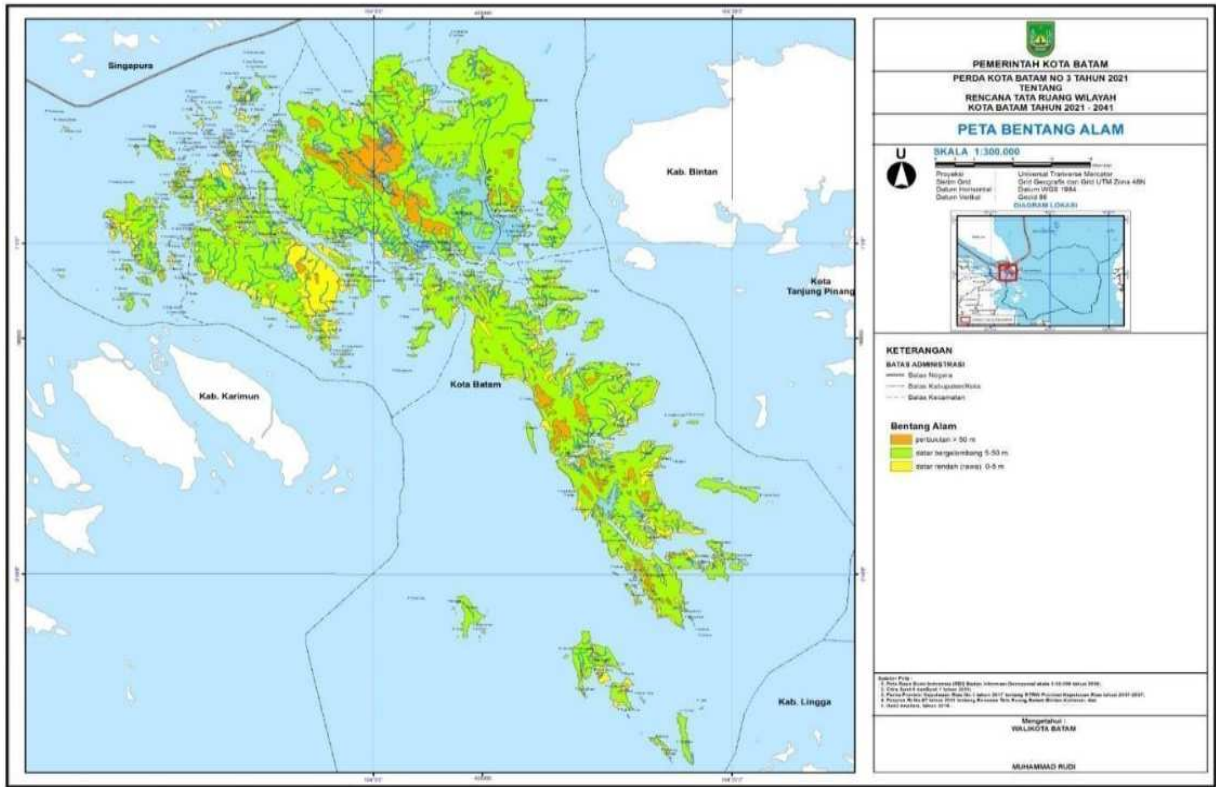
Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

D. Morfologi Wilayah

Kota Batam memiliki keragaman ketinggian lahan, sehingga turut membentuk adanya variasi kemiringan lereng pada topografi wilayahnya (Bentang Alam/Morfologi). Morfologi wilayah merupakan gambaran bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya.

Terkait dengan morfologi ini, di kawasan Kota Batam, terdapat satuan morfologi dataran dan perbukitan. Adapun satuan morfologi daratan di sini merujuk pada bentuk bentang alam yang didominasi oleh daratan yang relatif datar atau sedikit bergelombang.

Gambar II.4.
Peta Bentang Alam Kota Batam



Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

Di kawasan Kota Batam, morfologi daratan yang ada ialah dataran rendah dan dataran bergelombang, sedangkan untuk morfologi perbukitan yang ada ialah perbukitan rendah dan perbukitan tinggi.

E. Geologi

Menurut Das (1995), dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Kota Batam termasuk dalam kawasan dari geologi Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plaser bawah laut. Secara struktur bentang geologi berdasarkan interpretasi rekaman seismik, Kota Batam masuk dalam kawasan perairan Kepulauan Riau yang pada dasar perairan tersebut merupakan patahan yang membentuk Pola Barat Laut – Tenggara di bagian barat perairan dan Pola Barat - Timur di bagian timur perairan. Terdapat beberapa jenis batuan di Kota Batam

yang meliputi Aluvium, Garis Tepi Pantai/Pulau, Formasi Duriangkang, Formasi Goungon, Formasi Pulau Panjang, Formasi Tanjung Kerotang, Formasi Pancur, dan Granit. Berdasarkan jenis batuan tersebut, Formasi Goungon merupakan jenis batuan yang paling mendominasi di Kota Batam dengan luas 495,6 Ha atau 47,70% dari total keseluruhan jenis batuan yang ada di Kota Batam. Sedangkan, jenis batuan yang paling minim di Kota Batam adalah Garis Tepi Pantai/Pulau dengan luas 7,865 Ha atau hanya 0,80% dari total keseluruhan jenis batuan di Kota Batam. Tabel berikut menggambarkan informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.3.
Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No	Jenis Batuan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Granit	82,05	7,90
2	Garis Tepi Pantai/Pulau	7,865	0,80
3	Formasi Tanjung Kerotang	264,5	26,40
4	Formasi Pancur	109,9	10,60
5	Formasi Goungon	495,6	47,70
6	Formasi Duriangkang	28,77	2,80
7	Aluvium	39,52	3,80

Sumber : Perda RPJPD Kota Batam 2025-2045

Jenis batuan yang paling mendominasi di Kota Batam yaitu Formasi Goungon tersusun dari batuan lempung hitam hingga pink coklat. Selain itu, Formasi Goungon ini juga memiliki material berpasir yang terdiri dari pasir mika, pasir putih, dan pasir kecoklatan. Formasi Goungon ini tersebar cukup merata di beberapa pulau utama di Kota Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Setokok, Pulau Rempang di bagian tengah dan tenggara, Pulau Galang, dan beberapa pulau kecil di sekitar pulau utama Kota Batam.

F. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Batam dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air bawah tanah/air tanah dan air permukaan. Untuk jenis air tanah tersebar di 2 (dua) wilayah, yaitu :

- Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah
Susunan batuan yang ada dalam kawasan wilayah air tanah ini berupa batu pasir, batu lempung, illit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil pelapukan batuan padu tersebut dan terdapat

pada kedudukan dangkal.

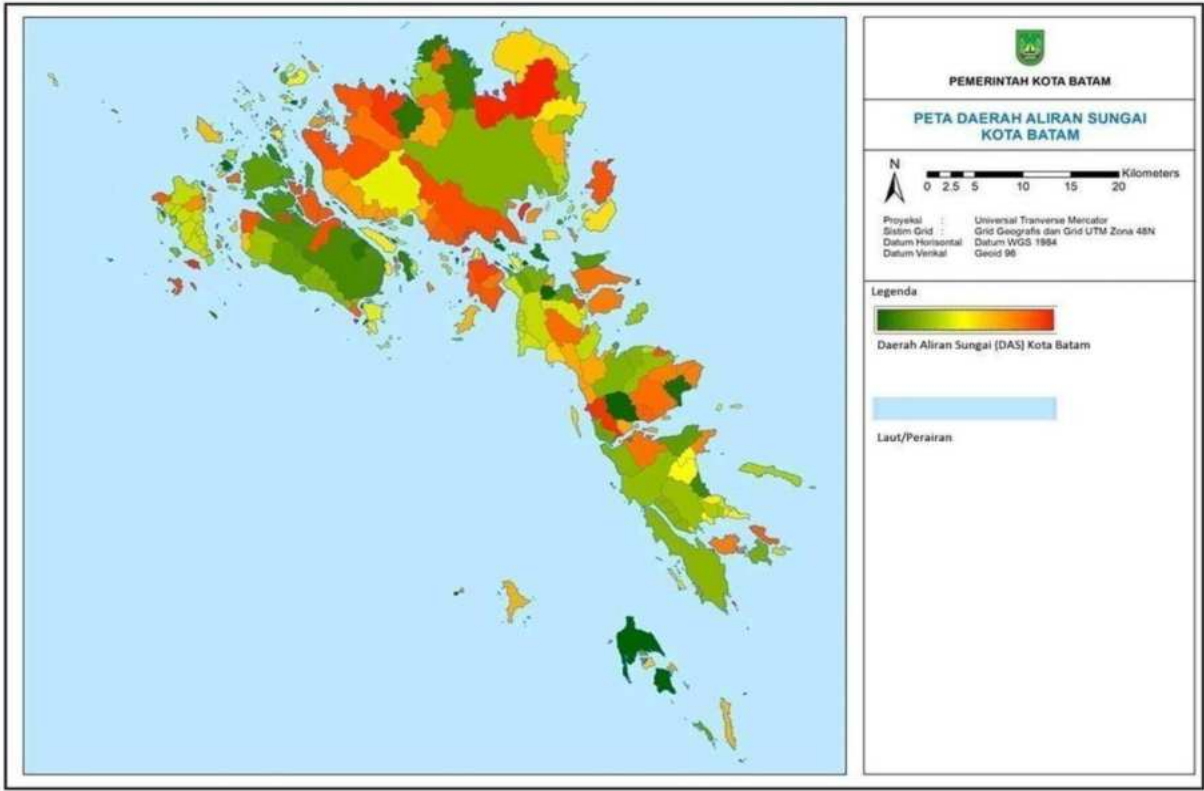
- Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku
Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulang Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulang Lintang, Waduk Pulau Bulan, Waduk Sei Gong, Waduk Tembesi serta air permukaan lain yang bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam. (Sumber: BPDAS Kepulauan Riau, 2024)

Adapun informasi mengenai DAS berdasarkan data Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.5.

Peta Daerah Aliran Sungai Kota Batam



Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

G. **Klimatologi**

Iklim Kota Batam adalah tropis dengan suhu minimum pada tahun 2024 berkisar antara 22,3°C hingga 24,5°C dan suhu maksimum antara 30,5°C hingga 35,0°C. Suhu rata- rata minimum sepanjang tahun 2023 adalah 27,0°C dan suhu rata-rata maksimum adalah 28,90°C. Tekanan udara rata-rata untuk tahun 2024, berkisar antara 1.005,80 sampai 1.017,90 mb (milibar); rata-rata kelembaban udara Kota Batam berada di sekitar angka 79,0%-87,30% dengan kisaran kelembaban minimum sekitar 48,0%-59,0% dan kelembaban maksimum berada di kisaran 97,0%-100%. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 13 sampai 20 knot dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 3,3 sampai 9,0 knot. Banyaknya hari hujan di Kota Batam pada tahun 2024 sebanyak 157 hari dengan curah hujan tertinggi yaitu 453,5 mm³ pada Bulan Januari.

H. **Penggunaan Lahan**

Rencana pola ruang wilayah Kota Batam meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Di mana untuk kawasan peruntukan lindung terdiri atas : 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 2) Kawasan perlindungan setempat; 3) Kawasan konservasi; 4) Kawasan cagar budaya; 5) Kawasan ekosistem mangrove; 6) Ruang terbuka hijau; dan 7) Badan air. Sedangkan peruntukan kawasan budidaya terdiri atas : 1) Kawasan hutan produksi; 2) Kawasan pertanian; 3) Kawasan peruntukan industri; 4) Kawasan pariwisata; 5) Kawasan permukiman; 6) Kawasan pertahanan dan keamanan; dan 7) Kawasan pertambangan dan energi. Berikut merupakan luasan pola ruang wilayah di Kota Batam, seperti pada tabel berikut.

Tabel II.4.

Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung Kota Batam

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
	Kawasan Peruntukan Lindung	
1	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
a	Kawasan Hutan Lindung	19.395
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
a	Sempadan Sungai	9
b	Kawasan Sekitar Waduk	75
3	Kawasan Konservasi	
a	Taman Wisata Alam	901
b	Kawasan Taman Buru	2.642
4	Kawasan Cagar Budaya	
5	Kawasan ekosistem mangrove	404



No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
	Kawasan Peruntukan Lindung	
6	RTH Publik	
a	RTH Publik	5.299*
b	RTH Privat	-
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	33
8	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	18
9	Kawasan Reklamasi Perairan/Ruang Terbuka Hijau	47
10	Kawasan Hutan Produksi	-
11	Badan Air	4.671
12	Kawasan Hutan Lindung/Badan Air	68
13	Badan Air/Kawasan Sumber Daya Air	1.941
	Total	35.503

Sumber: Perda RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

*: Target Tahun 2041 a-spasial

RTH atau Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu penggunaan lahan yang mampu menjadi paru-paru sebuah wilayah karena tanaman mampu menyerap karbon dioksida. Pemeliharaan dan penyediaan RTH Privat sendiri menjadi tanggung jawab swasta, perseorangan, maupun masyarakat itu sendiri. Adanya RTH Privat, akan membantu pemerintah dalam memenuhi luasan RTH Publik. Sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yaitu proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Tabel II.5.

Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budidaya Kota Batam

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
	Kawasan Peruntukan Budidaya	
1	Kawasan hutan produksi terbatas	9.101
2	Kawasan hutan produksi tetap	2.361
3	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	11.514
4	Kawasan perkebunan	1.622
5	Kawasan peternakan	6.009
6	Kawasan peruntukan industri	11.603
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peruntukkan industri	663
8	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan peruntukan industri	1.151
9	Kawasan pariwisata	8.389
10	Kawasan Hutan Lindung/Pariwisata	190
11	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	1.302
12	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pariwisata	397



No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
13	Kawasan perumahan	15.694
14	Kawasan perdagangan dan jasa	4.161
15	Kawasan perkantoran	116
16	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkantoran	6
17	Kawasan fasilitas umum dan sosial	829
18	Kawasan transportasi	2.453
19	Kawasan Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan	2
20	Kawasan Hutan Lindung /Kawasan Perumahan	653
21	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	67
22	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	14
23	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Transportasi	1
24	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perumahan	4.534
25	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perdagangan dan jasa	424
26	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	41
27	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Transportasi	103
28	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	1.218
29	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perumahan	657
30	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Transportasi	857
31	Kawasan pertahanan dan keamanan	380
32	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	1
33	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	88
34	Kawasan pembangkitan tenaga listrik	93
34	Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi	15
35	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	18
36	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Listrik	6
	TOTAL	90.361

Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

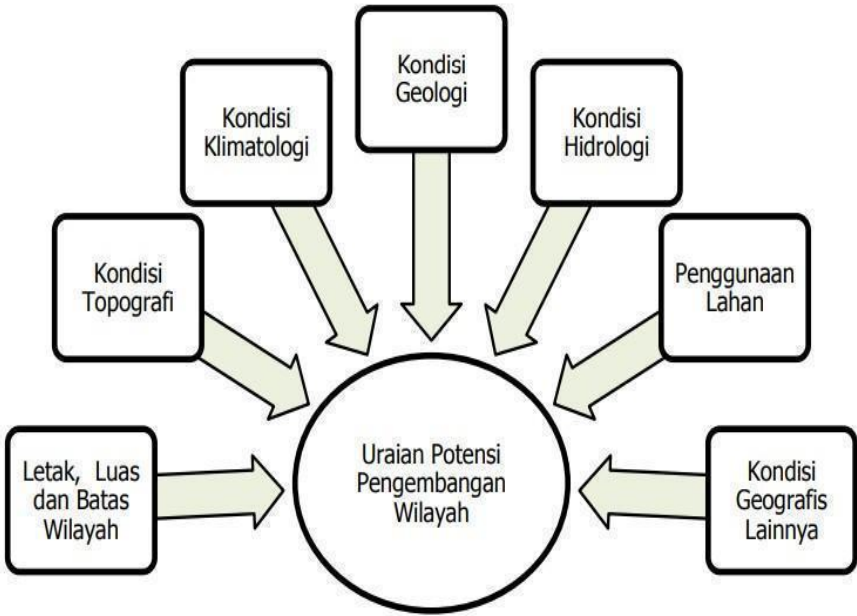
Rencana pola ruang Kota Batam untuk kawasan lindung yang terbesar didominasi oleh kawasan hutan lindung dengan luas 19.395 Hektar. Sedangkan kawasan hutan lindung/kawasan transportasi menjadi kawasan dengan luas terkecil yaitu hanya seluas 1 hektar. Kemudian menurut Tabel II.5 rencana pola ruang Kota Batam untuk budidaya yang terbesar diperuntukkan bagi Kawasan Perumahan dengan luas 15.694 Hektar.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa uraian potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan uraian pada sub bab terdahulu serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga penyajian potensi pengembangan wilayah diklasifikasi ke dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah. Secara skematik kerangka pemikiran hubungan antara uraian kondisi geografi daerah dengan uraian potensi pengembangan wilayah disampaikan pada gambar berikut.

Gambar II.6.

Gambar Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber : Lampiran Permendagri No.86/2017

A. Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada ataupun direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan internasional. Berikut merupakan potensi pengembangan struktur ruang wilayah yang ada di Kota Batam yaitu:

1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam namun juga lingkup regional, nasional,

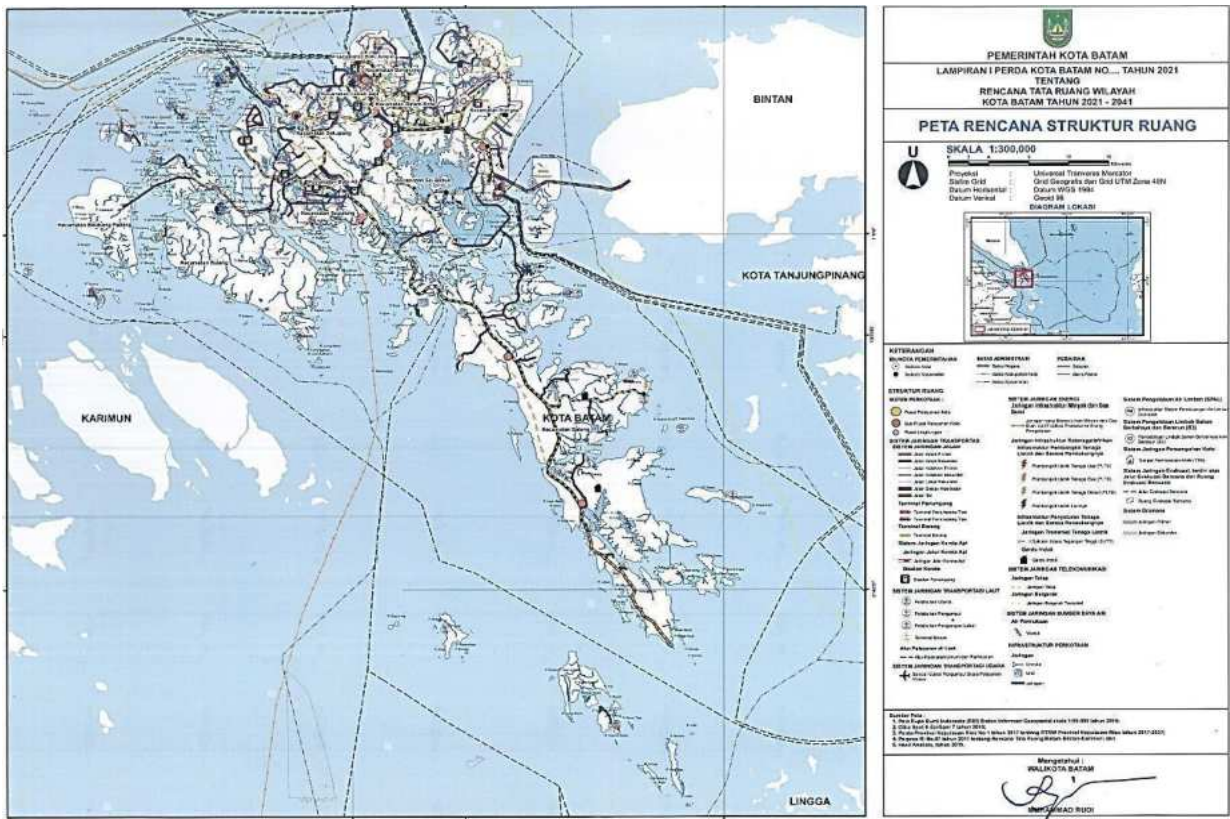
- internasional dan kawasan perbatasan. Sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang ekonomi dan tujuan investasi sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).
2. Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hierarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
 - Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hierarki ke-1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional dan internasional;
 - Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hierarki ke-2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan
 - Pusat Lingkungan (*Neighbourhood Services Center*), yang merupakan pusat pelayanan hierarki ke-3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (*neighbourhood unit*).
 3. Dalam jangka waktu tahun 2020-2040, Kecamatan Batam Kota merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintah, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota di Pulau Batam termasuk pengembangannya di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
 4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu yang dibutuhkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sebagian bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
 5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (*outlet*) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
 6. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (*outlet*) utama transportasi (kawasan primer), serta ke/dari kawasan-kawasan sekunder (kawasan

industri, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (*flyover*), simpang susun (*interchange*), jalan lintas bawah (*underpass*) dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT/BRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.

7. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain, yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan penyehatan lingkungan permukiman.

Gambar II.7.

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Batam



Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

B. Pola Ruang Wilayah

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pola ruang wilayah Kota Batam diarahkan secara serasi dan terpadu dengan menyeimbangkan kawasan lindung dan budidaya di darat maupun laut untuk mendukung sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengembangan

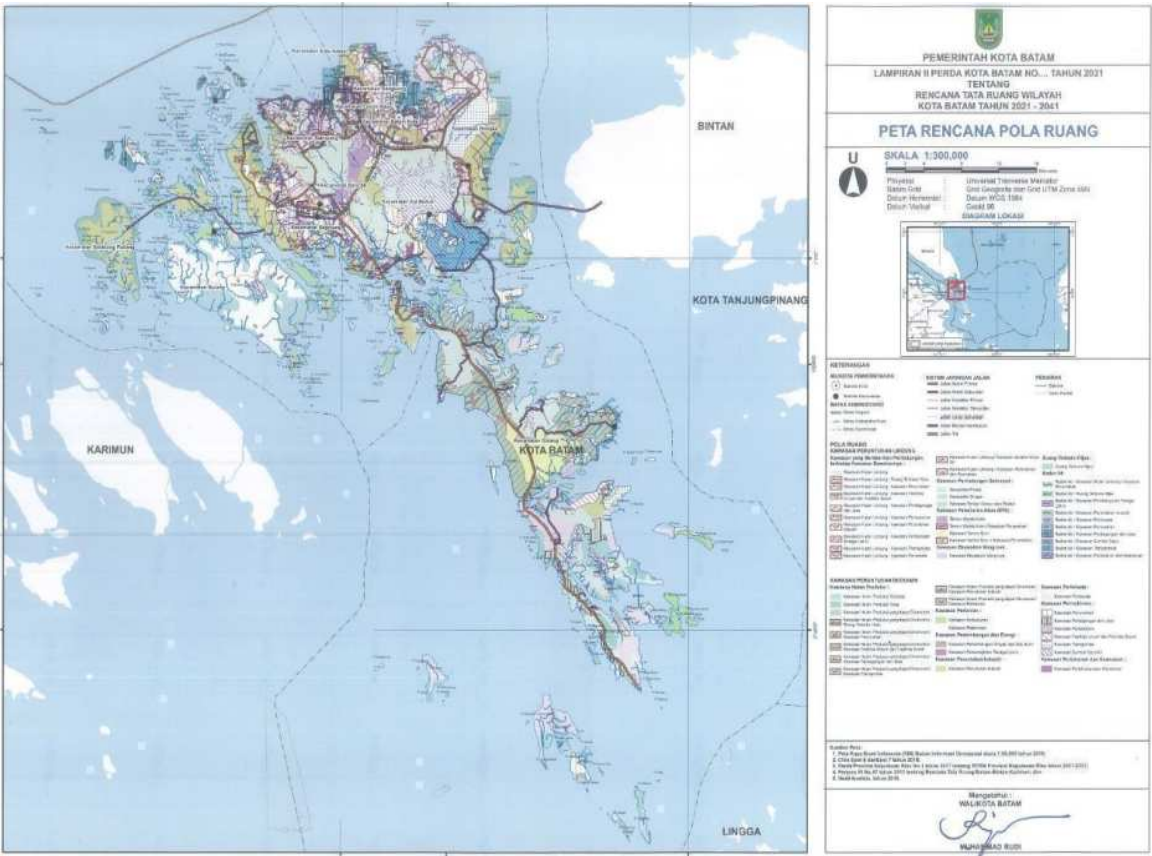
dilakukan melalui perluasan ruang terbuka hijau, pemanfaatan kawasan budidaya sesuai potensi, serta pemerataan pembangunan antara Kawasan Perdagangan Bebas dan pulau-pulau sekitar dengan pendekatan kawasan strategis dan KEK. Optimalisasi lahan serah pengembang, intensifikasi pembangunan vertikal di wilayah bernilai ekonomi tinggi, pengendalian reklamasi pantai, serta integrasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan. Berikut merupakan potensi pengembangan pola ruang wilayah di Kota Batam, yaitu:

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut.
2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dan lain-lain).
3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh dan kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan Pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota.
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal.
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut.
8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu

dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

Gambar II.8.

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Batam



Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya dukung lingkungan hidup Kota Batam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

A. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyedia sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dalam suatu ruang atau wilayah. Dalam identifikasi

kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dilakukan beberapa tahapan analisis yang digunakan untuk mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan
- c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air

Perhitungan daya dukung lingkungan hidup selain mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang, juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Perhitungan Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dilakukan dengan pendekatan perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dan perhitungan daya dukung lahan pertanian padi (Fuad, et al. yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266).

- b. Perhitungan Daya Dukung Lahan untuk Permukiman

Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kota Batam dilakukan dengan pendekatan permukiman (bangunan) berdasarkan Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc. (KLHS untuk RTRW dengan pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016).

- c. Perhitungan Daya Tampung Wilayah

Perhitungan daya tampung wilayah dilakukan dengan pendekatan daya dukung lingkungan oleh Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., MSP (Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah).

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis

Ketersediaan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) secara demografis dapat dilihat pada jumlah penduduk dan luas lahan yang menjadi dasar dalam perhitungan DDDT Demografis. Kota Batam, dalam rentang tahun 2021 hingga 2024, mengalami peningkatan demografi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.256.600 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 1.276.930 jiwa pada tahun 2024.

Pada tahun 2023, angka DDDT Demografis berada di angka 0,082 dan pada tahun 2024 menjadi 0,081. Angka DDDT Demografis Kota Batam menunjukkan bahwa masih mampu dan memiliki daya dukung serta daya tampung yang baik terhadap penduduk yang tinggal dan masih akan dapat menampung lebih banyak penduduk lagi. Selengkapnya terkait data demografis

berdasarkan jumlah penduduk serta daya dukung dan daya tampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.6.
Perhitungan Demografis Kota Batam berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2024

Tahun	Luas Lahan	Jumlah Penduduk	DDDT Demografis (Ha/org)
2021	103.473,2 ha	1.215.140 jiwa	0,085
2022	103.473,2 ha	1.236.010 jiwa	0,084
2023	103.473,2 ha	1.256.600 jiwa	0,082
2024	103.473,2 ha	1.276.930 jiwa	0,081

Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045, diolah

Pada tabel dapat terlihat bahwa jumlah penduduk dari tahun 2021-2024 konsisten mengalami peningkatan yang berdampak pada angka proyeksi DDDT demografis yang mengalami penurunan dikarenakan luas lahan yang tidak mengalami pertumbuhan.

a). Ketersediaan Pangan

Kota Batam sebagai kota industri dan memiliki letak yang strategis di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi magnet bagi pekerja dari berbagai daerah untuk datang ke Batam sehingga mendorong pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan sebanding dengan meningkatnya kebutuhan akan pangan, yaitu padi/beras. Akan tetapi, dengan karakteristik kota industri yang sangat menonjol di Kota Batam membuat kota ini tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan pangan secara mandiri, di mana kondisi tersebut mengakibatkan Kota Batam memenuhi kebutuhan konsumsi beras dari distribusi daerah lain.

b). Ketersediaan Air

Ketersediaan air Kota Batam diidentifikasi berdasarkan peta jasa penyedia air, waduk atau DTA, dan sumber hidrologi di Kota Batam. Selanjutnya perhitungan ketersediaan air dilakukan melalui pendekatan sistem *grid* dengan ukuran 150 X 150 mm dengan cara melakukan proses tumpang susun (*overlay*) antara Peta DTA/Waduk, Peta *Grid* dan Peta Kinerja Jasa Lingkungan sebagai Penyedia Air. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa Kota Batam memiliki potensi ketersediaan air sebesar 284.118.318,59 m³, hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki potensi air yang cukup

melimpah sebagai sebuah perkotaan di Indonesia. Secara lebih jelas, total dan rincian ketersediaan air di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7.

Perhitungan Ketersediaan Air di Kota Batam

No	Kecamatan	Ketersediaan Air
1	Batam Kota	22.385.969,78
2	Batu Aji	27.665.885,80
3	Batu Ampar	6.998.365,86
4	Belakang Padang	7.048.908,76
5	Bengkong	8.387.443,18
6	Bulang	7.048.908,76
7	Galang	11.000.190,96
8	Lubuk Baja	5.396.405,10
9	Nongsa	59.954.769,32
10	Sagulung	30.584.742,71
11	Sei Beduk	76.313.932,02
12	Sekupang	21.332.796,33
Total		284.118.318,59

Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

c). Ketersediaan Permukiman

Lingkungan alam memiliki peran positif yang signifikan bagi makhluk hidup, terutama sebagai permukiman yang mendukung kesejahteraan. Daya dukung dan daya tampung permukiman ini didefinisikan oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang memberikan dukungan dalam aspek tempat tinggal yang dapat mendukung kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bermukim. Keadaan ekoregion, atau wilayah geografis yang memiliki karakteristik lingkungan yang serupa, memainkan peran penting dalam penyediaan ruang permukiman dan lingkungan hidup yang baik.

Ekoregion yang ideal untuk penyediaan permukiman dan ruang hidup cenderung memiliki topografi datar hingga landai, didukung oleh tanah dan batuan dasar yang stabil. Akuifer yang potensial untuk menyediakan sumber air bersih juga menjadi bagian dari ekoregion ini. Selain itu, ekoregion ini memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memiliki aksesibilitas yang mudah. Ancaman dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi tektonik biasanya rendah atau minim dalam ekoregion tersebut.

Distribusi luasan dalam setiap kelas jasa lingkungan budaya yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup ini juga dipengaruhi oleh perhitungan kemampuan Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLb). Menurut



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DDLB mengacu pada kumpulan rumah yang masih mampu mendukung permukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.

Karakteristik permukiman yang umumnya ditemui di Kota Batam adalah adanya kecenderungan untuk mendekati pusat-pusat kegiatan. Ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak di pusat kota menjadi daya tarik bagi penduduk. Namun, jika pembangunan fasilitas dan utilitas kota tidak merata, hal ini dapat berdampak negatif pada struktur ruang kota. Dalam situasi tersebut, perkembangan kota dapat menjadi tidak merata karena terpusat pada satu wilayah tertentu.

DDLB Kota Batam secara keseluruhan mencapai skor 5,18, menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki daya dukung lahan permukiman yang baik. Oleh karena itu, Kota Batam masih mampu mengakomodasi rencana pengembangan lahan terbangun, terutama dalam zona perumahan, baik dengan kualitas yang baik maupun bersyarat. Analisis tingkat DDLB di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Galang memiliki skor DDLB tertinggi mencapai 44,11, diikuti oleh Kecamatan Bulang dengan skor 23,85. Sebaliknya, Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja dan Kecamatan Batu Ampar memiliki skor terendah masing-masing 1,22 dan 1,23. Mayoritas wilayah Kota Batam dinilai memiliki kondisi yang baik, sementara beberapa kecamatan masih berada dalam kategori sedang atau bersyarat. Tidak ada kecamatan yang masuk dalam kategori buruk. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan Kota Batam harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan terbangun dan upaya untuk menjaganya, sehingga lahan tetap dapat mendukung berbagai aktivitas di atasnya. Rincian nilai DDLB Kota Batam terdapat dalam tabel berikut.

Tabel II.8.
Perhitungan Daya Dukung Lahan (DDL) Bangunan berdasarkan Pemanfaatan Ruang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Terbangun	Koefisien Bangunan	DDL	Interpretasi
					Bangunan	
1	Batam Kota	3.854,00	2.206,48	0,7	1.22	Bersyarat
2	Batu Aji	4.182,00	1.540,51	0,7	0,7	Bersyarat
3	Batu Ampar	1.096,00	578,58	0,7	0,7	Bersyarat



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Terbangun	Koefisien Bangunan	DDL	Interpretasi
					Bangunan	
4	Belakang Padang	6.855,00	212,38	0,7	0,7	Baik
5	Bengkong	1.371,00	781,83	0,7	0,7	Bersyarat
6	Bulang	15.893,00	466,39	0,7	0,7	Baik
7	Galang	35.324,00	560,60	0,7	0,7	Baik
8	Lubuk Baja	1.116,00	633,00	0,7	0,7	Bersyarat
9	Nongsa	10.837,00	863,29	0,7	0,7	Baik
10	Sagulung	5.495,00	1.720,21	0,7	0,7	Bersyarat
11	Sei Beduk	10.597,00	3.041,13	0,7	0,7	Bersyarat
12	Sekupang	6.853,00	1.373,29	0,7	0,7	Baik
Kota Batam		103,473.00	13.977,71	0,7	5,18	Baik

Sumber: Perda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

d). Daya Tampung Lingkungan

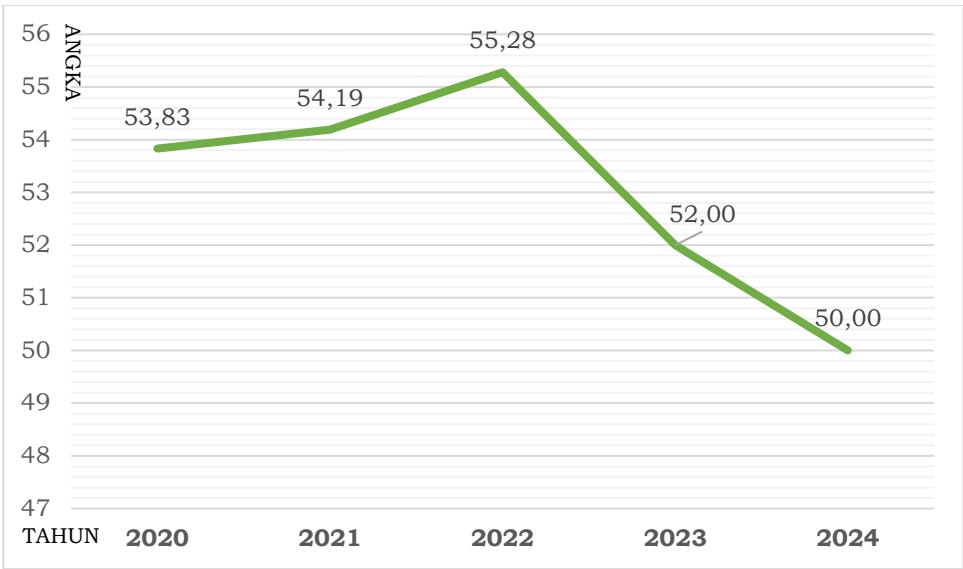
- Kualitas Air

Negara mengamanatkan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa sumber daya air dikelola secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Gambar II.9.

Indeks Kualitas Air Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2025

Pengelolaan sumber daya air dan konservasi sumber daya air perlu dilakukan sebagai upaya dalam memelihara keberadaan, keberlanjutan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Kualitas air di Kota Batam diinterpretasikan dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dari sejumlah waduk yang berada di Kota Batam. Nilai IKA cenderung menurun, yaitu dari nilai 53,83 hingga 50,00.

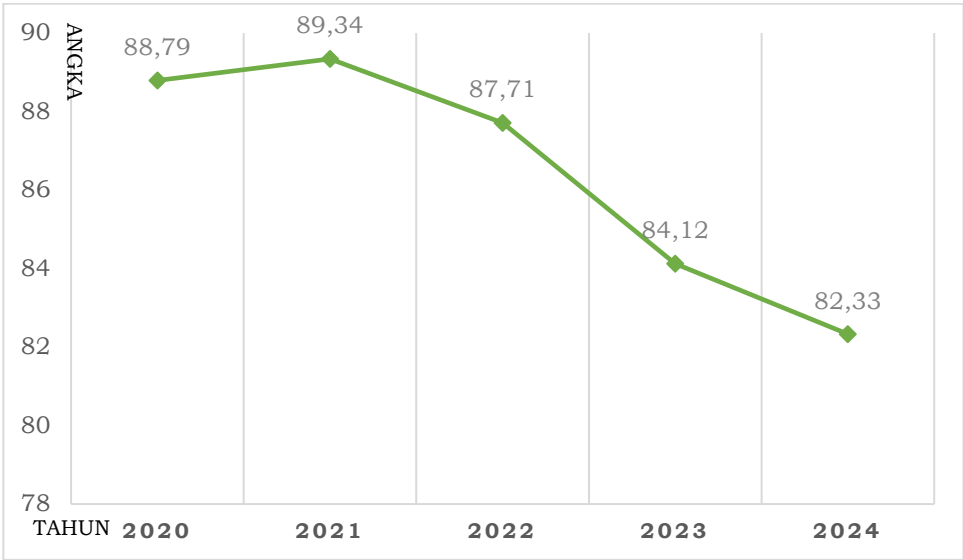
- **Kualitas Udara**

Laju pertumbuhan penduduk serta karakteristik Kota Batam sebagai kota industri memicu pencemaran udara. Laju pertumbuhan penduduk akan memungkinkan adanya aktivitas masyarakat yang menghasilkan mobilitas setiap harinya yang ditandai dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi dibutuhkan guna melakukan perpindahan barang dan orang. Penggunaan kendaraan bermotor yang tidak terawat memungkinkan menghasilkan pembakaran tidak sempurna yang memicu parahnya polusi udara yang dihasilkan. Selain pencemaran udara dihasilkan dari emisi hasil pembakaran kendaraan bermotor, kualitas udara yang buruk dipengaruhi oleh kendaraan operasional industri serta emisi buangan proses kegiatan industri. Banyaknya industri menghasilkan gas buangan dari aktivitas industri yang menekan kualitas udara yang ada di Kota Batam. Pembangunan yang berlangsung turut pula menghasilkan debu-debu di udara yang mempengaruhi

buruknya kualitas udara sebab minimnya pengawasan dan pengelolaan proyek pembangunan yang ramah lingkungan.

Gambar II.10.

Indeks Kualitas Udara Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2025

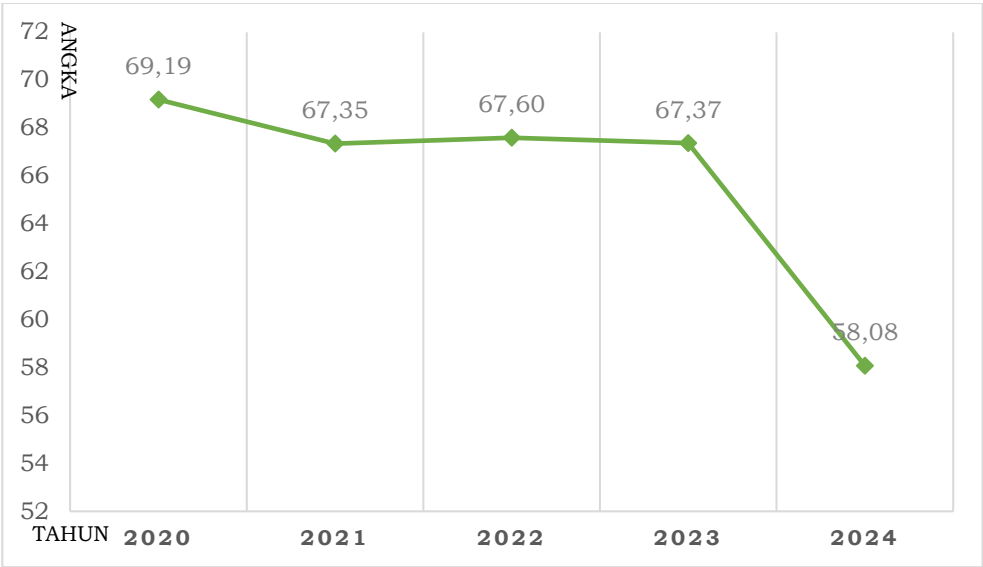
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam di tahun 2024 cenderung menurun. Analisis ini dilihat berdasarkan data kualitas udara dari tahun 2020 hingga 2024. Kualitas udara di Kota Batam termasuk ke dalam level baik bagi kesehatan. Pengendalian dan pemantauan periodik dibutuhkan dalam bentuk upaya menjaga kualitas udara di Kota Batam tetap baik. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengendalian pencemaran udara. Adapun pengendalian pencemaran udara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara, dan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

- Indeks Kualitas Lahan

Kota Batam mengalami tantangan dalam mempertahankan kualitas lahan akibat urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beberapa area mengalami degradasi lahan, terutama wilayah yang berada di sekitar kawasan industri dan pemukiman yang padat. Namun, upaya konservasi dan penghijauan di area tertentu telah memberikan hasil yang positif, meskipun secara keseluruhan, kualitas lahan di Batam masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Hal tersebut tercermin dalam Indeks Kualitas Lahan Kota Batam melalui gambar berikut.

Gambar II.11.

Indeks Kualitas Lahan Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat fluktuatif kualitas lahan di Kota Batam selama lima tahun terakhir. Kualitas lahan di tahun 2020 sebesar 69,19 kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 58,08 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh belum memadainya digitalisasi RTH untuk pengelolaan, pemantauan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta adanya perkembangan tutupan lahan.

- **Kondisi Limbah B3**

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang dihasilkan dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan bahkan domestik rumah tangga yang mengandung B3. Kota Batam beroperasi sebagai industri *offshore*, fabrikasi, dan perkapalan (*shipyard*) serta industri elektronik yang melakukan kegiatan *blasting*, pengelasan, penimbunan, dan *tank cleaning* yang memungkinkan menghasilkan limbah B3. Limbah B3 di antaranya adalah sampah elektronik berupa potongan PCB, *rejected goods*, *solvent*, *sludge WWTP*, *flux*, *expired material*, *fluorescent (Hg) lamp*, *contaminated waste*. Adapun data jumlah limbah B3 yang dikelola oleh Kota Batam tercantum pada tabel berikut.

Tabel II.9.

Jumlah Timbunan Limbah B3 di Kota Batam Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah (Ton)		
		Padat	Cair	Sludge
1	2021	44.953	5.519	5.728
2	2022	76.536	8.815	2.761
3	2023	115.813	8.059	6.352

No	Tahun	Jumlah (Ton)		
		Padat	Cair	Sludge
4	2024	60.998	15.438	7.266

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2025

Jumlah timbunan limbah B3 di Kota Batam dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Besarnya jumlah limbah B3 secara langsung maupun tidak langsung mampu membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Oleh karenanya, Kota Batam mengelola Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (KPLI-B3) yang berlokasi di wilayah Kabil dengan luas sekitar 20 ha dan memiliki luas pengembangan sebesar 60 ha dengan 32 mitra pengelola limbah.

2.1.1.4 Berketahan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

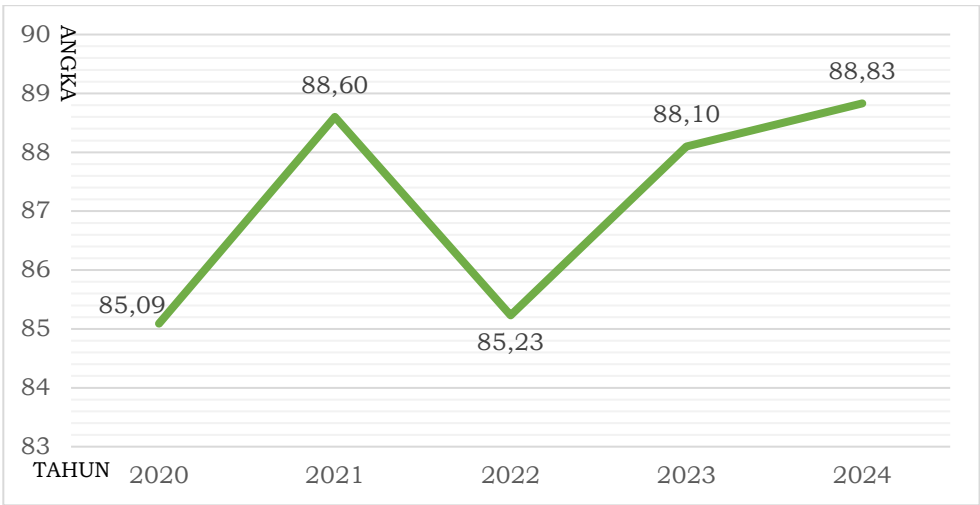
Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Batam, aspek ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan. Ketiga sektor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan program yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas produksi pangan lokal menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan data PT. Bright PLN Batam, konsumsi listrik per kapita sebesar 2.554 kWh pada tahun 2023 dan 2.772 kWh pada tahun 2024, hal ini menunjukkan tingkat elektrifikasi dan kebutuhan energi masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya dan cukup tinggi, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas domestik yang semakin meningkat. Jika tren ini berlanjut dan terjadi peningkatan konsumsi pada tahun 2025, maka perlu mengantisipasi ketersediaan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Di sektor air bersih, kapasitas air baku sebesar 3.600 liter/detik pada tahun 2024 menjadi modal penting dalam menjamin ketersediaan air bagi penduduk. Namun, terdapat kesenjangan akses antara wilayah perkotaan (98,85%) dan *hinterland* (50,69%) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerataan infrastruktur perpipaan dan peningkatan kualitas layanan air minum, khususnya di kawasan *hinterland*, sebagai bagian dari misi pembangunan yang inklusif.

Ketahanan dapat dilihat melalui capaian dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada dasarnya menunjukkan tingkat kerentanan atau ketahanan suatu wilayah terhadap kondisi rawan pangan IKP Kota Batam cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 IKP Kota Batam berada di angka 85,09% dan mengalami peningkatan menjadi 88,60% di tahun 2021. Angka tersebut menjadikan Kota Batam berada di urutan kelima skor IKP tertinggi dari seluruh kota di Indonesia. Hal ini mencerminkan kondisi yang cukup baik pada ketersediaan pangan, keterjangkauan akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Namun, IKP Kota Batam menurun pada tahun 2022 menjadi 85,23% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 88,10% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 88,83%.

Gambar II.12.

Indeks Ketahanan Pangan Kota Batam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, 2025

Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan pangan adalah Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan pangannya berada di bawah tingkat minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Indikator ini memegang peranan penting untuk memahami sejauh mana ketahanan pangan tercapai dalam suatu populasi serta membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kekurangan pangan.

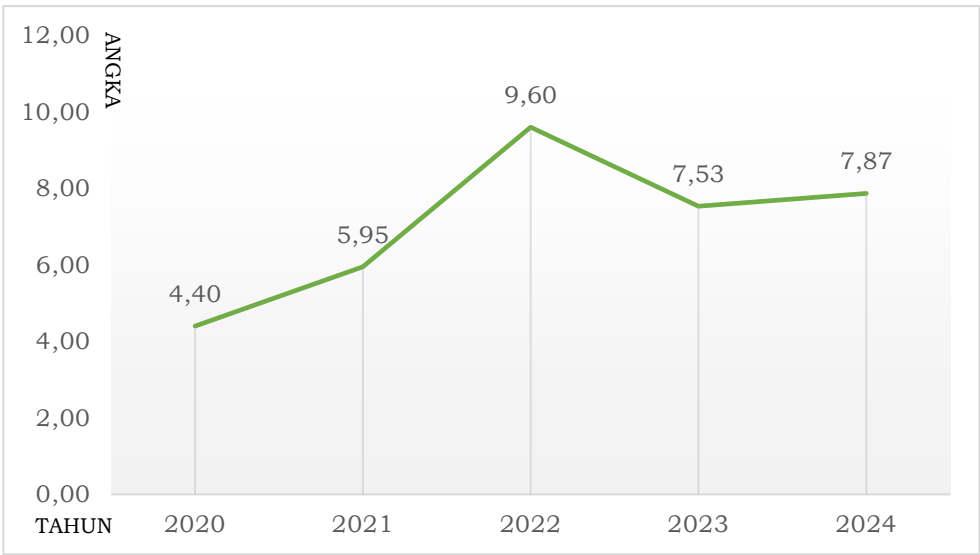
Melalui indikator ini, pemerintah maupun organisasi kemanusiaan dapat mengenali wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pangan sehingga mereka dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk memperbaiki akses pangan masyarakat. Selain itu, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan juga menyediakan data penting untuk

memantau perubahan ketahanan pangan dari waktu ke waktu, memungkinkan evaluasi atas efektivitas program yang telah dilaksanakan. Tidak hanya itu, indikator ini berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ketahanan pangan serta mendorong dukungan kolektif dalam upaya memperbaiki kondisi ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Batam dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, prevalensi berada di angka 4,40 persen dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 9,68 persen, yang mengindikasikan belum optimalnya peningkatan akses dan distribusi pangan. Namun demikian, pada tahun 2023 prevalensi menurun menjadi 7,53 persen dan kembali meningkat hingga mencapai 7,87 persen pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam satu periode, Kota Batam masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi ketahanan pangan, terutama dalam memastikan konsumsi pangan yang cukup dan merata bagi seluruh masyarakat.

Gambar II.13.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Batam
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

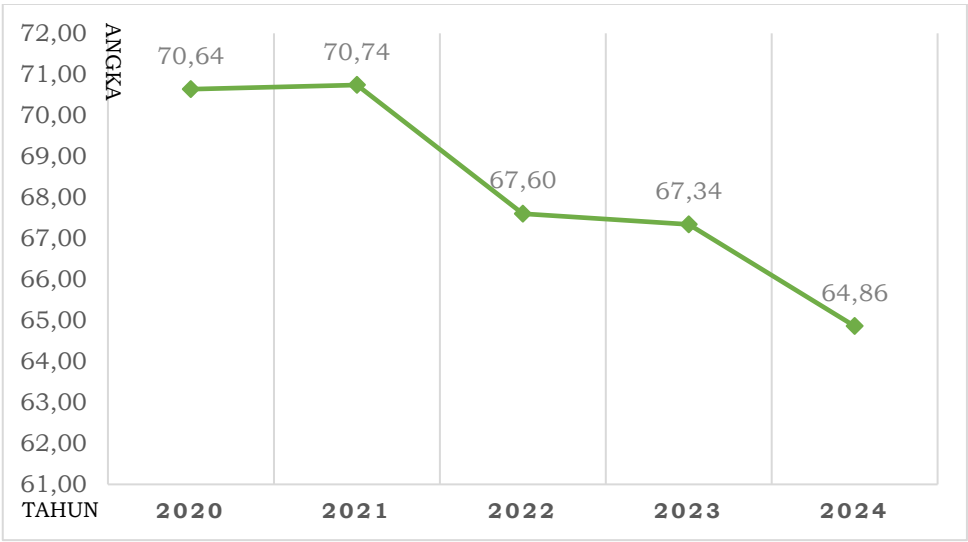
Kualitas lingkungan hidup yang baik di suatu wilayah merupakan fondasi utama bagi terciptanya harmoni antara alam dan kehidupan manusia, sehingga menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hadir sebagai indikator penting yang mencerminkan kondisi lingkungan pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas udara, air, dan tutupan lahan terjaga dengan baik. Bagi Kota Batam, IKLH menjadi

cerminan nyata atas tantangan sekaligus capaian dalam pengelolaan lingkungan, terutama karena posisi Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Dengan demikian, IKLH tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Batam belum cukup optimal di mana pada tahun 2020 sebesar 70,64 namun pada tahun 2023, angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun cukup signifikan menjadi 67,34 dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 64,86. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia dan pembangunan yang mulai kembali normal pasca *Covid-19* yang sangat mempengaruhi kualitas udara sehingga terjadi penurunan kualitas udara pada tahun 2022 hingga 2024, secara umum kondisi ini masih berada pada kategori sedang.

Gambar II.14.

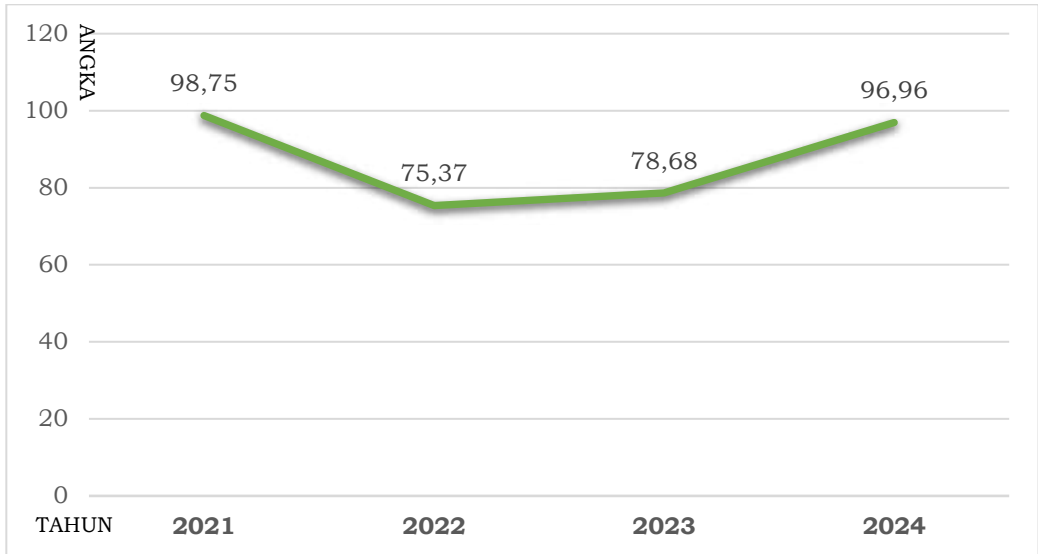
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Di Kota Batam, persentase sampah yang dikelola dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Persentase pengelolaan sampah di Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 98,75%, kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 75,37%. Pada tahun 2023 persentase pengelolaan sampah di Kota Batam mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 78,68%. Dan terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 96,96%. Terdapat lokasi pelayanan persampahan di sepuluh kecamatan yang ada di Kota Batam, yaitu di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Belakang Padang.

Gambar II.15.
Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Batam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2025

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup yang baik dan lestari dalam rumah tangga di Kota Batam perlu dilihat baik dari akses sanitasi aman hingga terkelolanya persampahan. Di Kota Batam akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan tahun 2024 sebesar 96,56 persen dengan rincian 299.523 sambungan rumah tangga atau 1.198.014 jiwa, selain itu akses sanitasi aman sebesar 10,59 persen pada tahun 2024. Kemudian untuk timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah sebesar 75,74 ton/tahun pada tahun 2023 dengan angka proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 54,70 persen pada tahun 2023. Diharapkan terus meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Batam terlebih di lingkungan rumah tangga dalam mewujudkan pembangunan kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang berkelanjutan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) memegang peranan krusial dalam konteks pembangunan daerah. Indikator ini dipengaruhi oleh bahaya (*hazard*) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selain itu, IRB juga dipengaruhi oleh kerentanan (*vulnerability*) yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta kapasitas (*capacity*) yang dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;



- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Fenomena alam adalah peristiwa non-buatan yang terjadi di alam, seperti badai, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pelangi. Fenomena ini merupakan hasil dari proses fisik dan kimia yang kompleks di bumi, atmosfer, dan luar angkasa. Bencana alam yang terjadi di Kota Batam salah satunya adalah angin puting beliung yang terjadi pada akhir Mei tahun 2021 dengan 54 rumah di Tanjung Riau yang terdampak. Kemudian terjadi lagi angin puting beliung yang menerjang Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang pada akhir Juni tahun 2023, pada tahun 2024 Kota Batam mengalami bencana angin puting beliung pada bulan September serta di awal Januari 2025 mengalami bencana longsor yang menyebabkan korban jiwa.

Tak hanya itu, Kota Batam juga menghadapi ancaman banjir yang signifikan, dengan Indeks Rawan Bencana mencapai skor 27, menempatkannya dalam kategori tinggi dalam hal potensi bencana banjir. Perubahan curah hujan yang ekstrim memperbesar risiko banjir, yang ditandai oleh lebih dari 42 titik banjir yang telah teridentifikasi menurut data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2021. Sedangkan data Kajian Analisis Risiko Bencana Banjir Kota Batam, data di tahun 2022, wilayah yang terkena bencana banjir di Kota Batam mencapai 30 titik.

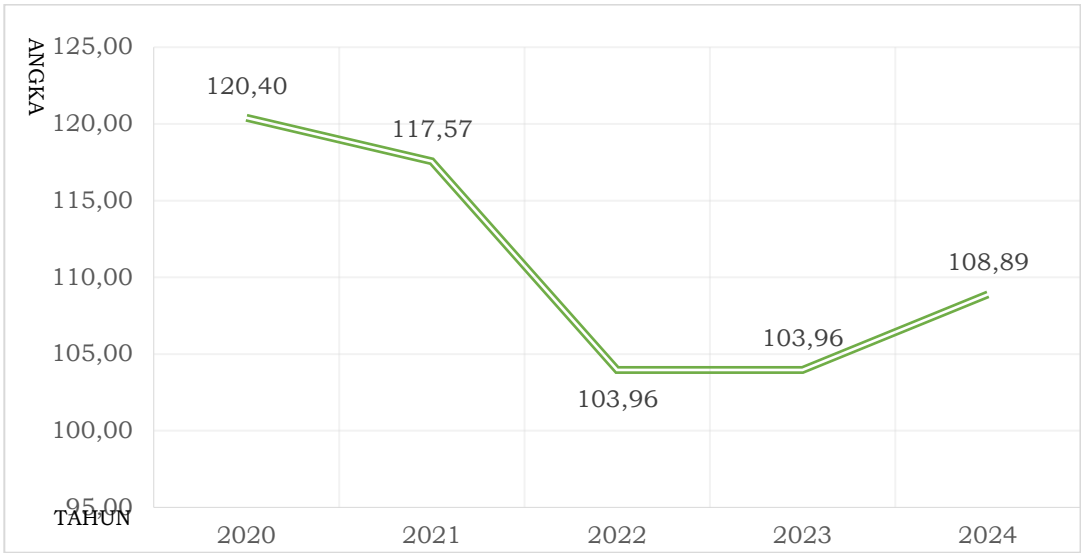
Tabel II.10.
Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Batam

No	Kecamatan	Luas per Kelas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total Luas	
1	Batam Kota	2.489	2.444,8	3.004,3	7938,2	Tinggi
2	Batu Aji	3.078,7	1.786,2	2.303,8	7.168,6	Rendah
3	Batu Ampar	952,1	421,3	524,9	1.898,3	Rendah
4	Belakang Padang	5.666,8	3.345	4.119,5	13.131,5	Rendah
5	Bengkong	813,5	799,1	815,3	2.427,8	Tinggi
6	Bulang	13.696,7	9.449,5	12.774,7	35.921	Rendah
7	Galang	44.642,8	17.607	21.933,7	84.183,5	Rendah
8	Lubuk Baja	1.026,3	513,8	584,4	2.124,7	Rendah
9	Nongsa	7.631,1	3.765,3	4.484,9	15.881,5	Rendah
10	Sagulung	4.408,1	3.702	4.789,1	12.899,2	Tinggi
11	Sei Beduk	12.601,4	4.996,6	5.762,1	23.360,3	Rendah
12	Sekupang	7.059,8	2.317,2	2.866	12.242,9	Rendah
Kota Batam		104.066,3	51.147,8	63.962,7	219.177,5	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Banjir, 2022

Indeks Risiko Bencana Kota Batam selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, angka risiko bencana tercatat sebesar 120,40, kemudian terus menurun hingga mencapai 108,89 pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini patut diapresiasi, kategori risiko masih berada pada level sedang sehingga kewaspadaan tetap diperlukan. Kondisi ini menggambarkan adanya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang mulai membuahkan hasil, baik melalui perencanaan tata ruang, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun penguatan infrastruktur. Dengan demikian, penurunan Indeks Risiko Bencana ini menjadi dasar penting bagi Kota Batam untuk terus meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang.

Gambar II.16.
Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024



Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2025

2.1.1.7 Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya. Jumlah penduduk Kota

Batam pada tahun 2020 mencapai sebanyak 1.196.396 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.168,01 jiwa per km² dan rasio jenis kelamin sebesar 103,80. Pada tahun 2024 kependudukan Kota Batam meningkat, jumlah penduduk sebesar 1.276.930 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.233,98 jiwa per km² serta rasio jenis kelamin sebesar 102,00

Tabel II.11.

Data Kependudukan Kota Batam Tahun 2020-2024

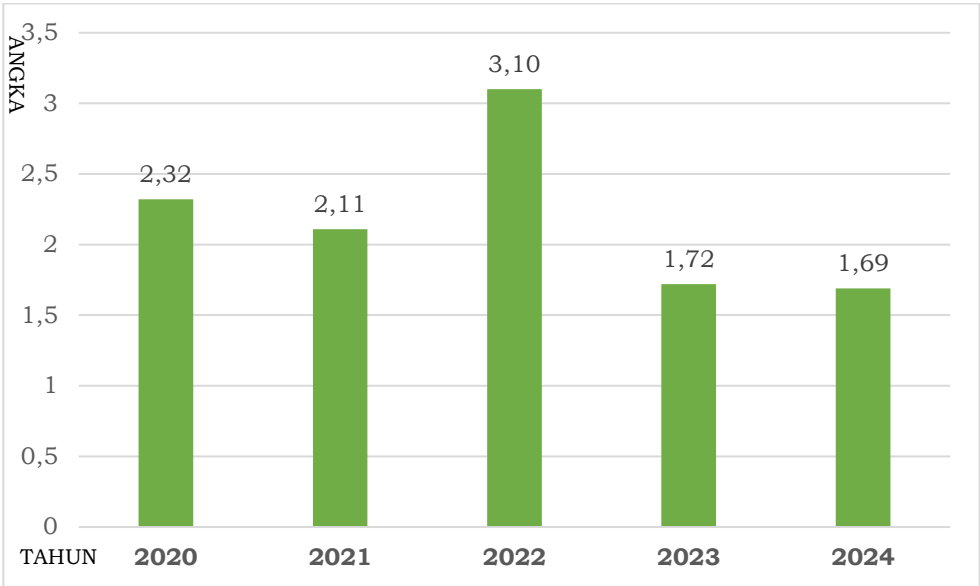
Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Rasio Jenis Kelamin
2020	1.196.396	1.168,01	103,80
2021	1.215.140	1.188,73	103,80
2022	1.236.010	1.226,72	103,83
2023	1.256.610	1.214,35	103,00
2024	1.276.930	1.233,98	102,00

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam memiliki tren yang cenderung menurun mulai tahun 2020 hingga tahun 2024. Terlihat bahwa tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Batam adalah sebesar 2,32 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 2,11 persen. Kemudian laju pertumbuhan penduduk Kota Batam mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi 3,10 persen dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 1,72 persen dan terus menurun menjadi 1,69 persen di tahun 2024.

Gambar II.17.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Kota Batam Dalam Angka, 2021-2025

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi

tantangan yang muncul akibat peningkatan dan penurunan jumlah penduduk, memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, eksistensi masyarakat adat/tempatan, khususnya komunitas Melayu Batam, menjadi entitas sosial-budaya yang memiliki karakteristik kultural khas serta keterkaitan historis terhadap wilayah geografis Kota Batam. Meskipun secara yuridis Kota Batam tidak dikategorikan sebagai wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana definisi dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat Melayu tempatan secara sosiologis dapat diposisikan sebagai komunitas adat kultural yang memiliki struktur nilai, pranata sosial, dan kearifan lokal yang terinternalisasi secara turun-temurun. Fenomena pembangunan fisik dan ekspansi kawasan permukiman serta industri telah berdampak terhadap berkurangnya ruang hidup masyarakat tempatan, khususnya di wilayah-wilayah kampung tua. Selain itu, transformasi sosial dan tekanan ekonomi turut mempengaruhi keberlanjutan praktik budaya, struktur sosial, dan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam perlu memperkuat kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tempatan dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Intervensi dapat diarahkan pada penguatan legalitas wilayah kampung tua, revitalisasi budaya lokal, serta afirmasi terhadap partisipasi masyarakat tempatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kota Batam diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 1.296,96 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 1.374,37 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun pada akhir periode pembangunan, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan sebanyak 689,43 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 684,95 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 100,65. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk di mana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 1.328 jiwa per kilometer persegi.

Kota Batam pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi di mana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada di bawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II.12.
Proyeksi Penduduk Kota Batam Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1.296,96	1.316,75	1.336,24	1.355,44	1.374,37
Laki-laki	654,73	663,68	672,43	681,02	689,43
Perempuan	642,24	653,08	663,82	674,43	684,95
Rasio Jenis Kelamin	101,94	101,62	101,30	100,98	100,65
Kepadatan Penduduk	1253	1272	1291	1310	1328
Rasio Ketergantungan	41,60	41,42	41,29	41,22	41,22
Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)					
0-14	339,42	339,61	339,50	339,21	338,90
15-64	915,93	931,08	945,74	959,83	973,18
65+	41,61	46,06	51,00	56,40	62,29

Sumber: BPS Kota Batam, 2025 (data diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan peran stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memenuhi utilitas masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi menjadi pilar utama dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, pencapaian kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan stabilitas makro seperti inflasi yang terkendali, tetapi juga oleh bagaimana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memastikan distribusi ekonomi yang adil, melalui kebijakan yang mendorong akses setara terhadap lapangan kerja, peluang usaha, serta pelayanan publik yang berkualitas. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah inklusif, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga menyentuh masyarakat di wilayah pinggiran maupun kelompok rentan. Dengan demikian, eksplorasi terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika global dan nasional..

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi daerah dapat diketahui dari pendapatan daerah melalui Produk Daerah Domestik Bruto (PDRB). Terdapat dua pendekatan perhitungan PDRB yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Selain itu, perhitungan PDRB dapat didasarkan pada nilai harga berlaku dan harga konstan. PDRB dapat dipahami sebagai total nilai bruto dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. PDRB lapangan usaha dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja distribusi sektoral dari perekonomian Kota Batam. Pertama, dapat diketahui dari nilai pendapatan pada tahun berjalan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp106.029,65 miliar dan meningkat menjadi

Rp135.511,59 miliar pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perubahan signifikan, dari kondisi kontraksi sebesar -2,55 persen akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, menjadi pertumbuhan positif sebesar 6,69 persen di tahun 2024. Pemulihan ini mencerminkan kemampuan Kota Batam untuk bangkit dari tekanan krisis global sekaligus mengoptimalkan potensi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, pencapaian ini dapat dijadikan modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang..



Tabel II.13.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110,81	-0,47	1.107,09	-0,33	1.156,74	4,48	1.056,66	-8,65	973,11	-7,91
2	Pertambangan dan Penggalian	67,84	-3,64	73,20	7,89	77,86	6,36	84,47	8,5	89,95	6,48
3	Industri Pengolahan	61.411,92	3,78	64.672,84	5,31	68.824,75	6,42	71.915,43	4,49	77.835,01	8,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.456,72	-2,67	1.506,71	3,43	1.745,97	15,88	1.904,92	9,1	2.042,68	7,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	204,17	-2,83	210,75	3,22	219,33	4,07	223,20	1,76	236,35	5,89
6	Konstruksi	20.507,50	-6,98	21.880,62	6,7	22.840,39	4,39	25.092,83	9,86	25.491,80	1,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.073,38	-14,73	6.219,69	2,41	6.657,45	7,04	7.289,97	9,5	7.949,37	9,05
8	Transportasi dan Pergudangan	1.425,89	-44,52	1.276,50	-10,48	1.871,81	46,64	2.161,52	15,48	2.306,46	6,71



No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.521,45	-45,49	1.423,41	-6,44	2.117,71	48,78	2.773,11	30,95	2.899,03	4,54
10	Informasi dan Komunikasi	3.950,89	18,09	4.306,47	9	4.407,71	2,35	5.223,01	18,5	5.549,33	6,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.849,27	-1,18	3.860,47	0,29	4.042,36	4,71	4.415,76	9,24	4.793,16	8,55
12	Real Estate	1.233,88	-16,74	1.282,12	3,91	1.342,55	4,71	1.384,44	3,12	1.479,42	6,86
13	Jasa Perusahaan	2,81	-43,33	3,08	9,66	3,48	12,97	3,82	9,63	3,99	4,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.288,46	12,23	1.306,76	1,42	1.320,65	1,06	1.363,44	3,24	1.523,53	11,74
15	Jasa Pendidikan	954,48	-5,96	915,56	-4,08	920,66	0,56	939,59	2,06	989,34	5,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	818,62	-2,09	881,29	7,65	939,46	6,6	962,99	2,5	1.098,12	14,03
17	Jasa lainnya	151,55	-67,98	142,37	-6,06	176,31	23,84	221,81	25,8	250,92	13,13
	Produk Domestik Regional Bruto	106.029,65	-2,55	111.068,95	4,75	118.665,21	6,84	127.016,98	7,04	135.511,59	6,69

Sumber : BPS Kota Batam, 2021- 2025

*) Angka Sementara

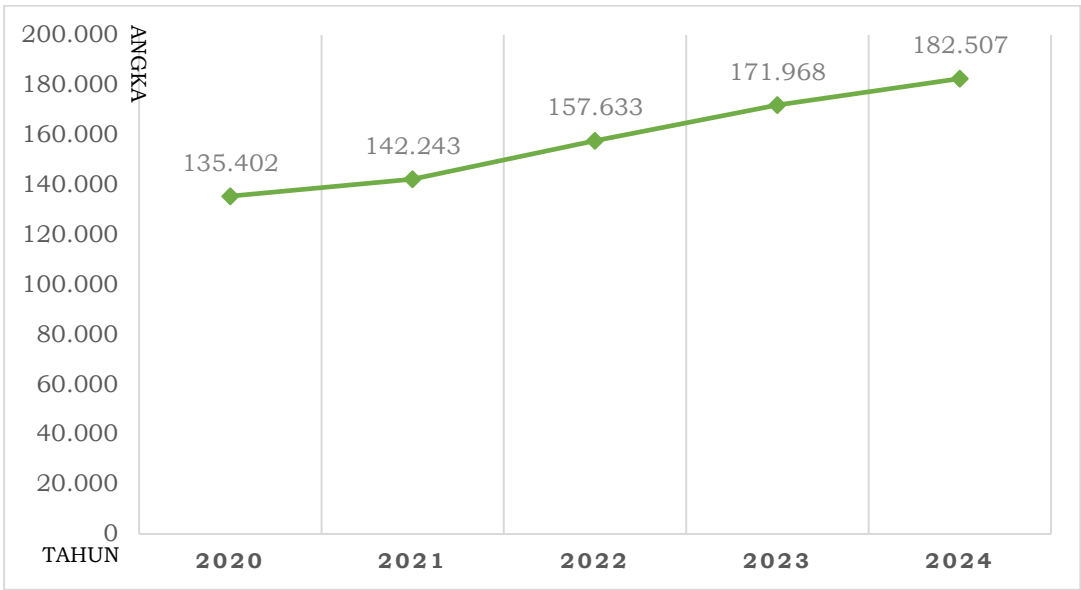
**) Angka Sangat Sementara

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata setiap individu di wilayah tersebut. Angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih besar dan secara umum, tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Dari data yang tersedia, PDRB per kapita Kota Batam menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 sebesar 135.402 ribu rupiah per kapita menjadi 182.507 ribu rupiah per kapita pada tahun 2024.

Gambar II.18.

PDRB Per Kapita Kota Batam Tahun 2020-2024 (ribu/kapita/tahun)



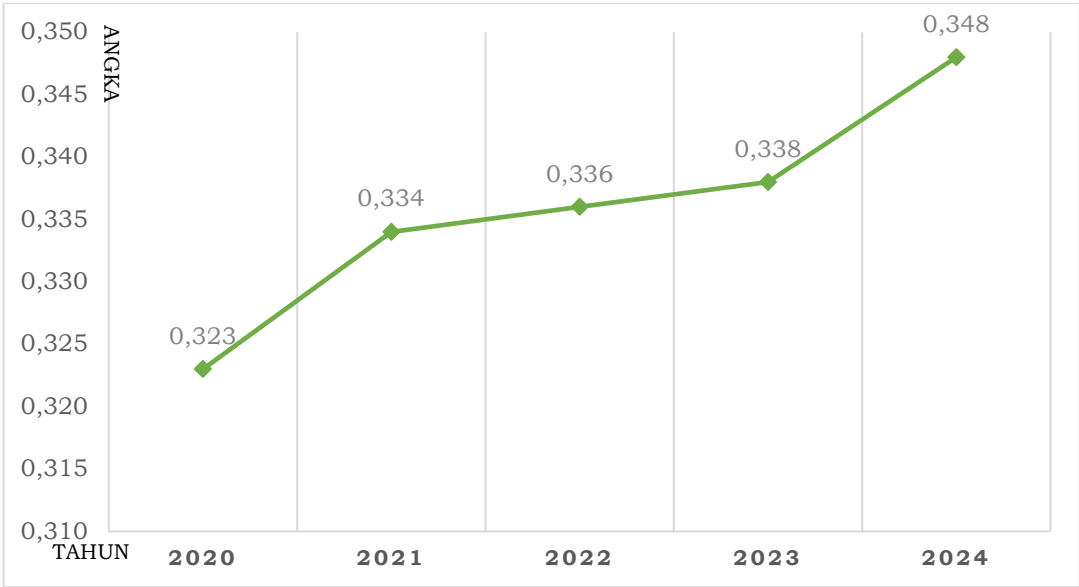
Sumber : BPS Kota Batam, 2025

C. Indeks Gini

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan pembangunan yang baik pada suatu wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi hambatan pencapaian pembangunan yang inklusif. Nilai PDRB yang menunjukkan hasil kinerja ekonomi yang cukup baik dilengkapi dengan pengukuran indeks gini, yang berfungsi untuk mengetahui tingkat ketimpangan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.

Gambar II.19.

Indeks Gini Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Indeks Gini juga dikenal sebagai koefisien Gini, adalah sebuah parameter yang mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Indeks gini dihasilkan dari analisis Lorenz, yang digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana pendapatan penduduk tersebar dalam berbagai kelompok pengeluaran, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Rentang nilai yang mungkin untuk Indeks Gini adalah antara 0 hingga 1. Ketika Indeks Gini mendekati 0, itu menandakan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Sebaliknya, semakin mendekati 1, semakin besar ketimpangan pendapatan di antara individu dalam masyarakat tersebut.

Tingkat Ketimpangan Kota Batam tahun 2020-2024 termasuk kriteria ketimpangan sedang (moderat) karena berada di kisaran 0,323 hingga 0,348. Pada gambar di atas menunjukkan perkembangan ketimpangan Kota Batam yang cenderung meningkat di mana pada tiga tahun terakhir Indeks Gini meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,323 menjadi 0,348 pada tahun 2024. Nilai Indeks Gini yang semakin meningkat tersebut menggambarkan bahwa disparitas pendapatan antar kelas pengeluaran di Kota Batam belum mengindikasikan adanya kemajuan dalam penanganannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam perlu mengambil langkah- langkah untuk mengendalikan pertumbuhan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin meningkat. Hal ini penting agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Batam, tanpa memandang tingkat pendapatan individu.



D. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu penentu evaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Definisi kemiskinan menurut terminologi umum disebut sebagai kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Garis kemiskinan Kota Batam dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terus terjadi hingga sampai sebesar Rp 903.960/kapita/bulan pada tahun 2024. Jumlah penduduk miskin memiliki tren meningkat selama lima tahun terakhir, peningkatan terbesar berada tahun 2020-2021 dengan selisih 10,11 ribu orang. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 82,59 ribu orang hingga pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 83,09 ribu orang dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 83,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kota Batam juga terlihat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu ditunjukkan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mencapai 4,75 persen dan di tahun 2023 meningkat mencapai 5,02 persen, dan pada tahun 2024 berhasil menurun menjadi 4,85 persen.

Tabel II.14.

Indikator Kemiskinan Kota Batam Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	707.856	740.109	783.730	854.465	903.960
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	67,06	77,17	82,59	83,09	83,57
Persentase Penduduk Miskin	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,70	0,89	0,76	0,59	0,65
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20	0,25	0,17	0,13	0,12

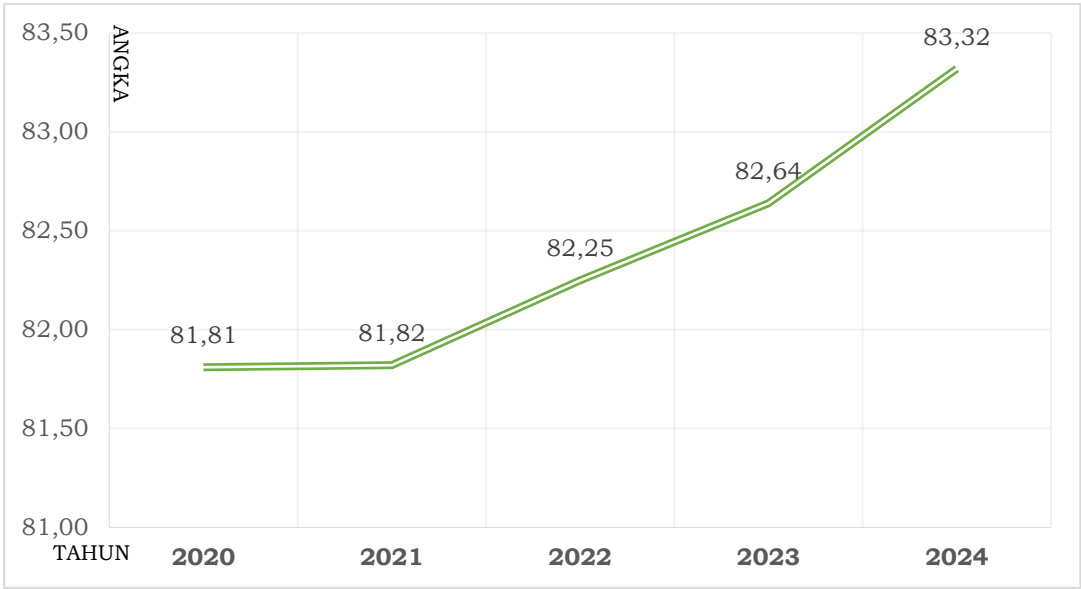
Sumber: BPS Kota Batam, 2025

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan; dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM di Kota Batam dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren meningkat pada setiap tahunnya. Dari data BPS nilai IPM di Kota Batam pada tahun 2020 sebesar 81,81. Tahun 2021 IPM mengalami kenaikan hingga menjadi 81,82. Kemudian pada tahun 2022 IPM mengalami kenaikan hingga berada di angka 82,25 dan meningkat kembali pada tahun 2023 hingga mencapai angka 82,64, dan pada tahun 2024 angka IPM menyentuh 83,32.

Gambar II.20.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Keempat komponen indikator IPM Kota Batam menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun pada komponen Konsumsi Riil Per Kapita pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan daya beli masyarakat dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat termasuk di Kota Batam.

Tabel II.15.

Perkembangan Indikator IPM Kota Batam
Tahun 2020-2024

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Konsumsi Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)
2020	74,73	13,16	11,14	18.095
2021	74,76	13,17	11,15	18.034
2022	74,78	13,32	11,17	18.506
2023	74,98	13,34	11,19	18.990
2024	75,19	13,56	11,21	19.668

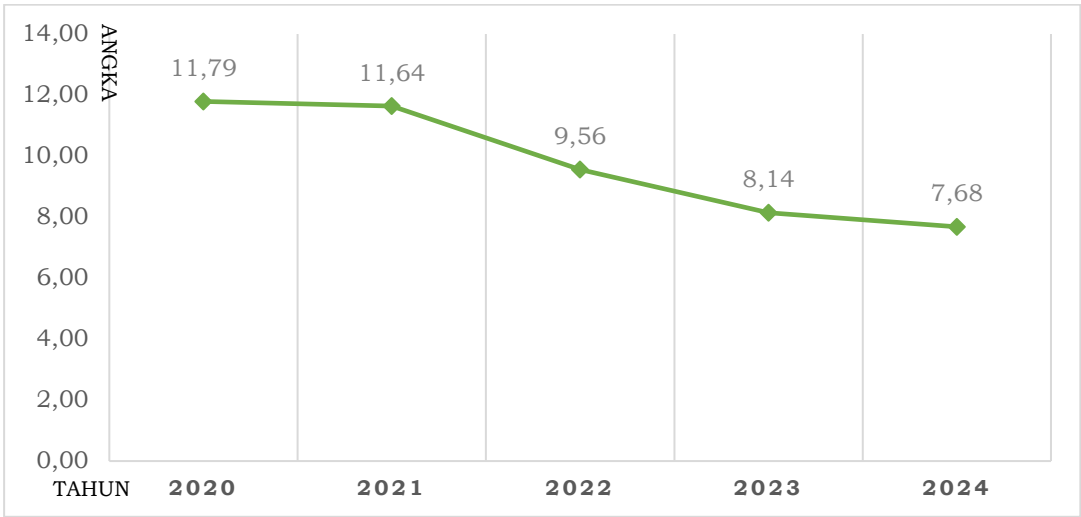
Sumber : BPS Kota Batam, 2025

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu sarana dalam mencapai stabilitas ekonomi adalah tenaga kerja dalam keadaan *full employment*. Berbagai upaya kebijakan ditetapkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu variabel yang dapat dianalisis yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 TPT mencapai angka lebih dari 10 persen yang berarti menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada saat itu sangat meningkat. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Gambar II.21.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Selama masa pemulihan pandemi, kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan sudah mulai aktif kembali hal ini berdampak kepada pengurangan angka

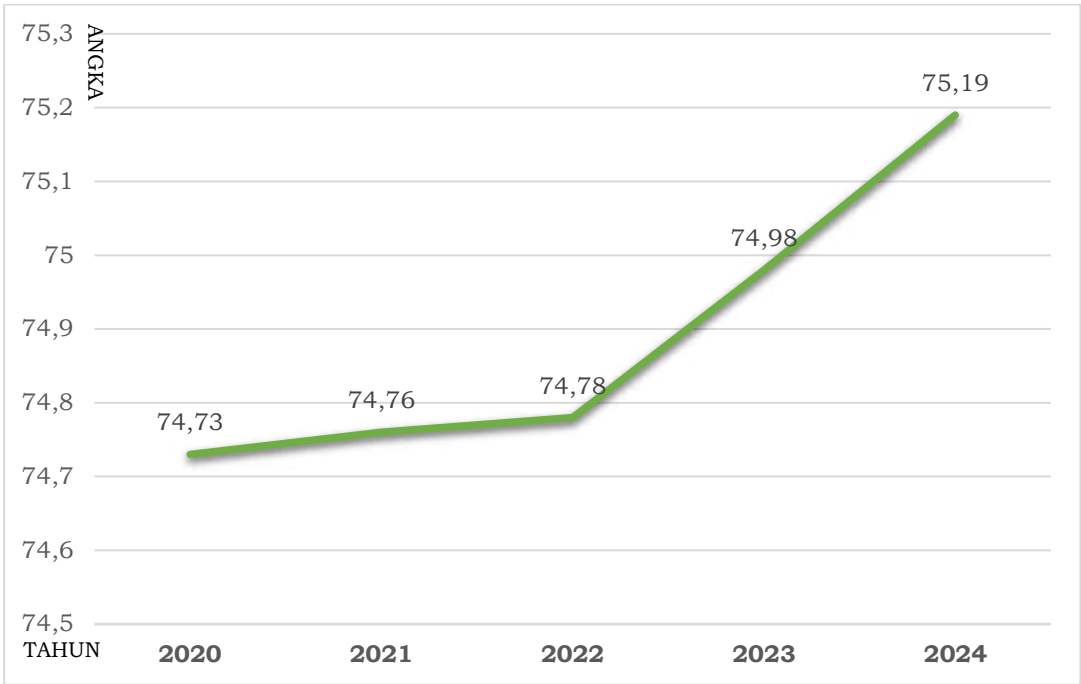
pengangguran di Kota Batam sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT menjadi 8,14 persen, dan pada tahun 2024 TPT menurun menjadi 7,68 persen.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Dalam kerangka pembangunan manusia, terdapat tiga domain utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga aspek ini saling berhubungan erat satu sama lain. Tanpa kesehatan yang baik, proses pendidikan tidak dapat berjalan optimal, dan tanpa kesehatan serta pendidikan yang memadai, mustahil bagi keluarga dan masyarakat untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sebaliknya, tanpa dukungan ekonomi yang kuat, peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan pun sulit tercapai. Kesehatan menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab dengan masyarakat yang sehat, diharapkan produktivitas dan kualitas hidup juga meningkat. Salah satu indikator kualitas hidup masyarakat tercermin dalam Usia Harapan Hidup (UHH), yang menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang lahir pada tahun tertentu. Di Kota Batam, capaian UHH pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,19 tahun, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menjadi cerminan kemajuan di bidang kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Gambar II.22.

Usia Harapan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Dalam mengukur Pembangunan Kesehatan di Kota Batam lainnya dapat dilihat melalui Jumlah Kematian Ibu, Prevalensi Stunting, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis, serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan data tahun 2024, Jumlah Kematian Ibu tercatat sebesar 24 kasus, sedangkan Prevalensi Stunting sebesar 14,00 persen. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis mencapai 67,00%, dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 100,00%. Adapun cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional mencapai 85,62 persen, mencerminkan tingkat inklusivitas yang tinggi dalam program jaminan kesehatan. Perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis yang masih dibawah target ideal. Selanjutnya, perlu adanya penguatan program pencegahan stunting dan perbaikan kualitas perawatan ibu hamil agar dapat menurunkan jumlah kematian ibu. Untuk itu, pembangunan kedepannya harus fokus pada pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah, peningkatan kualitas tenaga medis, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Kota Batam masih menghadapi tantangan penting yaitu belum tercapainya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya sebagian masyarakat yang belum mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan konkret dari pemerintah Kota Batam dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN, baik melalui optimalisasi peran anggaran daerah, kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, maupun sinergi dengan perangkat daerah terkait. Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi target nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), melainkan juga untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat di bidang kesehatan sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, salah satu indikator utama yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS dihitung berdasarkan rata-rata tahun pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut, mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikannya. Selain RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi indikator penting untuk melihat daya saing sumber daya manusia, keduanya



berperan sebagai komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS mencerminkan jumlah tahun yang telah dihabiskan dalam pendidikan formal, sementara HLS menunjukkan estimasi lama pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Semakin tinggi nilai HLS, semakin besar harapan terhadap tingkat pendidikan yang akan diraih. Berdasarkan data Kota Batam tahun 2020 hingga 2024, tercatat adanya peningkatan positif dalam capaian pendidikan. RLS naik dari 11,14 pada tahun 2020 menjadi 11,21 pada tahun 2024, sedangkan HLS meningkat dari 13,16 tahun menjadi 13,56 tahun pada periode yang sama. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya untuk memperpanjang masa pendidikan formal masyarakat di Kota Batam.

Tabel II.16.

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kota Batam Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	11,14	11,15	11,17	11,19	11,21
Harapan Lama Sekolah	13,16	13,17	13,32	13,34	13,56

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

Di Kota Batam proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan berpendidikan terakhir perguruan tinggi hanya 13,23%. Penduduk yang berpendidikan tertinggi SD, SMP, dan SMA sederajat masih mendominasi. Hal ini perlu diantisipasi karena menyangkut kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. Bila dalam jangka panjang belum ada perubahan signifikan, sangat mungkin SDM penggerak pembangunan di Daerah Kota Batam akan diisi oleh masyarakat luar daerah Kota Batam.

Tabel II.17.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Batam Tahun 2024

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Rata-Rata
Tidak Mempunyai Ijazah	2,69	3,83	3,26
SD/Sederajat	12,90	13,12	13,01
SMP/Sederajat	17,95	18,64	18,29
SMA/Sederajat	53,12	51,28	52,21
Perguruan Tinggi	13,34	13,13	13,23
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

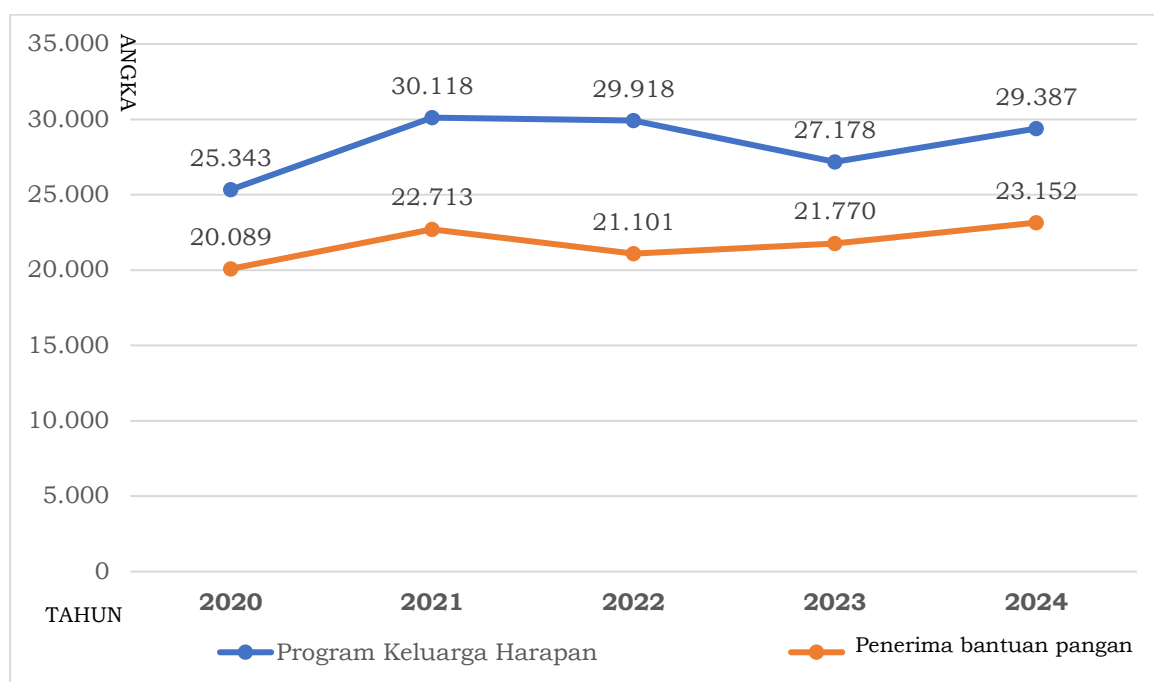
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Lingkup sosial mencakup segala hal yang berkaitan dengan upaya melakukan perlindungan sosial sebagai penguat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak gejolak atau ketidakstabilan ekonomi. Perlindungan sosial ini ditujukan untuk sekelompok masyarakat rentan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Seperti masyarakat miskin, penyandang cacat fisik dan mental, lansia, dan lainnya.

Bantuan sosial untuk konsumsi menjadi komponen terbanyak dalam perlindungan sosial. Salah satu bantuan yang memiliki fungsi sebagai pendukung terbentuknya faktor produksi adalah Program Keluarga Harapan, yaitu berupa bantuan tunai untuk akses pendidikan. Bantuan tunai digunakan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kartu Keluarga Sejahtera juga menjadi sumber bantuan yang lebih memberikan kesempatan untuk akses ke pelayanan kesehatan, wirausaha, dan pendidikan.

Gambar II.23.

Jumlah Penerima Bantuan Pangan dan Program Keluarga Harapan di Kota Batam Tahun 2020-2024 (KPM)



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2025

Berdasarkan gambar grafik jumlah penerima dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batam dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penerima PKH di Kota Batam mencapai 20.089 KPM dan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai sebanyak 23.152 KPM. Jumlah penerima Bantuan Pangan di Kota Batam pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari tahun 2023



berjumlah 25.343 KPM menjadi 29.387 KPM pada tahun 2024.

Bantuan sosial juga disebut sebagai jaring pengaman sosial yaitu serangkaian program dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan atau berisiko mengalami kemiskinan. Program-program ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko jatuh miskin, serta membantu mereka yang telah terjatuh dalam kemiskinan untuk bangkit dan memperbaiki kondisinya. Selain bantuan pengaman sosial tersebut, terdapat juga kebijakan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena hal ini mencerminkan efektivitas layanan sosial dan komitmen pemerintah Kota Batam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang rentan.

Tabel II.18.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak balita terlantar	1	1	5	1	3
2	Anak terlantar	2	8	14	22	40
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	21	23	6	36	8
4	Anak jalanan	185	175	157	36	75
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	438	445	401	380	400
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	123	61	0	0	82
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	36	7	33	23
8	Lanjut usia terlantar	225	225	360	360	376
9	Penyandang disabilitas	7677	787	788	709	435
10	Tuna Susila	190	150	117	157	250
11	Gelandangan	20	9	5	31	17
12	Pengemis	40	49	16	190	120
13	Pemulung	48	50	45	40	20
14	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	319	316	500	38.758	15.060
15	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35	5	3	18	0
16	Korban <i>Trafficking</i>	39	9	0	16	0
17	Korban Tindak Kekerasan	61	40	33	43	47
18	Korban bencana alam	1032	1308	1050	1258	1056
19	Korban bencana sosial	181	219	207	95	109
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	6	4	NA	NA	NA
21	Keluarga bermasalah sosial psikologis	40	21	NA	40	40



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, 2025

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam dari tahun 2020 sampai 2024 paling banyak didominasi oleh korban bencana alam dari 1032 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1056 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan jumlah PMKS terkecil terdapat pada jumlah anak balita terlantar yang pada tahun 2024 hanya mencapai 3 jiwa dan capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2023 yang ada sebanyak 1 jiwa.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Komitmen daerah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain, Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang pada tahun 2023 berada di angka 83,58 poin, menunjukkan kondisi kerukunan yang cukup baik. Selain itu, persentase potensi konflik yang berhasil diselesaikan mencapai 88,00%, mencerminkan kapasitas penyelesaian konflik yang tinggi. Dalam bidang kebudayaan, persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftarannya tercatat sebesar 30,00%, sementara persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan sebesar 25,00%. Ke depan, pembangunan harus diarahkan pada penguatan forum-forum kerukunan dan peningkatan literasi toleransi antar umat beragama. Di sisi lain, perlu dilakukan percepatan pendataan, pencatatan, dan penetapan terhadap kekayaan budaya, baik benda maupun tak benda, serta mendorong pelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Setiap tahunnya, Kota Batam mengadakan serangkaian festival seni dan budaya rutin, seperti Festival Kenduri Seni Melayu dan Parade Budaya Nusantara pada HUT Kota Batam. Festival-festival tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama sebagai magnet untuk menarik wisatawan berkunjung dan menginap di Kota Batam. Selain itu, mereka juga berperan sebagai wadah untuk memelihara dan melestarikan kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Batam.

Tabel II.19.
Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan	8	21	21	41	41



No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	budaya					
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	2	3	3	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3	3	4	9	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah festival seni dan budaya yang diadakan di Kota Batam mengalami variasi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Kota Batam mampu menggelar festival seni dan budaya sebanyak 500 kali hingga pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena upaya untuk memulihkan industri pariwisata. Kemudian meningkat lagi menjadi 1.500 kali penyelenggaraan di tahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 2.000. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengembalikan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam. Dengan adanya festival seni dan budaya, Kota Batam tidak hanya menarik minat wisatawan tetapi juga memperkuat identitas budaya dan mempromosikan warisan seni lokal.

Tabel II.20.

Upaya Pelestarian Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024

Indikator	satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Objek Kebudayaan Yang Dilestarikan	unit	5	5	5	3	8
Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	persen	20	20	20	20	20
Kelompok Seni Teater/drama	kelompok	2	2	2	3	3
Kelompok Seni Musik tradisional di Kota Batam	kelompok	8	8	8	8	8
Kelompok Seni Musik Modern di Kota Batam	kelompok	30	30	8	8	8
Kelompok Seni Lukis di Kota Batam	kelompok	12	12	12	12	20
Jumlah Seni Suara Vokal	kelompok	24	24	24	24	24



Indikator	satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kelompok Tari Tradisional	kelompok	43	43	43	43	43
Museum	unit	1	1	1	1	1
Sanggar Kesenian	unit	43	43	43	43	43

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, 2025

Objek budaya yang dilestarikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 meningkat dari 5 unit menjadi sebanyak 8 unit. Kemudian persentase objek budaya yang dilestarikan dari tahun 2020 hingga 2024 masih memiliki persentase yang sama besarnya yaitu sebesar 20 persen. Sedangkan selama tiga tahun, jumlah kelompok seni musik tradisional dan museum berjumlah stagnan. Kelompok seni musik modern mengalami penurunan tajam pada tahun 2020-2021 berjumlah 30 kelompok, dan menurun drastis pada tahun 2022-2024 berjumlah 8 kelompok. Jumlah seni suara vokal juga menunjukkan jumlah yang stagnan dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu berjumlah 24. Begitu pula dengan jumlah sanggar kesenian yang tetap berjumlah sebanyak 43 dari tahun 2020 hingga 2024.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau daerah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender di Kota Batam sudah cukup tinggi di mana pada tahun 2020 memiliki capaian 95,35 dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 95,95, pada tahun 2024 IPG kembali meningkat menjadi 96,66. Selanjutnya pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator untuk melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, terlihat capaian yang ada bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Batam pada tahun 2020 mencapai 59,10 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 58,26. Kondisi ini harus terus ditingkatkan dan dijaga kestabilannya guna memberdayakan penduduk secara merata dan berkeadilan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 IKG sebesar 0,407 menjadi 0,193 pada tahun 2024.

Tabel II.21.

Indikator Pembangunan Gender Kota Batam
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG) *	95,35	95,43	95,62	95,95	96,66
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,10	58,38	58,65	58,26	61,31
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,343	0,342	0,306	0,193

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

*data menggunakan hasil SP 2020 LF

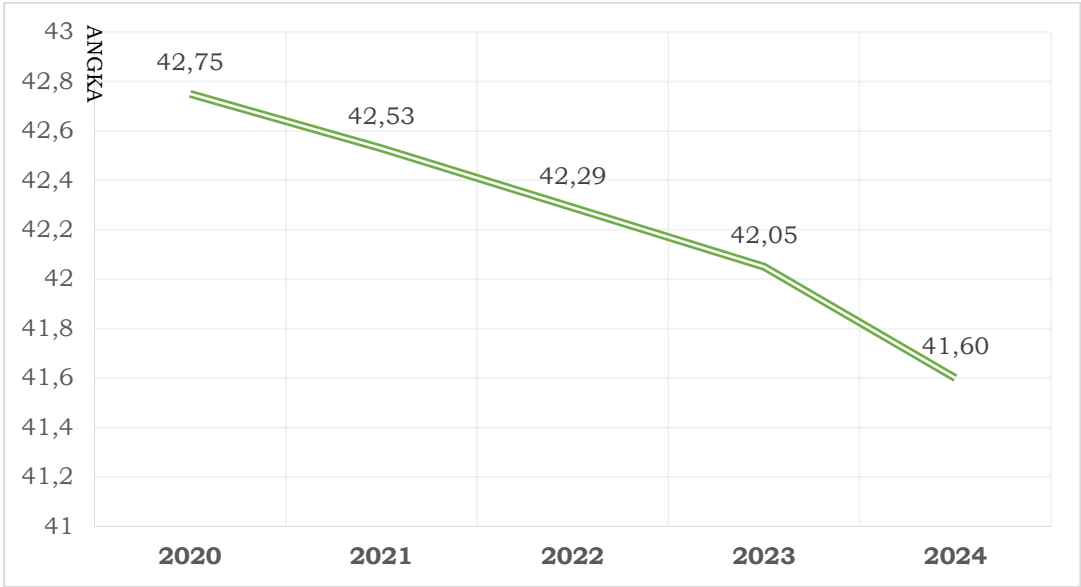
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan adalah sebuah indikator demografi yang mengukur hubungan antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya karena usia atau kondisi yang membuat mereka tidak dapat bekerja) dengan jumlah individu yang bekerja atau berpotensi bekerja. Angka ini sering kali digunakan untuk memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok yang berpotensi produktif.

Gambar II.24.

Angka Ketergantungan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kota Batam, 2025 (diolah)

Terlihat Angka Ketergantungan di Batam berada di bawah 50 persen pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,75 persen. Kondisi tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 41,60 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di antara 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 42 orang penduduk non produktif. Penurunan angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas

masyarakat meningkat karena jumlah masyarakat produktif lebih tinggi dibanding non produktif.

2.1.3.2 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemanfaatan iptek dan inovasi tidak hanya menjaga stabilitas produktivitas di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi dan inovasi mampu meningkatkan efisiensi produksi serta mendorong diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.

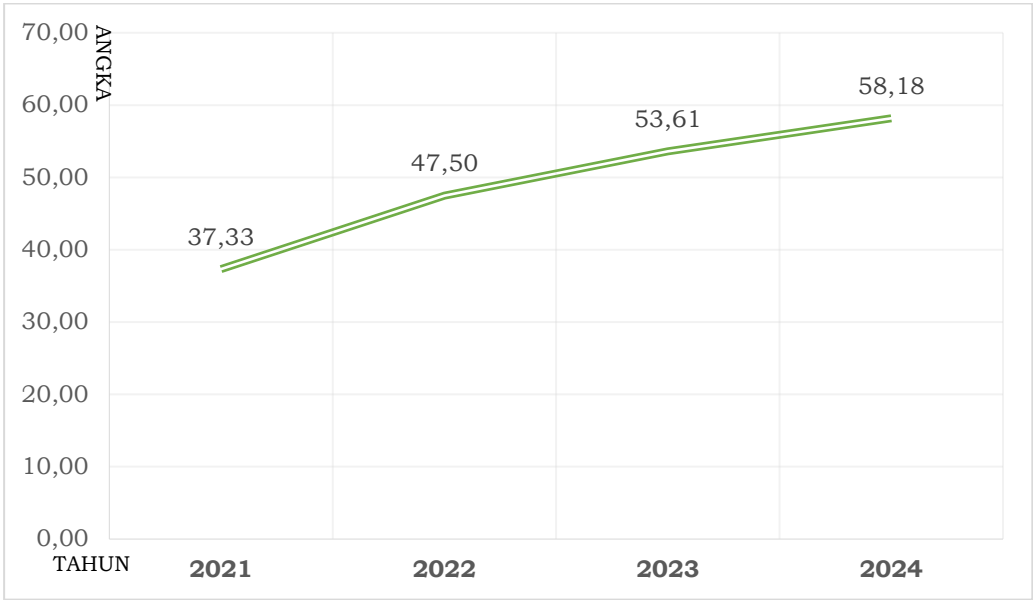
Iptek menyediakan basis inovasi dan efisiensi bagi dunia usaha yang berpengaruh terhadap rasio kewirausahaan. Dalam indikator rasio kewirausahaan, masyarakat produktif perlu mengadopsi dan memanfaatkan Iptek dalam aktivitas ekonomi. Rasio kewirausahaan adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi jumlah wirausaha dalam suatu populasi. Indikator ini berfungsi sebagai barometer utama untuk menilai dinamika ekonomi suatu daerah, menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mandiri dan inovatif. Rasio kewirausahaan yang tinggi umumnya mencerminkan iklim bisnis yang kondusif, keberadaan dukungan dari pemerintah, akses ke modal, serta tingginya minat dan kemampuan masyarakat untuk berinovasi dan mengambil risiko dalam menciptakan peluang usaha. Memahami rasio kewirausahaan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rasio kewirausahaan di Kota Batam mencapai angka 4,1 persen pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa rasio kewirausahaan, yang mengukur proporsi wirausahawan dalam populasi produktif, memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Kota Batam.

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan suatu ukuran yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai bentuk inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan. IID Kota Batam menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IID berada pada angka 37,33 (Inovatif) dan meningkat menjadi

47,50 (Inovatif) pada tahun 2022. Tren ini terus berlanjut hingga mencapai 53,61 (Inovatif) di tahun 2023 dan meningkat ke angka 58,18 (Inovatif) pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai inovasi kebijakan dan pelayanan publik, yang berpotensi besar dalam mendukung efektivitas pemerintahan dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gambar II.25.

Indeks Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2021-2024

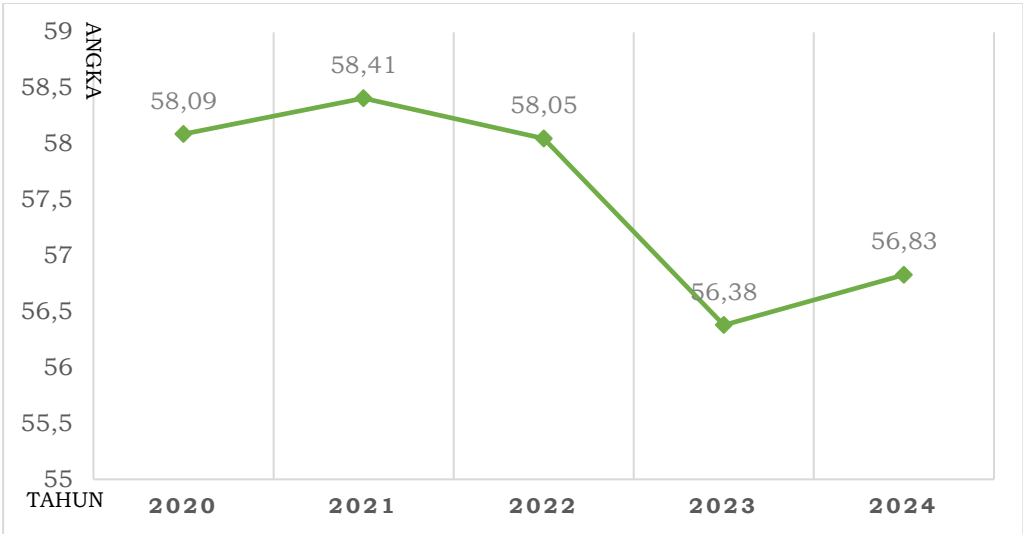


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Peningkatan dan fluktuasi rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kota Batam selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama dalam menopang struktur ekonomi daerah, meskipun kontribusinya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi industri pengolahan tercatat sebesar 58,09 persen dan sempat naik menjadi 58,41 persen pada 2021, namun kemudian menurun ke 58,05 persen pada 2022 dan kembali turun signifikan menjadi 56,38 persen di tahun 2023, sebelum sedikit pulih menjadi 56,83 persen pada 2024. Pergerakan angka ini menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi global, perubahan permintaan pasar, maupun efisiensi produksi dalam negeri. Meski demikian, konsistensi kontribusi yang masih di atas 50 persen memperlihatkan bahwa industri pengolahan tetap memiliki peran strategis dalam mendorong produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta pemanfaatan iptek dan inovasi di Batam. Ke depan, penguatan sektor ini menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat industri dan perdagangan.

Gambar II.26.

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)

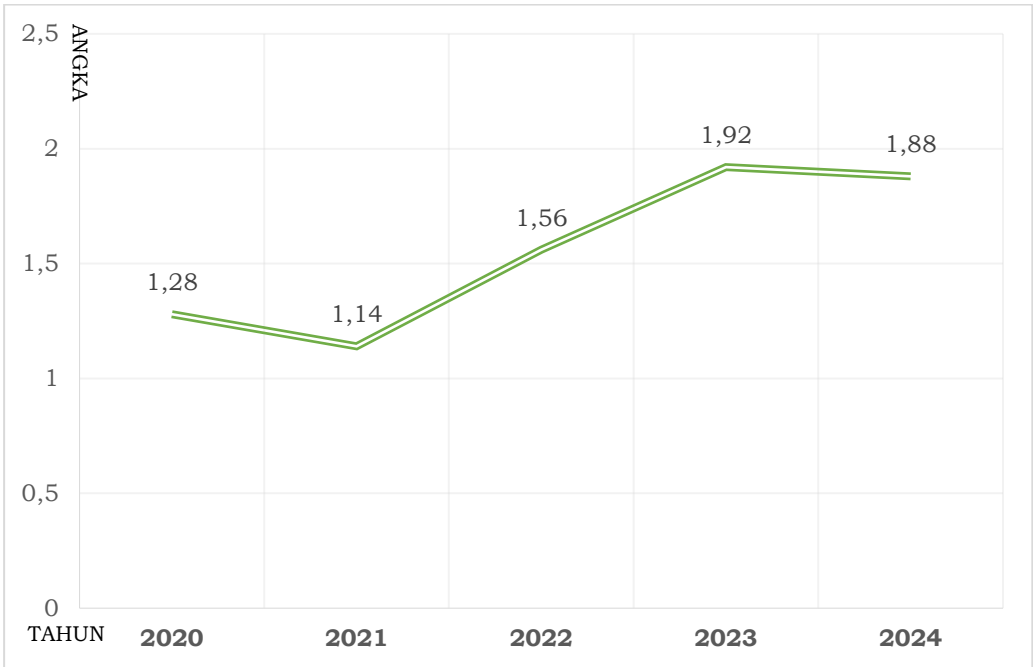


Sumber: BPS Kota Batam, 2025

Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat kontribusi pembangunan perekonomian yang meningkat walaupun masih di bawah rasio PDRB industri pengolahan. Capaian rasio PDRB sektor tersebut sebesar 1,28 persen pada tahun 2020, dan meningkat hingga mencapai 1,88 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam sektor penyediaan akomodasi (hotel dan penginapan) serta makan minum, yang dapat berkaitan dengan meningkatnya kunjungan, konsumsi lokal, serta inovasi pelayanan di bidang pariwisata dan kuliner.

Gambar II.27.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)

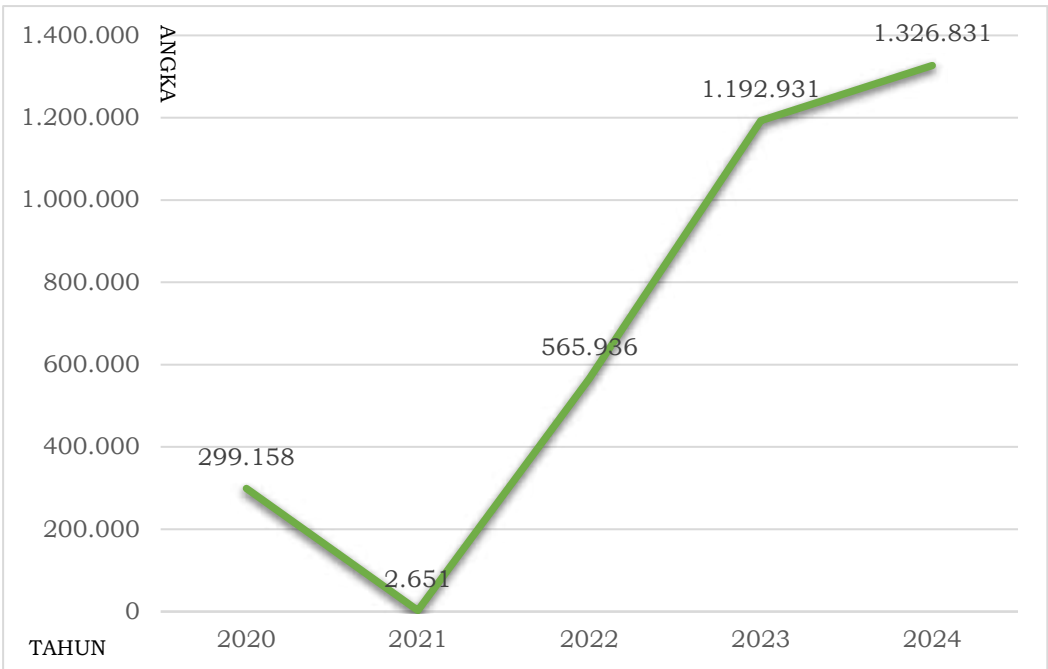


Sumber: BPS Kota Batam, 2025

Kota Batam, secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran internasional. Keindahan gugusan kepulauan juga menjadi daya tarik sendiri untuk pariwisata di Kota Batam. Letak Kota Batam yang berseberangan dengan Singapura juga menjadi suatu keunggulan karena menjadi alternatif pariwisata bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan Kota Batam tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan adanya penurunan yang drastis, yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan kembali meningkat menjadi 565.936 wisatawan mancanegara (wisman). Berbagai upaya kebijakan pasca COVID-19 pada akhirnya mampu meningkatkan kembali jumlah wisatawan di Kota Batam, sejak tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun belum melebihi jumlah kunjungan sebelum adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan Kota Batam sudah mencapai 1.326.831 wisman.

Gambar II.28.

Kunjungan Wisatawan Kota Batam (Jiwa) Tahun 2020-2024



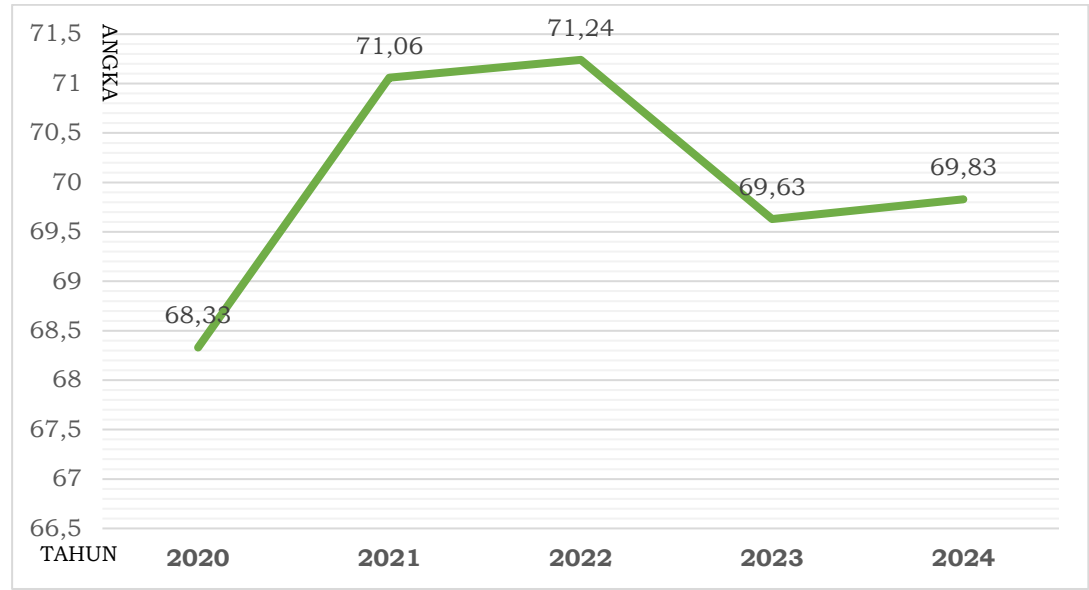
Sumber : BPS Kota Batam, 2025

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Adapun penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan gambar di bawah, TPAK Kota Batam mengalami peningkatan selama periode tahun 2020 hingga 2024. TPAK Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar 68,33. Kemudian di tahun 2021

dan 2022 TPAK Kota Batam mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu masing-masing mencapai 71,06 dan 71,24. TPAK yang memiliki tren meningkat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia kerja yang bekerja meningkat dalam populasi. Peningkatan TPAK mencerminkan terjadinya peningkatan individu dalam masyarakat yang termasuk usia kerja aktif dalam kegiatan perekonomian. Pada tahun 2023 terjadi penurunan TPAK menjadi 69,63 kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 69,83.

Gambar II.29.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang mulai berlaku sejak 11 Februari 2025 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan peralatan berbasis standar kinerja energi dan label hemat energi. Langkah ini secara tidak langsung membuka peluang optimalisasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti panel surya atap, lampu hemat energi, dan teknologi lainnya yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru di Kota Batam terus diupayakan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor ini mengalami perkembangan yang beragam selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sektor ini tercatat sebesar -0,47 persen dan meningkat pada tahun

2021 dan 2022 masing-masing menjadi -0,33 persen dan 4,48 persen. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi -8,65 persen dan -7,91 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas atau produktivitas pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam tetap stabil pada kisaran angka 0,72-1,02 dalam rentang tahun 2020-2024. Terjadi sedikit penurunan, yakni dari 1,02 persen pada tahun 2020 menjadi 0,72 persen pada tahun 2024.

Tabel II.22.

Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kota Batam Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,47	-0,33	4,48	-8,65	-7,91
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	0,98	0,95	0,82	0,72

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, sistem administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang melalui platform *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), dan berbagai inovasi teknologi. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga berperan penting dalam mempercepat konektivitas antar wilayah yang mendukung distribusi informasi, barang, dan jasa. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, transformasi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan berkualitas secara lebih luas, seperti melalui pembelajaran daring dan layanan kesehatan berbasis teknologi (*telemedicine*). Penerapan pembangunan berbasis digital juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mendorong solusi yang ramah lingkungan.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, terlihat bahwa sektor informasi dan komunikasi mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sektor ini tercatat sangat

tinggi, yakni mencapai 18,09 persen, namun mengalami penurunan tajam pada 2021 menjadi 9,00 persen, dan terus melemah hingga 2,35 persen pada 2022. Meski demikian, pada 2023 terjadi pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan melonjak kembali ke angka 18,50 persen, sebelum akhirnya menurun moderat menjadi 6,25 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Batam cenderung stabil meskipun pertumbuhan sektoralnya berfluktuasi. Kontribusi PDRB tercatat sebesar 2,83 persen pada 2020, sedikit naik menjadi 2,87 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 2,62 persen pada 2022, tetapi kembali mengalami kenaikan tipis di tahun-tahun berikutnya menjadi 2,85 persen pada 2023 dan 2,84 persen pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sektor informasi dan komunikasi mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada beberapa tahun, kontribusinya terhadap total perekonomian Kota Batam masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi penguatan peran sektor ini agar digitalisasi benar-benar mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih optimal di Kota Batam.

Tabel II.23.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kota Batam Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Informasi dan Komunikasi (%)	18,09	9,00	2,35	18,5	6,25
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	2,83	2,87	2,62	2,85	2,84

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing serta memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global. Di Kota Batam, arah pembangunan ini tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB menurut pengeluaran.

Kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Kota Batam tetap menjadi salah satu penopang utama pembangunan, meskipun menunjukkan sedikit fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data, kontribusi PMTB tercatat sebesar 47,53 persen pada tahun 2020, mengalami sedikit



penurunan menjadi 45,59 persen di tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi signifikan sebesar -4,67 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, namun berhasil pulih dengan pertumbuhan positif berturut-turut, mencapai 4,40 persen pada 2021, 3,81 persen pada 2022, 8,29 persen pada 2023, hingga 4,51 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan investasi dan pembangunan fisik di daerah pasca pandemi, meskipun laju pemulihan sempat mengalami variasi dari tahun ke tahun.

Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Batam menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode yang sama. Pada tahun 2020, kontribusi Net Ekspor tercatat sebesar 9,71 persen, meningkat menjadi 12,19 persen di tahun 2024, meskipun sempat mengalami fluktuasi di angka 10,84 persen pada 2021, 12,51 persen pada 2022, dan 11,05 persen pada 2023. Tren kontribusi yang meningkat menunjukkan adanya potensi daya saing produk daerah yang semakin kuat dalam pasar luar wilayah, serta keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok global.

Secara keseluruhan, meskipun kontribusi PMTB terhadap PDRB menunjukkan sedikit penurunan di akhir periode, namun perbaikan laju pertumbuhan PMTB serta peningkatan kontribusi Net Ekspor mencerminkan bahwa perekonomian Kota Batam mulai kembali ke jalur pemulihan. Hal ini menandakan adanya transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih terbuka, resilien, dan terintegrasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.24.

Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kota Batam Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,67	4,40	3,81	8,29	4,51
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,53	47,53	45,61	47,09	45,59
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	9,71	10,84	12,51	11,05	12,19

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

2.1.3.6 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, salah satunya adalah akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketersediaan hunian yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan

mendukung mobilitas ekonomi lokal. Infrastruktur prasarana dasar merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Pencapaian pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perkotaan tercermin dari sejumlah indikator yang menunjukkan capaian positif namun tetap memerlukan perhatian lanjutan. Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur pada tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 72,27. Capaian persentase pemenuhan infrastruktur perkotaan sebesar 71,24%, dan pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman mencapai 70,84%. Sementara itu, persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan berada pada angka 89,98%, serta rasio konektivitas tercatat sebesar 0,748 poin.

Dari sisi kualitas sarana prasarana pekerjaan umum, terjadi peningkatan kualitas dominasi jalan dengan kategori baik pada tahun 2020 sepanjang 401,12 km meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.018,50 km dari total panjang jalan menurut kondisi jalan di Kota Batam sepanjang 1.234,62 km. Serta ditinjau juga berdasarkan jenis permukaan jalan yang meliputi aspal, kerikil, tanah, beton. Adapun pada tahun 2024, jenis permukaan jalan di Kota Batam dari total panjang 1.234,62 km didominasi oleh permukaan aspal dengan panjang jalan 836,57 km. Meskipun begitu, masih perlu upaya optimalisasi pembangunan sarana prasarana dasar di Kota Batam serta infrastruktur jalan yang dapat mendukung pembangunan Kota Batam dalam berbagai bidang..

Tabel II.25.

Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan
di Kota Batam Tahun 2020-2024 (km)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	646,16	646,16	646,16	917,20	1.234,62
-Baik	401,12	403,93	496,90	734,06	1.018,50
-Sedang	160,85	161,43	73,69	80,59	80,06
-Rusak	84,19	80,80	25,76	50,72	82,50
-Rusak Berat	0	0	49,81	51,83	53,56
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	646,16	646,16	646,16	917,20	1.234,62
-Aspal	593,95	597,24	495,01	736,89	836,57
-Kerikil	41,29	38,44	1,03	10,79	1,71
-Tanah	10,92	10,48	41,97	41,30	43,44



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
-Lainnya	0	0	108,15	128,22	352,90

Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA, 2025

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan primer bagi manusia, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman, kenyamanan, dan mendukung kehidupan serta keberlangsungan masyarakat secara umum. Diharapkan bahwa peningkatan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dalam proses pembangunan.

Adapun beberapa indikator yang menilai capaian keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Batam meliputi capaian pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Batam pada tahun 2023 telah mencapai 367,44 Ha dan pada tahun 2024 telah dilakukan data pemutakhiran sehingga pengurangan luasan kawasan kumuh menjadi sebesar 212,90 Ha.

Kemudian persentase pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan di mana pada tahun 2024 mencapai 85,79%. Begitu juga persentase pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah *hinterland* pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 40,46% di tahun 2021 menjadi 77,65%.

Tabel II.26.

Indikator Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Uraian	satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	Ha	140,88	220,2	176,28	367,44	212,90
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	persen	0	73,00	77,32	83,36	85,79
3	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	persen	0	40,46	41,67	72,12	77,65

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

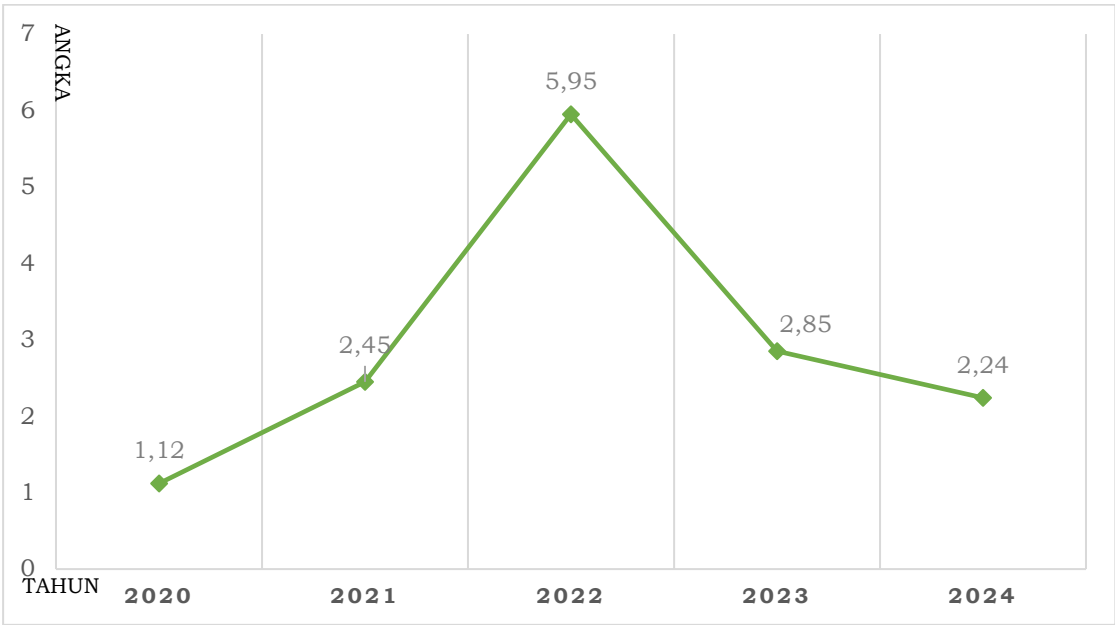
Inflasi menduduki peran sentral sebagai salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi serta stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi

memiliki kapasitas untuk menyebabkan dampak yang signifikan, mulai dari penurunan daya beli hingga gangguan dalam keseimbangan sosial-ekonomi. Inflasi, secara substansial, merupakan fenomena kenaikan umum dalam harga barang dan jasa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Kehadirannya menandakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Dengan munculnya inflasi, nilai mata uang secara efektif tergerus, menyebabkan konsekuensi ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data ditunjukkan bahwa tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami lonjakan pertumbuhan. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Batam sempat berada di angka 1,12%. Setelah itu pada tahun 2021 inflasi Kota Batam mengalami peningkatan yang mencapai sebesar 2,45% dan capaian ini terus meningkat sampai tahun 2022 dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 5,95%. Kemudian inflasi Kota Batam mengalami penurunan di tahun 2023 yang mencapai sebesar 2,85%. Pada tahun 2024 menurun menjadi 2,24% menunjukkan adanya upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Gambar II.30.

Laju Inflasi Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Batam, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum adalah gambaran mengenai kualitas, cakupan, dan pemerataan layanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Aspek Pelayanan Umum meliputi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan

Demokrasi Substansial; Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan; Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Kota Batam menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kapabilitas inovasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing. Posisi geografis yang strategis di dekat pusat teknologi global seperti Singapura, didukung dengan infrastruktur modern serta kehadiran berbagai kawasan industri berbasis manufaktur dan teknologi tinggi, menjadikan Batam sebagai lokasi potensial pengembangan ekosistem inovasi. Fasilitas riset dan pengembangan yang tersedia di kawasan industri, serta keberadaan perusahaan multinasional, mendorong percepatan transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan alih pengetahuan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Batam juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap dan sistematis. Upaya ini meliputi perbaikan manajemen ASN, optimalisasi kinerja administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasilnya terlihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat, dari 52,33 (kategori C) pada tahun 2020 menjadi 81,92 (kategori A-) pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mencapai 84,02 (kategori A).

Pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah dapat diintegrasikan ke dalam platform *e-Government* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu metrik yang mengukur tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Indeks SPBE Kota Batam mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni dari 2,64 menjadi 3,77 pada tahun 2024. Kenaikan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kinerja berbasis IT. Dari beberapa indikator yang lain Indeks Pelayanan Publik, Nilai SPI mengalami fluktuasi di mana menunjukkan tingkat kestabilan Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan masih perlu menjadi catatan, beberapa indikator dalam mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel II.27.

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Kota Batam Tahun 2020-2024

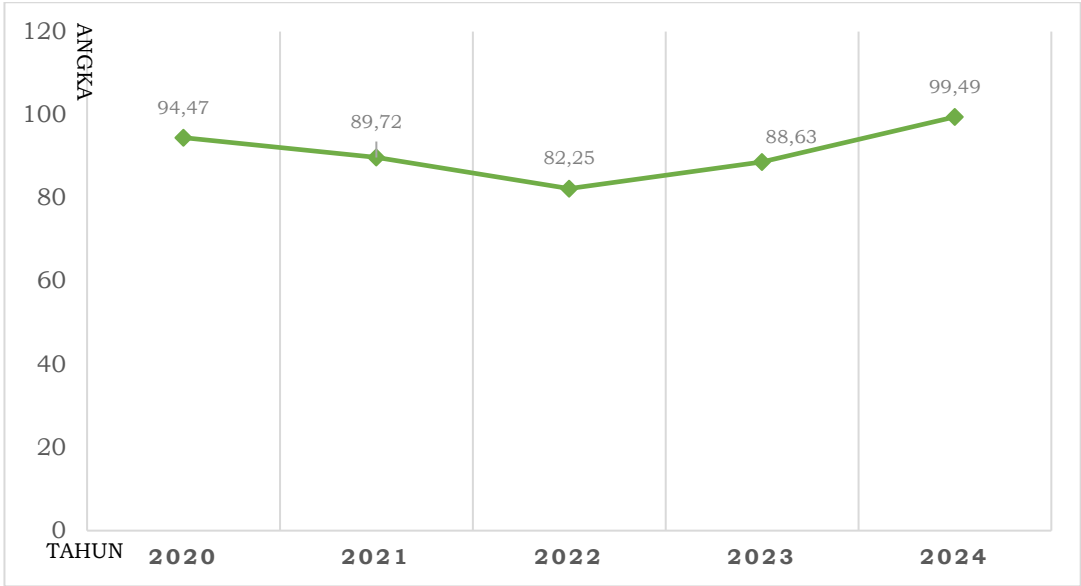
Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kapabilitas Inovasi	Survei Penilaian Integritas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2020	52,33	NA	3,69	NA	NA	3,11
2021	53,54	NA	3,80	NA	NA	2,64
2022	56,98	56,98	4,07	3,08	72,68	2,85
2023	81,92	57,77	3,24	3,64	74,12	3,77
2024	84,02	NA	4,20	3,31	68,70	3,77

Sumber : Olahan Tim RPJMD, 2025

Keuangan memegang peran penting dalam mendukung berbagai urusan pemerintah, termasuk perencanaan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selama lima tahun terakhir persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.

Gambar II.31.

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Batam, 2025

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Pendapatan ini bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Tabel II.28.

Komponen Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi PAD (dalam milyar)	94,47	89,72	82,25	88,63	99,49
2	Jumlah Pendapatan Bunga (dalam juta)	6.566	6.915	3.906	3.359	10.829
3	Persentase Realisasi Pendapatan Bunga (%)	153,92	115,27	78,13	51,09	180,49
4	Pertumbuhan Pajak (%)	-19,11	5,39	29,79	18,58	14,75
5	Pertumbuhan Retribusi Daerah(%)	2,32	3,44	-1,20	48,43	20,81
6	Jumlah Pajak Daerah (dalam milyar)	755,878	796,651	1.033,98	1.226,137	1.407,05
7	Jumlah Retribusi Daerah (dalam milyar)	92,622	95,807	94,659	140,496	169,74
8	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	90,88	84,24	81,72	89,59	98,84
9	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)	112,78	74,9	63,58	71,43	87,89
10	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat
12	Peningkatan Pelayanan BLUD Dana Bergulir Kota Batam	100	100	100	100	100

Sumber : BPKAD Kota Batam, 2023

Berdasarkan data pada tabel, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi PAD mencapai 94,47%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 89,72% pada 2021 dan 82,25% pada 2022. Namun demikian, terjadi pemulihan pada 2023 dengan capaian 88,63%, dan diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 99,49% pada 2024. Pendapatan bunga menunjukkan tren penurunan nominal dari Rp 880,7 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 658,2 juta pada tahun 2023. Persentase realisasi PAD sempat mencapai puncak pada tahun 2022 sebesar 99,95%, namun menurun ke 83,91% pada 2023. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan kas dan investasi jangka pendek yang lebih efisien. Dari sisi pajak daerah, pertumbuhan sempat negatif pada tahun 2020 (-19,11%) sebagai dampak pandemi, namun pulih tajam pada 2022 dengan pertumbuhan 29,79% dan tetap positif pada 2023 sebesar 18,58%. Jumlah pajak daerah terus meningkat dari Rp755,9 miliar pada 2020 menjadi Rp1.226,1 miliar pada 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp1.407,05 miliar pada 2024. Realisasi penerimaan pajak juga terjaga di atas 80%, bahkan meningkat menjadi 98,84% pada 2024. Sementara itu, pertumbuhan retribusi daerah juga berfluktuasi. Setelah mencatat pertumbuhan positif di 2020 dan 2021, sempat negatif pada 2022 (-1,20%), kemudian melonjak menjadi 48,43% pada 2023. Jumlah retribusi meningkat dari Rp92,6 miliar pada 2020 menjadi Rp140,5 miliar pada 2023, dengan estimasi mencapai Rp169,7 miliar pada 2024. Meskipun demikian, persentase realisasi retribusi menunjukkan volatilitas yang tinggi, dari 112,78% pada 2020 turun tajam menjadi 63,58% pada 2022, lalu meningkat kembali menjadi 87,89% pada 2024. Untuk melihat kontribusi pajak dalam mendukung perekonomian daerah dilakukan perhitungan jumlah pajak terhadap PDRB Kota Batam, dimana angka di Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,604 yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian relatif belum optimal.

Secara keseluruhan, Kota Batam mempertahankan opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut dan selalu menetapkan APBD secara tepat waktu. Pelayanan BLUD Dana Bergulir juga tercatat konsisten pada tingkat 100%, mencerminkan tata kelola keuangan yang relatif baik namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek optimalisasi pendapatan daerah non-pajak.

Realisasi investasi adalah pencatatan nilai investasi yang benar-benar terealisasi dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik dari



Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Tabel di bawah ini, realisasi investasi di Kota Batam menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke 2024, yaitu dari Rp22.948.515juta menjadi Rp 25.462.030 juta. Kenaikan ini terjadi pada investasi PMA (dari Rp9.259.653juta menjadi Rp17.303.387 juta). Secara makro, peningkatan ini dapat disebabkan oleh perbaikan iklim investasi, kebijakan pemerintah yang pro-investor seperti kemudahan perizinan, serta pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan perdagangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, hal itu bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian global, hambatan birokrasi, atau minimnya insentif fiskal yang kompetitif.

Tabel II.29.

Realisasi Investasi Kota Batam Tahun 2023-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi Rp. (Juta)		Jumlah Rp. (Juta)
		PMDN	PMA	
1	2020	13.688.862	9.259.653	22.948.515
2	2021	7.519.910	7.360.885	14.880.795
3	2022	2.521.305	10.717.334	13.238.639
4	2023	6.801.522	8.819.448	15.620.970
5	2024	8.158.643	17.303.387	25.462.030

Sumber : DPMPTSP Kota Batam, 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah keadaan yang dinamis, memungkinkan pemerintah daerah dan warga untuk menjalankan aktivitas dengan aman, teratur, dan tertib. Di sisi lain, perlindungan masyarakat merupakan usaha yang aktif dalam memberdayakan warga dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi bencana, serta berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jumlah pelanggaran trantibum tahun 2024 berjumlah 456 pelanggaran, 22 demonstrasi, dan penurunan konflik berhasil ditekan sampai 15,51 persen. Penyediaan sarana prasarana untuk membangun ketenteraman dan ketertiban umum Kota Batam terdiri dari pos pemadam kebakaran berjumlah 3 unit, mobil rescue berjumlah 1 unit, dan mobil operasional yang aktif berjumlah 6 unit. Hydrant tersedia cukup banyak berjumlah 55 unit. Penanganan 256 kasus yaitu penanganan non kebakaran, dan sisanya dengan penanganan kebakaran.

Tabel II.30.

Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kota Batam Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggaran Trantibum	pelanggaran	777	698	618	534	456
Demonstrasi	kali	NA	NA	53	30	22
Pos Pemadam Kebakaran	unit	3	3	3	3	3
Mobil Rescue	unit	1	1	1	1	1
Mobil Operasional (pemadam kebakaran)	unit	6	6	6	6	6
Hydrant	unit	55	55	55	55	55
Fire Truck	unit	4	4	4	4	4
Fire Supply	unit	3	3	3	3	3
Penanganan Non Kebakaran	kali	59	123	205	135	256
Penanganan Kebakaran	kali	235	212	146	138	189
Persentase Penurunan Konflik	persentase	NA	21,57	11,28	13,19	15,51
Jumlah Pelanggaran Perda	kasus	1068	960	853	743	623
Angka Kriminalitas	angka	164	142	150	192	214

Sumber : Satpol PP Kota Batam; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat perkembangan kasus tindak pidana dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bersifat fluktuatif, dan jika dilihat jumlah tindak pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 1.521 kasus pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.717 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menciptakan kondisi Kota Batam yang aman dan tertib sebagai salah satu upaya meningkatkan iklim daya saing investasi di Kota Batam.

Tabel II.31.

Jumlah Tindak Pidana Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dilaporkan	2.259	1.948	2.147	2.156	2.411
2	Diselesaikan	1.521	1.261	1.498	1.403	1.717

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan tercermin dari kemampuannya dalam meningkatkan daya saing wilayah secara konsisten. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan daerah dalam menghadapi dinamika global, nasional, dan regional. IDSD pada tahun 2021 dan 2022 memiliki cara perhitungan yang berbeda dengan tahun selanjutnya.

Pada tahun 2024, IDSD Kota Batam mencapai skor tertinggi sebesar 4,07, meningkat dari 3,51 di tahun 2023. Meskipun data tahun 2022 belum tersedia secara keseluruhan, tren kenaikan ini mencerminkan kinerja pembangunan yang membaik. Dua pilar dengan capaian tertinggi di tahun 2024 adalah Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Adopsi TIK, masing-masing dengan skor 5,00, yang mengindikasikan bahwa Batam memiliki daya tarik pasar yang besar serta kemajuan signifikan dalam transformasi digital.

Namun demikian, tantangan masih perlu diperhatikan, terutama pada Pilar Kapabilitas Inovasi (3,31) dan Pilar Kesehatan (4,09) yang meskipun cukup baik, tetap memerlukan penguatan agar mampu menunjang pertumbuhan daya saing jangka panjang. Selain itu, Pilar Sistem Keuangan juga menunjukkan peningkatan penting dari skor 1,72 di tahun 2023 menjadi 2,87 di tahun 2024, namun masih relatif rendah dan memerlukan perhatian untuk mendukung inklusi keuangan di daerah.

Tabel II.32.

Indeks Daya Saing Daerah Kota Batam Tahun 2022-2024

Nilai Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Pilar Institusi	NA	NA	NA	4,41	4,79
Pilar Infrastruktur	NA	NA	2,78	3,25	3,49
Pilar Adopsi TIK	NA	NA	3,77	4,92	5,00
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	NA	NA	4,04	3,40	4,16
Pilar Kesehatan	NA	NA	4,08	4,12	4,09
Pilar Keterampilan	NA	NA	3,56	3,99	3,75
Pilar Pasar Produk	NA	NA	1,26	1,29	2,89
Pilar Pasar Tenaga Kerja	NA	NA	4,24	3,84	4,80
Pilar Sistem Keuangan	NA	NA	1,18	1,72	2,87
Pilar Ukuran Pasar	NA	NA	5,00	5,00	5,00
Pilar Dinamisme Bisnis	NA	NA	5,00	2,57	4,74
Pilar Kapabilitas Inovasi	NA	NA	3,08	3,62	3,31
Indeks Daya Saing Daerah	2,47	2,46	NA	3,51	4,07

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13–15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama merupakan indikator statistik yang menggambarkan proporsi anak usia 13–15 tahun yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti pendidikan jenjang menengah pertama, seperti SMP atau yang sederajat. Berdasarkan data, jumlah anak usia 13–15 tahun yang tercatat sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama mencapai 73.570 orang, dari total 75.505 anak usia tersebut di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Capaian ini mencerminkan tingginya keterlibatan kelompok usia tersebut dalam sistem pendidikan formal dan menjadi indikator keberhasilan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi.

Sepanjang periode 2020–2024, kinerja Urusan Pendidikan di Kota Batam menunjukkan tren yang sangat positif dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di semua kelompok usia. Untuk usia 5–6 tahun, peningkatan signifikan terjadi pada partisipasi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang mencapai hampir seluruh anak usia tersebut pada tahun 2024. Data mencatat bahwa seluruh anak usia 5–6 tahun telah mengikuti atau menyelesaikan pendidikan PAUD, menunjukkan tingkat keterjangkauan layanan pendidikan awal yang sangat tinggi.

Demikian pula, partisipasi pendidikan dasar pada kelompok usia 7–12 tahun juga menunjukkan angka yang hampir menyentuh 100% pada tahun 2024. Jumlah anak usia ini yang telah mengikuti atau menyelesaikan sekolah dasar tercatat sebanyak 152.068 orang dari total 153.346 anak yang ada. Sementara itu, program pendidikan kesetaraan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 4.585 anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sebanyak 4.583 anak telah mengikuti program pendidikan kesetaraan. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang sebelumnya tertinggal dari sistem pendidikan formal, sekaligus memperkuat upaya penurunan angka putus sekolah di Kota Batam.

Tabel II.33.

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,60	95,44	99,73	99,96	99,98
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,60	99,74	99,73	99,80	99,99
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,20	99,36	99,56	99,98	99,99
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,70	92,10	99,75	99,94	99,96

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan merupakan perbandingan antara jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan kapasitas rumah sakit dalam mengakomodasi pasien, terutama dalam kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selama periode 2020–2024, kinerja Urusan Kesehatan di Kota Batam menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator pelayanan dasar.

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun terakhir, daya tampung mencapai 2.455 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.342.038 jiwa. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kapasitas layanan rujukan di wilayah Kota Batam dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lanjutan.

Seluruh rumah sakit rujukan di tingkat kota yang berjumlah 21 unit telah terakreditasi penuh, sebagaimana dicatat dalam rumus indikator yang menyebut jumlah rumah sakit terakreditasi sama dengan jumlah total rumah sakit yang ada. Hal ini memperlihatkan komitmen Kota Batam dalam menjamin mutu layanan kesehatan di fasilitas rujukan, terutama sejak tahun 2023.

Pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan tercatat sebanyak 23.678 dari total sasaran 24.185, sedangkan layanan persalinan telah menjangkau 23.430 dari jumlah kelahiran sebanyak 24.185. Untuk bayi baru lahir, cakupan layanan kesehatan mencapai 22.639 dari total 23.142 bayi. Ketiga indikator ini menunjukkan capaian di atas 96 persen, yang menandakan konsistensi dalam pemberian layanan esensial bagi ibu dan anak.

Layanan kesehatan balita dan anak usia sekolah dasar juga menunjukkan lonjakan cakupan. Pada tahun terakhir, terdapat 115.604 balita yang mendapat layanan sesuai standar dari total 117.349 anak. Cakupan untuk anak usia pendidikan dasar bahkan lebih tinggi, yaitu 196.909 dari total 196.422 anak, yang mengindikasikan cakupan melebihi 100 persen karena kemungkinan intervensi layanan juga mencakup anak luar wilayah atau siswa non-KTP Batam.

Pelayanan skrining kesehatan bagi penduduk usia 15–59 tahun juga menunjukkan pencapaian maksimal, dengan 867.150 orang telah menjalani skrining dari total sasaran dengan jumlah yang sama. Hal serupa terjadi pada penduduk lanjut usia, di mana 61.673 warga usia 60 tahun ke atas telah mendapat layanan skrining dari total 70.891 sasaran. Ini menunjukkan bahwa cakupan layanan preventif bagi kelompok usia produktif dan lansia menjadi perhatian serius dalam sistem layanan kesehatan daerah.

Penanganan penyakit kronis juga menunjukkan progres optimal. Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar berjumlah 185.189 dari total yang sama, sementara penderita Diabetes Melitus sebanyak 13.883 dari keseluruhan penderita. Hal ini memperlihatkan upaya sistematis dalam pengelolaan penyakit tidak menular yang berpotensi menjadi beban ganda kesehatan masyarakat.

Pelayanan kepada kelompok khusus juga telah menjangkau seluruh sasaran. Penderita gangguan jiwa berat (ODGJ) yang berjumlah 1.149 telah seluruhnya mendapatkan pelayanan standar. Begitu pula dengan penderita



TBC sebanyak 36.113 dan orang yang berisiko terinfeksi HIV sebanyak 15.060, seluruhnya telah menerima layanan sesuai standar.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Batam dalam memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan hingga ke kelompok paling rentan, serta memperkuat sistem layanan preventif dan kuratif secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Tabel II.34.

Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,20	0,22	0,17	1,45	1,83
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	89,50	80,95	85,71	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,70	90,84	90,55	94,08	97,90
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,00	91,25	90,09	93,11	96,88
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,20	86,85	89,44	92,27	97,83
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	58,90	72,64	87,75	95,40	98,51
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43,00	54,29	104,79	100,00	99,94
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40,90	68,78	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26,40	32,14	67,69	78,90	87,03



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,90	52,85	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,60	86,50	100,06	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68,60	68,00	109,13	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	26,70	38,94	100,17	94,67	100,00
I4	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,00	53,13	100,14	100,00	100,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batam pada periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana. Seluruh kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan kota seluas 14,25 hektar dari total 16 hektar telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Begitu pula kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi—seluas 1.030 meter—seluruhnya telah dilengkapi infrastruktur pengaman, memperlihatkan bahwa perlindungan kawasan permukiman terhadap risiko bencana telah dicapai secara maksimal selama lima tahun terakhir.

Capaian akses rumah tangga terhadap air minum terlayani 100 persen namun jika melihat data pelayanan air minum perpipaan di kawasan *hinterland* sebagai kewenangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2024, dari proyeksi rumah tangga sebanyak 324.876, yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan hanya berjumlah 164.930, yaitu sekitar 50,77 persen. Sementara untuk pengolahan air limbah, seluruh rumah tangga



dalam proyeksi tersebut telah mendapatkan akses, baik melalui sistem individu seperti cubluk atau PLT, maupun melalui sambungan rumah ke IPALD, menunjukkan cakupan layanan limbah yang sudah maksimal.

Dalam aspek pengawasan dan perizinan bangunan, rasio kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan tren positif. Dari total 1.194 bangunan yang telah mendapatkan persetujuan, 1.156 telah sesuai peruntukannya. Tingkat kemantapan jalan juga meningkat stabil, dengan panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.098,56 kilometer dari total jaringan sepanjang 1.234,62 kilometer.

Kemajuan yang cukup mencolok terlihat pada peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dari total kebutuhan sebanyak 1.534 orang, sebanyak 1.472 tenaga kerja telah terlatih dan tersertifikasi, mencerminkan peningkatan dari capaian awal hanya 0,58% pada 2021 menjadi hampir 96 persen pada 2024. Meski begitu, upaya pengawasan proyek konstruksi tanpa kecelakaan masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024, dari total 1.281 proyek yang menjadi kewenangan pengawasan, hanya 1.080 proyek yang berjalan tanpa kecelakaan kerja, atau sekitar 84,31 persen.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan terutama pada aspek layanan air minum dan pengawasan keselamatan kerja konstruksi, Kota Batam tetap menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif dan aman, serta penataan ruang yang berkelanjutan.

Tabel II.35.

Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	82,06



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	87,00	NA	100,00	99,26	96,82
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	87,00	87,50	88,24	88,82	88,98
7	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	87,00	0,58	2,92	95,41	95,96
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	98,90	16,98	94,94	97,97	84,31

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Pada aspek penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, data menunjukkan bahwa belum terdapat unit rumah korban bencana yang berhasil ditangani pada tahun berjalan, dari satu unit rumah yang direncanakan untuk ditangani. Meskipun angkanya kecil, hal ini menunjukkan bahwa intervensi langsung terhadap perumahan pasca bencana

masih perlu ditingkatkan agar kesiapsiagaan penanganan bencana lebih optimal.

Sementara itu, untuk fasilitasi hunian bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah, target pelaksanaan juga belum terealisasi. Dari satu rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, belum ada yang tercatat sebagai penerima fasilitas seperti penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan, subsidi uang sewa, maupun penyediaan rumah layak huni. Ketidaktercapaian ini perlu menjadi perhatian dalam penguatan program relokasi yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, upaya pengurangan kawasan permukiman kumuh menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dari total luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar sebesar 77,7 hektar, seluas 64,44 hektar telah berhasil ditangani. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan dengan karakteristik kumuh skala kecil telah mendapatkan intervensi peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara bertahap.

Untuk indikator pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), sebanyak 33.423 unit rumah dari total 279.027 unit rumah telah ditingkatkan kualitasnya menuju kategori layak huni. Angka ini menunjukkan kontribusi yang kuat dari program rehabilitasi dan renovasi rumah dalam mengurangi *backlog* rumah tidak layak, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga tercermin dalam pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Sebanyak 4.212 unit rumah dari keseluruhan jumlah unit rumah di kabupaten/kota, yaitu 279.027 unit, telah difasilitasi dengan PSU. Hal ini menunjukkan langkah nyata dalam mengintegrasikan penyediaan rumah dengan kelengkapan infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan dan kelayakan huni.

Secara umum, capaian sektor perumahan dan permukiman Kota Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang konsisten, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek layanan pasca bencana dan relokasi. Perluasan cakupan terhadap rumah tidak layak dan kawasan kumuh, serta pemenuhan infrastruktur dasar perumahan, menjadi titik kunci dalam mendorong kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.



Tabel II.36.

Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0	0	100,00	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	0	0	100,00	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	8,70	92,40	36,35	75,66	82,93
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,40	8,46	8,46	12,62	11,98
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	46,2	NA	100,00	2,38	0,19

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan perlindungan publik. Seluruh pengaduan atas gangguan Trantibum berhasil ditangani, sebanyak 108 kasus dari 108 laporan yang masuk pada tahun terakhir. Ini mencerminkan sistem respons aduan masyarakat yang berjalan secara optimal dan tuntas.

Capaian maksimal juga terlihat dalam indikator penegakan Perda dan Perkada. Sebanyak 23 peraturan daerah atau kepala daerah yang memuat sanksi berhasil ditegakkan dari total jumlah yang sama. Hal ini menandakan tidak hanya adanya regulasi yang memadai, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya di lapangan semakin diperkuat.



Dalam aspek penanggulangan bencana, terjadi peningkatan cakupan layanan secara drastis dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 100 warga memperoleh layanan informasi rawan bencana dari total target 100 orang, menandakan keberhasilan dalam menyampaikan informasi preventif kepada kelompok sasaran. Di samping itu, sebanyak 390 warga yang tinggal di kawasan rawan bencana mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dari jumlah warga yang memang berada di wilayah tersebut. Upaya ini menunjukkan bahwa program mitigasi tidak hanya tersedia, tetapi juga menjangkau secara menyeluruh.

Respons terhadap kejadian bencana pun sudah sangat baik. Seluruh warga terdampak bencana pada tahun tersebut sebanyak 3 orang telah mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi. Bahkan, cakupan layanan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban kebakaran mencapai 100%. Tercatat 189 kejadian kebakaran di wilayah kota, dan seluruhnya telah mendapatkan respons dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Perangkat Daerah terkait sesuai prosedur tanggap darurat yang berlaku.

Capaian luar biasa juga terlihat pada efisiensi waktu respons dalam penanganan kebakaran. Rata-rata waktu tanggap terus mengalami penurunan tajam dari 67,7 menit pada tahun 2020 menjadi hanya 9,47 menit pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kesiapan personel, peralatan, dan sistem pelaporan yang semakin baik, serta distribusi titik pos pemadam kebakaran yang makin optimal menjangkau wilayah terdampak secara cepat.

Secara keseluruhan, capaian indikator dalam lima tahun terakhir mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem ketertiban dan perlindungan masyarakat yang responsif, tanggap terhadap krisis, serta berpihak pada ketenangan dan keselamatan warganya.

Tabel II.37.

**Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98,10	99,71	93,71	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,0	23,68	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.213	0,00	100,00	0,00	100,00



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.213	0,00	4,55	100,00	100,00
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65,10	63,68	75,34	97,10	100,00
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	67,70	12,60	11,32	10,30	9,47

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Sosial Kota Batam tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan. Seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya secara penuh setiap tahun. Dari total 1.017 individu yang termasuk dalam kategori tersebut, semuanya telah mendapatkan layanan sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan layanan sosial telah menjangkau seluruh sasaran secara menyeluruh dan merata.

Demikian pula, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial juga berhasil dicapai secara maksimal. Dari 1.165 orang yang menjadi korban bencana dan membutuhkan perlindungan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar dalam satu tahun anggaran, seluruhnya telah menerima layanan bantuan sesuai standar yang berlaku. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan sistem layanan sosial daerah, baik dalam fase tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100% pada kedua indikator utama ini menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan dan terdampak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pendataan, perencanaan program,



hingga distribusi layanan sosial berjalan secara efektif dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II.38.

Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

Kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Batam selama periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja daerah. Sepanjang lima tahun, seluruh kegiatan (sebanyak 14 kegiatan dari total 14 kegiatan yang dilaksanakan) mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), mencerminkan keselarasan program kerja dengan dokumen perencanaan yang telah disusun secara strategis.

Di sisi perusahaan, implementasi prinsip tata kelola kerja yang layak juga menunjukkan performa tinggi. Dari total 1.675 perusahaan yang terdata, sebanyak 1.656 perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, seperti PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, serta terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Persentase ini berada di kisaran 98,87%, menandakan bahwa hampir seluruh perusahaan di Kota Batam telah memenuhi standar ketenagakerjaan nasional.



Namun demikian, terdapat tantangan dalam aspek peningkatan kualitas tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi kompetensi mencapai 227.126 dari total 321.824 tenaga kerja, dengan capaian 70,57 persen pada 2024. Persentase ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 90 persen, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penguatan pelatihan dan sertifikasi vokasional. Tingkat produktivitas tenaga kerja pun mengalami fluktuasi signifikan. Pada 2022, capaian hanya sebesar 0,05, jauh di bawah target, meski sempat meningkat menjadi 45,07 di 2023, sebelum kembali menurun ke angka 31,19 pada 2024. Produktivitas dihitung berdasarkan rasio antara PDRB atas dasar harga konstan sebesar 100.370 dan jumlah tenaga kerja 321.824, yang mengindikasikan perlunya peningkatan nilai tambah tenaga kerja.

Sementara itu, indikator penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja menunjukkan tren positif. Pada 2024, sebanyak 20.103 pencari kerja telah berhasil ditempatkan dari total 24.690 orang yang terdaftar, dengan capaian penempatan sebesar 81,47 persen. Peningkatan signifikan ini menggambarkan keberhasilan layanan antar kerja dalam menjembatani kebutuhan dunia kerja dan pencari kerja di wilayah Kota Batam, baik untuk penempatan dalam maupun luar negeri.

Secara umum, capaian indikator urusan ketenagakerjaan Kota Batam mencerminkan sinergi positif antara perencanaan, regulasi perusahaan, serta dukungan layanan penempatan kerja. Ke depan, perlu didorong perbaikan dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja agar selaras dengan dinamika pertumbuhan sektor industri dan jasa di daerah.

Tabel II.39.

Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	90,72	86,79	80,17	70,57
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	NA	52,29	0,05	45,07	31,19



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	NA	100,00	100,00	97,90	98,87
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	NA	61,46	80,24	80,07	81,47

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup konsisten, terutama dalam aspek penanganan korban kekerasan terhadap anak. Seluruh anak korban kekerasan yang berada dalam kewenangan pemerintah kota, berjumlah 216 anak dengan usia di bawah 18 tahun, telah mendapatkan pendampingan oleh instansi terkait, mencerminkan sistem perlindungan anak yang aktif dan responsif.

Sementara itu, dalam hal kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tercatat sebanyak 50 perempuan mengalami kekerasan dari total populasi perempuan sebanyak 638.206 jiwa. Hal ini menghasilkan rasio sebesar 7,83 per 100.000 penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan sistem deteksi dan pencegahan dini, terutama untuk kasus-kasus tersembunyi atau tidak dilaporkan, serta penguatan layanan rehabilitasi dan perlindungan korban.

Dari sisi kebijakan fiskal yang responsif terhadap isu gender, proporsi Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total belanja langsung APBD tercatat sebesar 11,92 persen pada tahun 2024. Dari jumlah total belanja operasi dan modal sebesar Rp 353,63 triliun, alokasi ARG yang digunakan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai Rp275,33 triliun. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, capaian 2024 menunjukkan adanya tren pemulihan komitmen fiskal terhadap pengarusutamaan gender di tingkat daerah. Ke depan, konsistensi penganggaran dan penguatan kapasitas kelembagaan perlu dijaga agar efektivitas pelaksanaan program tetap berkelanjutan.



Tabel II.40.

Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	NA	16,29	13,87	10,39	11,92
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	NA	6,81	5,55	7,03	7,36

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Pangan Kota Batam pada periode 2020–2024 menunjukkan perbaikan dalam aspek ketersediaan cadangan beras/jagung di Kota Batam meskipun belum bisa memenuhi 100% dari target yang dibutuhkan. Dari data terakhir pada tahun 2024, jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebesar 33.230 ton dan hanya tersedia sebanyak 28.773 ton. Dengan pencapaian hanya sebesar 86,59% mencerminkan adanya potensi risiko ketahanan pangan.

Kota Batam yang secara geografis bukan daerah agraris, sangat bergantung pada pasokan dari luar (wilayah lain/pulau lain). Jika cadangan lokal minim, maka ketergantungan pada distribusi dan impor sangat tinggi. Untuk itu kebijakan ke depannya perlunya peningkatan cadangan pangan salah satunya dengan penguatan sistem distribusi dan rantai pasok dari daerah lain.

Tabel II.41.

Indikator Kinerja Urusan Pangan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	NA	171,12	6,12	NA	86,59

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Pertanahan di Kota Batam selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang beragam pada berbagai indikator. Salah satu capaian signifikan terlihat pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan izin lokasi yang diterbitkan, yang mengalami lonjakan dari 0 persen pada tahun 2020–2022 menjadi 100 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya perbaikan signifikan dalam penataan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang.

Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum juga menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, dengan capaian 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menjamin ketersediaan lahan untuk kebutuhan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, sejumlah indikator lainnya menunjukkan kinerja yang masih fluktuatif. Ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal serta ketersediaan tanah untuk masyarakat baru tercapai hanya pada tahun 2023, sementara tahun-tahun sebelumnya berada pada angka nol. Hal serupa juga terjadi pada indikator Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan, yang hanya menunjukkan capaian pada tahun 2021, serta penanganan sengketa tanah garapan yang hanya aktif dilakukan pada tahun yang sama melalui mediasi.

Secara umum, capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada beberapa aspek pertanahan, tantangan utama masih terletak pada konsistensi pelaksanaan dan perencanaan program pertanahan, terutama terkait penyediaan lahan untuk masyarakat, investasi, dan penyelesaian konflik agraria. Perlu adanya upaya penguatan koordinasi antar lembaga, pembenahan data spasial, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan pengelolaan pertanahan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Tabel II.42.

Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	NA	0,00	0,00	0,00	100,00



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	NA	0,00	0,00	0,00	100
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	NA	100	0,00	0,00	0,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	NA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	NA	100	0,00	0,00	0,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 67,60 pada tahun 2022 menjadi 64,86 pada tahun 2024. Pengelolaan sampah sempat menurun drastis dari 98,75 persen pada tahun 2021 menjadi 75,37 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 96,96 persen di tahun 2024, menandakan adanya upaya pemulihan dalam manajemen sampah daerah. Total volume sampah yang dapat ditangani mencapai 419,690.5 ton pada tahun 2024, sedangkan total timbunan sampah di kabupaten/kota berjumlah 432,868.72 ton, mencerminkan volume sampah yang terus dikelola dalam upaya meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan regulasi terkait masih tergolong rendah, meskipun terjadi peningkatan dari 1,31% pada tahun 2021 menjadi 4,32 persen pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa terdapat 14 pelaku usaha yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH, dengan 324 pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan



pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup agar pembangunan tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel II.43.

Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	NA	67,35	67,60	67,34	64,86
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	NA	98,75	75,37	78,68	96,96
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	NA	1,31	1,76	1,45	4,32

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang positif dalam pelayanan dasar administrasi kependudukan. Perekaman KTP elektronik mencapai angka hampir sempurna sejak 2021, dengan capaian 100,02% pada 2021, sedikit menurun di 2022 menjadi 97,48 persen, lalu kembali mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP tercatat sebanyak 935,236 orang, mencerminkan keberhasilan dalam program perekaman identitas penduduk. Cakupan kepemilikan akta kelahiran juga terus meningkat dari 91,08 persen pada 2021 menjadi 97,23 persen di 2024. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran mencapai 408,255 orang, sementara jumlah anak usia 0-18 tahun total adalah 419,899 orang.

Sementara itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat secara bertahap dari 21,74v di 2021 menjadi 58,05 persen di 2024, mencerminkan perhatian yang tumbuh terhadap identitas anak. Pada tahun 2024, terdapat 236,150 anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA, dari total 406,793 anak usia 0-17 tahun.

Di sisi lain, pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sempat mengalami penurunan dari 73,81 persen pada 2021 menjadi 35,48 persen di 2022. Namun, upaya integrasi data kembali menunjukkan hasil positif dengan peningkatan hingga 100% pada 2024. Tercatat bahwa sebanyak 31 perangkat daerah telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan semakin kuat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efisien dan akurat.

Tabel II.44.

Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Perekaman KTP elektronik	NA	100,02	97,48	100,00	100,00
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	NA	21,74	50,39	57,27	58,05
3	Kepemilikan akta kelahiran	NA	91,08	95,54	96,95	97,23
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	NA	73,81	35,48	48,39	100,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Batam selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Terdapat dua indikator utama yang dinilai, yaitu pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri. Pada tahun 2021, kedua indikator tersebut menunjukkan capaian maksimal sebesar 100 persen, menandakan bahwa seluruh target desa tertinggal berhasil dituntaskan dan ada peningkatan status desa menjadi mandiri.

Namun, pada tahun-tahun lainnya, yaitu 2020, 2023, dan 2024, capaian pada kedua indikator tersebut tercatat 0 persen, yang mengindikasikan tidak adanya tambahan desa tertinggal yang dituntaskan maupun peningkatan status desa mandiri. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tidak adanya desa yang masuk dalam kategori tertinggal lagi setelah tahun 2021, atau karena perubahan fokus program serta dinamika penilaian status desa. Secara



keseluruhan, berdasarkan rumus yang digunakan, jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun-tahun tersebut tercatat sebagai 0, yang mencerminkan pencapaian yang maksimal di tahun 2021. Demikian pula, tidak tercatat ada desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun-tahun lainnya.

Meskipun capaian 100 persen pada 2021 merupakan kemajuan signifikan, keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas desa tetap perlu diperhatikan.

Tabel II.45.

Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	NA	0,00	100,00	NA	0,00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	NA	0,00	100,00	NA	0,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Batam pada periode 2020–2024 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan peningkatan layanan keluarga berencana. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) mengalami tren penurunan, dari 2,30 pada tahun 2021 menjadi 2,14 pada tahun 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian jumlah kelahiran. Penurunan ini selaras dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi modern, yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 82,63%, meskipun sedikit menurun menjadi 81,58 persen pada tahun 2024. Jumlah peserta KB aktif modern tercatat sebanyak 163.263, dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tercatat sebanyak 200.123.

Sementara itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) mengalami fluktuasi. Setelah mencatat angka 12,85 persen pada 2021, terjadi lonjakan signifikan pada 2022 sebesar 28,32%, namun kemudian turun kembali menjadi 11,10 persen pada 2024. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani tercatat sebanyak 22,214. Penurunan *unmet need* di akhir periode menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan keluarga berencana dan aksesibilitas alat kontrasepsi. Secara umum, data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan



program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara lebih efektif dari tahun ke tahun.

Tabel II.46.

Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	NA	2,30	2,16	2,16	2,14
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	NA	78,70	82,63	82,18	81,58
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	NA	12,85	28,32	19,74	11,10

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Rasio konektivitas sebagai indikator pengukuran keterhubungan antar wilayah menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 82,40, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 74,90. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 yang hanya mencapai angka 0,61, dan meskipun terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2024 menjadi 0,67, nilai tersebut masih menunjukkan capaian yang jauh di bawah standar konektivitas yang ideal.

Indikator kinerja lalu lintas menunjukkan kecenderungan yang serupa. Capaian tahun 2021 tercatat pada angka 0,33, mengalami peningkatan menjadi 0,65 di tahun 2022 yang mencerminkan adanya intervensi kebijakan atau pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran lalu lintas. Namun, kinerja ini kembali anjlok pada tahun 2023 hingga mencapai 0,00, yang dapat ditafsirkan sebagai stagnasi atau terhentinya program-program pengelolaan lalu lintas. Tahun 2024 memperlihatkan pemulihan ke angka 0,56, namun belum mampu mengembalikan kondisi ke capaian tertinggi sebelumnya. Adapun capaian kinerja daerah pada sub urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.47.

Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	NA	82,40	74,90	0,61	0,67
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	NA	0,33	0,65	0,00	0,56

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Pencapaian pada indikator pertama yaitu Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan adanya lompatan signifikan. Jika pada periode 2021 hingga 2023 persentase OPD yang terhubung dengan jaringan internet Kominfo stagnan pada kisaran 29,54 persen –30,23 persen, maka pada tahun 2024 terjadi peningkatan tajam menjadi 66,67 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur TIK internal pemerintah daerah yang mendukung efisiensi birokrasi. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo tercatat sebanyak 30, dengan total jumlah PD mencapai 45.

Untuk indikator kedua, yaitu Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi, pencapaian sempat mengalami penurunan dari 71,42% (2021) menjadi 64,29 persen pada 2022 dan 2023, namun kembali meningkat ke level 71,43 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menggambarkan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan sistem layanan digital yang mungkin berkaitan dengan kesiapan teknis, SDM, serta integrasi lintas sektor. Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi tercatat sebanyak 10 dari total 14 layanan publik yang ada.

Sementara itu, indikator ketiga yaitu Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dari 68,95 persen di tahun 2021 menjadi 79,69 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan program prioritas pemerintah secara lebih luas dan efektif kepada masyarakat. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik tercatat sebanyak 1.003 orang, dari total penduduk sebanyak 1.259 orang.



Tabel II.48.

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	NA	29,54	30,23	30,23	66,67
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	NA	71,42	64,29	64,29	71,43
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	NA	68,95	76,66	76,82	79,69

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Peningkatan kualitas koperasi dan transformasi usaha mikro menjadi wirausaha merupakan indikator utama penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Selama periode 2021–2024, capaian kinerja menunjukkan tren yang sangat positif. Persentase koperasi berkualitas melonjak tajam dari 5,72 persen (2021) menjadi 93,69 persen (2024), mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan revitalisasi kelembagaan koperasi. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset tercatat sebanyak 263 dari total 308 koperasi aktif.

Sementara itu, persentase usaha mikro yang bertransformasi menjadi wirausaha juga meningkat signifikan dari 56,10 persen menjadi 86,96 persen pada periode yang sama. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tercatat sebanyak 1,247 dari total 1,434 usaha mikro keseluruhan. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pemberdayaan UMKM, khususnya dalam aspek pendampingan usaha dan akses pasar.



Tabel II.49.

Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	NA	5,72	8,56	84,42	93,69
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	NA	56,10	57,03	85,10	86,96

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2023–2024, persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota menunjukkan lonjakan signifikan dari 18,00 persen menjadi 63,00 persen. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan iklim investasi daerah, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan promosi potensi daerah kepada investor. Jumlah investasi di tahun 2024 tercatat sebesar Rp9.841.060.363.975, sedangkan jumlah investasi di tahun sebelumnya (2023) tercatat sebesar Rp15.620.970.368.755. Capaian ini perlu terus diperkuat melalui integrasi layanan berbasis digital dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha.

Tabel II.50.

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	NA	NA	NA	18,00	63,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2021–2024, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren penurunan, dari 0,93 persen menjadi 0,42 persen, yang mengindikasikan perlunya penguatan dukungan kewirausahaan pemuda. Jumlah pemuda berwirausaha di kabupaten/kota tercatat sebanyak 1,451 orang, dari total jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) sebanyak 346,144 orang.



Partisipasi dalam organisasi kepemudaan sempat meningkat signifikan pada 2023, namun menurun kembali di tahun berikutnya, mencerminkan tantangan dalam menjaga keterlibatan aktif generasi muda. Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota tercatat sebanyak 54.502 orang, dari total jumlah pemuda sebanyak 346.144 orang.

Di sisi lain, prestasi olahraga mengalami fluktuasi cukup tajam, dengan capaian tertinggi pada 2022 (454), namun belum konsisten di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya kesinambungan program pembinaan dan fasilitas pendukung olahraga daerah.

Tabel II.51.

Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	0,93	0,55	0,60	0,42
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	7,90	7,84	26,14	15,75
3	Peningkatan prestasi olahraga	NA	9,00	454,00	72,00	181,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sejak tahun 2021 hingga 2024, seluruh Perangkat Daerah (PD) secara konsisten mencapai angka 100 persen dalam penggunaan data statistik sebagai dasar penyusunan perencanaan. Jumlah perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tercatat sebanyak 43, dari total 43 PD yang ada.

Capaian ini mencerminkan budaya kerja yang semakin berbasis data serta efektivitas sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan perencanaan yang lebih terukur, akuntabel, dan berbasis *evidence*. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, yang juga tercatat sebanyak 43 PD. Ke depan,



konsistensi ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui integrasi sistem informasi perencanaan dan penguatan kapasitas SDM pengelola data.

Tabel II.52.

Indikator Kinerja Urusan Statistik Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Keamanan informasi merupakan elemen krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang andal, terpercaya, dan adaptif terhadap risiko digital. Selama periode 2021–2024, tingkat keamanan informasi pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, dari 61,98 pada tahun 2021 menjadi 80,78 pada tahun 2023 dan stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Jumlah nilai per area keamanan informasi tercatat sebanyak 521, dari total 645 area penilaian yang ada. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur keamanan siber, pengendalian akses data, serta implementasi kebijakan perlindungan informasi yang lebih sistematis. Ke depan, tantangan keamanan digital yang semakin kompleks menuntut penguatan berkelanjutan melalui audit sistem, pelatihan SDM, serta adopsi teknologi keamanan informasi terkini.

Tabel II.53.

Indikator Kinerja Urusan Persandian Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	61,98	66,37	80,78	80,78

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024



Pelestarian cagar budaya merupakan upaya strategis dalam menjaga identitas dan warisan sejarah daerah. Selama periode 2021–2024, tingkat pelestarian cagar budaya menunjukkan capaian yang relatif tinggi, dengan persentase 100 persen pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Meskipun sempat menurun menjadi 76 persen pada tahun 2023, capaian tersebut berhasil dipulihkan di tahun berikutnya. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan tercatat sebanyak 24, dari total 24 cagar budaya yang terdata. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian objek cagar budaya melalui kolaborasi lintas sektor, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas pelaku budaya. Ke depan, penguatan regulasi dan pengawasan pelestarian cagar budaya tetap menjadi prioritas untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya lokal di tengah modernisasi.

Tabel II.54.

Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	NA	100,00	100,00	76,00	100,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Peningkatan kegemaran membaca dan pembangunan literasi masyarakat merupakan indikator utama dalam mendukung penguatan sumber daya manusia dan budaya belajar sepanjang hayat. Selama periode 2020–2024, capaian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar 80,24. Meskipun sempat tidak tercatat pada tahun 2020 dan 2022, capaian pada tahun 2021 (67,35) dan 2023 (65,00) menunjukkan adanya konsistensi upaya peningkatan minat baca melalui berbagai program literasi berbasis komunitas dan layanan perpustakaan yang lebih inklusif.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari 18,72 pada tahun 2021, indeks melonjak menjadi 82,13 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya menjadi 50,68 (2023) dan 48,52 (2024). Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program literasi, penyediaan akses bacaan yang merata, serta dukungan terhadap ekosistem literasi digital di masyarakat. Secara umum, capaian urusan perpustakaan menunjukkan adanya potensi yang besar namun memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sarana-prasarana, dan

strategi literasi berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan dan kebudayaan daerah. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.55.

Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	0,00	67,35	0,00	65,00	80,24
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	18,72	82,13	50,68	48,52

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Pengelolaan kearsipan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Selama periode 2021–2024, terdapat peningkatan signifikan pada dua indikator utama yang mencerminkan penguatan fungsi kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.

Indikator pertama, yaitu tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah, menunjukkan tren positif yang konsisten. Dari capaian 52,05 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 69,70 persen (2022), 80,90 persen (2023), dan mencapai 97,50 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kemajuan dalam penataan arsip dinamis dan penguatan sistem informasi kearsipan yang mendukung fungsi dokumentasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban institusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sementara itu, indikator kedua, yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menunjukkan perkembangan walaupun masih berada pada tingkat yang perlu ditingkatkan. Dari kondisi awal 0 persen pada tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan menjadi 16,70 persen (2023) dan 33,00 persen (2024). Capaian ini mencerminkan adanya upaya awal dalam pemulihan dan pelestarian arsip statis yang bernilai sejarah dan strategis bagi kepentingan publik dan negara.

Peningkatan kualitas SDM kearsipan, digitalisasi arsip, dan penguatan regulasi internal perlu menjadi prioritas agar pengelolaan arsip tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan berbasis data. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:



Tabel II.56.

Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	NA	52,05	69,70	80,90	97,50
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	0,00	0,00	16,70	33,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2020–2024, jumlah total produksi perikanan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan berkelanjutan. Capaian produksi meningkat dari 45.629,23 ton pada tahun 2020 menjadi 50.506,27 ton di tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 52.790,00 ton (2023), dan mencapai 53.368,00 ton pada tahun 2024.

Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 53.368.00 ton, dengan target produksi perikanan yang ditetapkan mencapai 49.449,23 ton. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan,



peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Meskipun tren pertumbuhan relatif positif, tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem pesisir, dan keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan, diversifikasi komoditas, digitalisasi rantai pasok, dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Tabel II.57.

Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (ton)	45.629,23	47.764,56	50.506,27	52.790,00	53.368,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selama periode 2021–2024, kinerja pariwisata menunjukkan tren pemulihan yang bertahap pasca terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Indikator pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan pemulihan yang sangat signifikan. Setelah mengalami kontraksi tajam sebesar -99,11 persen pada tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 15.777,71 persen pada tahun 2022 sebagai dampak pembukaan kembali akses internasional, yang kemudian tumbuh lebih stabil sebesar 83,93 persen di tahun 2023 dan 11,22 persen pada 2024. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 133.900 orang, dibandingkan dengan 1.192.931 orang pada tahun 2023.

Sementara itu, pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara juga mulai menunjukkan perbaikan, dari 0,00 persen (2022) menjadi 4,86 persen (2023), dan meningkat lebih lanjut menjadi 15,68 persen pada 2024. Jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota pada tahun 2024 tercatat sebanyak 242.827 orang, dibandingkan dengan 1.548.413 orang pada tahun sebelumnya.



Tingkat hunian akomodasi turut mengalami tren peningkatan dari 60,89 persen (2021) menjadi 82,15 persen pada tahun 2024, dengan jumlah kamar yang terjual mencapai 1.573.066 kamar dari total 1.914.790 kamar yang tersedia.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 0,00 persen (2021) menjadi 1,92 persen pada tahun 2023 dan tetap stabil di 2024. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat konsisten dari 12,3 persen (2021) menjadi 20,87 persen (2024), dengan total realisasi PAD sektor pariwisata pada 2024 mencapai Rp 3.577.538.613.118 dari total realisasi PAD sebesar Rp 1.713.860.159.149,9.

Secara keseluruhan, tren kinerja sektor pariwisata mencerminkan pemulihan yang positif dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan strategi penguatan daya saing destinasi, peningkatan kualitas SDM pariwisata, pemanfaatan digitalisasi promosi, serta pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif dan resilien.

Tabel II.58.

Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	NA	-99,11	15.777,71	83,93	11,22
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	NA	-99,11	0,00	4,86	15,68
3	Tingkat hunian akomodasi	NA	60,89	67,14	81,90	82,15
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	NA	1,4	0,00	1,92	1,92
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	NA	12,3	15,74	18,42	20,87

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024



Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun mengalami fluktuasi yang tajam. Setelah mencatat angka yang sangat tinggi pada tahun 2022 (3007,69), produktivitas menurun drastis pada 2023 (165,28) dan kembali ke tingkat yang relatif rendah pada 2024 (4,69). Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun tercatat sebanyak 25,73 ton dengan luas panen sebesar 548,6 hektar. Lonjakan dan penurunan tajam ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan metode penghitungan, jenis komoditas dominan yang dicatat, atau pergeseran luasan lahan efektif yang dikelola. Fenomena ini menegaskan pentingnya konsistensi data dan penguatan sistem informasi statistik pertanian sebagai dasar perencanaan yang akurat.

Sementara itu, indikator penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan kinerja yang sangat positif. Dari kondisi awal tahun 2021 dengan peningkatan 575 persen, terjadi penurunan signifikan hingga 96 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan keberhasilan dalam program pengendalian dan pencegahan penyakit hewan strategis. Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun 2024 tercatat hanya 1 kasus, dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 30 kasus. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem kesehatan hewan, termasuk pelaksanaan vaksinasi, pemantauan epidemiologi, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan ternak dan keamanan pangan asal hewan.

Konsistensi peningkatan produktivitas pertanian dan stabilitas kesehatan hewan memerlukan dukungan berkelanjutan melalui inovasi teknologi pertanian, penyuluhan, perlindungan petani dan peternak, serta reformasi sistem distribusi dan pasar hasil pertanian.

Tabel II.59.

Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	NA	7	7	7	9
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	NA	-575	-12,96	50,82	96,00

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2021–2024, kinerja sektor perdagangan menunjukkan perkembangan positif meskipun terdapat fluktuasi. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan sempat menurun menjadi 0% pada



2023, namun berhasil mencapai 100 persen di tahun 2024, dengan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan tercatat sebanyak 346, dari total pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota yang juga berjumlah 346. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam sistem perizinan usaha.

Realisasi kinerja pupuk mengalami lonjakan tajam pada 2024 dengan pencapaian 119,76 persen, setelah berada pada tingkat yang sangat rendah di tahun-tahun sebelumnya, menandakan peningkatan efisiensi distribusi. Jumlah realisasi pupuk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 52,550 ton, dengan RDKK sebesar 43,880 ton. Sementara itu, persentase UTTP bertanda tera sah terus meningkat dari 85,92 persen menjadi 95,06 persen, dengan jumlah UTTP yang bertanda tera sah pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8,460 unit. Hal ini mencerminkan penguatan pengawasan metrologi legal untuk menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan.

Tabel II.60.

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	NA	89,61	94,27	0,00	100,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	3,63	0,44	2,02	119,76
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	NA	85,92	86,57	80,00	95,06

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Kinerja sektor perindustrian selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan masih memerlukan penguatan tata kelola. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) tercatat meningkat pada 2024 sebesar 9,66 persen, setelah stagnan di 2023, menandakan mulai pulihnya iklim usaha pasca-pandemi. Jumlah industri kecil dan menengah



pada tahun 2024 tercatat 196 unit, dibandingkan dengan 2029 unit pada tahun sebelumnya.

Pencapaian sasaran pembangunan industri dalam RPIP masih terbatas, hanya tercapai sebagian pada 2022 dan 2024 dengan nilai pencapaian sebesar 1,00, menunjukkan perlunya integrasi perencanaan industri secara lebih konsisten.

Dari sisi pengawasan, persentase hasil pemantauan terhadap IUI dan IPUI menunjukkan penurunan tajam dibanding tahun awal, mengindikasikan menurunnya intensitas pengawasan atau belum optimalnya pelaporan. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan pada 2024 tercatat sebanyak 9 izin, dengan jumlah izin yang dikeluarkan mencapai 508.

Begitu pula dengan pengawasan terhadap kawasan industri, yang anjlok dari 100 persen menjadi 5,56 persen pada 2024. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan terkait dengan kawasan industri tercatat sebanyak 2 izin, dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 36. Meski demikian, tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini mengalami peningkatan, dari 0% pada 2021 menjadi 75 persen pada 2024, mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan data industri daerah.

Tabel II.61.

Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	NA	9,19	8,64	0,00	9,66
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	0,00	1,00	0,00	1,00



No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	100,00	4,09	0,44	1,77
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	100,00	100,00	0,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	NA	100,00	100,00	100,00	5,56
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	0,00	100,00	14,00	75

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kinerja urusan perencanaan dan keuangan menunjukkan perbaikan di beberapa aspek strategis meskipun masih terdapat fluktuasi. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menurun secara bertahap dari 30,80 persen (2020) menjadi 16,56 persen (2024), mencerminkan efisiensi belanja aparatur. Rasio PAD mengalami penurunan signifikan setelah 2021, mengindikasikan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.



Tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP konsisten pada level 3, yang menunjukkan sistem pengendalian intern dan pengawasan telah berada pada level "terdefinisi", namun masih perlu peningkatan menuju level kapabilitas yang lebih tinggi. Rasio belanja urusan pemerintahan umum meningkat tajam sejak 2022, mencerminkan peningkatan fokus belanja non-transfer. Sementara itu, opini laporan keuangan tetap terjaga dengan predikat WTP (100%) dalam empat dari lima tahun terakhir, menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.62.

Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota
Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	30,80	NA	19,56	15,24	16,56
2	Rasio PAD	593,10	687,10	50,43	52,47	47,66
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,00	3,31	3,00	3,00
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	0,00	0,00	0,51	77,08	75,91
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kinerja pengadaan barang/jasa menunjukkan perbaikan pada aspek strategis meskipun masih menghadapi tantangan konsistensi. Persentase proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya konsisten pada angka 0 persen, menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian proyek tepat waktu. Namun, persentase pengadaan dengan metode kompetitif mengalami penurunan dari 152,8 persen (2021) menjadi



45,19 persen (2024), yang menunjukkan perlunya penguatan prinsip transparansi dan efisiensi dalam proses pemilihan penyedia.

Rasio nilai belanja melalui pengadaan juga menurun dari 73,0 persen (2020) menjadi 53,35 persen (2024), mengindikasikan perlunya optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme pengadaan. Di sisi lain, terdapat peningkatan positif pada penggunaan produk dalam negeri serta produk UMKM dan koperasi, dari 6,66 persen (2023) menjadi 12,80 persen (2024), yang mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal melalui belanja pemerintah. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.63.

Indikator Kinerja Urusan Fungsi Pengadaan Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	7,60	152,80	80,76	68,58	45,19
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	73,00	65,99	554,40	54,87	53,35
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	NA	NA	NA	6,66	12,80

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024



Selama periode 2020–2024, kinerja kepegawaian menunjukkan tren peningkatan dalam profesionalisme dan kompetensi aparatur, khususnya di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Rasio pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan menengah/dasar meningkat signifikan dari 33,0% menjadi 84,51% pada 2024, mencerminkan perbaikan kualitas SDM aparatur.

Rasio pegawai fungsional juga menunjukkan pertumbuhan dari 4,60 persen (2020) menjadi 22,25 persen (2024), menandakan pergeseran struktur organisasi ke arah yang lebih berbasis keahlian. Selain itu, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi naik tajam dari 5,91 persen pada 2020 menjadi 74,27 persen di 2024, mencerminkan upaya serius dalam peningkatan kapasitas dan standarisasi kompetensi aparatur sipil negara. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.64.
Indikator Kinerja Urusan Fungsi Kepegawaian Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,00	75,65	78,39	80,83	84,51
2	Persentase pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,60	4,83	21,50	29,54	22,25
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,91	5,11	22,54	49,43	74,27

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2020–2024, pengelolaan keuangan daerah menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Deviasi realisasi belanja terhadap total APBD menurun dari 9,14 persen (2022) menjadi 2,55 persen (2024), menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Hal serupa terlihat pada deviasi realisasi PAD, yang turun signifikan dari 17,74

persen menjadi hanya 0,51 persen di 2024, mencerminkan perencanaan pendapatan yang semakin akurat.

Manajemen aset daerah juga menunjukkan capaian positif dengan tingkat kepatuhan mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024, setelah sempat menurun pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio anggaran sisa terhadap total belanja menurun tajam dari 99,2 persen (2020) menjadi 4,42 persen (2024), menandakan peningkatan dalam ketepatan penggunaan anggaran tahun berjalan dan efisiensi fiskal secara keseluruhan. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.65.

Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,00	0,00	9,14	8,99	2,55
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,00	0,00	17,74	11,37	0,51
3	Manajemen Aset	100,00	0,00	75,00	100,00	100,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	99,20	0,00	5,28	3,93	4,42

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

Selama periode 2020–2024, transparansi tata kelola daerah mengalami peningkatan signifikan. Informasi mengenai sumber daya pelayanan publik yang sebelumnya tidak tersedia, mulai tahun 2023 mencapai 93,66 persen dan meningkat menjadi 97,02 persen pada 2024. Demikian pula, akses publik terhadap informasi keuangan daerah melonjak dari 0 persen menjadi 91,67 persen sejak 2023 dan tetap konsisten di tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip good governance. Adapun data capaian kinerja pada sub urusan ini disajikan dalam tabel berikut:



Tabel II.66.

Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kota Batam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0,00	0,00	0,00	93,66	97,02
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	91,67	91,67

Sumber : LPPD Kota Batam, 2020-2024

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Penerapan pencapaian SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Berikut adalah Indikator yang mencakup Standar Pelayanan Minimum di Kota Batam.

Tabel II.67.

Indikator Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Jenis Pelayanan Dasar
1	Pendidikan	1. pendidikan anak usia dini;
		2. pendidikan dasar;
		3. pendidikan kesetaraan;
2	Kesehatan	4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
		5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
		6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
		7. pelayanan kesehatan balita;
		8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
		9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
		10.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
		11.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
		12.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
		13.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
		14.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;



No	Urusan Pemerintahan Wajib	Jenis Pelayanan Dasar
		15.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 16.virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>);
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2. pelayanan informasi rawan bencana; 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6	Sosial	1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Sumber : Permendagri No 59 Tahun 2021

A. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan adalah ketentuan yang mengatur jenis dan kualitas layanan pendidikan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Indikator SPM di bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan yang akan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merencanakan intervensi yang tepat. Berikut adalah pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan di Kota Batam.

Tabel II.68.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Persen	95,60	94,80	96,40	85,86	96,82
2	Pendidikan Dasar	Persen	99,67	97,40	97,40	91,07	99,20
3	Pendidikan Kesetaraan	Persen	94,65	84,10	55,00	91,72	98,54

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan data capaian SPM bidang pendidikan di Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum menunjukkan tren capaian yang fluktuatif. Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini berada pada kisaran yang cukup baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 96,82 persen, meskipun sempat menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 85,86 persen. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan program pendidikan usia dini, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan faktor adaptasi masyarakat terhadap layanan pendidikan pasca-pandemi. Sementara itu, indikator Pendidikan Dasar cenderung stabil di atas 97 persen, kecuali pada tahun 2023 yang turun menjadi 91,07 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,20 persen.

Indikator Pendidikan Kesetaraan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, di mana pada tahun 2022 realisasinya menurun drastis menjadi 55 persen. Namun kondisi ini dapat segera diatasi melalui intervensi program yang tepat, sehingga capaian meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 91,72 persen dan 98,54 persen. Pada tahun 2024 pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini di targetnya jumlah yang harus dilayani/dipenuhi masing-masing 16.157 jiwa, 196.092 jiwa serta 6.481 jiwa sedangkan realisasi pada tahun 2024 pada pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan masing-masing sebesar 16.157 jiwa, 196.092 jiwa, serta 6.481 jiwa. Fluktuasi capaian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan program pendidikan kesetaraan. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan, serta optimalisasi program berbasis kebutuhan masyarakat untuk memastikan layanan pendidikan dasar dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh warga Kota Batam.



B. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Pemenuhan SPM kesehatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Indikator SPM bidang kesehatan berfungsi sebagai alat ukur capaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, merumuskan program, serta menentukan arah intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Tabel II.69.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	89,72	90,80	89,00	88,34	99,76
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	91,02	91,20	88,08	90,77	97,32
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	88,21	86,90	86,37	89,19	98,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	58,91	72,60	85,73	90,07	98,09
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	42,92	54,30	95,32	97,76	97,41
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	38,74	68,80	84,20	100	97,68
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	26,40	32,10	66,06	81,72	89,20
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	34,90	52,80	89,85	100,00	100,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	73,55	86,50	95,54	100,00	99,67
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	68,62	68,20	87,11	100,00	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	26,66	39,00	95,79	95,58	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persen	60,97	53,30	93,27	95,62	100,00

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan data capaian SPM bidang kesehatan Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada hampir seluruh jenis layanan. Sebagian besar indikator mengalami lonjakan capaian setelah tahun 2021, utamanya pada pelayanan kesehatan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga pelayanan bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus, yang bahkan mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Meski sempat mengalami capaian yang rendah pada awal periode, khususnya pada layanan kesehatan usia lanjut dan orang terduga tuberkulosis, capaian indikator tersebut mampu meningkat tajam di tahun-tahun berikutnya, menandakan efektivitas kebijakan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Tren pencapaian yang positif ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pencapaian 100 persen pada beberapa indikator menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan semakin merata. Meski demikian, tantangan tetap perlu diwaspadai, terutama dalam menjaga stabilitas capaian layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit menular. Ke depan, kolaborasi lintas sektor, penguatan layanan primer berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian SPM kesehatan di Kota Batam.

C. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar terkait infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini, SPM pekerjaan umum meliputi pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari serta pelayanan pengolahan air limbah domestik. Indikator SPM di bidang ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan lingkungan dan kelayakan hidup masyarakat. Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui capaian layanan yang sudah ada, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan intervensi yang diperlukan.

Tabel II.70.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	41,62	43,85	91,84	96,89	100,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	10,74	12,16	94,97	96,34	100,00

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan capaian SPM bidang pekerjaan umum Kota Batam tahun 2020-2024, kedua indikator menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada awal periode 2020-2021, capaian kedua indikator masih tergolong rendah, dengan penyediaan kebutuhan pokok air minum hanya sebesar 41,62 persen dan 43,85 persen, serta pengolahan air limbah domestik baru mencapai 10,74 persen dan 12,16 persen. Namun, peningkatan yang pesat terjadi mulai tahun 2022 hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024 untuk kedua indikator tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam meningkatkan akses layanan dasar di bidang pekerjaan umum, khususnya dalam penyediaan air minum yang layak dan pengelolaan air limbah yang baik, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

D. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Pelayanan ini difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Indikator SPM bidang perumahan rakyat digunakan untuk memberikan gambaran capaian layanan dasar tersebut, sehingga dapat menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan intervensi program yang efektif untuk menjamin perlindungan hak atas tempat tinggal yang aman dan sehat.

Tabel II.71.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang
Perumahan Rakyat Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	0,00	NA	79,31	97,14	100,00
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,00	NA	82,57	100,00	100,00

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan data capaian SPM bidang perumahan rakyat Kota Batam tahun 2020-2024, terdapat peningkatan yang signifikan dari awal periode pelaksanaan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian kedua indikator masih 0 persen, menunjukkan bahwa pelayanan belum optimal terlaksana. Namun mulai tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, dengan capaian sebesar 79,31 persen untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, dan 82,57 persen untuk fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat relokasi. Puncaknya, pada tahun 2023 dan 2024 capaian kedua indikator berhasil mencapai 100 persen. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak, sekaligus menjadi komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

E. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang Trantibum Linmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) adalah kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. SPM ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan yang konsisten dan berkualitas dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ketertiban dan perlindungan.

Tabel II.72.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	98,09	95,44
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	80	NA	NA	82,86	100,00
3	Kesiapan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	73,60	NA	NA	89,85	100,00
4	Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	39,35	NA	NA	NA	100,00
5	Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persen	33,33	NA	71,34	98,51	100,00

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan data capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum capaian layanan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum selalu mencapai 100 persen sejak 2020 hingga 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 95,44 persen pada tahun 2024. Sementara itu, capaian pada pelayanan kesiapsiagaan dan evakuasi korban bencana mengalami peningkatan bertahap dari capaian awal yang masih rendah pada tahun 2020, seperti kesiapan terhadap bencana yang awalnya sebesar 73,60 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2024. Capaian evakuasi korban bencana dan korban kebakaran juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan kedua indikator berhasil mencapai 100 persen di akhir periode.

Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pelayanan yang tanggap dan responsif terhadap potensi ancaman bencana maupun gangguan ketertiban umum. Meski sebagian indikator sempat mengalami capaian yang rendah di awal periode, namun melalui intervensi program yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, capaian indikator tersebut dapat terus ditingkatkan. Ke depan, upaya menjaga konsistensi pencapaian, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan ketertiban umum menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kota Batam.



F. Capaian SPM Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesejahteraan sosial yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Layanan ini meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana. Indikator SPM bidang sosial digunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja pelayanan sosial, sekaligus sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Tabel II.73.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial
Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persen	NA	100,00	97,33	100,00	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen	NA	50	97,33	100,00	100,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persen	NA	100,00	96,00	96,92	100,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	216 PMKS	100,00	95,44	96,67	100,00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	68,06	100,00	100,00

Sumber: LPPD Kota Batam, 2020-2024

Berdasarkan capaian SPM bidang sosial Kota Batam tahun 2020-2024, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama pada tahun-tahun terakhir periode. Pada awal periode, beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang rendah, seperti pada rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang baru mencapai 50 persen di tahun

2021, serta perlindungan sosial saat tanggap darurat yang sempat turun menjadi 68,06 persen pada tahun 2022. Namun capaian indikator tersebut mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Capaian yang tinggi secara konsisten juga terlihat pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial.

Kondisi ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam menjamin hak dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Meskipun sempat mengalami fluktuasi capaian pada pertengahan periode, keberhasilan pencapaian 100 persen pada tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan telah berjalan efektif. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan kesinambungan program pelayanan sosial, meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan sosial, serta memperkuat sinergi dengan berbagai *stakeholder* agar perlindungan sosial di Kota Batam dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menyeluruh.

2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Dalam lingkup ekonomi Kota Batam masih bergantung pada sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa. Hal ini menuntut strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan antisipatif terhadap isu-isu perekonomian.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu Kota Batam merujuk pada pendataan dan hasil keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batam selama periode waktu sebelumnya, yaitu pada periode 2020 - 2024. Hal ini mencakup seluruh informasi terkait dengan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas yang terkait dengan Pemerintah Kota Batam selama periode tertentu di masa lampau. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk melihat pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan menyajikan kinerja keuangan masa lalu Kota Batam, dapat diberikan gambaran tentang pengelolaan sumber daya keuangan di Kota Batam dalam periode sebelumnya. Bab ini akan mencakup informasi terkait pendapatan pemerintah daerah, alokasi dana, dan pemenuhan kewajiban keuangan daerah, sehingga dapat ditunjukkan perkembangan struktur keuangan daerah dari waktu ke waktu untuk menjelaskan kinerja keuangan Kota Batam.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kota Batam terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang didalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah mencakup semua hak yang dimiliki oleh Daerah yang dapat meningkatkan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa), dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah merupakan bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berpengaruh besar terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Tabel II.74.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Batam Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)

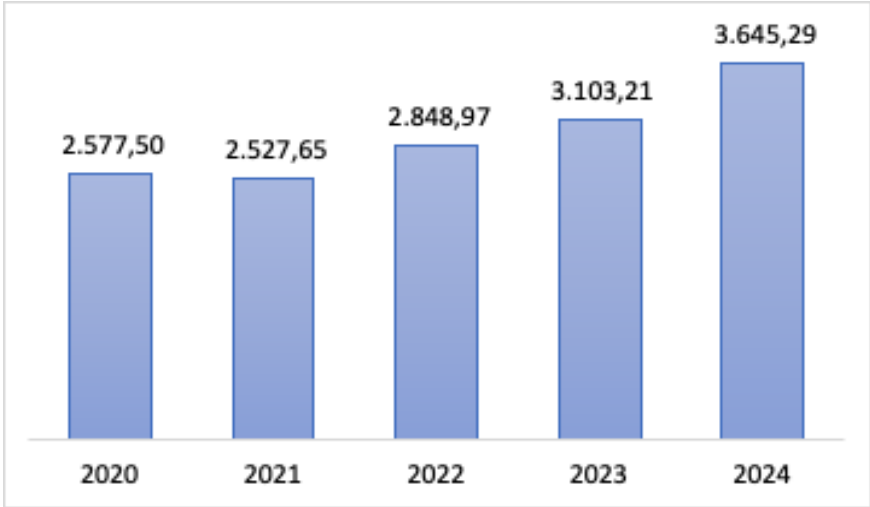
Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2020	2.654,95	2.577,50	97,08
2021	2.668,29	2.527,65	94,73
2022	3.090,76	2.848,97	92,18
2023	3.287,92	3.103,21	94,38
2024	3.730,19	3.645,29	97,72

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan realisasi pendapatan daerah Kota Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sudah di atas 90 persen. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 97,08 persen dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 2.577,50 miliar. Di tahun 2024 anggaran pendapatan daerah Kota Batam sebesar 3.730,19 miliar dengan realisasi sebesar 3.645,29 miliar atau sebesar 97,72 persen.

Gambar II.32.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

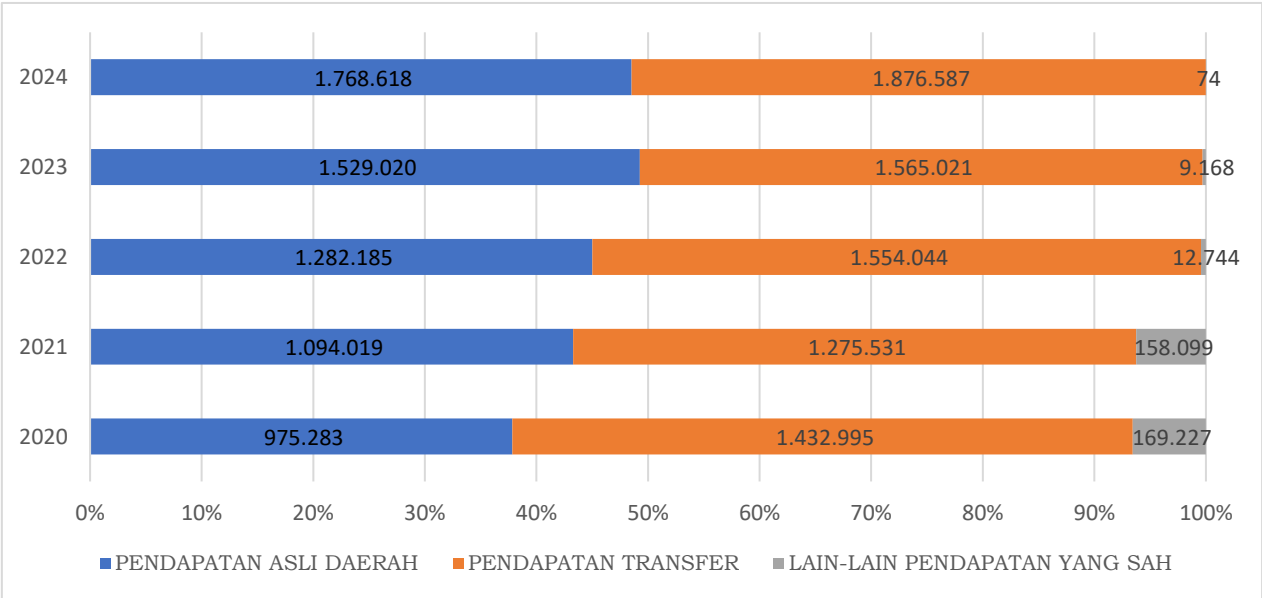


Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kota Batam terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,29 persen di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp2,577 triliun menjadi Rp3,645 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer dan PAD.

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif cukup signifikan di mana pertumbuhan PAD sebesar 16,04 persen dan pendapatan transfer sebesar 6,97 persen per tahun. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar -85,56% dari Rp169,22 miliar menjadi hanya Rp 73,55 miliar yang disebabkan turunnya sumber pendapatan hibah.

Gambar II.33.
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Tabel II.75.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Jumlah (dalam Miliar)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
I	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1	Pajak daerah	755,88	796,65	1.033,98	1.226,14	1.407,04
1.2	Retribusi daerah	92,62	95,81	94,66	140,50	169,74
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,60	12,65	10,38	10,21	7,94
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118,18	188,91	143,17	152,18	183,90
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	975,28	1.094,02	1.282,19	1.529,02	1.768,62
2	PENDAPATAN TRANSFER					
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana perimbangan					
2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	297,08	209,46	263,11	206,53	300,16

No	Uraian	Jumlah (dalam Miliar)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	629,85	626,20	618,06	689,83	819,54
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	251,29	201,4	379,25	370,36	407,81
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.178,22	1.032,05	1.260,42	1.266,72	1.527,50
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya					
2.2.1	DID/Insentif Fiskal	47,40	24,02	25,78	18,99	11,73
2.2	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	47,40	24,02	25,78	18,99	11,73
2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
2.3.1	Bagi hasil	-	219,46	-	-	327,66
2.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi	205,38	-	262,62	279,30	9,69
2.3.3	Bagi hasil lainnya	2,00	-	-	-	

No	Uraian	Jumlah (dalam Miliar)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
2.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	-	-	5,22	-	
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	207,38	219,46	267,84	279,30	337,35
	Total Pendapatan Transfer	1.432,99	1.275,53	1.554,04	1.565,02	1.876,58
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
3.1	Pendapatan hibah	169,22	0,03	-	-	
3.2	Dana darurat	-	-	-	-	
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	158,07	12,74	9,17	0,08
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	169,22	158,10	12,74	9,17	0,08
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.577,50	2.527,65	2.848,97	3.103,21	3.645,29

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp2.577,50 miliar. Lalu, capaian realisasi pendapatan daerah Kota Batam mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp 2.527,65 miliar. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Kota Batam mengalami peningkatan menjadi Rp 2.848,97 miliar dan terus meningkat di tahun 2023 dengan capaian sebesar Rp 3.103,21 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 3.645,29 miliar. Pada tahun 2025 pendapatan daerah Kota Batam diproyeksikan sebesar Rp 3.961,01 miliar.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kinerja keuangan daerah perlu melihat kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah (kabupaten/kota) dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar (khususnya provinsi dan nasional). Dalam konteks pemerintahan daerah (kabupaten/kota), ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.76.

Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id



Derajat otonomi fiskal diukur menggunakan pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah. Kondisi kemandirian keuangan daerah Kota Batam berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami tren positif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Persentase realisasi PAD Kota Batam terhadap Pendapatan mengalami peningkatan selama periode 2020 - 2024. Derajat otonomi fiskal tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 49,27 persen. Kemudian capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,75 persen pada tahun 2024 menjadi 48,5 persen. Meskipun menurun, kemampuan keuangan Kota Batam menunjukkan predikat baik. Adapun perkembangan DOFD Kota Batam periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel II.77.

Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pendapatan Daerah Kota Batam, 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	975.283.123.576	2.577.504.994.815	37,84
2	2021	1.094.019.332.635	2.527.649.538.976	43,28
3	2022	1.282.185.392.071	2.848.972.905.176	45,01
4	2023	1.529.020.059.423	3.103.208.245.107	49,27
5	2024	1.768.618.582.165	3.645.287.633.271	48,52
Rata-Rata				44,78

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diidentifikasi seperti pada tabel berikut

Tabel II.78.

Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
2020-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pajak Daerah	755,88	796,65	1.033,98	1.226,14	1.407,05
Realisasi Retribusi Daerah	92,62	95,81	94,66	140,50	169,74
Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	(19,11)	5,39	29,79	18,58	14,75
Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	2,33	3,44	(1,20)	48,42	20,81

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam,2025

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pajak daerah Kota Batam dalam Peraturan Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT (1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan); d. Pajak Reklame; e. Pajak MBLB; f. Pajak Sarang Burung Walet; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB. Pajak Daerah Kota Batam pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp 934,46 miliar menjadi Rp 755,88 miliar. Setelah itu, pada tahun 2021 pajak daerah Kota Batam mengalami peningkatan menjadi Rp 796,65 miliar dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp 1.407,05 miliar.

c. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Capaian realisasi retribusi daerah Kota Batam mengalami fluktuasi yang cukup meningkat. Peningkatan capaian realisasi retribusi daerah terlihat dari tahun 2020 sebesar Rp 92,62 miliar menjadi Rp 169,74 miliar di tahun 2024.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah. Karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi, maka wajar bila perkembangan sumber pendapatan ini relatif lambat dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya.

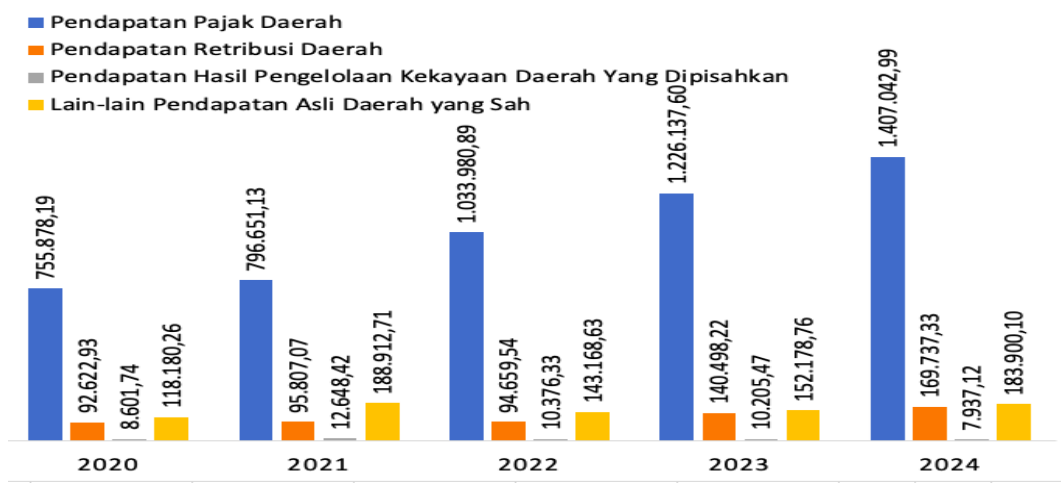
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah mencakup antara lain: (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) hasil pengelolaan dana bergulir; (e) pendapatan bunga; (f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; (g) penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (h) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; (i) pendapatan denda pajak daerah; (j) pendapatan denda retribusi daerah; (k) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; serta (l) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun secara umum, PAD mengalami peningkatan dari Rp1,12 triliun pada 2020 menjadi Rp1,41 triliun pada 2024. Kontributor utama adalah Pendapatan Pajak Daerah, yang terus meningkat dan mendominasi struktur PAD, mencapai Rp1,19 triliun pada 2024. Sementara itu, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan fluktuasi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sempat nihil di 2023 sebelum kembali muncul di 2024.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.34.
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita tahu bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kota Batam. Secara rata-rata kontribusi Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 78 persen per tahun terutama dari pajak BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak listrik dan pajak hiburan. Kemudian Lain-lain PAD yang sah berkontribusi rata-rata 12 persen per tahun atau dari BLUD. Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 9 persen per tahun, dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 1 persen per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah dengan kategori sangat baik maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan

dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.35.
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)

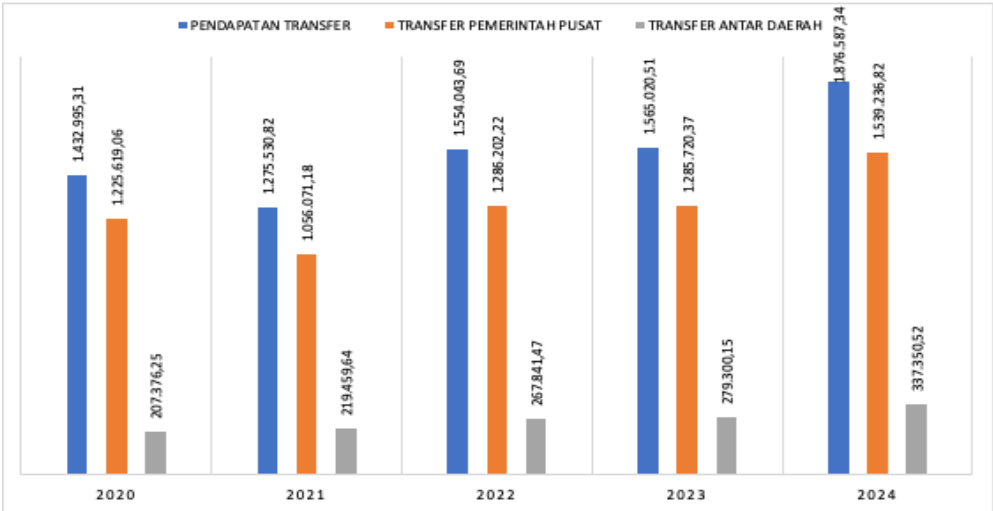


Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif fiskal dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.36.
Komponen Pendapatan Transfer Kota Batam
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

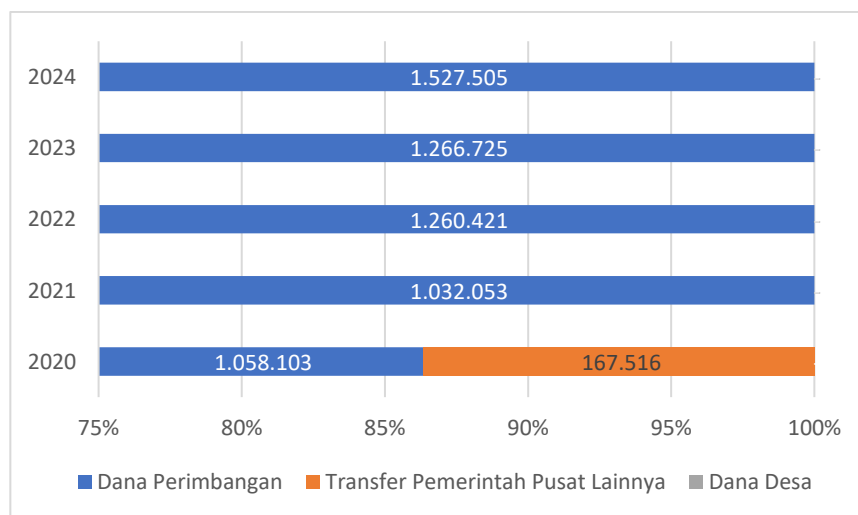


Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kota Batam mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,97 persen dari Rp1,432 triliun (2020) menjadi Rp 1,876 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024 karena relatif tingginya DAK, DAU, dan pendapatan transfer antar daerah dari sumber Bagi Hasil pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 83,05 persen Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 97,92 persen adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari Dana Insentif Daerah.

Gambar II.37.

**Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Batam
Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)**



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

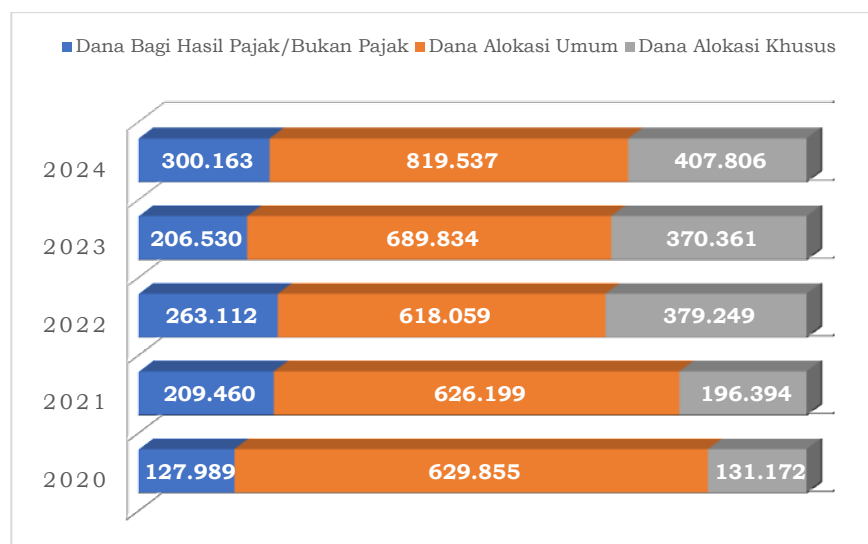
Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,61 persen dari Rp 1,058 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,527 triliun di tahun 2024. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 53 persen kemudian DAK sebesar 23 persen, DBH Pajak dan Bukan Pajak sebesar 24 persen.

Gambar II.38.

Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Gambar II.39.

Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kota Batam Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

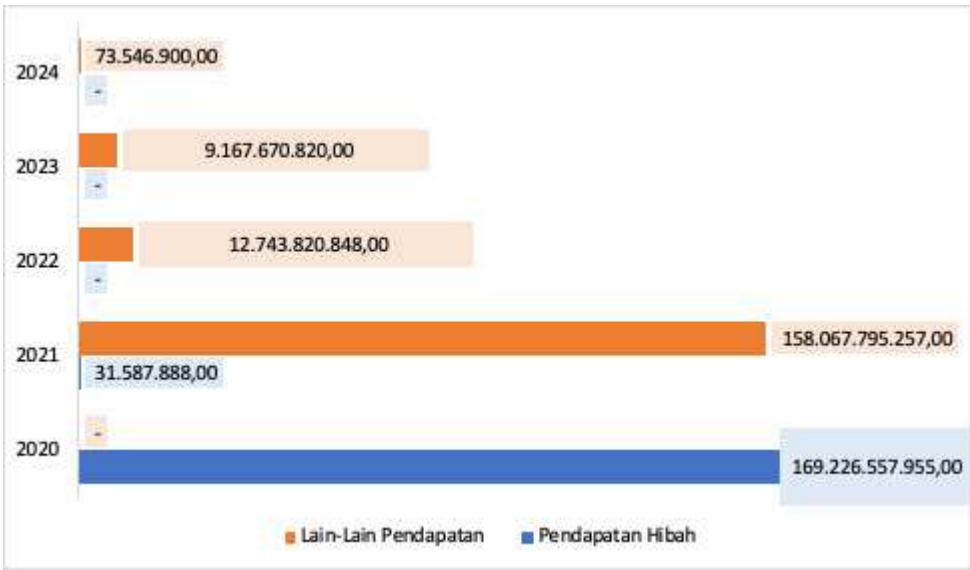
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang menurun cukup

signifikan dari Rp169,22 miliar (2020) menjadi hanya Rp 73,55 juta (2024). Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar Rp 169,22 miliar. Jika dilihat lebih detail dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp169,22 miliar (2020) menjadi Rp 0 sejak tahun 2022 hingga saat ini. Sementara sumber pendapatan lainnya mengalami penurunan dari dari Rp158,07 miliar (2021) menjadi Rp 73,55 juta (2024).

Gambar II.40.
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.

- d. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- e. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak seperti pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dan penerimaan lainnya.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- g. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

B. Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Batam

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

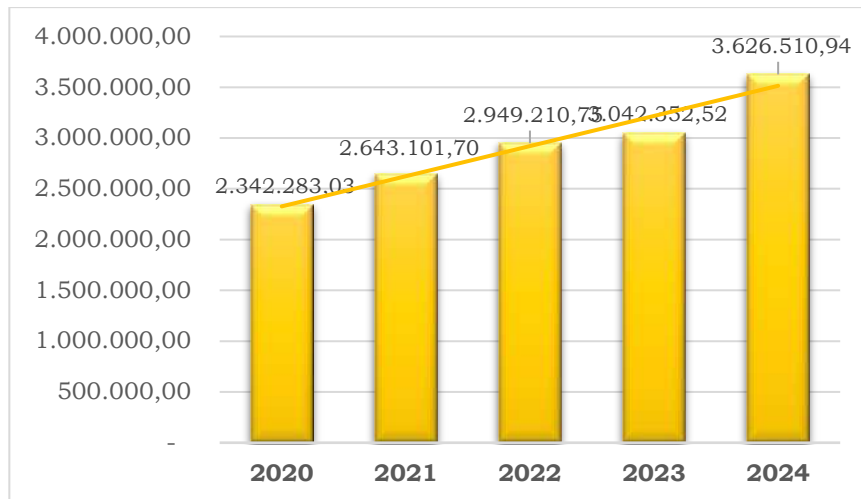
4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) dalam tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,51 persen per tahun. Realisasi Belanja Daerah di tahun 2020 mencapai Rp2,34 triliun terus mengalami kenaikan di tahun 2024 (Rp3,63 triliun).

Gambar II.41.

Perkembangan Belanja Kota Batam Tahun 2020-2024
(Juta Rupiah)



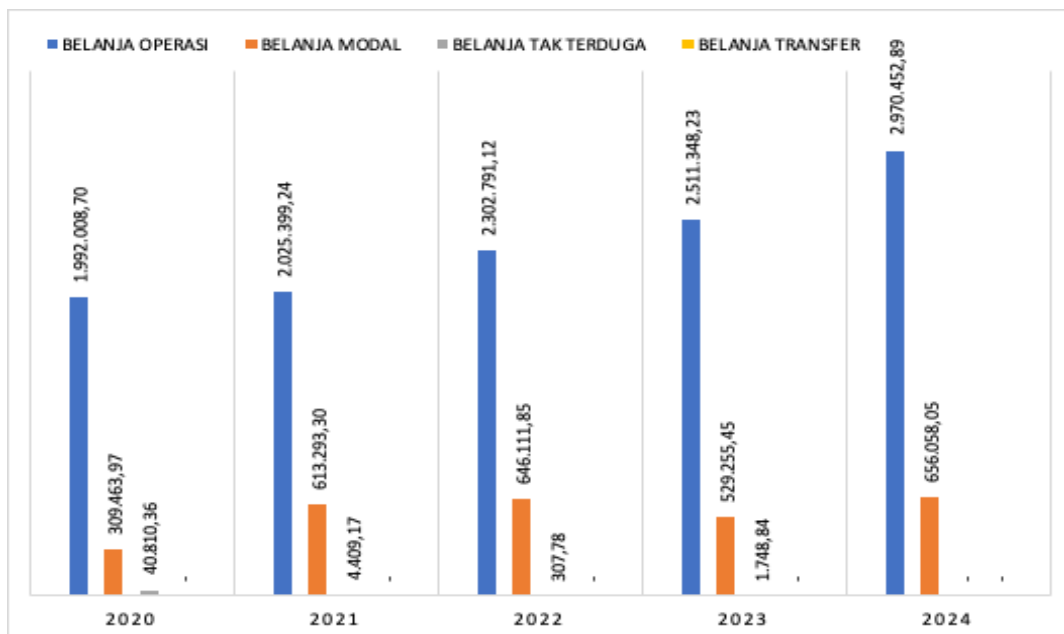
Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat dan hanya belanja tak terduga yang trennya menurun cukup drastis yaitu dari Rp40,81 miliar (2020) menjadi Rp 0 (2024). Belanja yang mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi sebesar 10,68 persen, dan Belanja Modal sebesar 27,35 persen. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 81 persen Belanja Daerah

digunakan untuk belanja operasi, kemudian 19 persen digunakan untuk belanja modal, dan kurang dari 1 persen digunakan untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Gambar II.42.

**Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kota Batam
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

1. Belanja Operasi

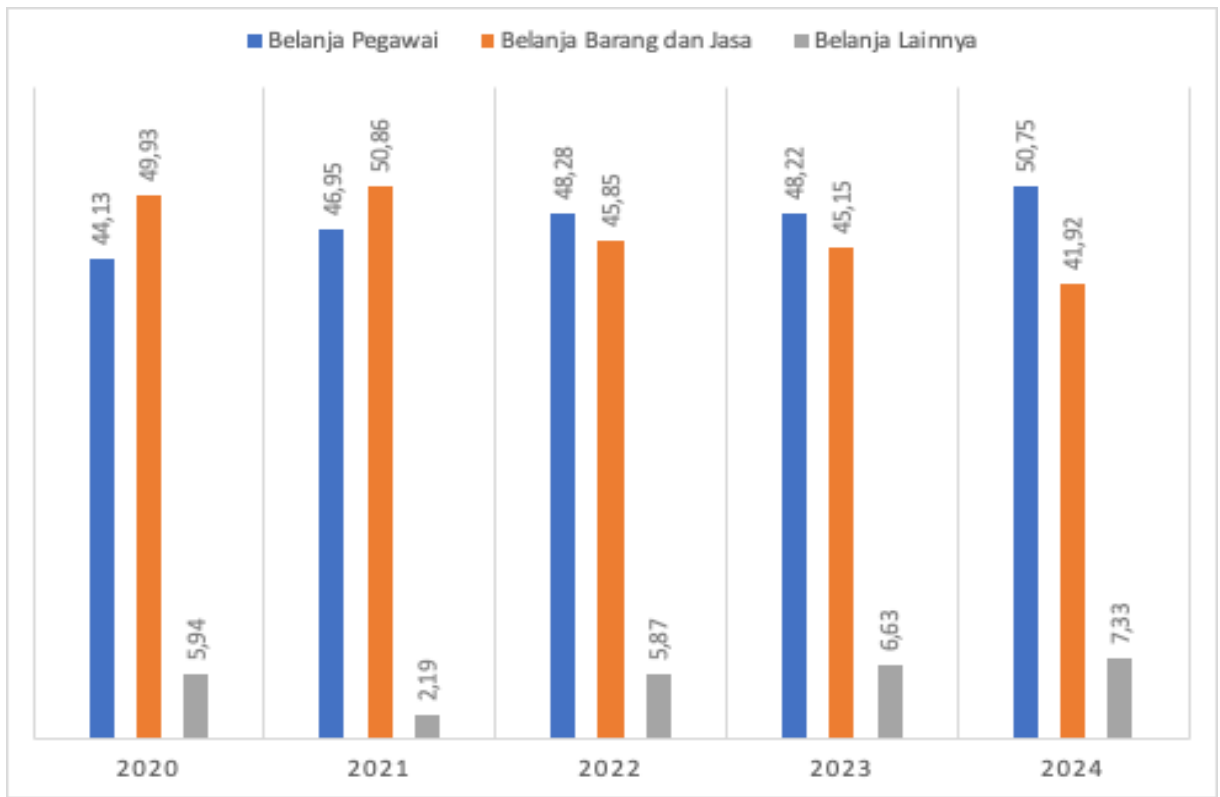
Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kota Batam telah mengalami pertumbuhan rata-rata 10,51 persen per tahun dari Rp1,992 triliun (2020) menjadi Rp 2,970 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 879,06 Miliar atau 44,13 persen dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus meningkat hingga mencapai 50,75 persen di tahun 2024 atau sebesar Rp 1,508 Triliun. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus menurun setiap tahun dari Rp 879,06 Miliar atau sebesar 49,93 persen (2020) menjadi Rp 1,245 Triliun atau berkontribusi 41,92 persen (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 10 persen dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 7,33 persen atau sebesar Rp 217,74 Miliar.

Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka belanja pegawai ditargetkan di tahun 2027 paling besar adalah 30 persen. Untuk itu kondisi peningkatan

nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian karena agar selain dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut juga agar ke depan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.43.

Komposisi Struktur Belanja Operasi Kota Batam
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

2. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kota Batam mengalami tren naik 20,67 persen per tahun dari Rp 309,46 miliar (2020) menjadi Rp 656,05 miliar (2024). Belanja tanah tidak pernah terealisasi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan belanja modal lainnya ada yang mengalami pertumbuhan dan mengalami penurunan yaitu Belanja Peralatan dan Mesin turun 0,48 persen per tahun. Belanja Bangunan dan Gedung meningkat signifikan yaitu 28,68 persen per tahun, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tumbuh 25,23 persen per tahun dan Belanja Aset Tetap Lainnya tumbuh 6,11 persen per tahun.

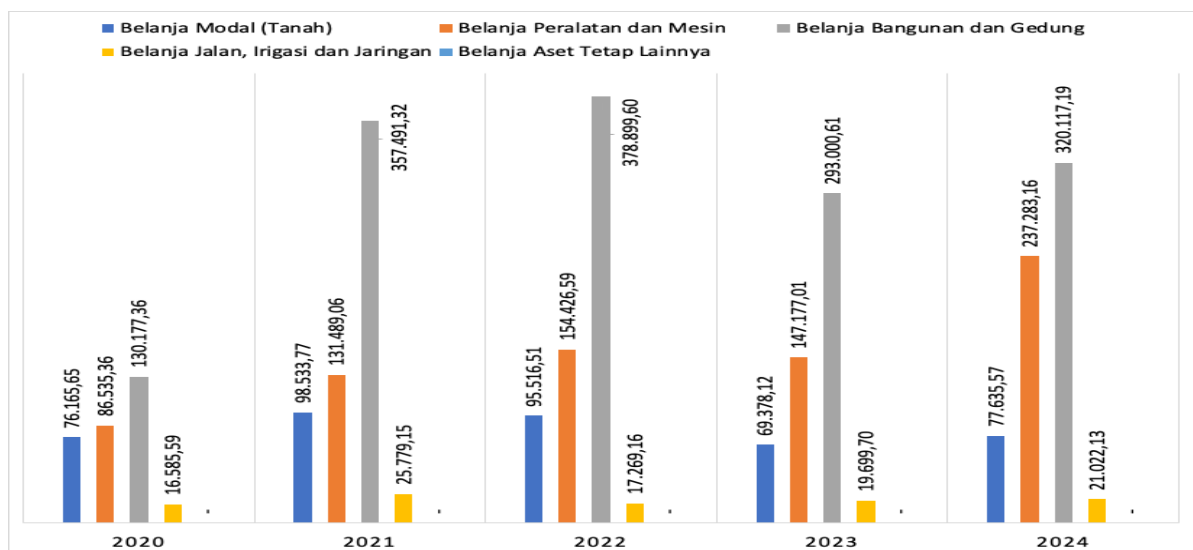
Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta

membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang seperti di kawasan *hinterland*.

Gambar II.44.

Perkembangan Struktur Belanja Modal Kota Batam

Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

3. Belanja Tidak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tidak terduga Kota Batam hanya terjadi di tahun 2020 hingga 2023 yang sebesar Rp40,81 miliar dan Rp 1,748 miliar di tahun 2023. Belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2021 dan 2022 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp 115,45 miliar dan Rp100,24 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SILPA yang dapat digunakan di tahun 2021 dan 2022 yang secara berturut-turut sebesar Rp 270,60 miliar dan Rp 155,15 miliar. Adapun tahun 2020, 2023, dan 2024 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan

efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) **Perencanaan Anggaran yang Cermat:** Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerjasama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 5) **Pengembangan Pendapatan Alternatif:** Mencari sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan anggaran belanja, Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) **Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.79.

Realisasi Belanja Daerah Kota Batam, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	BELANJA					
1	BELANJA OPERASI					
1.1	Belanja Pegawai	Rp 879,06	Rp 950,96	Rp 1.111,74	Rp 1.211,06	Rp 1.507,62
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 994,65	Rp 1.030,04	Rp 1.055,78	Rp 1.133,84	Rp 1.245,09
1.3	Bunga	-	-	-	-	-
1.4	Subsidi	-	-	-	-	-
1.5	Hibah	Rp 118,29	Rp 43,82	Rp 128,12	Rp 166,26	Rp 217,27
1.6	Bantuan Sosial	Rp 0,02	Rp 0,58	Rp 7,15	Rp 0,18	Rp 0,46
	Jumlah Belanja Operasi	Rp 1.992,01	Rp 2.025,40	Rp 2.302,79	Rp 2.511,35	Rp 2.970,45
2	BELANJA MODAL					
2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 76,16	Rp 98,53	Rp 95,52	Rp 69,38	Rp 77,63
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp 86,54	Rp 131,49	Rp 154,43	Rp 147,18	Rp 237,28
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 130,18	Rp 357,49	Rp 378,90	Rp 293,00	Rp 320,11
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 16,59	Rp 25,78	Rp 17,27	Rp 19,70	Rp 21,02
	Jumlah Belanja Modal	Rp 309,46	Rp 613,29	Rp 646,11	Rp 529,26	Rp 656,05
3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
3.1	Belanja Tidak Terduga	Rp 40,81	Rp 4,41	Rp 0,31	Rp 1,75	Rp 0
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 40,81	Rp 4,41	Rp 0,31	Rp 1,75	
4	BELANJA TRANSFER					
4.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-
4.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	Rp 2.342,28	Rp 2.643,10	Rp 2.949,21	Rp 3.042,35	Rp 3.626,51

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

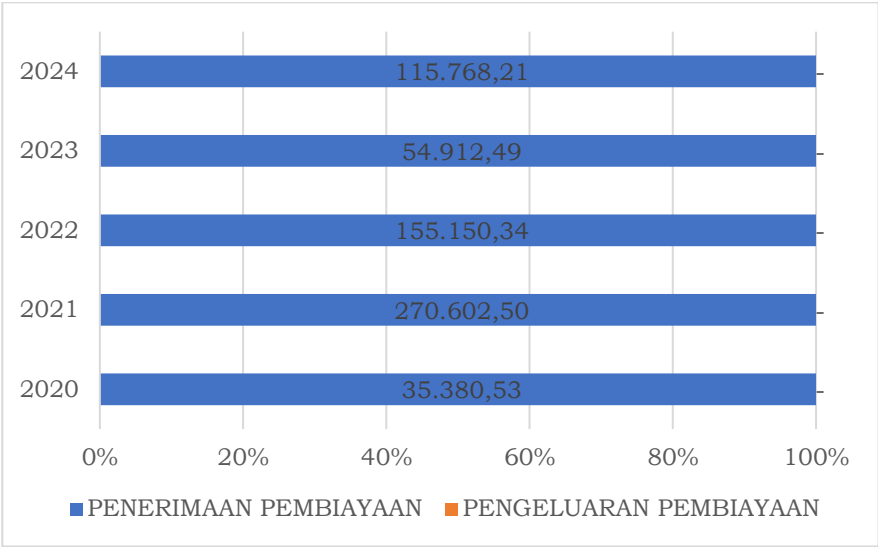
Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja daerah Kota Batam tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Realisasi belanja daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 2.342,28 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp 3.626,51 miliar.

C. **Pembiayaan**

Untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang realisasi pengeluaran pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlanjutan keuangan daerah, perlu dipahami seberapa besar pengeluaran pemerintah yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi menggunakan surplus anggaran yang ada. Pengeluaran pembiayaan, bersama dengan belanja daerah, merupakan komponen penting dari pengeluaran daerah yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu wilayah. Dengan demikian, data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam selama lima tahun terakhir dan pertumbuhannya menjadi landasan penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan daerah.

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 34,50 persen per tahun dari Rp 35,38 miliar (2020) menjadi Rp 115,76 miliar (2024). Menurunnya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SILPA.

Gambar II.45.
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kota Batam
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.80.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.577.504.994.815,32	2.527.649.538.975,96	2.848.972.905.176,25	3.103.208.245.106,79	3.645.278.431.756,19
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	975.283.123.576,32	1.094.019.332.634,96	1.282.185.392.071,25	1.529.020.059.422,79	1.768.618.582.165,19
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	755.878.193.409,76	796.651.133.373,17	1.033.980.891.080,63	1.226.137.604.182,90	1.407.050.918.403,15
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	92.622.927.690,00	95.807.067.976,33	94.659.540.732,32	140.498.218.797,00	169.736.535.405,50
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.601.742.730,00	12.648.420.047,00	10.376.332.794,00	10.205.472.833,00	7.937.122.231,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.180.259.746,56	188.912.711.238,46	143.168.627.464,30	152.178.763.609,89	183.894.006.125,54
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.432.995.313.284,00	1.275.530.823.196,00	1.554.043.692.257,00	1.565.020.514.864,00	1.876.587.339.561,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.225.619.062.683,00	1.056.071.178.732,00	1.286.202.223.479,00	1.285.720.365.569,00	1.539.236.820.300,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.178.222.930.683,00	1.032.052.817.732,00	1.260.420.763.479,00	1.266.725.077.569,00	1.527.505.163.300,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	297.076.594.012,00	209.459.660.599,00	263.112.281.947,00	206.530.062.702,00	300.162.975.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	629.854.829.000,00	626.199.396.000,00	618.059.165.098,00	689.833.897.919,00	819.536.519.228,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	251.291.507.671,00	196.393.761.133,00	379.249.316.434,00	370.361.116.948,00	407.805.669.072,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	47.396.132.000,00	24.018.361.000,00 -	25.781.460.000,00 -	18.995.288.000,00-	11.731.657.000,00-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	47.396.132.000,00	-	-	-	-
	Dana Insentif Daerah (DID)		24.018.361.000,00	25.781.460.000,00		
	Insentif Fiskal				18.995.288.000,00	11.731.657.000,00
1.2.1.4	Dana Desa	-	-	-	-	-
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	207.376.250.601,00	219.459.644.464,00	267.841.468.778,00	279.300.149.295,00	337.350.519.261,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil		219.459.644.464,00	262.622.068.778,00	279.300.149.295,00	327.657.019.261,00



No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	205.376.250.601,00				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.000.000.000,00				
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	5.219.400.000,00	-	9.693.500.000,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	5.219.400.000,00		-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-		-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	169.226.557.955,00	158.099.383.145,00	12.743.820.848,00	9.167.670.820,00	73.546.900,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	169.226.557.955,00	31.587.888,00	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	158.067.795.257,00	12.743.820.848,00	9.167.670.820,00	73.546.900,00
2	BELANJA	2.342.283.027.037,71	2.643.101.703.752,08	2.949.210.753.164,75	3.042.352.524.490,24	3.626.510.938.848,04
2.1	BELANJA OPERASI	1.992.008.701.074,55	2.025.399.239.140,74	2.302.791.124.118,46	2.511.348.234.926,24	2.970.452.890.070,90
2.1.1	Belanja Pegawai	879.057.813.329,00	950.960.936.070,07	1.111.738.363.056,00	1.211.060.746.904,60	1.507.622.963.359,40
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	994.646.428.151,62	1.030.035.069.731,67	1.055.782.368.607,46	1.133.843.954.991,64	1.245.091.204.994,50
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	118.288.889.593,93	43.823.613.339,00	128.121.814.080,00	166.260.083.030,00	217.277.198.717,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.570.000,00	579.620.000,00	7.148.578.375,00	183.450.000,00	461.523.000,00
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	309.463.968.545,16	613.293.295.304,84	646.111.854.046,29	529.255.447.014,00	656.058.048.777,14
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.165.649.899,89	98.533.772.372,19	95.516.510.332,00	69.378.124.709,00	77.635.573.697,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	86.535.361.300,92	131.489.060.538,05	154.426.590.364,46	147.177.014.286,00	237.283.157.474,72
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.177.363.876,35	357.491.316.103,06	378.899.595.860,83	293.000.605.138,00	320.117.187.969,42
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.585.593.468,00	25.779.146.291,54	17.269.157.489,00	19.699.702.881,00	21.022.129.636,00



No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	-	-	-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	40.810.357.418,00	4.409.169.306,50	307.775.000,00	1.748.842.550,00	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	40.810.357.418,00	4.409.169.306,50	307.775.000,00	1.748.842.550,00	-
2.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	235.221.967.777,61	(115.452.164.776,12)	(100.237.847.988,50)	60.855.720.616,55	18.767.492.908,15
3	PEMBIAYAAN	35.380.532.738,17	270.602.500.515,78	155.150.335.739,66	54.912.487.751,16	115.768.208.367,71
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.380.532.738,17	270.602.500.515,78	155.150.335.739,66	54.912.487.751,16	115.768.208.367,71
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	35.380.532.738,17	270.602.500.515,78	155.150.335.739,66	54.912.487.751,16	115.768.208.367,71
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-



No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.1.5	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	35.380.532.738,17	270.602.500.515,78	155.150.335.739,66	54.912.487.751,16	115.768.208.367,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	270.602.500.515,78	155.150.335.739,66	54.912.487.751,16	115.768.208.367,71	134.535.701.275,86

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Tabel di atas menunjukkan realisasi dari total pendapatan daerah dan belanja daerah Kota Batam. Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kota Batam mencapai Rp 2.577.504.994.815,32 dan belanja daerah mencapai Rp 2.342.283.027.037,71. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah Kota Batam sebesar Rp 2.527.649.538.975,96 lebih kecil dari realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.643.101.703.752,08. Kemudian di tahun 2024 realisasi pendapatan daerah Kota Batam mencapai sebesar Rp 3.645.287.633.271,19 dan belanja daerah sebesar Rp 3.645.278.431.756,19.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Penyajian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kota Batam dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 19,14 persen per tahun dari Rp6,54 triliun (2020) menjadi Rp12,997 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah aset tetap (21,58% per tahun), dan aset lainnya (15,35% per tahun). Aset lancar

dan investasi jangka panjang mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -5,13 persen dan -3,18 persen.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek berfluktuatif namun relatif mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,08 persen per tahun dari Rp 21,09 miliar (2020) menjadi Rp 23,81 miliar (2024).

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas Kota Batam berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat sedikit mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 19,18 persen per tahun di mana pada tahun 2020 sebesar Rp 6,43 Triliun menjadi Rp 12,97 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2024 secara konsisten nilainya terus mengalami peningkatan.



Tabel II.81.

Neraca Daerah Kota Batam tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	-	-	-	-	
ASET LANCAR	-	-	-	-	-
Kas di Kas Daerah	234.684.194.717,02	76.167.448.119,84	17.744.957.329,20	93.124.812.255,79	16.830.071.978,33
Kas di Bendahara Penerimaan	4.171.100,00	105.999.423,00	9.955.000,00	21.848.000,00	14.450.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.909.553,00	656.800,00	-	-	-
Kas di BLUD	14.270.698.014,98	65.161.387.343,15	27.646.342.405,42	13.679.680.515,03	10.303.085.802,03
Kas di Bendahara FKTP	-	-	722.590.295,89	809.340.912,49	-
Kas di Bendahara BOS		12.783.464.406,78	8.501.130.625,76	7.630.523.783,51	6.020.886.650,61
Kas dana BOK Puskesmas		-	-	-	1.534.236.882,00
Kas Lainnya	21.436.527.130,78	931.3793646,89-	26.130.117,00	659.831.423,00	-
Setara Kas	-		-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan		-	-	-	-
Piutang Pajak	531.944.796.058,00	539.723.430.817,00	540.654.599.592,00	549.938.219.938,00	585.918.399.124,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(299.237.043.832,22)	(331.289.106.739,50)	(363.915.528.228,85)	(379.685.281.279,46)	(405.733.607.809,97)
Piutang Pajak Netto	232.707.752.225,78	208.434.324.077,50	176.739.071.363,15	170.252.938.658,54	180.184.791.314,03
Piutang Retribusi	4.106.696.278,00	8.575.294.998,34	6.682.522.503,33	4.377.408.094,07	7.348.378.230,54
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(2.254.422.559,52)	(2.078.988.806,54)	(2.024.805.503,33)	(2.629.107.854,54)	-(4.201.785.973,04)
<u>Piutang Retribusi Netto</u>	1.852.273.719,48	6.496.306.191,80	4.657.716.918,11	4.377.408.094,07	3.146.592.257,50



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-		-	-	
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	-	-	-	-	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-			240.126.599.497,23
<i>Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah</i>	-	-	-	-	(185.221.986.807,66)
<i>Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto</i>					54.904.612.689,57
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	32.263.809.000,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	116.927.774591,00
<i>Penyisihan Piutang</i>	-	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	660.059.028,48	-	217.417.200,00
Piutang Lainnya	312.438.734.877,53	277.765.907.060,75	304.394.365.819,35	308.061.891.430,96	-



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persediaan	-	-	-	-	-
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>	(147.084.661.583,42)	(154.283.060.829,76)	(177.198.032.021,14)	(182.180.918.264,08)	-
Piutang lainnya Netto	165.354.073.294,11	123.482.846.230,99	127. 196.333.021,78	125.880.973.166,88	-
Persediaan	77.343.083.159,01	95.592.445.449,41	65.484.400.090,78	55.286.672.231,71	83.554.329.668,91
Jumlah Aset Lancar	747.859.682.914,16	589.156.257.689,36	429.388.686.972,00	471.724.029.041,02	605.902.058.033,98
INVESTASI JANGKA PANJANG	47.166.328.257,01	-	-	-	
Investasi Non Permanen					
Investasi Non Permanen Lainnya	22.460.999.907,00	22.460.999.907,00	22.460.999.907,00	22.460.999.907,00-	22.423.364.631,00
Dana Bergulir	-	-			
<i>Penyisihan Dana Bergulir</i>	-	-			
<i>Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya</i>	(8.111.684.304,65)-	-(8.425.295.318,34)	(9.070.439.172,57)	(8.512.081.337,57)-	(8.329.724.091,86)
Jumlah Investasi Non Permanen	14.349.315.602,35	14.035.704.588,66	13.390.560.734,43	13.948.918.569,43	14.093.640.539,14
Investasi Permanen	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	69.676.870.284,83	66.568.413.454,31	65.565.625.487,01	63.263.316.642,32	59.747.703 684,36



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investasi Permanen	69.676.870.284,83	66.568.413.454,31	65.565.625.487,01	63.263.316.642,32	-59.747703.684,36
Jumlah Investasi Jangka Panjang	84.026.185.887,18	80.604.118.042,97	78.956.186.221,44	77.212.235.211,75	73.841.344.223,14
ASET TETAP	-	-	-	-	
Tanah	2.124.499.077.288,13	3.457.975.777.836,14	6.130.364.796.691,64	7.353.727.549.785,83	7.556.342.486.469,58
Peralatan dan Mesin	776.307.247.622,74	862.785.690.853,25	973.476.594.992,81	949.360.399.767,84	1.002.236.305.230,11
Gedung dan Bangunan	2.657.570.435.505,40	2.855.682.622.489,70	2.964.446.047.128,79	3.038.347.254.546,41	3.145.418.977.530,81
Jalan. Irigasi. Dan Jaringan	2.598.943.162.823,72	2.998.385.116.921,86	3.231.242.407.423,50	3.589.123.023.229,70	3.868.409.603.187,30
Aset Tetap Lainnya	330.034.403.108,73	395.448.236.049,51	658.770.077.515,31	637.223.472.256,81	804.739.545.327,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	54.633.841.385,50	50.197.324.110,50	64.057.411.530,44	122.606.270.439,51	98.307.301.315,50
Akumulassi Penyusutan	(3.015.289.210.222,12)	(3.384.424.782.796,98)	(3.660.566.797.432,46)	(3.968.206.573.289,69)	(4.398.334.445.403,07)
Jumlah Aset Tetap	5.526.698.957.512,10	7.236.049.985.463,98	10.361.790.537.850,00	11.722.181.396.736,40	12.077.118.273.657,23
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-		-	-
ASET LAINNYA	-	-	-	-	-
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	3.322.614.867,00	3.322.614.867,00	3.786.847.674,00	3.786.847.674,00



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39
Aset Tak Berwujud	44.476.272.552,42	44.799.617.252,42	30.451.862.364,14	30.552.478.728,14	6.401.653.084,40
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(42.846.466.606)	(43.813.501.402,44)	(29.829.547.864,16)	(30.250.639.728,14)	(6.282.668.584,40)
Aset Tak Berwujud Netto	1.629.898.600	986.115.849,98	622.314.499,98	301.839.000,00	118.984.500,00
Aset Lain-Lain	88.917.913.491,40	100.320.536.847,03	112.325.872.883,24	200.581.961.053,95	150.211.542.889,45
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-
Kas yang Telah Dibatasi Penggunaannya	1.944.898.600,00	1.974.014.600,00	2.106.631.600,00	2.267.194.824,00	2.149.133.053,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	20.632.786.277,00	119.557.676.000,00	2.474.761.000,00
Jumlah Aset Lainnya	92.492.618.037,82	111.598.282.155,40	144.005.220.118,61	331.490.518.543,34	163.736.269.107,84
Properti Investasi	-	-	-	-	-
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	77.109.323.824,24
Jumlah Properti Invstasi	-	-	-	-	77.109.323.824,24
JUMLAH ASET	6.451.077.444.351,26	8.017.408.643.351,71	11.014.140.631.162,10	12.602.608.179.532,50	12.997.707.268.846,79



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	57.112.342,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	573.700.160,19	1.117.044.346,66	2.826.712.936,46	2.628.054.630,55	2.694.311.521,53
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
Utang Belanja	4.166.002.969,29	33.307.132.311,11	34.183.263.148,42	118.377.061.393,41	18.451.280.586,59
Utang Beban	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.346.718.910,59	1.996.187.116,00	2.489.259.985,10	2.355.187.666,10	2.665.262.277,10
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	21.086.422.040,07	36.420.363.773,77	39.499.236.069,98	123.417.416.032,06	23.810.854.385,22
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	21.086.422.040,07	36.420.363.773,77	39.499.236.069,98	123.417.416.032,06	23.810.854.385,22
EKUITAS	-	-	-	-	-
Ekuitas	6.429.991.022.311,19	7.980.988.279.577,94	10.974.641.395.092,10	12.479.190.763.500,50	-
Sisa Kas BLUD	-	-	-	-	-
Sisa Kas JKN	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	6.429.991.022.311,19	7.980.988.279.577,94	10.974.641.395.092,10	12.479.190.763.500,50	12.973.896.414.461,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.451.077.444.351,26	8.017.408.643.351,71	11.014.140.631.162,10	12.602.608.179.532,60	12.997.707.268.846,79

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Pada tabel di atas menunjukkan capaian neraca daerah Kota Batam tahun 2020- 2024 yang mencakup semua aset, kewajiban dan ekuitas. Total aset daerah Kota Batam selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Capaian total aset daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 6.451.077.444.351,26 dan meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp 12.997.707.268.846,70. Hal yang sama juga terjadi pada total kewajiban daerah Kota Batam pada tahun 2020-2024 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total kewajiban daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 21.086.422.040,07 dan meningkat hingga tahun 2024 mencapai sebesar Rp 23.810.854.385,22 rupiah. Lalu total ekuitas Kota Batam juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Total ekuitas daerah Kota Batam pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp 12.973.896.414.461,50 rupiah dan capaian ini meningkat dari tahun 2020 yang dulu mencapai sebesar Rp 6.429.991.022.311,19.

2.2.2.Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merinci sumber dan alokasi dana untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Analisis kerangka pendanaan memastikan bahwa seluruh rencana yang tertuang memiliki dukungan finansial yang memadai dan realistis. Dalam hal ini, kerangka pendanaan bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, dan secara bersamaan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan dana publik melalui transparansi yang diberikan selama pengelolaan anggaran. Analisis kerangka pendanaan terdiri dari proyeksi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2025-2029 serta perhitungan kerangka pendanaan itu sendiri.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan

keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD Tahun 2025.

Mempertimbangkan analisis kondisi makro ekonomi Kota Batam, dapat diproyeksikan pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2025 - 2030. Selain itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, serta kebijakan yang ditetapkan pada

awal masa RPJMD, pertumbuhan ekonomi Kota Batam serta tingkat inflasi tahun 2025 – 2030. Seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fondasi transformasi Kota Batam pada awal periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025 – 2045, stimulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber investasi lain diperkirakan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Batam sebagai berikut.

Tabel II.82.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi *Year-on-Year* Kota Batam Tahun 2025 – 2030

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	6,80 – 7,35	7,37- 8,01	7,40- 8,68	7,43- 9,34	7,47- 10,00	8,00 - 10,50
2	Inflasi (% YoY)	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5

Sumber: Analisis Tim RPJMD, 2025

Dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sampai dengan 2030, digunakan asumsi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam, pertumbuhan ekonomi diasumsikan terus tumbuh di atas 6 persen, dengan inflasi yang tidak melebihi 3,5 *year-on-year*. Capaian indikator ini menunjukkan adanya optimisme terhadap stabilitas dan peningkatan ekonomi. Target ekonomi kota Batam disesuaikan dengan target BP Batam dimana di tahun 2030, perekonomian kota Batam dapat mencapai angka diatas 10%.
2. Asumsi proyeksi fiskal dilakukan berdasarkan *outlook market* global, nasional, dan lokal. Hal ini meliputi proyek- proyek strategis nasional dan investasi sektor swasta yang akan meningkatkan investasi di Kota Batam. Tahun 2025 diperkirakan akan terjadi pembangunan di Kota Batam secara masif, sehingga diprediksi akan menyumbang pertumbuhan ekonomi di atas 6,8 persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi kemungkinan juga berdampak pada tidak stabilnya laju inflasi, mempertimbangkan juga capaian inflasi Kota Batam tahun 2024 yang mencapai 2,24 persen.
3. Asumsi fiskal juga didasari atas penahapan proyek strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Bintan, dan Karimun, yang diproyeksikan akan menambah nilai *Foreign Direct Investment* dalam jumlah besar ke Kota Batam pada tahun 2026 – 2028. Adapun *outlook* tahun 2030 diproyeksikan akan menjadi semakin stabil, dengan sudah beroperasinya beberapa proyek strategis yang dibangun pada tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Batam sudah menunjukkan kemandirian fiskal. Upaya mempertahankan kemandirian ini perlu didukung oleh kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksikan pendapatan, lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 7,73$ persen per tahun dari Rp 4,279 triliun (2025) menjadi Rp 6,211 triliun (2030). Proyeksi ini cukup realistis karena pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 9,05% per tahun. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara sumber pendapatan transfer diproyeksikan tumbuh 9,11% per tahun. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 0%.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 16,04% per tahun, maka proyeksi PAD tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 6,67$ persen per tahun dari Rp 2,36 triliun (2025) menjadi Rp 3,27 triliun (2030). Adapun pada komponen PAD, pendapatan pajak daerah ditargetkan tumbuh 6,5% per tahun, pendapatan retribusi daerah sebesar 11 persen per tahun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1 persen pertahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah dari Rp 1,95 triliun (2025) menjadi Rp 2,67 triliun (2030), proyeksi ini sudah mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh $\pm 16,81$ persen per tahun. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya

NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.

- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 4) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 5) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 6) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 7) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2030 ditargetkan dari Rp 243 miliar (2025) menjadi Rp 395 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir tumbuh 16,35 persen per tahun. Berikut ini strategi untuk memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk

sektor pariwisata, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.

- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 meningkat menjadi Rp 11,00 Miliar di tahun 2030. Target ini sudah mempertimbangkan pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diupayakan peningkatan penyertaan modal yang lebih produktif, melalui:

1. **Skema Penyertaan Modal melalui Lembaga Pembiayaan Pemerintah dan Swasta**

Pemerintah Kota Batam dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan syariah untuk mendukung proyek-proyek strategis melalui pola pembiayaan daerah (*blended finance*).

2. **Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Dalam konteks aset yang telah dipisahkan, pendekatan KPBU memberikan ruang kepada sektor swasta untuk menanamkan modal, sementara pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Skema ini dapat digunakan untuk sektor-sektor seperti transportasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan infrastruktur digital.

Gambar II.46.
Target Komposisi PAD Kota Batam
Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kota Batam meskipun sudah menunjukkan kemandirian fiskal dengan predikat baik, namun masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer khususnya DAU yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Besaran pendapatan transfer tidak dapat diperkirakan. Dalam proyeksi pendapatan transfer, digunakan asumsi:

- DBH Pajak ditargetkan naik dari Rp 194,52 miliar (2025) menjadi Rp 330,33 miliar (2030).
- DBH Non Pajak/SDA diproyeksikan naik dari Rp 17,17 miliar (2025) menjadi Rp 53,73 miliar (2030).

- DAU diproyeksikan diproyeksikan naik dari Rp 914,37 miliar (2025) menjadi Rp 1.352 miliar (2030).
- DAK diproyeksikan diproyeksikan naik dari Rp 466,57 miliar (2025) menjadi Rp 639,83 miliar (2030).
- Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal) diproyeksikan diproyeksikan naik dari Rp 15,51 miliar (2025) menjadi Rp 22,27 miliar (2030).

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Perangkat Daerah (PD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif PD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan target kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal

- tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi PD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Batam
 5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Batam akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Batam, terutama di bidang industri, logistik dan pariwisata dengan berkolaborasi bersama BP Batam.

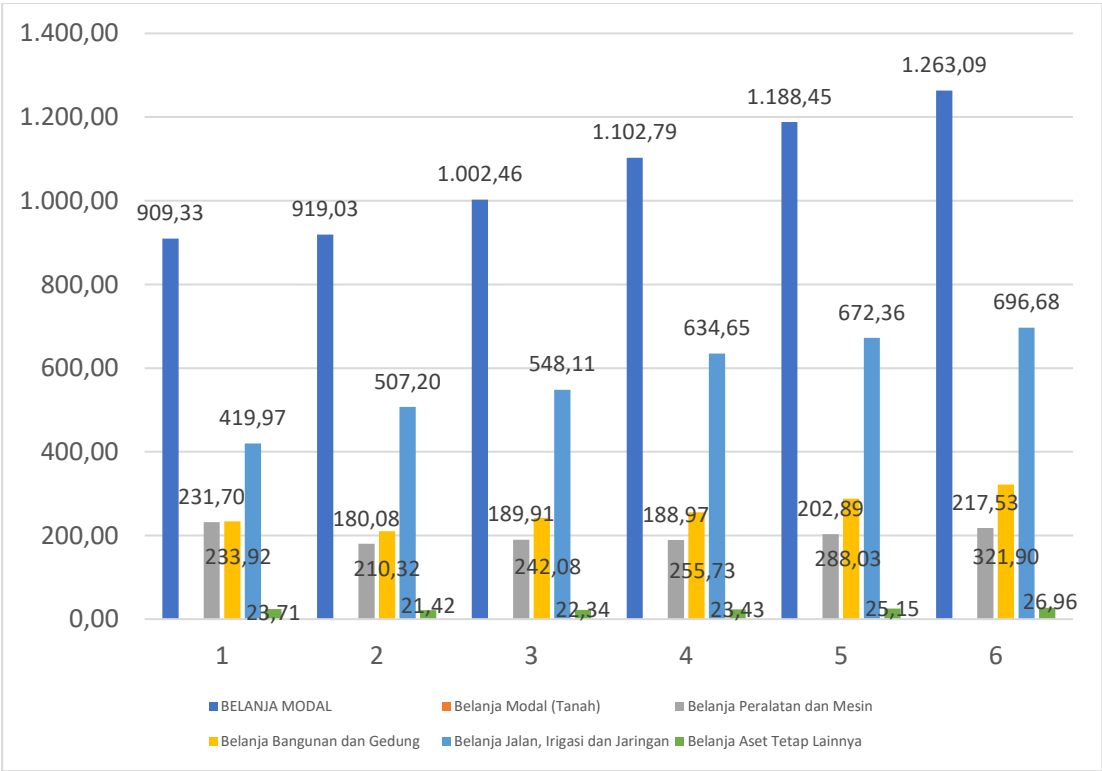
Belanja Daerah Kota Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,07 persen per tahun dari Rp 4,413 triliun (2025) menjadi Rp 6,211 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang tumbuh mencapai $\pm 11,55$ persen per tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Belanja operasi mulai tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata 7,05 persen dari Rp 3,487 triliun (2025) menjadi Rp 4,902 triliun (2030). Dalam komposisi Belanja Operasi, Belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah tumbuh sebesar 6,00 persen per tahun , sedangkan belanja pegawai diproyeksikan naik sebesar 7 persen per tahun.

Gambar II.47.

Target Belanja Modal Kota Batam Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah)



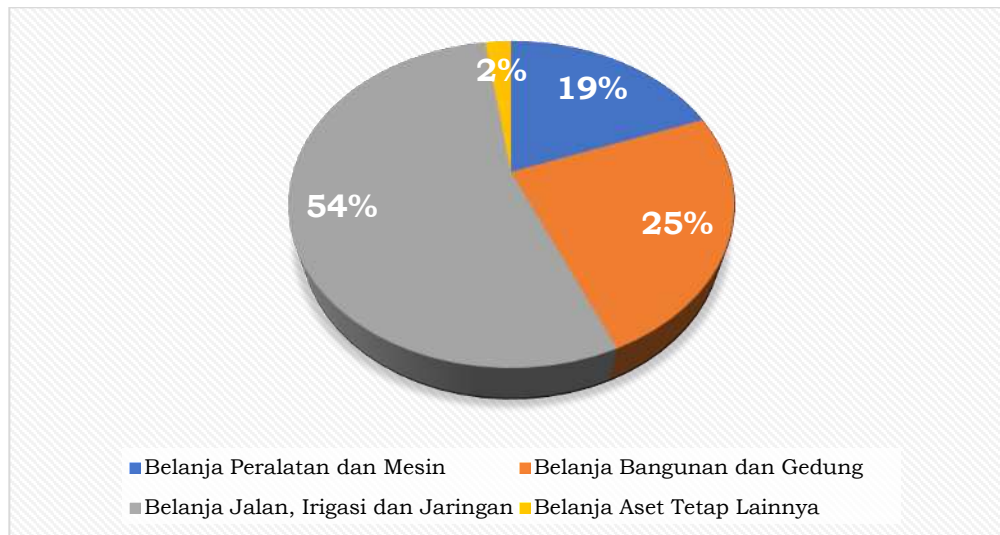
Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan ±9,41 persen per tahun dari Rp 909,33 miliar (2025) menjadi Rp 1.263 Miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui belanja jalan, drainase dan jaringan sebesar 10,31 persen pertahun, belanja bangunan dan gedung sebesar 25 persen pertahun, belanja peralatan dan mesin 19% pertahun dan aset tetap lainnya sebesar 2 persen per tahun.

Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.48.

**Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kota Batam
Tahun 2025-2030**



Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025 (diolah)

Belanja Tidak Terduga tahun 2005-2030 ditargetkan meningkat dari 17,32 Miliar di tahun 2025 menjadi Rp 63 Miliar. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana atau kejadian tak terduga yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area dimana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah.

Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.

- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau BP Batam terkait proyek-proyek strategis.
- 7) **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) **Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:** Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.83.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. Tahun 2030 Kota Batam (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi						Proyeksi Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PENDAPATAN	4.279.388.200.511	4.728.925.744.625	5.030.459.069.000	5.394.626.722.000	5.797.362.712.000	6.211.017.815.000	7,73
1.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.364.427.539.406	2.581.767.140.625	2.707.456.592.000	2.870.019.686.000	3.063.011.070.000	3.265.659.457.000	6,67
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.951.950.293.317	2.099.455.340.675,00	2.213.950.000.000	2.357.858.000.000	2.511.119.000.000	2.674.342.000.000	6,50
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	243.307.558.896	305.198.753.700,00	309.970.598.000	325.359.047.000	360.359.847.000	395.261.317.000	10,19
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.481.402.255	11.000.000.000,00	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	3,02
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.688.284.938	166.113.046.250,00	172.535.994.000	175.802.639.000	180.532.223.000	185.056.140.000	2,99
1.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.904.380.008.285	2.147.158.604.000	2.323.002.477.000	2.524.607.036.000	2.734.351.642.000	2.945.358.358.000	9,11
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.597.124.417.666	1.837.009.827.000	1.980.847.429.000	2.140.674.970.000	2.309.163.525.000	2.480.674.981.000	9,21
	TRANSFER ANTAR DAERAH	307.255.590.619	310.148.777.000	342.155.048.000	383.932.066.000	425.188.117.000	464.683.377.000	8,63
1.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.580.652.820	0	0	0	0	0	0,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	Pendatan Dana Darurat							
01.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.580.652.820	-	-	-	-	-	
2	BELANJA	4.413.924.938.657	4.849.981.438.071	5.174.459.069.000	5.504.626.722.000	5.897.362.712.000	6.301.017.815.000	7,38
2.01	BELANJA OPERASI	3.831.787.575.088	3.862.705.484.559	4.096.277.005.002	4.340.605.152.158	4.645.840.676.035	4.974.013.580.360	5,36
02.01.01	Belanja Pegawai	2.023.461.168.757	2.048.038.709.006	2.190.941.129.109	2.345.083.486.161	2.537.099.858.787	2.744.810.494.576	6,29
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.583.246.357.844	1.570.268.383.195	1.648.726.215.899	1.726.765.830.147	1.824.736.684.230	1.928.975.159.088	4,03
02.01.02	Belanja Bunga							
02.01.04	Belanja Subsidi	9.138.179.287	8.601.468.315	9.031.237.245	9.458.715.302	9.995.371.843	10.566.358.597	2,95
02.01.05	Belanja Hibah	237.488.991.185	229.895.795.477	241.382.446.651	252.807.868.595	267.151.331.578	282.412.407.388	3,53
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.370.787.487	5.901.128.565	6.195.976.098	6.489.251.953	6.857.429.597	7.249.160.711	-5,00
2.02	BELANJA MODAL	999.164.892.581	914.293.798.112	1.003.825.393.714	1.102.798.130.235	1.188.452.584.163	1.263.091.340.785	4,80



No	Uraian	Proyeksi						Proyeksi Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
02.02.01	Belanja Modal (Tanah)							
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	232.980.067.205	179.157.318.642	190.174.304.937	188.971.970.739	202.895.945.201	217.535.413.784	-1,36
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	235.199.339.705	209.236.997.399	242.411.533.673	255.732.372.512	288.037.296.287	321.908.734.369	6,48
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	422.270.352.174	504.586.405.224	548.861.580.577	634.656.586.970	672.363.522.164	696.684.381.839	10,53
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	23.844.039.027	21.313.076.846	22.377.974.527	23.437.200.014	25.155.820.511	26.962.810.792	2,49
2.03	BELANJA TAK TERDUGA	17.318.096.591	72.982.155.400	74.356.670.285	61.223.439.608	63.069.451.802	63.912.893.856	29,84
02.03.01	Belanja Tak Terduga	17.318.096.591	72.982.155.400	74.356.670.285	61.223.439.608	63.069.451.802	63.912.893.856	29,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	-134.536.738.146	-121.055.693.446	-144.000.000.000	-110.000.000.000	-100.000.000.000	-90.000.000.000	-7,73
3	PEMBIAYAAN	134.536.738.146	121.055.693.446	144.000.000.000	110.000.000.000	100.000.000.000	90.000.000.000	-7,73
3.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.536.738.146	121.055.693.446	144.000.000.000	110.000.000.000	100.000.000.000	90.000.000.000	-7,73
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	134.536.738.146	121.055.693.446	144.000.000.000	110.000.000.000	100.000.000.000	90.000.000.000	-7,73
3.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	134.536.738.146	121.055.693.446	144.000.000.000	110.000.000.000	100.000.000.000	90.000.000.000	-7,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025 (diolah)

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun 2025 hingga 2030 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi moderat sesuai dengan tren saat ini, dengan inflasi yang terkendali dan belanja daerah yang stabil. Dengan melihat asumsi makro ekonomi Kota Batam serta melihat performa dari pendapatan daerah dari periode sebelumnya, pendapatan daerah Kota Batam, khususnya PAD, diproyeksikan akan meningkat. Namun, peningkatan tersebut perlu diiringi dengan beberapa upaya dan kebijakan seperti implementasi insentif dan disinsentif. Pada aspek pendapatan transfer, diproyeksikan akan mengalami tren pertumbuhan yang positif dengan adanya peningkatan pada transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan meningkat terutama pada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Peningkatan tersebut turut diasumsikan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat Kota Batam. Selain itu, belanja daerah dapat diarahkan untuk dapat membiayai berbagai urusan Pemerintah Kota Batam, baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kota Batam.

Dalam proyeksi keuangan jangka menengah Kota Batam tahun 2025–2030, terlihat adanya potensi defisit anggaran, terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan penguatan daya saing ekonomi kawasan, yang belum sepenuhnya dapat ditutupi oleh pendapatan daerah yang ada. Pemerintah Kota Batam akan menempuh pendekatan kolaboratif dan inovatif untuk menutup kesenjangan pembiayaan tersebut, melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemitraan Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Kota akan secara aktif membangun sinergi dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, untuk mengakses bantuan teknis dan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dekonsentrasi, maupun program strategis nasional yang bersifat lintas sektor.
2. Peningkatan Efektivitas Belanja dan Penguatan Belanja Produktif
3. Evaluasi atas efisiensi belanja operasional serta peningkatan belanja modal yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal.

4. Mobilisasi Dana Non-APBD
5. Pemerintah Kota juga akan menjajaki peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional, dana CSR perusahaan swasta, hingga dana filantropi atau hibah luar negeri yang relevan dengan program pembangunan daerah.

Dengan pendekatan ini, defisit anggaran yang terjadi bukan menjadi penghambat pembangunan, melainkan menjadi pendorong bagi Pemerintah Kota Batam untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kompetitif.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam gambaran umum daerah, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam pembangunan Kota Batam. Kajian terhadap data dan informasi terkait kondisi daerah, serta analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan di berbagai bidang urusan, menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis yang sesuai lingkup global, nasional, maupun regional yang dapat mempengaruhi Kota Batam.

2.3.1. Permasalahan Daerah

Kota Batam sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, terus mengalami pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat yang tentunya akan muncul berbagai permasalahan pembangunan dan sosial masyarakat. Melihat kompleksitas permasalahan di Kota Batam, maka penyajian permasalahan dibagi menjadi 2 (dua) pengelompokan yaitu Permasalahan Daerah dan Permasalahan per Urusan.

A. Permasalahan Daerah

Dari hasil kompilasi gambaran keseluruhan tentang kondisi daerah, dapat diidentifikasi beberapa tren penting dalam aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum, yang menunjukkan kecenderungan perkembangan di berbagai aspek dalam beberapa tahun terakhir. Dirumuskan tujuh permasalahan daerah pada RPJMD sebagai berikut:

Gambar II.49.
Permasalahan Daerah Kota Batam



Penjelasan dari masing-masing permasalahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. **Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing**

Kota Batam sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan daya saing ekonomi belum optimal. Ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan kontribusi sektor industri utama, perlambatan investasi, dan tekanan inflasi menjadi faktor utama yang menghambat penguatan struktur ekonomi di Batam.

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2024, Kota Batam mencatat pertumbuhan sebesar **6,69 persen**, mengalami perlambatan sebesar **0,35 poin** dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencapai **7,04 persen** pada 2023. Meskipun pertumbuhan tersebut masih tergolong tinggi secara regional dan nasional, tren perlambatan ini mencerminkan adanya tekanan struktural dan sektoral yang memerlukan perhatian khusus.

Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja pada sejumlah sektor lapangan usaha strategis, seperti **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** yang terdampak fluktuasi iklim dan keterbatasan lahan produktif; **Pengadaan Listrik dan Gas** yang mengalami stagnasi permintaan dari sektor industri pengguna energi besar; **Konstruksi** yang menurun akibat penundaan proyek-proyek strategis dan terbatasnya realisasi investasi fisik; serta sektor **Transportasi dan Pergudangan** yang melambat seiring penyesuaian rantai pasok dan logistik pasca pandemi. Sektor lain seperti **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan**, serta **Jasa Lainnya** juga menunjukkan perlambatan akibat penyesuaian pasar dan konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

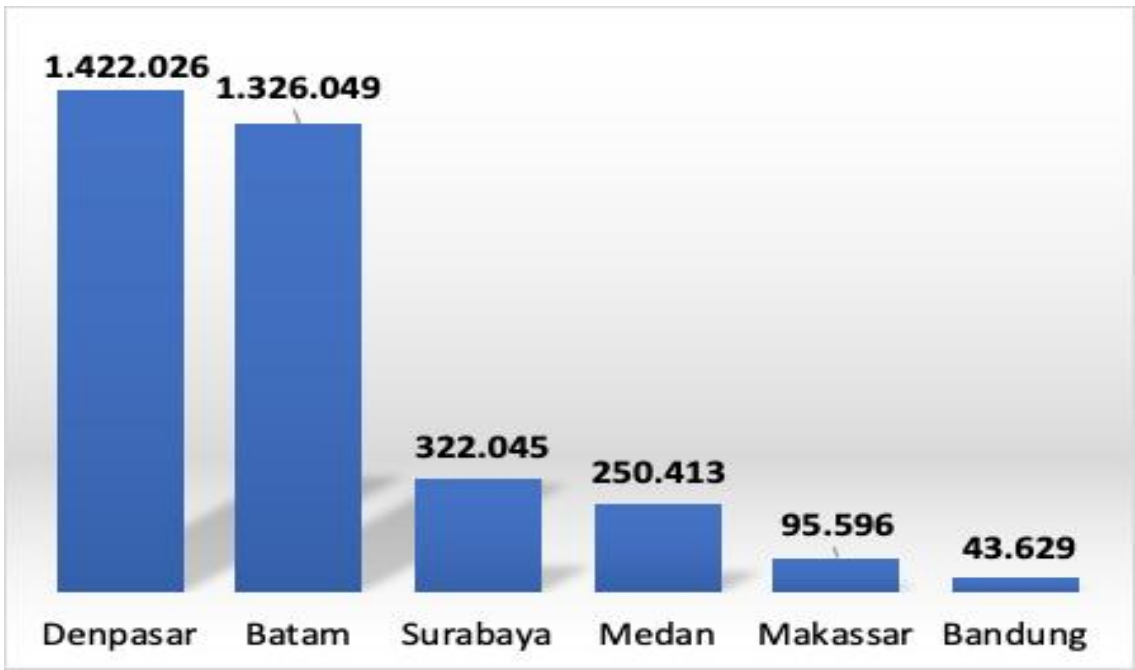
Indikasi permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah belum optimalnya akselerasi investasi baru di sektor-sektor bernilai tambah, ketergantungan terhadap sektor industri manufaktur tertentu yang rentan terhadap dinamika global, serta belum meratanya distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi antar wilayah kecamatan dan kelompok sosial di Batam. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Batam perlu mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi kreatif, digital, dan berbasis jasa modern; mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi yang mendukung aktivitas ekonomi; serta memperkuat peran UMKM lokal dalam ekosistem industri melalui kebijakan hilirisasi dan insentif fiskal yang terintegrasi.

Dengan kondisi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang menjadi salah satu sektor yang terkait dengan pariwisata mengalami perlambatan. Hal ini juga terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batam, yakni sebesar 1.326.049 kunjungan yang berada di posisi kedua setelah Denpasar (1.422.026 kunjungan). Jika dibandingkan dengan Surabaya, Medan, dan Makassar masih paling tinggi dengan angka kunjungan di Kota Surabaya sebanyak 322.045 kunjungan wisman, kemudian menyusul Kota Medan berada di posisi ketiga dengan 250.413 kunjungan, didominasi oleh wisatawan dari Malaysia. Sementara itu, Makassar mencatat 95.596 kunjungan, dengan mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia dan Singapura. Perbedaan jumlah kunjungan ini mencerminkan peran strategis masing-masing kota dalam sektor pariwisata, baik sebagai gerbang masuk internasional maupun sebagai destinasi wisata unggulan. Perkembangan ini menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pariwisata di Kota Batam. Sebagian besar kunjungan ke

Batam masih bersifat singkat dan terbatas pada wisata belanja atau transit lintas negara. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk mengembangkan atraksi wisata yang lebih beragam, meningkatkan lama tinggal wisatawan, dan memperkuat citra Batam sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga memberi pengalaman wisata yang bernilai. Data perbandingan kunjungan wisatawan mancanegara dengan Kota Maju di Indonesia tahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.50.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan nilai investasi, Kota Batam mencatat realisasi sebesar 25,46 triliun rupiah, menempati peringkat kedua setelah Surabaya yang mencapai 40,3 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Batam tetap menjadi salah satu pusat investasi domestik dan asing yang penting di Indonesia, meskipun belum melampaui Surabaya yang didominasi oleh investasi dalam negeri. Sementara itu, Makassar dan Medan masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi dalam skala besar, baik dari segi infrastruktur maupun daya tarik ekonomi lokal.

Gambar II.51.

Nilai investasi (PMA dan PMDN) Kota Batam
dengan Kota Maju di Indonesia



Sumber: BP Batam 2025

Permasalahan belum optimalnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing di Kota Batam tercermin dari tren penurunan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meskipun jumlah proyek yang direalisasikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat mencapai Rp 13,6 triliun, namun mengalami penurunan signifikan menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 sebesar Rp6,8 triliun, nilai tersebut masih belum mampu melampaui capaian tahun 2020. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan nilai investasi sebesar Rp5,992 triliun. Salah satu penyebab penurunan ini disebabkan kondisi Covid-19 dan oleh tersosialisasikannya penggunaan *Online Single Submission* (OSS).

Dengan adanya penurunan nilai investasi PMDN, maka diindikasikan adanya penurunan kepercayaan investor domestik terhadap iklim investasi di Kota Batam terutama pada nilai investasi PMDN. Kemudian adanya pengaruh ketidakpastian regulasi dan meningkatnya persaingan antar kawasan ekonomi global, serta kurang optimalnya kebijakan insentif investasi.

Di sisi lain, tekanan inflasi juga menjadi faktor penghambat dalam penguatan daya saing ekonomi Batam. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam pada Juni 2024 tercatat sebesar 106,94, dengan tingkat inflasi *Year on Year* (y-on-y) sebesar 2,24%. Angka ini tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang hanya sebesar 1,57%. Tingginya tekanan inflasi di Batam mencerminkan adanya tekanan dari sisi biaya produksi dan harga bahan kebutuhan pokok yang meningkat, sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempersempit ruang gerak pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

2. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur di Kota Batam masih menghadapi tantangan dalam mencapai kualitas dan kuantitas yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, target Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang ditetapkan sebesar 73,4 pada tahun 2024 hanya mampu direalisasikan sebesar 71,24 atau sekitar 97,33 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, pencapaian ini masih belum sepenuhnya memenuhi target, sehingga mengindikasikan perlunya upaya tambahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

Kondisi jalan di Kota Batam juga masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Hingga tahun 2024, kondisi jalan mantap baru mencapai 88 persen, artinya masih ada sekitar 12 persen jalan yang belum berada dalam kondisi mantap. Ketidakoptimalan ini tidak hanya menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur yang belum merata, tetapi juga semakin kompleks dengan adanya penambahan jalan rusak berat sepanjang 51,72 km pada tahun 2023, yang sebelumnya tidak tercatat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau, berdampak pada seluruh ruas dengan status jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Batam telah dilepaskan. Kondisi ini menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang seluruh ruas jalannya berstatus Jalan Kota.

Hal ini menambah beban pembiayaan untuk penanganan jalan di Kota Batam, sehingga jika tidak diatasi berpotensi menghambat konektivitas dan mobilitas masyarakat, memperlambat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan biaya transportasi yang dapat berpotensi menurunkan efisiensi dan daya saing wilayah. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

Selain itu, pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan di Kota Batam juga masih belum optimal. Hingga tahun 2024, persentase pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan baru mencapai 79,07 persen. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jaringan drainase yang memadai. Kurangnya infrastruktur permukiman yang layak berpotensi menurunkan kualitas hidup

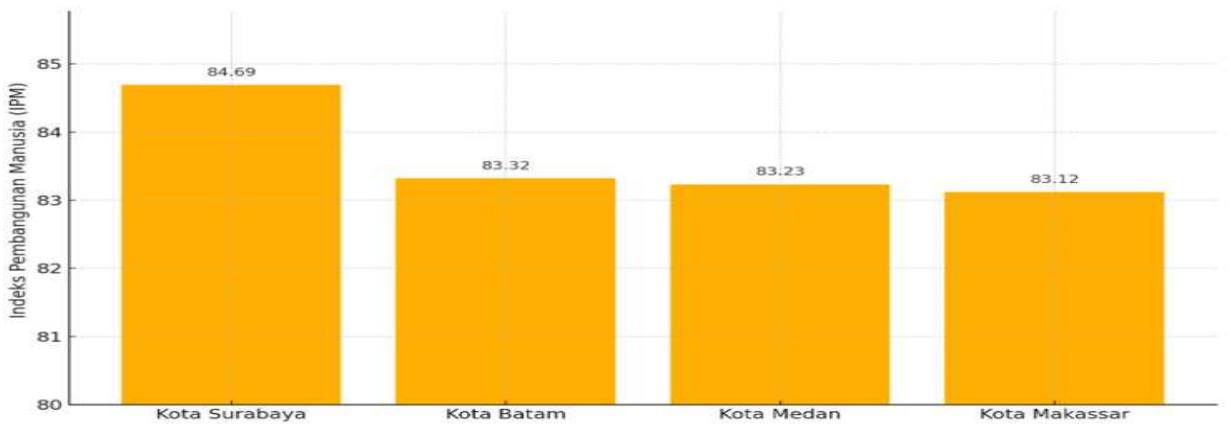
masyarakat dan meningkatkan risiko terhadap permasalahan lingkungan, seperti banjir dan pencemaran. Risiko banjir yang cukup tinggi di Kota Batam menjadi ancaman serius akibat ketidakmampuan sistem drainase dalam mengatasi curah hujan tinggi dan aliran air permukaan.

Ketidakoptimalan dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Batam ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan anggaran pembangunan menyebabkan beberapa wilayah belum terdapat akses terhadap konektivitas dan kebutuhan jaringan komunikasi, serta tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Permasalahan ini memperkuat kesenjangan dalam penyediaan layanan infrastruktur.

3. Belum Optimalnya Kualitas SDM dan Pembangunan Berbasis Gender

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Batam belum optimal dan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Sebagai salah satu kota pusat ekonomi dan perdagangan internasional, Batam membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Keterbatasan ini menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Batam, terutama dalam memperkuat posisinya sebagai pusat industri dan perdagangan.

Gambar II.52.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam dengan Kota di Indonesia
Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025;

Kondisi kualitas SDM tergambarkan dari Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Pengeluaran Per Kapita yang dibandingkan dengan beberapa kota dengan capaian pembangunan yang tinggi di Indonesia. Capaian ini mencerminkan kinerja positif Kota Batam dalam tiga

dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Keunggulan ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, industrialisasi yang terarah, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif baik. Ke depan, tantangan Kota Batam adalah menjaga kualitas SDM di tengah tekanan urbanisasi, serta memperluas inklusi ekonomi dan penguatan ekosistem sosial untuk memperkuat pencapaian ini secara berkelanjutan.

Kemudian dari gambar di atas, jika melihat perbandingan IPM pada beberapa Kota di Indonesia (Kota Surabaya, Kota Medan, dan Kota Makassar) terlihat Kota Batam lebih unggul dari Kota Medan (83,23) namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Surabaya (84,69). Salah satu penyebab utama belum optimalnya angka IPM yang dibandingkan dengan beberapa Kota di Indonesia adalah kualitas pendidikan yang belum optimal yang dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Batam pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,21 tahun dan masih berada di bawah standar nasional rata-rata lama sekolah 15 tahun. Hal ini disebabkan masih belum meratanya akses dan ketersediaan sarana pendidikan di Kota Batam terutama di daerah *hinterland* seperti gedung sekolah, guru, dan fasilitas pendukung belajar mengajar. Sehingga masih perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat Kota Batam untuk memperkuat fondasi SDM yang berkualitas. Indikator lain terkait kualitas pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Batam juga tercatat sebesar 13,56 tahun yang masih di bawah standar maksimal nasional sebesar 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Batam masih memiliki potensi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di masa depan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. APM Kota Batam tahun 2023 pada setiap jenjang pendidikan belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. APM SD mencapai 99,22 persen, partisipasi mulai menurun pada jenjang SMP (88,56%), semakin rendah di tingkat SMA (75,88%), dan sangat rendah di perguruan tinggi (17,42%). Penurunan ini mencerminkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih cenderung tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Utamanya di jenjang perguruan tinggi yang memiliki fleksibilitas durasi studi dan tidak adanya batasan usia masuk.

Selain dari aspek pendidikan, kualitas hidup masyarakat Batam juga dilihat dari sisi Kesehatan yang diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH). Kota Batam memiliki Usia Harapan Hidup (UHH) telah mencapai 75,19 tahun, dan masih di bawah angka maksimal UHH sebesar 85 Tahun. Meskipun fasilitas kesehatan di Kota Batam terus ditingkatkan, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar, seperti akses layanan kesehatan yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di *hinterland*.

Penguatan kualitas SDM di Kota Batam perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperluas pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, dalam berbagai sektor. Dengan penguatan kualitas SDM yang berkelanjutan, Kota Batam diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi, meningkatkan daya saing regional, dan memperkuat posisinya sebagai kota pelabuhan yang maju dan berdaya saing tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang linear antara tingkat pendidikan dengan sektor pekerjaan di Batam, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan sektor jasa-jasa yang membutuhkan keterampilan dan keahlian spesifik.

Permasalahan ketenagakerjaan dan relevansinya dengan pendidikan di Kota Batam pada tahun 2024, dengan data bahwa mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA (35,38 persen), sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya mencapai 16,38 persen. Selain itu, sektor pertanian masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah, sebagian besar tidak tamat sekolah dasar, yang mencerminkan kesenjangan kualitas tenaga kerja antar sektor.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang linear antara tingkat pendidikan dengan sektor pekerjaan di Batam, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan sektor jasa-jasa yang membutuhkan keterampilan dan keahlian spesifik. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah mengindikasikan kemungkinan yang lebih besar bagi seseorang untuk bekerja di sektor yang tidak membutuhkan keahlian tinggi.

Kondisi ini menegaskan bahwa ke depannya perlu adanya penguatan kualitas SDM di Kota Batam sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperluas pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dalam berbagai sektor. Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di sektor strategis, memperkuat daya saing ekonomi, serta mendorong Batam untuk menjadi kota yang maju

dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Dalam aspek pembangunan berbasis gender, Kota Batam juga menghadapi tantangan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan dari 58,26 pada tahun 2023 menjadi 61,31 pada tahun 2024, masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Riau (58,83) dan nasional (76,90). Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan ekonomi.

Lebih lanjut, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Batam sebesar 0,193 pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori tinggi mencerminkan masih tingginya ketimpangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan publik dan kepemimpinan. Ketimpangan gender yang masih tinggi, lemahnya pelestarian budaya, serta rendahnya ketahanan keluarga berpotensi menurunkan kohesi sosial, melemahkan identitas budaya lokal, dan membatasi partisipasi aktif kelompok rentan, khususnya perempuan, dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pelestarian budaya, pembentukan Kampung Madani sebagai model penguatan nilai lokal, serta pengarusutamaan gender menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kota Batam.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas

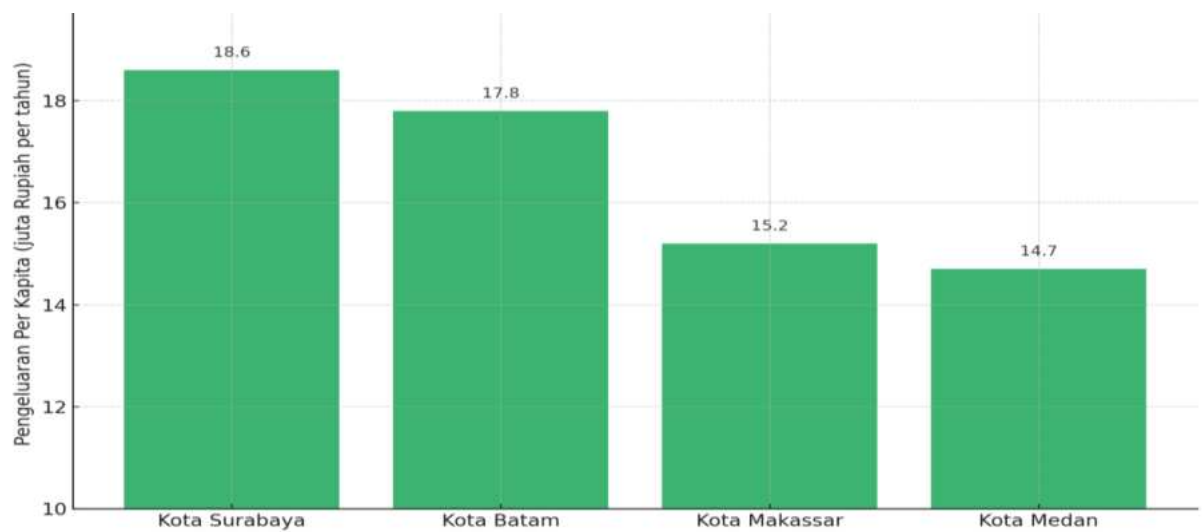
Kota Batam memiliki potensi besar sebagai pusat industri dan perdagangan internasional. Namun, dibalik kemajuan ekonomi yang dicapai, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat di Batam masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Ketidakmerataan dalam distribusi kesejahteraan, ketimpangan dalam akses pendidikan dan pekerjaan, serta keterbatasan di sektor ekonomi tertentu menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kualitas hidup masyarakat di Batam.

Salah satu indikator yang mencerminkan permasalahan kesejahteraan di Batam adalah tingkat kemiskinan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,85%. Kondisi kemiskinan Masyarakat Kota Batam juga dapat dilihat pada besarnya pengeluaran per kapita, yang menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan Masyarakat secara layak. Berdasarkan grafik, **Kota Batam** mencatat **pengeluaran per kapita sebesar Rp17,8 juta per tahun**, menempati

posisi kedua tertinggi setelah **Kota Surabaya (Rp18,6 juta)**, dan jauh di atas **Makassar (Rp15,2 juta)** serta **Medan (Rp14,7 juta)**. Tingginya angka pengeluaran per kapita mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat, serta akses terhadap kebutuhan dasar yang lebih memadai. Data pengeluaran per kapita Kota-Kota Maju di Indonesia dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.53.

Pengeluaran Perkapita (Juta/Tahun) Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

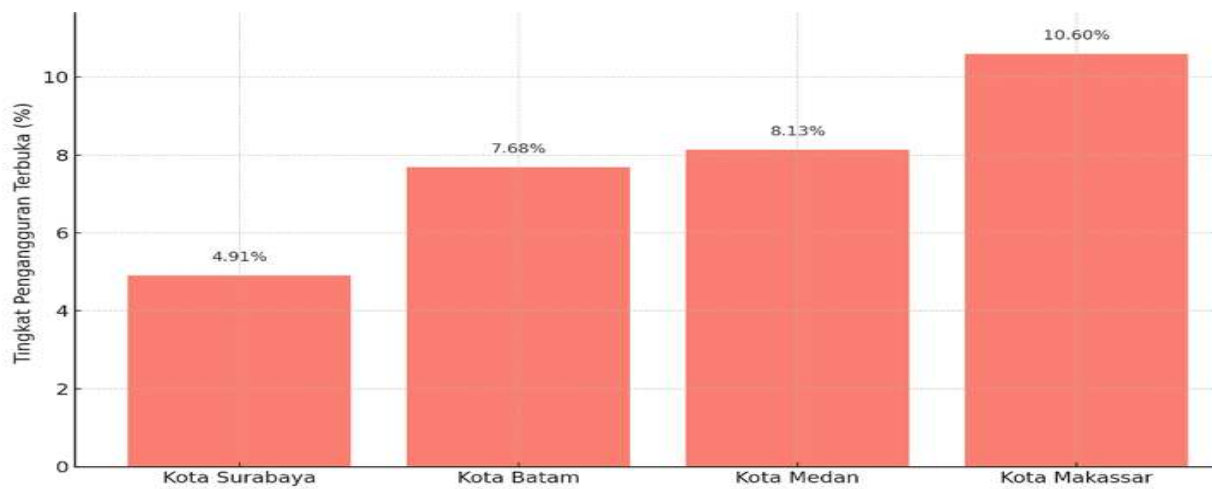
Permasalahan kesejahteraan di Kota Batam masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait dengan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Indeks Gini, yang menunjukkan peningkatan dari 0,323 pada tahun 2020 menjadi 0,348 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan terus berjalan, hasilnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar lainnya, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pencapaian kesejahteraan.

Permasalahan kesejahteraan di Batam juga tercermin dari masih tingginya angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batam pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,86 persen. Dari grafik, terlihat bahwa **TPT Kota Batam sebesar 7,68** persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Surabaya (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Batam memiliki struktur industri yang relatif kuat, tingkat serapan tenaga kerja masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain yang memiliki karakteristik ekonomi regional serupa. Masih tingginya tingkat pengangguran ini salah

satunya mengindikasikan bahwa lapangan kerja di Batam tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat Batam adalah salah satu pusat industri dan perdagangan yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Gambar II.54.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam dengan Kota Maju di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Salah satu penyebab belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di Kota Batam adalah masih adanya kesenjangan dalam pemerataan kualitas tenaga kerja di Kota Batam. Berdasarkan data BPS, dari total 641.605 angkatan kerja, masih terdapat 39.795 orang yang belum atau tidak tamat SD, serta 50.296 yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD. Meskipun sebagian besar penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA/ sederajat (52,21%), hanya 13,23 persen yang mampu melanjutkan hingga jenjang pendidikan tinggi, dan sekitar 3,26 persen belum memiliki ijazah sama sekali. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya, kelompok dengan keterbatasan akses pendidikan cenderung bekerja di sektor informal yang kurang stabil dan minim perlindungan sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesenjangan dalam pemerataan pendidikan turut mempengaruhi belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat secara adil dan berkelanjutan di Kota Batam.

Kesejahteraan yang belum optimal di Kota Batam dilihat dari sektor perikanan, terutama nelayan kecil. Hal ini ditunjukkan melalui capaian nilai tukar nelayan yang meskipun meningkat, tetapi pergerakan kenaikannya sangat lambat. Nilai tukar nelayan pada tahun 2020 sebesar 100,3 dan

meningkat hingga tahun 2023 mencapai 101,85. Capaian nilai tukar nelayan mencerminkan seberapa besar penghasilan yang diperoleh oleh nelayan dari aktivitas perikanan setelah mempertimbangkan biaya-biaya operasional. Dengan capaian nilai tukar nelayan yang hanya meningkat 1 poin selama 4 (empat) tahun terakhir, teridentifikasi bahwa kesejahteraan ekonomi nelayan mengalami pergerakan yang lambat. Selain itu, terbatasnya perlindungan kerja terhadap nelayan juga menjadi permasalahan belum optimalnya prasarana dan hal ini ditunjukkan pada tahun 2023 di mana hanya sebanyak 3.888 dari 10 ribu lebih nelayan yang memiliki asuransi kerja. Penguatan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Langkah strategis yang perlu ditempuh mencakup pengembangan sektor perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kinerja pemerintahan yang belum efektif, transparan, dan akuntabel. Perwujudan pemerintahan yang baik salah satunya dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan dan sumber daya publik. Keterbukaan dan pertanggungjawaban tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan manajemen yang efektif menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Batam di tahun 2024 berada di angka 84,02. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau angka IRB Kota Batam lebih tinggi daripada Provinsi Kepulauan Riau (83,24), namun angka ini masih belum optimal melihat Kota Batam yang memiliki SDM dan fasilitas penunjang kinerja yang sudah cukup memadai.

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan integritas daerah. Akuntabilitas Kinerja terlihat dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang hanya meningkat dari 65,86 pada tahun 2021 menjadi 68,85 pada tahun 2024, atau hanya naik 2,99 poin dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Peningkatan yang minim ini menunjukkan proses perbaikan akuntabilitas masih berjalan

lambat. Selain itu, capaian SAKIP Kota Batam juga masih tertinggal dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 77,86 pada tahun 2024, mencerminkan pengelolaan kinerja yang belum efektif dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Selain akuntabilitas, kualitas pelayanan publik di Kota Batam juga masih belum optimal. Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,20 masih di bawah capaian Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 4,26. Prosedur birokrasi yang berbelit, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan, dan rendahnya penerapan layanan berbasis teknologi menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan kualitas layanan publik. Persentase PNS dengan pengembangan kompetensi bersertifikat juga masih rendah, hanya mencapai 65,59 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pelayanan publik di Kota Batam belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan responsif.

Dalam aspek pengelolaan administrasi, pemanfaatan *database* kependudukan di Kota Batam baru mencapai 48,39% pada tahun 2023. Jumlah pasangan yang memiliki akta nikah hanya sebesar 76,14%, menunjukkan bahwa pencatatan administrasi kependudukan masih belum maksimal. Selain itu, nilai tata kelola kearsipan OPD juga belum mencapai target, dengan capaian 57,42 (target 60) pada tahun 2023. Meskipun persentase penyelesaian agenda DPRD telah mencapai 98%, sistem keuangan daerah masih lemah dengan pilar sistem keuangan pada Indeks Daya Saing Daerah yang hanya mencatatkan skor 1,72. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan dalam tata kelola administrasi yang berpengaruh pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Kendala dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan juga tercermin dari indeks kapabilitas inovasi yang hanya mencapai 3,62 dari skor 1-5, menunjukkan rendahnya inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Rendahnya inovasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Kota Batam.

6. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan dan Norma Masyarakat

Upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan, norma sosial, serta pembangunan berbasis gender di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan belum terwujudnya keselarasan antara

pembangunan ekonomi dan penguatan identitas budaya lokal. Salah satu indikator lemahnya perhatian terhadap sektor kebudayaan adalah menurunnya frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 8 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya, namun jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 kali pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pelestarian budaya di tengah arus modernisasi dan industrialisasi yang pesat. Minimnya kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya, rendahnya alokasi anggaran, serta terbatasnya promosi kegiatan kebudayaan menjadi faktor utama penyebab penurunan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hilangnya identitas budaya lokal, menurunnya apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah, dan terancamnya eksistensi seni serta tradisi lokal. Dalam konteks ini, diperlukan inisiatif seperti pembentukan Kampung Madani sebagai ruang hidup berbasis nilai-nilai budaya, religiusitas, kearifan lokal, dan partisipasi warga untuk memperkuat jati diri masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi.

7. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Persampahan

Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya kualitas lingkungan yang optimal dan pelayanan pengelolaan sampah yang merata. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batam pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 67,34 dan menurun di tahun 2024 menjadi 64,86 dengan kategori sedang. Penurunan kualitas lingkungan hidup juga ditunjukkan adanya penurunan indeks kualitas air dari 52 menjadi 50. Dengan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pencemaran lingkungan akibat aktivitas ekonomi seperti industri, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan dan aktivitas ekonomi di perumahan.

Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam juga terlihat dari pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya optimal. Hingga tahun 2024, timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru mencapai 75,74%, yang berarti masih terdapat sekitar 24,26% sampah yang belum terolah dengan baik. Ketidakoptimalan ini berpotensi mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, keterbatasan



kapasitas fasilitas pengolahan sampah dan belum meratanya layanan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Batam menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah.

Selain kapasitas pengolahan yang terbatas, proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Batam juga masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 54,70%. Artinya, hampir separuh rumah tangga di Kota Batam belum terlayani oleh sistem pengumpulan sampah yang memadai. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pembuangan sampah sembarangan dan pencemaran lingkungan akibat minimnya akses terhadap layanan pengumpulan sampah. Ketidakmerataan layanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya armada pengangkutan sampah, minimnya

ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Selain permasalahan pengelolaan sampah, Kota Batam juga menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi. Indeks Risiko Bencana Kota Batam pada tahun 2023 tercatat sebesar 103,96, yang masuk dalam kategori sedang. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Batam masih rentan terhadap bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Ketidakmampuan sistem drainase dalam mengelola aliran air permukaan, meningkatnya lahan terbangun, dan berkurangnya daerah resapan air memperbesar potensi terjadinya bencana lingkungan di wilayah perkotaan.

B. Permasalahan Per Urusan

Permasalahan per urusan merupakan persoalan yang muncul dalam setiap bidang atau sektor tertentu yang menjadi tanggung jawab atau wewenang di lingkup Pemerintah Daerah. Urusan ini biasanya dibagi menjadi beberapa sektor di lingkup yang menjadi wewenang Kota Batam. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan, telah terpetakan permasalahan per urusan sebagai berikut:

Tabel II.84.

Permasalahan Perurusan Kota Batam

PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum optimalnya penanganan terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sesuai aturan	Sosial



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tepat sasaran	Sosial
Belum optimalnya ketersediaan pangan	Tingginya tingkat ketergantungan pasokan pangan dengan daerah lain	Pangan
	Keterbatasan lahan pertanian	Pangan
	Kurangnya masyarakat berprofesi petani	Pangan
Belum optimalnya produktivitas pertanian	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya pertanian	Pertanian
	Belum optimalnya peningkatan potensi komoditas pertanian	Pertanian
Belum optimalnya penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum optimalnya pelayanan kebakaran	Belum optimalnya penyelenggaraan pemadam kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan sektor perikanan	Belum optimalnya produktivitas hasil perikanan tangkap dan budidaya	Kelautan dan Perikanan
	Masih adanya proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang bersifat konvensional/ tradisional	Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya kualitas pendidikan	Belum meratanya akses pendidikan	Pendidikan
	Belum optimalnya kompetensi dan kualitas guru	Pendidikan
Masih rendahnya literasi masyarakat	Masih rendahnya layanan perpustakaan	Perpustakaan
	Belum sesuainya penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan
	Belum tersedianya perpustakaan digital	Perpustakaan
	Belum adanya kebijakan untuk meningkatkan budaya membaca	Perpustakaan
Belum optimalnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan	Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
	Kurangnya akses ke organisasi dan kegiatan	Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya akses penyaluran aktivitas olahraga	Belum optimalnya penyelenggaraan event olahraga tingkat kota	Kepemudaan dan Olahraga
	Belum optimalnya layanan kesehatan	Kesehatan



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum optimalnya akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Belum optimalnya mutu tenaga kesehatan	Kesehatan
Tingginya daya tarik pencari kerja dari luar daerah untuk ke Batam	Masih kurangnya kompetensi SDM pencari kerja lokal (bersertifikasi)	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan	Tenaga Kerja
	Budaya kerja tenaga kerja lokal di bawah tenaga kerja luar Batam	Tenaga Kerja
	Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja yang telah dilatih	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya diseminasi informasi lowongan kerja	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja	Tenaga Kerja
Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	Belum optimalnya inventarisasi objek budaya	Kebudayaan
	Belum optimalnya pengelolaan objek kebudayaan	Kebudayaan
	Belum optimalnya pendidikan kebudayaan	Kebudayaan, Pendidikan
	Belum optimalnya promosi objek kebudayaan ke masyarakat Kota Batam	Kebudayaan
Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pembinaan ketahanan keluarga	Belum optimalnya upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya peran Perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Batam	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya pembinaan, pergerakan pengawasan kelompok ketahanan keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Belum optimalnya penerapan digitalisasi	Belum optimalnya infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika	Komunikasi dan Informatika
	Belum optimalnya validasi data yang di publikasi	Statistik
	Masih rendahnya tingkat keamanan informasi	Persandian



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belum optimalnya kualitas data kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data pribadi	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Belum optimalnya penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
Belum optimalnya tata kelola arsip	Belum optimalnya SDM kearsipan (ASN yang sesuai dengan NSPK Kearsipan)	Kearsipan
	Belum melakukan penataan dan pengelolaan arsip di bawah 10 tahun di perangkat daerah dan di atas 10 tahun di Lembaga kearsipan daerah (Dispusip) sesuai dengan NSPK Kearsipan	
	Belum adanya <i>record center</i> untuk arsip di bawah 10 tahun di Perangkat Daerah dan Lembaga kearsipan daerah (Dispusip) sesuai dengan NSPK Kearsipan	
	Belum adanya depo arsip statis di Lembaga kearsipan daerah sesuai dengan NSPK Kearsipan	
Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan terhadap masyarakat	Belum optimalnya infrastruktur dan suprastruktur	Kelurahan Kecamatan
Belum optimalnya implementasi inovasi dan kelitbangan	kurangnya sinergi antara hasil penelitian dan kebutuhan praktis di lapangan	Penelitian dan Pengembangan
Belum optimalnya penanganan pemerintahan umum	Belum optimalnya penguatan ideologi Pancasila	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya deteksi dini konflik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang berpolitik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan Ormas	Kesatuan Bangsa dan Politik



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum optimalnya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum	Upaya penegakan peraturan daerah masih belum optimal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum optimalnya kualitas SDM ASN di Kota Batam	Belum optimalnya penjenjangan karier ASN	Kepegawaian
	Belum optimalnya kinerja ASN	Kepegawaian
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Kepegawaian
Kualitas perencanaan Pembangunan daerah kota Batam masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya perencanaan Pembangunan kota Batam yang akuntabel, efektif dan efisien	Perencanaan
	Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan Pembangunan daerah	Perencanaan
Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Masih kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Sekretariat Daerah
Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset Kota Batam	Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah di seluruh perangkat daerah	Keuangan
	Belum optimalnya pengelolaan aset Kota Batam	Keuangan
Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan pajak dan retribusi	Keuangan
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya tertib administrasi aset tanah pemko dan tanah masyarakat	Pertanahan
Belum optimalnya akses layanan transportasi	Belum optimalnya konektivitas moda transportasi penghubung/ terintegrasi antar wilayah	Perhubungan
	Belum optimalnya sarana prasarana transportasi publik	Perhubungan
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas	Perhubungan
	Belum optimalnya pelayanan parkir	Perhubungan
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Belum maksimalnya kemantapan jalan dan kelengkapan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya penanganan banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya pelayanan air bersih di wilayah <i>hinterland</i>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan ruang terhadap kesesuaian rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya pelayanan air limbah domestik di wilayah <i>hinterland</i>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum Optimalnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas PSU (Prasarana Sarana Utilitas) Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Belum Optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Masih adanya Hunian Tidak Layak Huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perlunya peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlunya peningkatan kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Lingkungan Hidup
	Perlunya peningkatan kinerja pengawasan lingkungan	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengelolaan RTH Publik	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah	Lingkungan Hidup, Kecamatan
	Minimnya sarana prasarana tempat pemilahan sampah dan kurangnya sarana TPST/TPS 3R	
	Masih banyaknya tempat pengumpulan sampah yang liar	
Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Perindustrian
Belum optimalnya peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro
	Belum optimalnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	Koperasi dan Usaha Mikro
	Belum optimalnya ketersediaan SDM dan peningkatan kompetensi pengawas koperasi	Koperasi dan Usaha Mikro
Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara	Belum optimalnya daya saing pariwisata	Pariwisata
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	Pariwisata
Belum optimalnya pertumbuhan realisasi investasi	Belum optimalnya dukungan iklim investasi	Penanaman Modal
	Belum optimalnya promosi peluang investasi	Penanaman Modal
Menurunnya daya beli masyarakat	Belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sektor perdagangan	Perdagangan
	Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal di Kota Batam	Perdagangan
	Belum optimalnya pelaksanaan stabilitas harga dan stok Bahan	Perdagangan



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kota Batam	

2.3.2.Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Isu strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dirumuskan melalui isu internasional, isu nasional (RPJMN 2025-2029), isu strategis daerah (Arahan RPJMN terhadap Provinsi Kepulauan Riau dan KLHS RPJMD).

2.3.2.1 Isu Internasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat berbagai isu strategis internasional (isu global) yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kota Batam sebagai daerah industri yang berdaya saing global. Berikut penjabaran isu global:

Gambar II.55.

Isu Global yang Sesuai dengan Kondisi Batam



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan internasional di Indonesia, Kota Batam memiliki posisi strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Kedekatan geografis Batam dengan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan posisinya di kawasan ekonomi strategis menjadikan Batam sangat dipengaruhi oleh kebijakan dagang global dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada stabilitas industri manufaktur dan sektor logistik di Batam. Selain itu, adanya ketegangan geopolitik peran Timur Tengah memberikan dampak signifikan pada stabilitas harga pangan, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan. Untuk menghadapinya, Batam perlu memperkuat ketahanan ekonomi dengan diversifikasi sumber bahan baku, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok industri dan ketahanan pangan. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kawasan industri modern yang terintegrasi juga menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing Batam di tengah ketidakpastian ekonomi global.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Sebagai daerah industri dan kawasan pesisir, Batam rentan terhadap dampak perubahan iklim global seperti kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu, dan perubahan pola cuaca ekstrem. Kondisi ini dapat

mengganggu operasional industri, infrastruktur pelabuhan, serta produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang komprehensif, seperti penguatan infrastruktur penahan banjir, penerapan konsep industri ramah lingkungan (*green industry*), dan pengembangan energi terbarukan untuk mendukung ketahanan energi di kawasan industri. Selain itu, promosi teknologi produksi bersih dan penggunaan material ramah lingkungan dalam aktivitas manufaktur akan meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat industri berkelanjutan di tingkat global.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Era Industri 5.0 yang ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan otomatisasi dalam proses industri menuntut Batam untuk mempercepat transformasi teknologi guna meningkatkan daya saing industri manufaktur dan teknologi tinggi. Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat teknologi dan industri cerdas (*smart industry*) dengan memanfaatkan ekosistem kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) dan dukungan investasi asing langsung (FDI). Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, seperti semikonduktor, elektronika, dan perakitan otomotif, perlu dioptimalkan dengan memperkuat kemitraan global dan mendorong inovasi berbasis riset dan pengembangan (R&D). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kawasan industri, efisiensi logistik, dan pemasaran produk akan meningkatkan daya saing Batam di pasar global.

4. Pergeseran Identitas Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam aspek identitas budaya. Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan akses informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah. Namun, di balik manfaatnya yang begitu luas, ada fenomena pergeseran identitas budaya yang semakin nyata. Masyarakat, terutama generasi muda, kini lebih mudah terpapar oleh budaya asing melalui media sosial, platform streaming, dan aplikasi berbasis internet lainnya. Hal ini menyebabkan nilai-nilai tradisional dan lokal perlahan-lahan tergeser oleh tren global yang lebih populer dan dianggap modern.

Namun, fenomena ini tidak sepenuhnya negatif jika dikelola dengan bijaksana. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk melestarikan

identitas budaya dengan mendigitalisasi warisan budaya lokal, seperti cerita rakyat, tari tradisional, dan kuliner khas. Selain itu, platform digital juga bisa menjadi media promosi budaya kepada dunia internasional. Oleh karena itu, upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya global dan pelestarian budaya lokal utamanya melayu di Kota Batam perlu terus dilakukan.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional (RPJMN 2025-2029)

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kota Batam. Berikut penjabaran isu strategis nasional:

Gambar II.56
Isu Nasional yang Sesuai dengan Batam



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional melalui penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) dan pusat industri, Kota Batam memiliki posisi strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Batam dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur dan industri elektronik terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan pasar internasional, terutama Singapura dan Malaysia. Untuk memperkuat resiliensi ekonomi, Batam perlu

mendorong diversifikasi industri dengan memperluas investasi di sektor teknologi tinggi, otomotif, dan pengolahan logistik. Selain itu, pengembangan infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas logistik, serta insentif investasi akan memperkuat daya saing Batam sebagai pusat industri global. Dengan memperkuat ekosistem investasi dan mempercepat pengembangan kawasan industri terpadu, Batam dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

2. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendorong daya saing nasional. Batam memiliki potensi besar dalam pengembangan SDM berorientasi industri dan teknologi tinggi karena kehadiran kawasan ekonomi khusus dan pusat industri global. Penguatan pendidikan vokasi berbasis teknologi manufaktur, pelatihan tenaga kerja di sektor industri, serta pengembangan pusat riset dan inovasi akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri akan mempercepat transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan literasi digital dan keahlian teknis tenaga kerja di sektor teknologi informasi, pengolahan logistik, dan otomasi industri agar Batam dapat bersaing di tingkat global. Dengan memanfaatkan status sebagai kawasan perdagangan bebas, Batam memiliki peluang besar untuk menciptakan SDM yang mampu menghadapi tantangan industri 5.0 dan meningkatkan daya saing di kancah internasional.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Di Batam, laju industrialisasi dan pertumbuhan sektor manufaktur telah mendorong peningkatan jumlah kelas menengah, terutama di kalangan pekerja industri dan profesional. Namun, di sisi lain, ketimpangan ekonomi antara kelompok pekerja tetap dan informal, serta antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing, masih menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah perlu memperkuat inklusi ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kerja. Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dalam industri teknologi tinggi, otomotif, dan logistik akan memperkuat posisi masyarakat kelas menengah di Batam. Selain itu, penguatan koperasi dan

program kewirausahaan berbasis industri kreatif akan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, terutama di sektor ekonomi informal. Pemerataan pembangunan kawasan industri dan permukiman juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memperkuat daya tahan sosial-ekonomi masyarakat Batam.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas memiliki tantangan unik dalam pengelolaan regulasi dan investasi lintas batas negara. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat arus investasi asing. Penerapan sistem *e-government* yang terintegrasi, penguatan sistem perizinan berbasis digital, dan percepatan layanan publik di kawasan industri akan mempercepat proses bisnis dan meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat industri global. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan investasi dan pengawasan regulasi di sektor perdagangan dan industri akan memperkuat efektivitas kebijakan daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku industri dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan terciptanya tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Rendahnya Produktivitas

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi di Indonesia. Di Batam, tantangan ini muncul dalam bentuk ketergantungan pada teknologi impor dan rendahnya kapasitas tenaga kerja dalam sektor teknologi tinggi. Untuk meningkatkan produktivitas, Batam perlu memperkuat riset dan pengembangan (R&D) di sektor manufaktur dan otomotif, mempercepat alih teknologi dari perusahaan asing, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam teknologi otomasi dan kecerdasan buatan. Pengembangan pusat inovasi dan teknologi di kawasan industri Batam dapat menjadi motor utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat daya saing global. Dalam RPJMN 2025-2029 telah memberikan arahan pembangunan kepada Kota Batam dengan penjabaran sebagai berikut:



Tabel II.85.

Highlight Intervensi RPJMN 2025-2029 terhadap Kota Batam

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam)	Pengembangan kawasan perkotaan Batam mencakup beberapa aspek strategis, antara lain: • Penyusunan <i>masterplan</i> penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan permasalahan perkotaan secara terpadu. • Pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau. • Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. • Penataan permukiman kumuh secara terpadu di kawasan perkotaan. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang terintegrasi dengan Jalan Tol Batam-Bintan. Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun, dengan sektor industri prioritas meliputi: Industri semikonduktor, Industri mesin dan perlengkapan, Industri dirgantara, Industri transportasi laut dan galangan kapal, Hilirisasi bauksit, Industri logam, besi, dan baja, Industri berteknologi tinggi, Industri hijau dan industri halal Pengembangan Politeknik Negeri Batam menjadi universitas/institut teknologi bertaraf <i>world-class research university</i> berbasis potensi wilayah. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan dan pengembangan balai latihan kerja sesuai kebutuhan industri wilayah. Pembangunan PLTS Apung di Waduk Duriangkang. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping–WNTS. Pembangunan Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera–Kepulauan Meranti–Karimun–Batam–Bintan. Pengembangan layanan unggulan kesehatan (ibu-anak, kanker, jantung, stroke) dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Embung Fatimah Kota Batam (PHTC). Pemenuhan pelayanan dasar di Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kota Batam: Belakang Padang. Pengembangan <i>Green Tourism</i> di Batam. Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau di Batam.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kota Batam memiliki peranan strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kepulauan Riau melalui penataan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan layanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau, serta peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang diselaraskan dengan kebutuhan industri. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan logistik, pengembangan ekosistem industri 4.0, serta integrasi rantai pasok internasional akan meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi industri di Batam. Dengan memperkuat ekosistem inovasi dan mempercepat pengembangan SDM berbasis teknologi, Batam dapat menjadi pusat industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan berkontribusi dalam penguatan struktur ekonomi nasional. Pengembangan konektivitas juga menjadi fokus utama melalui pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan Jalan Tol Batam-Bintan yang mendukung pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun di sektor semikonduktor, mesin, dirgantara, transportasi laut, galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, baja, industri teknologi tinggi, industri hijau, dan halal. Selain itu, pengembangan Politeknik Negeri Batam menjadi universitas bertaraf internasional, pembangunan PLTS Apung di Waduk Duriangkang, pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping–WNTS, dan jaringan transmisi listrik 500 kV akan memperkuat ketahanan energi dan daya saing teknologi Batam. Di bidang kesehatan, pengembangan layanan unggulan di RSUD Embung Fatimah (PHTC) dan pemenuhan pelayanan dasar di Kecamatan Belakang Padang terus dioptimalkan. Batam juga berperan penting dalam pengembangan green tourism dan destinasi regeneratif untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kota Batam dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan

nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

➤ RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
 2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Kota Batam memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi RPJMN 2025-2029, sebagai pusat ekonomi dan industri di wilayah perbatasan, Batam berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional melalui

pengembangan industri, perdagangan, dan jasa berbasis digital serta berkelanjutan. Dalam mewujudkan delapan misi utama (Asta Cita) RPJMN, Batam berkontribusi melalui berbagai sektor. Dari aspek ideologi dan tata kelola pemerintahan, Batam dapat memperkuat transparansi serta meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Batam mendorong kemandirian bangsa melalui pengembangan ekosistem industri digital, investasi energi terbarukan, dan optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas untuk hilirisasi sumber daya alam. Pembangunan SDM dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian melalui pendidikan vokasi industri serta pemberdayaan kelompok rentan dalam dunia kerja. Sebagai langkah percepatan, *Quick Wins* yang dapat diimplementasikan mencakup peningkatan akses kesehatan, pembangunan infrastruktur pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dukungan terhadap UMKM dan *startup*, penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja industri, serta optimalisasi penerimaan daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Kontribusi Batam dalam program prioritas nasional juga signifikan, mencakup swasembada pangan, energi, dan air melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penguatan pendidikan dan digitalisasi sebagai pusat industri berbasis teknologi, serta hilirisasi SDA dan industrialisasi maritim yang didukung sektor galangan kapal dan perikanan. Selain itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif turut diperkuat dengan wisata bahari serta wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*). Dengan optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ekonomi digital, Batam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, berkontribusi pada pencapaian target RPJMN 2025-2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

2.3.2.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan permasalahan mendasar atau tantangan utama yang dihadapi oleh suatu daerah dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Isu strategis melihat dari tantangan eksternal maupun internal serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

A. Telaah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis Provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah antara lain:

1. Kualitas Pembangunan Manusia yang belum optimal

2. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang belum optimal
3. Kemiskinan dan Pengangguran
4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Pemajuan Budaya melayu yang belum optimal
6. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan hidup
7. Infrastruktur wilayah yang belum merata dan terintegrasi

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, rancangan pembangunan Kota Batam harus selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar acuan dalam pengembangan dan merencanakan Kota Batam tetap sejalan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan visinya **“Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata”** dan dijabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan di Kota Batam antara lain:

1. Peningkatan *multiplier effect* aktivitas ekonomi KPBPB
2. Pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan industri hijau, termasuk transisi menuju EBT
3. Optimalisasi pariwisata sejarah dan religi, pariwisata kesehatan, dan *grey tourism*

B. Telaah RPJPD Kota Batam 2025-2045

Isu strategis RPJPD memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah pada jangka panjang. Isu strategis ini menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kota Batam

yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Optimalisasi Bonus Demografi sebagai Kesempatan Akselerasi Pembangunan SDM

Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.

Bonus demografi dapat menjadi peluang dan permasalahan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Perlu adanya kesiapan yang matang dengan meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan melalui peningkatan akses lulusan SMA untuk menempuh perguruan tinggi, pelatihan keterampilan dan pendidikan non formal, program keluarga berencana, peningkatan akses kesehatan dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bonus demografi akan menjadi bencana jika masyarakat berusia produktif tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dan tidak berdaya saing. Perlu mengetahui di tahun berapa puncak bonus demografi untuk mempersiapkan peluang yang ada sehingga produktivitas penduduk wilayahnya meningkat. Upaya ini dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia.

2. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan pesat di Kota Batam masih diiringi adanya permasalahan ketidaksetaraan yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu yang muncul adalah ketidaksetaraan ekonomi, dimana sebagian penduduk belum merasakan manfaat pembangunan secara merata. Perbedaan akses pendidikan dan keterampilan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam, dengan tantangan dalam memberikan peluang pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat Kota Batam.

Mobilitas sosial dan peluang pekerjaan juga menjadi isu peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan perluasan peluang kerja dan mobilitas sosial menjadi kunci bagi pemerataan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan kesetaraan gender juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan merata.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan, Pemerintah Kota Batam membutuhkan kerjasama dengan seluruh stakeholder pembangunan. Diperlukan sinergi yang lebih inklusif dan pelaksanaan program-program yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini. Hanya dengan langkah- langkah konkret dan kolaborasi yang kuat, Kota Batam dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

3. Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Kota Batam menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan. Dengan struktur ekonominya yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, tengah mengalami proses transformasi ekonomi berkelanjutan. Sektor ini menjadi unggulan dengan kontribusi sebesar 58,05%, diikuti oleh sektor konstruksi 20,23% dan perdagangan besar dan eceran 5,88%. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam, Kota Batam yang terletak strategis 12,5 mil laut dari Singapura dan di jalur pelayaran internasional, mampu berkembang pesat sebagai pusat industri. Pertumbuhan industri yang signifikan diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan potensi ekonomi kreatif di masa depan.

Transformasi ekonomi berkelanjutan berpedoman pada 3 (tiga) pilar berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan transformasi ekonomi berkelanjutan harus mengedepankan keseimbangan ekosistem lingkungan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), antara lain:

1. menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
3. mewujudkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dengan proporsi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
4. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai; dan
5. mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahan

Transformasi ekonomi berkelanjutan yang berprinsip pada aspek sosial di Kota Batam diselenggarakan dengan melibatkan penguatan sektor usaha lokal, pelatihan kewirausahaan, dan pendukung infrastruktur untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis lokal. Melalui pendekatan ini, Kota Batam berupaya menciptakan transformasi ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga inklusif dan adil secara sosial.

4. Penyediaan Infrastruktur yang Modern

Penyediaan infrastruktur modern di Kota Batam merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan memperkuat posisi kota ini sebagai pusat industri, perdagangan, jasa, alih kapal, dan pariwisata. Kota Batam, sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia, telah memulai transformasi melalui penyediaan infrastruktur modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah dan sektor swasta telah bersinergi untuk mengembangkan sejumlah aspek infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Pelabuhan yang menjadi jantung aktivitas perdagangan, perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi arus barang dan penumpang yang semakin meningkat. Sementara itu, Bandara Internasional Hang Nadim perlu didorong untuk lebih berperan sebagai gerbang udara utama yang menghubungkan Kota Batam dengan destinasi internasional.

Infrastruktur telekomunikasi yang modern perlu diperkuat melalui konektivitas digital sehingga mampu mendukung perkembangan bisnis dan komunikasi di era globalisasi. Dengan demikian, melalui penyediaan infrastruktur modern, Kota Batam semakin mengokohkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang dinamis dan berkembang di Indonesia.

5. Perwujudan *Good Governance*

Isu perwujudan *good governance* di Kota Batam melibatkan sejumlah aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan kota. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa area, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai standar *good governance* yang optimal.

Kota Batam perlu meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya daerah serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Peningkatan transparansi dapat diwujudkan dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peningkatan

akuntabilitas melalui peningkatan kompetensi daya saing sumber daya aparatur yang inovatif dan kompetitif. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi diwujudkan melalui digitalisasi layanan publik.

6. Mewujudkan SDM yang Berkarakter dan Berbudaya

Kondisi masyarakat Kota Batam yang heterogen terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras membentuk sebuah dinamika dalam tatanan sosial yang menjadikan modal pembangunan Kota Batam jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak dan berbudaya di Kota Batam melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pendidikan moral dan karakter, kearifan lokal dalam pembangunan dan peningkatan budaya kerja. Pendidikan moral di sekolah dan program pengembangan kepribadian luar kurikulum membentuk dasar nilai yang kuat bagi generasi muda. Melalui upaya ini, diharapkan terbentuknya SDM yang memiliki kesadaran moral yang kuat, menghargai keberagaman budaya, berprinsip dalam perilaku kerja, serta aktif dan berkontribusi dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Ketahanan Ekologi Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Ketahanan ekologi menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kota Batam mengarah pada integrasi harmonis antara upaya pelestarian lingkungan alam dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Isu ini mencakup berbagai aspek secara berkelanjutan, termasuk perlindungan Sumber Daya Alam (SDA), mitigasi perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan ekologi menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kota Batam menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alam, mulai dari pengelolaan limbah dan polusi, pelestarian hutan *mangrove* dan lahan basah, hingga pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien. Kota Batam juga mendukung penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kota Batam berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ekologi pada Kota Batam, Pemerintah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya secara bijaksana dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ketahanan ekologi di Kota Batam. Melalui upaya tersebut, diharapkan Kota Batam dapat mengembangkan model pembangunan yang berkelanjutan, yang menghargai dan melindungi lingkungan alamnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya secara menyeluruh.

C. Telaah KLHS RPJMD Kota Batam

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS harus menjadi dasar perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. KLHS mengharuskan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta rekomendasi perbaikan jika ditemukan potensi pelampauan kapasitas. Selain itu, KLHS mencakup berbagai aspek seperti kinerja ekosistem, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, guna mendukung kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Sinkronisasi antara isu strategis dalam KLHS dan isu RPJMD menjadi sangat penting agar perencanaan pembangunan daerah tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan. Penyusunan isu strategis hasil dari identifikasi permasalahan di dokumen daerah terdahulu, dokumen atau literatur lain, dan keterkaitan isu dengan enam muatan dan TPB, serta masukan dari konsultasi publik pertama (KP I). Hasilnya adalah diperoleh rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Batam sebagai berikut: (1) Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan, (2) Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan, (3) Ketahanan Pangan, (4) Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan, (5) Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesetaraan Gender, (6) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, (7) Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM, (8) Pengendalian Laju Inflasi, (9) Pusat Ekonomi Wilayah, (10) Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku, (11) Pengelolaan Limbah dan Persampahan, (12) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan, (13) Alih Fungsi lahan, (14) Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI), (15) Peningkatan Ancaman Bencana Alam Akibat Perilaku Manusia,



(16)Pelaksanaan Regulasi dan Hukum, serta (17) Peningkatan Pelaksanaan *Good and Smart Governance*. Adapun sinkronisasi isu terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.86.

Sinkronisasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu RPJMD Kota Batam

ISU KLHS RPJMD BATAM	ISU STRATEGIS
-Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM -Pengendalian Laju Inflasi -Pusat Ekonomi Wilayah	Persaingan Global
Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Disparitas Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan
Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku	Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah hinterland, yang menghambat pemerataan pembangunan dan transformasi digital
Pengelolaan Limbah dan Persampahan	Pengelolaan Sampah Masih Berbasis Konvensional dan Belum Ramah Lingkungan
Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan	Bencana Akibat <i>Human Error</i> dan Aktivitas Pembangunan
Alih Fungsi Lahan	
Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI)	
Peningkatan Ancaman Bencana Alam Akibat Perilaku Manusia	
Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan	Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan	
Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesenjangan Gender	
Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Ketahanan Pangan	
Peningkatan Pelaksanaan Good and Smart Governance	. Pelayanan Perizinan Terpadu -Perlunya peningkatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>
Pelaksanaan Regulasi dan Hukum	Meningkatnya Dampak Negatif Arus Informasi di Era Digital pada Karakter dan Norma di Masyarakat

Keterkaitan antara isu dalam KLHS dan RPJMD mencerminkan hubungan strategis dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan mendukung optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan. Ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan pembangunan infrastruktur wilayah berperan dalam mengurangi disparitas pembangunan dan memperkuat pusat ekonomi wilayah. Pengendalian laju inflasi serta penguatan iklim investasi berbasis UMKM meningkatkan daya saing dalam persaingan pasar global. Pengelolaan limbah dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia mencerminkan urgensi tata kelola

lingkungan yang baik untuk mencegah bencana dan meningkatkan kualitas hidup. Penguatan moralitas masyarakat dan kesetaraan gender menjadi krusial dalam menghadapi dampak negatif arus informasi di era digital. Selain itu, pelaksanaan regulasi dan peningkatan *good governance* menjadi kunci dalam menciptakan iklim birokrasi yang transparan dan efektif untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Telaah RTRW Kota Batam Tahun 2021 - 2041

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029 harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam tahun 2021-2041 dikarenakan keselarasan antara keduanya merupakan landasan utama dalam memastikan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Batam terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dengan keselarasan antara kedua rencana ini, pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam RTRW, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di kemudian hari di Kota Batam. Keselarasan antara RPJMD dan RTRW merupakan bagian dari strategi yang penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batam.

Sesuai penjelasan dalam Undang – Undang no. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, muatan tata ruang diwujudkan melalui struktur dan pola ruang. Adapun struktur ruang dijelaskan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang mengacu pada distribusi atau penyebaran unsur-unsur fisik atau fungsional. Muatan struktur ruang dalam RTRW Kota Batam tahun 2021 – 2041 dijelaskan melalui arah pemanfaatan struktur ruang dan indikasi program struktur ruang, yaitu sebagai berikut.

Tabel II.87.

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Kota Batam Tahun 2021-2024

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW	
				I	II
2.1.3	Transportasi Udara	Pengembangan kawasan bandar udara	Kec. Nongsa		
2.2	Sistem Jaringan Energi				
2.2.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Pengembangan jaringan infrastruktur Migas koridor Natuna-Batam	Kec. Belakang Padang-Tanjung Uncang (Kec. Batu Aji)		
2.2.2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); pengembangan BTS terpadu	Tersebar		
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi				
		pengembangan BTS terpadu	Kota Batam		
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kota Batam		
		Pemeliharaan waduk	Tersebar		
2.5	Infrastruktur Perkotaan				
		Pembangunan <i>Utility Tunnel</i>	Kota Batam		
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pipa transmisi	Tersebar		
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah perkotaan	Pulau Batam		
		Pembangunan sanitasi komunal (berbasis masyarakat) di wilayah pulau-pulau	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW	
				I	II
		Pembangunan <i>Wastewater Treatment Plan</i> (WWTP) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)	Kec. Bengkong		
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)	Kec. Nongsa		
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sistem jaringan evakuasi bencana	Kota Batam		
2.5.6	Sistem Jaringan Drainase	Pengembangan drainase primer	Tersebar		
2.5.7	Sistem Jaringan Pejalan Kaki	Pembangunan pedestrian	Tersebar		
2.5.8	Sistem Jaringan Jalur Sepeda	Pembangunan jalur sepeda	Tersebar		

Keselarasan antara program-program yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 dengan struktur ruang yang terdapat dalam dokumen RTRW Kota Batam tahun 2021-2041 penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan di Kota Batam berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta menghindari tumpang tindih penggunaan lahan. Selain itu, keselarasan antara program akan membantu dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, indikasi program rencana struktur ruang yang terkandung dalam RTRW Kota Batam 2021-2041 yang teridentifikasi perlu diacu pada sasaran pokok RPJMD Kota Batam 2025-2029 berdasarkan skala prioritas meliputi pengembangan dan monitoring sistem informasi rencana tata ruang; pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan; pengembangan fasilitas dan rute pelabuhan; pengembangan kawasan bandar udara; pengembangan jaringan infrastruktur Migas koridor Natuna-Batam; pembangunan PLTU, PLTGU, PLTS, PLTD; pengembangan BTS terpadu; pengelolaan DAS dan pemeliharaan waduk; pembangunan *utility tunnel*; pembangunan IPA dan pipa transmisi; pembangunan sanitasi komunal dan WWTP; pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3; pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS); pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sistem jaringan evakuasi bencana; pengembangan drainase primer; pembangunan pedestrian; dan pembangunan jalur sepeda.

Sesuai penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pola ruang dijelaskan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang menekankan pada pola atau tata letak. Adapun muatan pola ruang dalam RTRW Kota Batam tahun 2021-2041 dijelaskan melalui arah pemanfaatan pola ruang dan indikasi program pola ruang, seperti pada tabel berikut.



Tabel II.88.

Muatan Rencana Pola Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode	
				RTRW	
				I	II
1	Kawasan Peruntukan Lindung				
1.1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya				
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan hutan	Kota Batam		
1.2	Kawasan Perlindungan Setempat				
		Penghijauan kawasan sempadan waduk Sungai Harapan, Sungai Ladi	Kec. Sekupang		
		Pembangunan tebing penahan pantai	Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang		
		Penghijauan kawasan sempadan waduk Sekanak, Pemping, Bulang Lintang	Kec. Belakang Padang		
1.3	Kawasan Konservasi				
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan konservasi	Kota Batam		
1.4	Kawasan Cagar Budaya				
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan cagar budaya	Kota Batam		
1.5	Kawasan Ekosistem Mangrove				



No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode	
				I	II
		Penghijauan/penanaman <i>mangrove</i> kawasan pantai	Kota Batam		
		Penanaman <i>mangrove</i> pada kawasan rawan abrasi	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang		
		Penanaman <i>mangrove</i> di kawasan perlindungan <i>mangrove</i> yang rusak	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang		
		Rehabilitasi kawasan terumbu karang rusak	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang		
		Pengawasan dan monitoring kawasan terumbu karang	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang		
1.6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota				
		Pembangunan, penataan dan penghijauan RTH Kota Batam	Tersebar		
2	Perwujudan Kawasan Budidaya				
2.1	Kawasan Hutan Produksi				
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan hutan produksi	Kota Batam		
2.2	Kawasan Pertanian				
		Pengembangan kawasan peternakan Pulau Bulan	Kec. Belakang Padang		



No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode	
				I	II
		Pengembangan kawasan perkebunan Pulau Kinun, Pulau Subang Mas, Pulau Sempur dan pulau-pulau di wilayah <i>hinterland</i> lainnya	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang, Kec. Nongsa		
2.3	Kawasan Peruntukan Industri				
		Pengembangan Kawasan Industri Terpadu di Pulau Kepala Jeri	Kec. Belakang Padang		
		Pengembangan <i>Big Data Center/Colocation Server and Digital 5G Industry Nongsa</i>	Kec. Nongsa		
		Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Ladi dan Pulau Belakangsidi	Kec. Bulang		
		Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Sauh dan Ngenang	Kec. Nongsa		
2.4	Kawasan Pariwisata				
		Pengembangan dan penataan kawasan wisata Pulau Batam	Pulau Batam		
		Pengembangan dan penataan kawasan wisata Rempang, Galang dan Galang Baru	Kec. Galang		
2.5	Kawasan Permukiman				



No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode	
				RTRW	
				I	II
		Peremajaan perumahan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan	Kota Batam		
		Pembangunan rusunawa	Pulau Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi Kawasan perkantoran	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan kesehatan	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan pendidikan	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peribadatan	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi Kawasan olahraga	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi Kawasan transportasi	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan sumberdaya air	Kota Batam		
		Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan evakuasi bencana	Kota Batam		

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Kota Batam tahun 2021-2041			
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode	
				RTRW	
				I	III
2.6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan				
		Pengembangan Pulau Karang Nipah	Kec. Belakang Padang		
		Penataan pulau Pelampong	Kec. Belakang Padang		
		Penataan Pulau Puteri	Kec. Nongsa		
3	Perwujudan Kawasan Strategis Kota				
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi				
		Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota kawasan pariwisata bahari	Kota Batam		
3.2	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya				
		Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota kawasan sejarah kamp Vietnam	Kota Batam		
		Revitalisasi Kawasan Bersejarah <i>Ex- Camp</i> Vietnam di Pulau Galang	Kota Batam		

Sumber: Perda RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

Keselarasan program RPJMD penting untuk mengacu kepada pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Program-program ini dapat dijadikan acuan dalam proses memanfaatkan lahan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kota Batam. Selain itu, dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang juga mengacu pada ketentuan pola ruang RTRW Kota Batam, diharapkan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD tidak melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Tentunya dari seluruh indikasi program pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kota Batam, telah dilakukan pemilihan beberapa program yang akan diacu dalam RPJMD Kota Batam berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, indikasi program rencana pola ruang yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2021-2041 yang teridentifikasi perlu diacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029 meliputi program pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan tata batas kawasan hutan lindung; penghijauan kawasan waduk sungai; pembangunan tebing penahan pantai; pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan konservasi, cagar budaya, hutan produksi; penghijauan dan penanaman *mangrove* serta rehabilitasi terumbu karang; pembangunan, penataan dan penghijauan RTH Kota Batam; pengembangan kawasan peternakan dan perkebunan; pengembangan kawasan industri; pengembangan *Big Data Center/Colocation Server and Digital 5G*; pengembangan dan penataan kawasan wisata; pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan perkantoran, kesehatan, pendidikan, peribadatan, olahraga, sumber daya air dan evakuasi bencana; pembangunan dan peremajaan permukiman; pengembangan dan penataan pulau-pulau; pengembangan dan penyusunan RTR kawasan strategis pariwisata Kota Batam; dan penyusunan dan revitalisasi RTR kawasan bersejarah Kota Batam.

2.3.2.4 Isu Strategis Kota Batam

Isu strategis dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029 merujuk pada permasalahan yang memiliki dampak signifikan terhadap wilayah tertentu. Mengetahui isu-isu strategis memiliki manfaat besar dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah. Sesuai dokumen rencana pembangunan nasional dan daerah, dilakukan penyandingan terhadap beberapa muatan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, isu strategis RPJPD Kota Batam Tahun 2025 – 2045, serta KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Penyandingan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Persaingan Global

Kota Batam menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing global di tengah dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks. Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Batam memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing dan meningkatkan nilai ekspor. Namun, persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menuntut Batam untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan regulasi yang mendukung kemudahan berbisnis. Strategi peningkatan daya saing global perlu difokuskan pada pengembangan sektor industri berbasis teknologi tinggi, optimalisasi ekosistem logistik, serta insentif fiskal yang kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat posisi Batam sebagai pusat ekonomi di Asia Tenggara.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu

Pelayanan perizinan yang cepat dan transparan menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan investasi di Kota Batam. Saat ini, Batam telah menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, masih terdapat kendala dalam hal kecepatan proses, ketidakjelasan regulasi, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi yang memperlambat realisasi investasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas lembaga, simplifikasi regulasi, serta penerapan teknologi digital yang lebih terintegrasi. Dengan sistem perizinan yang efisien dan transparan, Batam dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat masuknya modal asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu *highlight* intervensi RPJMN terhadap Kota Batam adalah Pemenuhan layanan dasar di Kecamatan Perbatasan. Maka dalam RPJMD Kota Batam perlu memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Posisi Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan kecamatan perbatasan sebagai kawasan strategis yang memerlukan penguatan layanan dasar, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, maupun pelayanan publik lainnya.

3. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Disparitas Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan

Disparitas pembangunan antar wilayah di Kota Batam masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Konsentrasi pembangunan di kawasan industri

dan perdagangan menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah pinggiran. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pengembangan wilayah perlu diarahkan pada penyelarasan pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh kecamatan. Peningkatan konektivitas antar wilayah, pembangunan pusat pelayanan publik di daerah terpencil, serta penguatan program pembangunan berbasis komunitas menjadi kunci dalam menjamin pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

4. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Meskipun Kota Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang krusial. Tingkat kemiskinan yang fluktuatif mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Untuk itu, strategi pemerataan kesejahteraan perlu difokuskan pada penguatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Peningkatan efektivitas program bantuan sosial berbasis data yang akurat dan integrasi lintas sektor diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

5. Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan

Bonus demografi di Kota Batam menjadi peluang besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengingat tingginya proporsi penduduk usia produktif. Namun, potensi ini dapat menjadi beban jika kualitas SDM tidak memadai. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan SDM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sehat, Batam dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai pendorong utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Perlunya akselerasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan *Good Governance*

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kota

Batam. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan indeks perilaku anti korupsi, dan penguatan pengawasan internal. Namun, tantangan dalam pengelolaan data, keamanan siber, dan keterbatasan kapasitas aparatur masih menjadi kendala dalam penerapan reformasi birokrasi. Dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas SDM birokrasi, serta mempercepat digitalisasi layanan publik, Batam dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

7. Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah *hinterland*, yang menghambat pemerataan pembangunan dan transformasi digital

Belum meratanya akses telekomunikasi di Kota Batam merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam kerangka pembangunan wilayah berbasis teknologi dan konektivitas digital. Meskipun Batam dikenal sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan nasional dengan potensi ekonomi yang tinggi, namun pemerataan infrastruktur telekomunikasi masih belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah *hinterland*. Ketimpangan ini disebabkan belum optimalnya pembangunan menara telekomunikasi, terbatasnya investasi penyedia layanan di daerah dengan kepadatan rendah, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengaturan dan penerbitan izin pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi efektivitas layanan publik berbasis digital, serta menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam lingkup Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terpadu yang mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat guna mempercepat penyediaan infrastruktur serta penyempurnaan regulasi yang mendukung pemerataan akses digital secara berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Pengelolaan Sampah Masih Berbasis Konvensional

Pengelolaan sampah di Kota Batam masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengolahan dan pemanfaatan sampah. Tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, sehingga menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan tumpukan sampah di wilayah permukiman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan sampah menjadi energi, serta penguatan

peran masyarakat dalam program daur ulang dan pengurangan sampah. Dengan strategi ini, Batam dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta berkelanjutan.

9. Bencana Akibat *Human Error* dan Aktivitas Pembangunan

Tingginya aktivitas pembangunan dan industrialisasi di Kota Batam meningkatkan risiko terjadinya bencana akibat kelalaian manusia (*human error*). Kasus kebakaran, kecelakaan kerja, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Untuk itu, penguatan regulasi keselamatan kerja, peningkatan kapasitas tanggap darurat, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas pembangunan menjadi prioritas utama dalam mengurangi risiko bencana. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap standar operasional juga menjadi langkah strategis dalam meminimalkan dampak bencana.

10. Meningkatnya Dampak Negatif Arus Informasi di Era Digital pada Karakter dan Norma di Masyarakat

Perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi digital di Kota Batam telah membawa dampak positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan konten negatif di media sosial turut mempengaruhi karakter dan norma masyarakat. Perubahan pola komunikasi yang semakin individualistik juga berpotensi melemahkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, edukasi mengenai etika bermedia, serta pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi merusak moral masyarakat. Dengan strategi ini, Batam dapat menciptakan masyarakat yang lebih bijak dan tangguh dalam menghadapi era digital.

Telah dilakukan pemetaan isu strategis pembangunan Kota Batam dengan mengkaji berbagai dimensi pembangunan secara komprehensif, yang mencakup potensi daerah, permasalahan aktual, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta keterkaitannya dengan isu global, nasional, dan regional. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan isu strategis daerah yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan.



Tabel II.89.

Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Batam

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD BATAM	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
Pertumbuhan Ekonomi Konsisten: Kota Batam mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebesar 6,69% pada 2024, didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. PDRB Per Kapita Meningkat: PDRB per kapita tumbuh dari Rp135,4 juta (2020) menjadi Rp182,5 juta (2024). Daya Saing Kawasan: Letak strategis di jalur pelayaran internasional serta penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) mendukung pengembangan investasi, industri, dan jasa. Pengembangan KEK: Terdapat pengembangan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan di pulau-pulau sekitar.	Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	-Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM -Pengendalian Laju Inflasi -Pusat Ekonomi Wilayah	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang belum optimal	Persaingan Global
			Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Rendahnya Produktivitas		
Ketersediaan Infrastruktur: Jaringan transportasi, energi, dan air cukup berkembang; potensi besar dalam pengembangan LRT/BRT, pelabuhan, dan bandara. Kualitas Lingkungan Fluktuatif: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun dari 70,71 (2021) menjadi 64,86 (2024) Pengelolaan Sampah dan Air Membaik: Waduk strategis dan layanan pengolahan limbah beroperasi aktif; lokasi KPLI-B3 di Kabil mendukung manajemen limbah industri.	Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Dampak Perubahan Iklim Global		Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan hidup	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Disparitas Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan
		Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku			Infrastruktur wilayah yang belum merata dan terintegrasi	Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah hinterland, yang menghambat pemerataan pembangunan dan transformasi digital
		Pengelolaan Limbah dan Persampahan				Pengelolaan Sampah Masih Berbasis Konvensional



POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD BATAM	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
		Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan				Bencana Akibat Human Error dan Aktivitas Pembangunan
		Alih Fungsi Lahan				
		Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI)				
		Peningkatan Ancaman Bencana Alam Akibat Perilaku Manusia				
Bonus Demografi dan Produktivitas SDM: Populasi usia produktif dominan, namun perlu penguatan keterampilan untuk menghindari jebakan kelas menengah. Layanan Dasar Meningkat: Akses sanitasi masih rendah (8,47%) tetapi layanan air bersih dan listrik baik. Konsumsi listrik per kapita mencapai 2.554 kWh. Gender dan Budaya Lokal: Identitas masyarakat Melayu dan Orang Laut tetap kuat meski terdesak urbanisasi. Perlu perhatian pada kesetaraan dan pelestarian budaya.	Belum Optimalnya Kualitas SDM dan Pembangunan Berbasis Gender	Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan		Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas Pembangunan Manusia yang belum optimal	Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
		Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan				
		Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesetaraan Gender				
Indeks Gini Fluktuatif: Indeks Gini meningkat dari 0,323 (2020) menjadi 0,348 (2024), menunjukkan ketimpangan pendapatan yang moderat. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan: Naik-turun, menunjukkan tantangan dalam distribusi pangan, meskipun IKP tinggi (88,83% di 2024). Akses Dasar Meningkat: Akses air minum perpipaan mencapai 90,81%, dan penanganan sampah meningkat menjadi 96,96% pada 2024.	Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas	Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
		Ketahanan Pangan				



POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD BATAM	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
Sistem Pemerintahan Terpusat dan Terkoneksi: Pusat-pusat pelayanan dikembangkan bertingkat (kota, sub-kota, lingkungan), memperkuat tata kelola pelayanan publik.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan Pelaksanaan <i>Good and Smart Governance</i>		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-Pelayanan Perizinan Terpadu -Perlunya akselerasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>
Warisan Budaya Melayu dan Orang Laut: Keberadaan masyarakat adat masih nyata, terutama dalam nilai-nilai hidup selaras dengan laut dan alam.	Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan dan Norma Masyarakat		Pergeseran Identitas Budaya Dampak dari Teknologi Informasi		Pemajuan Budaya melayu yang belum optimal	Meningkatnya Dampak Negatif Arus Informasi di Era Digital pada Karakter dan Norma di Masyarakat
Tantangan Urbanisasi: Perlu perhatian agar pembangunan tetap inklusif terhadap komunitas adat melalui perlindungan hak dan pelestarian budaya.						
Simbol Identitas Daerah: Tradisi Melayu dapat dikembangkan sebagai bagian dari branding wisata budaya Batam, memperkuat kohesi sosial di tengah dinamika modernisasi.						

Sumber: Analisis penyusun, 2025



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM

BAB 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

MENJELASKAN VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIJABARKAN KEDALAM TUJUAN DAN SASARAN YANG DIRUMUSKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI YANG DIJABARKAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Terbentuknya Batam sebagai kawasan industri menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan sektor-sektor potensial lainnya. Tidak hanya pada bidang industri manufaktur, sektor jasa, dan bidang lainnya pun turut mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan. Fenomena ini memberikan dampak positif terhadap dinamika perekonomian daerah, sehingga semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor. Ketersediaan beragam potensi investasi inilah yang menjadikan iklim investasi di Kota Batam mampu bertahan dan terus berkembang secara berkelanjutan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka strategis dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Visi dan misi ini merupakan arah pembangunan yang berasal dari Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2030, yaitu **Wali Kota Dr. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si. dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra**.

Secara geografis, Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia dan hanya berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) kilometer dengan negara Singapura. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Batam dalam mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah.

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Batam dalam jangka waktu lima tahun. Dalam hal ini sasaran dicerminkan sebagai sesuatu yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja pada akhir periode perencanaan maupun *breakdown* di masing-masing tahun. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan



dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

3.1.1 Visi RPJMD Kota Batam

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam perumusan visi daerah Kota Batam telah memperhatikan dan sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Asta Cita sendiri merupakan 8 (delapan) misi yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi, yaitu **“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

” BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Uraian Pokok Visi

Pokok Visi	Uraian
Madani dan Berbudaya	Madani dan Berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang



Pokok Visi	Uraian
	dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Inovatif	Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan	Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi



Pokok Visi	Uraian
	menghalangi terciptanya suatu <i>inclusive green economy</i>. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pusat Investasi dan Pariwisata	Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu serta peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi kota dengan pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam,



Pokok Visi	Uraian
	budaya, belanja, dan lainnya dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

3.1.2 Misi RPJMD Kota Batam

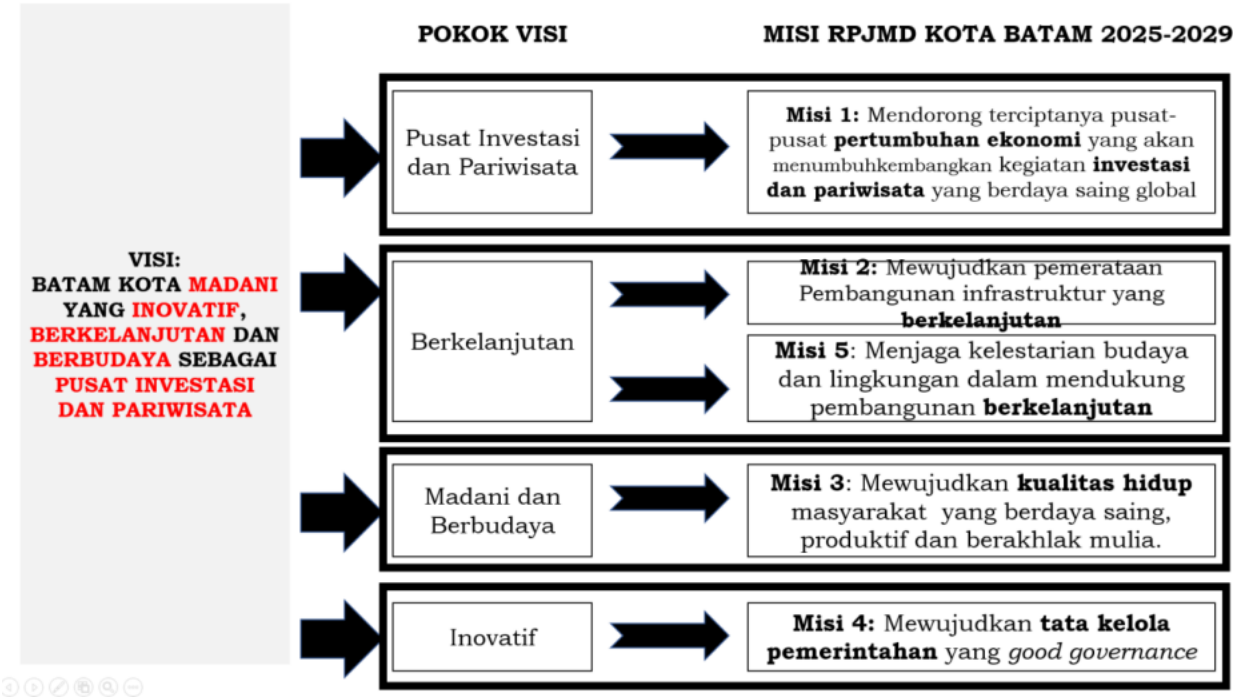
Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan kota dan provinsi dengan nasional serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Penjelasan misi harus dapat menyelaraskan muatan atau pokok visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah

kebijakan RPJPD periode berkenaan. Dengan memperhatikan pokok visi yang terkandung di dalam Visi Kota Batam Tahun 2025-2029, maka berikut ini dijabarkan keterkaitan Visi dengan Misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029:

Gambar III.1

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2025-2029



Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat **pertumbuhan ekonomi** yang akan menumbuhkan kegiatan **investasi dan pariwisata yang berdaya saing global**.
2. Mewujudkan **pemerataan pembangunan infrastruktur** yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan **kualitas hidup masyarakat** yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan **tata kelola pemerintahan** yang *good governance*.
5. Menjaga **kelestarian budaya dan lingkungan** dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Misi pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi prioritas, merupakan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pembangunan

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana Kota Batam harus mengintegrasikan misi pembangunan lima tahunan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah keterkaitan antara misi pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029 dengan Asta Cita.

Gambar III.2
Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita



Masing-masing misi sebagai upaya pencapaian visi Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

MISI 1 Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Kota Batam memiliki potensi investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena didukung oleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, dan konektivitas penerbangan internasional. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata, mulai dari pantai hingga pemandangan Kota Batam lainnya, menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang jasa.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur Batam juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Batam. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendorong peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi dan pariwisata terkemuka. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

MISI 2 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur konektivitas yang andal, merata dan ramah lingkungan, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menjadi prioritas Kota Batam untuk memenuhi layanan dasar permukiman yang andal dan inklusif dalam mendorong pemerataan serta peningkatan daya saing daerah.

MISI 3 Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang, sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

MISI 4**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance***

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

MISI 5**Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan**

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan kota dengan pengelolaan sampah terpadu, rendah karbon, serta ketersediaan ruang terbuka hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana.

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah.
- 1.2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata daerah.
- 1.3. Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi.
- 1.4. Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam.

2. Tujuan 2. Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 2.1. Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern.

3. Tujuan 3. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 3.1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat.
- 3.2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.
- 3.3. Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat.
- 3.4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Tujuan 4. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 4.1. Meningkatnya pelayanan publik.
- 4.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah.
- 4.3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah.
- 4.4. Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.

5. Tujuan 5. Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 5.1. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan.
- 5.2. Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah.

6. Tujuan 6. Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal sebagai pilar identitas dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Batam, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

6.1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Data Awal	Target					
		Tujuan/Sasaran		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA										
Misi 1 : Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Tujuan 1.Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	%	6,69	6,80-7,35	7,37-8,01	7,40-8,68	7,43-9,34	7,47-10,00	8,00-10,5
	Sasaran 1.1.Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota**	%	63,00	95,50	95,60	95,70	95,80	95,90	96,00
	Sasaran 1.2.Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**	Rasio	1,88	2,56	2,72	2,88	3,04	3,21	3,37



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 1.3.Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Sasaran 1.4.Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,24	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5
Misi 2 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Tujuan 2.Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72,55	63,84	69,24	74,31	78,31	81,26	85,60
	Sasaran 2.1.Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Rasio Konektivitas	Rasio	0,748	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	%	71,24	56,63	62,25	67,88	73,50	77,36	82,95
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	73,31	55,35	68,06	77,54	83,85	90,16	100,00



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3 : Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Tujuan 3. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan*	%	4,85	4,56-4,79	4,41-4,55	4,19-4,40	4,03-4,18	3,90-4,02	3,59-3,72
	Sasaran 3.1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Rasio Gini*	Rasio	0,348	0,334	0,332	0,330	0,328	0,326	0,324
	Sasaran 3.2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	7,68	7,19	7,14	7,09	7,04	6,98	6,93
	Sasaran 3.3. Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni	Nilai	NA	84,32	84,69	85,05	85,42	85,79	86,15
		Indeks Pembangunan Manusia*	Nilai	83,32	83,47	83,72	84,12	84,52	84,92	85,32
	Sasaran 3.4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan	%	75,03	75,16	75,52	76,21	76,83	77,46	78,15
		Indeks Kesehatan	Nilai	83,65	85,00	85,42	85,83	86,25	86,68	87,09
Misi 4 : Mewujudkan Tata kelola	Tujuan 4.Meningkatnya implementasi Reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
pemerintahan yang <i>good governance</i>	Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing									
	Sasaran 4.1. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**	Nilai	4,20	3,16	3,25	3,34	3,44	3,53	3,62
	Sasaran 4.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	nilai SAKIP	Nilai	68,85	70,30	72,80	74,30	76,60	78,30	80,30
	Sasaran 4.3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,10	78,30	78,40	78,50	78,60	78,80	79,00
	Sasaran 4.4. Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	Indeks	68,70	72,70	74,50	75,50	76,80	77,90	78,10
Misi 5 : Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Tujuan 5. Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah	Penurunan intensitas emisi GRK*	%	0,51	0,52	2,55	4,57	6,60	8,62	10,65
	Sasaran 5.1. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Nilai	64,86	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 5.2. Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	Nilai	108,89	101,89	100,96	100,04	99,11	98,18	97,25
	Tujuan 6. Meningkatnya Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lokal sebagai Pilar Identitas dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Nilai	0,05	0,18	0,36	0,52	0,68	0,84	1,00
	Sasaran 6.1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Warisan Budaya yang Terjaga Kelestariannya	%	5,65	19,05	38,10	53,57	69,05	84,52	100,00

*) : Indikator Sasaran Visi RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

**) : Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespon dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjabarkan misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses *cascading* kinerja, dimulai dari visi hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-20

jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Batam. Berikut strategi Kota Batam yang mendukung tujuan dan sasaran Kota Batam:

1. Strategi 1: Penguatan iklim usaha yang kondusif berbasis fasilitasi investasi produktif yang berorientasi pada sektor unggulan, pengembangan kepariwisataan daerah serta hilirisasi berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi tumbuh dan berdaya saing

Strategi **penguatan iklim usaha yang kondusif** diarahkan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mampu menarik investasi produktif dan **mendorong pertumbuhan sektor unggulan** Kota Batam melalui fasilitasi investasi yang tepat sasaran, pemerintah berupaya memperkuat rantai nilai perekonomian dengan mendorong hilirisasi produk industri, pengembangan kawasan industri terpadu yang berorientasi ekspor, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong efisiensi dan daya saing di pasar domestik maupun global, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam rantai pasok.

Selain memperkuat sektor unggulan, strategi ini juga menekankan **pengembangan kepariwisataan daerah** berbasis potensi lokal Kota Batam melalui pemanfaatan kekayaan alam bahari, budaya multietnis, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang internasional, diarahkan untuk menghadirkan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Keseluruhan strategi tersebut dilaksanakan dengan menciptakan **iklim usaha** yang transparan, kompetitif, dan ramah investasi. Pemerintah berperan aktif menyediakan regulasi yang jelas, infrastruktur pendukung, serta insentif yang mendorong kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, penguatan iklim usaha tidak hanya memacu investasi dan pariwisata, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Strategi 2: Percepatan penyediaan dan modernisasi infrastruktur transportasi, energi, permukiman yang mendukung distribusi barang dan jasa, penguatan ekosistem investasi dan kawasan industri yang produktif, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru

Strategi pemerintah dalam **percepatan penyediaan dan modernisasi infrastruktur** difokuskan pada pemenuhan **sarana dan prasarana** transportasi, energi, serta permukiman. Dengan infrastruktur yang memadai dan modern, distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih efisien, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat keterhubungan antar wilayah. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik, namun juga pengelolaan sistem transportasi, energi, dan permukiman secara cerdas, sehingga memberikan layanan dasar yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya.

Selain infrastruktur, strategi ini menekankan **pemenuhan infrastuktur perekonomian** yang produktif. Pemerintah mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru melalui pembangunan kawasan industri, insentif investasi, serta integrasi antara investor dengan pelaku usaha lokal. Infrastruktur transportasi yang modern memudahkan akses wisatawan, meningkatkan pengalaman pariwisata, dan mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti jasa, kuliner, dan perdagangan lokal. Dengan demikian, kombinasi modernisasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing

3. Strategi 3: Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, sumber daya pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang inovatif, adaptif dan melayani

Strategi **peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan** difokuskan pada penguatan kapasitas perangkat daerah agar lebih inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini mendorong penerapan **tata kelola digital** untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan dukungan sistem digital, proses perencanaan, penganggaran, serta pemantauan kinerja dapat berjalan lebih efisien dan akuntabel, sehingga kualitas pelayanan pemerintah meningkat secara signifikan.

Selain itu, strategi ini juga menekankan penguatan **sumber daya pemerintahan** melalui peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-22

penerapan sistem merit yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan sumber daya pemerintahan juga diarahkan pada optimalisasi kelembagaan dengan mendorong sinergi antar perangkat daerah, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini penting agar setiap unit pemerintahan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat **budaya kerja kolaboratif** serta membangun ekosistem pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, sumber daya pemerintahan tidak hanya berdaya dalam internal birokrasi, tetapi juga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Strategi 4: Membangun SDM unggul yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi modern sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif

Strategi **peningkatan SDM unggul** difokuskan pada pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak **ekonomi modern** serta upaya **mewujudkan kesejahteraan masyarakat**. Upaya ini mencakup melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan keterampilan vokasi dan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan budaya kerja yang inovatif dan berdaya saing global. penyediaan akses layanan dasar dapat dinikmati merata oleh seluruh lapisan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial.

Pemenuhan **layanan pendidikan dan kesehatan** yang berkualitas serta berdaya saing menjadi salah satu fokus dalam membangun SDM yang unggul. Peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan tidak hanya mendukung kualitas layanan publik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sumber daya manusia yang produktif dan berkompetensi tinggi. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan akses layanan dasar yang memadai.

Selain itu, strategi ini menekankan pentingnya **inklusiivitas sosial**, dengan memastikan bahwa pembangunan SDM memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batam, termasuk kelompok rentan. Pendekatan inklusif ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adaptif dan mandiri.

Lebih jauh, penguatan SDM unggul tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup **pembentukan karakter, integritas, serta sikap adaptif terhadap perubahan global**. Masyarakat unggul tercermin dari adanya jaminan kesetaraan gender dan terlaksananya pengendalian penduduk secara efektif serta perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penegakan nilai-nilai sosial budaya lokal, menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang holistik. Dengan demikian, penguatan SDM unggul berperan strategis sebagai motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Strategi 5: Penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah

Strategi penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah difokuskan pada penciptaan masyarakat yang tangguh, lingkungan yang lestari, dan budaya yang terjaga sebagai **modal pembangunan berkelanjutan**. Upaya ini mencakup **pemenuhan infrastruktur yang memadai untuk mitigasi bencana**, seperti sistem peringatan dini, shelter, dan jalur evakuasi, sehingga masyarakat dapat lebih tanggap bencana dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, **pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik diupayakan ramah lingkungan**, mendukung pelestarian ekosistem, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kelestarian lingkungan hidup Kota Batam menjadi pondasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Strategi ini juga menekankan pentingnya iklim investasi yang memperhatikan **prinsip keberlanjutan**. Sebagai kota industri, perdagangan, dan pariwisata, Batam menghadapi tantangan besar terkait kualitas udara, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta keberlanjutan kawasan pesisir dan laut. Upaya menjaga kelestarian lingkungan dilakukan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, penataan ruang yang ramah lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru. Selain itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain sangat diperlukan dalam mendorong gaya hidup berwawasan lingkungan, sehingga Batam tidak hanya tumbuh sebagai kota modern, tetapi juga sebagai kota yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Ketahanan sosial, kelestarian lingkungan, dan identitas budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi bagian dari nilai dan praktik sehari-hari masyarakat, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk Kota Batam. **Penguatan identitas budaya** daerah Kota Batam diarahkan pada upaya melestarikan nilai-nilai lokal yang berakar dari keberagaman etnis, tradisi maritim, serta interaksi budaya yang tumbuh seiring dengan peran Batam sebagai kota industri, perdagangan, dan pariwisata internasional. Dengan demikian, penguatan identitas budaya tidak hanya menjadi benteng dalam menghadapi arus globalisasi, tetapi juga menjadi daya tarik strategis yang memperkaya citra Kota Batam sebagai kota multikultural, berdaya saing, dan berkarakter.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan arah besar pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya melalui tema pembangunan dalam RKPD, yang disusun secara bertahap sesuai prioritas tahunan dan kondisi aktual. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun Kota Batam adalah sebagai berikut.

Gambar III.3
Tema Pembangunan Per Tahun Kota Batam
Tahun 2025-2030



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kota Batam 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.3

Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2030

Tema 2025	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur dalam Pembangunan Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi	Pemantapan kemandirian masyarakat dan keadilan pembangunan	Pemantapan daya saing SDM dan sektor unggulan pariwisata	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis kepariwisataan	Terwujudnya Batam sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
Prioritas 1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Prioritas 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Prioritas 1. Peningkatan <i>softskill</i> maupun <i>hardskill</i> sesuai dengan kebutuhan dunia industri	Prioritas 1. Peningkatan daya saing global sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Prioritas 1. Penguatan Ekosistem Pariwisata dan Iklim Investasi
Prioritas 2. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar,	Prioritas 2. Peningkatan <i>softskill</i> maupun <i>hardskill</i> sesuai dengan	Prioritas 2. Peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Prioritas 2. Transformasi dan inovasi dalam peningkatan sarana prasarana dasar,	Prioritas 2. Keberlanjutan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan



Tema 2025	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur dalam Pembangunan Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi	Pemantapan kemandirian masyarakat dan keadilan pembangunan	Pemantapan daya saing SDM dan sektor unggulan pariwisata	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis kepariwisataan	Terwujudnya Batam sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
	infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	kebutuhan dunia industri		infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	ekonomi, sosial dan budaya
Prioritas 3. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Prioritas 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Prioritas 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Prioritas 3. Penguatan jejaring dan kolaborasi dengan dunia industri	Prioritas 3. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dalam menciptakan budaya kerja adaptif dan inovatif



Tema 2025	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur dalam Pembangunan Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi	Pemantapan kemandirian masyarakat dan keadilan pembangunan	Pemantapan daya saing SDM dan sektor unggulan pariwisata	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis kepariwisataan	Terwujudnya Batam sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
Prioritas 4. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Prioritas 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Prioritas 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman	Prioritas 4. Penguatan inklusi sosial dalam penciptaan keadilan sosial	Prioritas 4. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Prioritas 5. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Prioritas 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Prioritas 5. Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya	Prioritas 5. Pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan produktivitas dan daya saing	Prioritas 5. Keberlanjutan pelayanan dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang moder, merata dan berkualitas



b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kota Batam. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi mendorong pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, *good governance*, serta pelestarian budaya. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.4

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi dan pelayanan investasi skala besar, sedang, dan kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, serta selaras dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai ketentuan
	Penguatan kemandirian perekonomian masyarakat
	Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, dan utilitas berbasis penataan ruang kota
	Penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	Meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban, pendidikan karakter kebangsaan, dan ideologi pancasila
	Terpenuhinya hak dasar dan meningkatnya perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia serta pembangunan pemuda dan keluarga berkualitas



Misi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan pemerataan layanan dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan
	Pengembangan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan
Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan aksi penurunan emisi karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan
	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi degradasi lingkungan hidup dan bencana alam
	Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan

Secara keseluruhan, keterkaitan strategi dan arah kebijakan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batam

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Penguatan iklim usaha yang kondusif berbasis fasilitasi investasi produktif yang berorientasi pada sektor unggulan, pengembangan kepariwisataan daerah serta hilirisasi berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi tumbuh dan berdaya saing	Meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi dan pelayanan investasi skala besar, sedang, dan kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, serta selaras dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai ketentuan
			Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kemandirian perekonomian masyarakat
			Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam		Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
			Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah		
	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern.	Percepatan penyediaan dan modernisasi infrastruktur transportasi, energi, permukiman yang mendukung distribusi barang dan jasa, penguatan ekosistem investasi dan kawasan industri yang produktif, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru	Peningkatan kualitas konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, dan utilitas berbasis penataan ruang kota
					Penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak
	Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Membangun SDM unggul yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi modern sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas		Meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan		Meningkatkan pemerataan layanan dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat		Meningkatkan keamanan dan ketertiban, pendidikan karakter kebangsaan, dan ideologi pancasila
					Terpenuhinya hak dasar dan meningkatnya perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia serta pembangunan pemuda dan keluarga berkualitas
	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	Meningkatnya pelayanan publik	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, sumber daya pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang inovatif, adaptif dan melayani	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah		Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah		Pengembangan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan
			Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi		
	Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah	Penguatan aksi penurunan emisi karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan
			Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah		Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi degradasi lingkungan hidup dan bencana alam
		Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal sebagai pilar identitas dan kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal		Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan



3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kota Batam dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan masyarakat. Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi janji kepala daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan 15 (lima belas) Program Unggulan Kepala Daerah yang terpetakan pada 20 (dua puluh) program prioritas pembangunan daerah dari 80 (delapan puluh) Program Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tabel III.6

Pemetaan Program Unggulan Kepala Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Batam 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
1. Optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Optimalisasi penanganan banjir	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
3. Pengobatan gratis masyarakat ber KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	5. Program Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
4. Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 juta untuk UMKM	6. Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5. Seragam sekolah gratis siswa baru SD dan SMP	7. Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
6. Pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru		
7. Bantuan Lansia	8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
8. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif	9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
9. Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu	11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
10. Penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan pembangunan LRT)	12. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
11. Percepatan pembangunan jalan lingkar	13. Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam	14. Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
13. Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok	15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
14. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	16. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
	17. Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
15. Peningkatan investasi dan destinasi MICE	18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	20. Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sumber: Diolah, 2025

Implementasi program unggulan kepala daerah perlu dijabarkan secara detail oleh perangkat daerah melalui kegiatan dan sub kegiatan yang terencana, terukur, dan selaras dengan visi serta misi pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menerjemahkan arah kebijakan ke dalam bentuk program kerja yang nyata, dengan indikator kinerja yang jelas serta target pencapaian yang realistis. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus disusun secara sistematis, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga dapat menjamin keterpaduan antar sektor dan keberlanjutan hasil pembangunan. Dengan demikian, program unggulan kepala daerah tidak hanya berhenti pada tataran ide dan kebijakan, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Tabel III.7

Keterkaitan Misi, Tujuan/sasaran, Outcome, Program Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
VISI: BATAMKOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUT AN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi*				
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota **				
				Meningkatnya realisasi dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	2. Program Pemberdayaan Dan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
						Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha	3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	4. Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**				



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	5. Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang sesuai dengan standar	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi				
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah realisasi invetasi PMDN dan PMA	7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	8. Program Promosi Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							Penanaman Modal
				Meningkatnya Kualitas Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	9. Program Pelayanan Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat inflasi daerah				
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya a penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Indeks Infrastruktur Daerah				
		Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas,	Rasio Konektivitas				



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
		dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia	11. Program Pengelolaan Pelayaran	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan laut	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan		
				Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	12. Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan darat oleh Trans Batam	Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan		
				Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional kendaraan angkutan barang	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR		



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				dan penumpang umum			
				Meningkatnya kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum		
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan				
				Meningkatnya infrastruktur jalan kota yang aman dan nyaman	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	13. Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, dan Kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik	14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya efektivitas pencegahan banjir melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang optimal	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Efektivitas Penanganan Banjir melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Optimal	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	16. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	17. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	18. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	19. Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional sesuai dengan standar	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	20. Program Penataan Bangunan Gedung	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sesuai kawasan kumuh yang ditetapkan	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	21. Program Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	22. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Luas RTH Publik	Peningkatan peningkatan luas RTH Publik	23. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Menurunnya potensi munculnya kawasan kumuh baru	Persentase luas di luar kawasan kumuh yang ditangani	24. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	25. Program Pengembangan Perumahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan*				
		Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini*				
				Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional,	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	26. Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				partisipatif, dan berkelanjutan			
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	27. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	28. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya produksi nelayan kecil	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	29. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				Meningkatnya produksi pembudidaya ikan	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							n Bidang Kelautan dan Perikanan
				Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	31. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				Meningkatnya produktivitas pertanian melalui ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian	32. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
					Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan		
				Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	33. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Menurunnya daerah kerawanan Pangan	Persentase Daerah rentan/Rawan Pangan	34. Program Penanganan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
						Kerawanan Pangan	Pemerintahan Bidang Pangan
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**				
				Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	35. Program Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase Pekerja rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan		
				Meningkatnya keterhubungan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	36. Program Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	37. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Tersusunnya profil ketenagakerjaan daerah yang akurat, mutakhir, dan sesuai standar	Persentase data sektoral ketenagakerjaan yang tercakup dalam profil	38. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni				
				Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	39. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas SDM anggota Satpol PP	Persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar		
				Terwujudnya penegakan perda dan perkara	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan		



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan satlimas		
				Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan	40. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perangkat Daerah Pengampu Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman stabilitas sosial	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	41. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	42. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	43. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	44. Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	45. Program Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							n Perempuan dan Perlindungan Anak
				Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	46. Program Pengendalian Penduduk	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Pembangunan Manusia				
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan				
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS 5-6 Tahun	47. Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
					APS 7-12 Tahun		
					APS 13-15 Tahun		
					APS 7-18 Tahun		



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SD	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD		n Bidang Pendidikan
				Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP		
				Terpenuhinya Rasio kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan	48. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Meningkatnya Akses Perpustakaan Bagi Masyarakat	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	49. Program Pembinaan Perpustakaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
					Persentase Perpustakaan yang dibina		
				Meningkatnya Minat Baca Masyarakat melalui Penguatan Layanan Perpustakaan	Persentase Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Batam		



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang dibina	50. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional	51. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan		
			Indeks Kesehatan				
				Meningkatnya kemudahan akses kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	52. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Meningkatnya kinerja upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) Prevalensi Stunting		



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kinerja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)		
				Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes		
	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi				
		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**				
				Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam pelayanan publik	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik	53. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	54. Program penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintaha n Bidang Persandian
				Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	55. Program Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintaha n Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	56. Program Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintaha n Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	57. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat DPRD



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tata kelola kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip	58. Program Pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
				Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan	59. Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
				Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan	60. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
				Meningkatnya penerapan inovasi daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	61. Program Riset dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam	Persentase Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam	62. Program Penatagunaan Tanah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
				Meningkatnya Pencapaian SPM Kota Batam	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam	63. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
				Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		
				Meningkatnya kualitas regulasi daerah yang implementatif	Persentase Produk Hukum yang implementatif		
				Meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU	Persentase MoU yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya sinergi dan pelaksanaan	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	64. Program perekonomian dan pembangunan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				kebijakan perekonomian			Pendukung Urusan Pemerintahan
				Meningkatnya efektifitas koordinasi fasilitas dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas		
				Meningkatnya kualitas pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.		
				Meningkatnya sinergi dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Nilai SAKIP				
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja pelayanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD	65. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		Seluruh Perangkat Daerah



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	66. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
					Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan		
				Meningkatnya kinerja ASN Pemko Batam yang berpredikat di atas ekspektasi	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik	67. Program Kepegawaian Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
				Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya kualifikasi pendidikan PNS	Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3		
				Meningkatnya data ASN yang berkualitas, akurat, terkini dan terpadu	Persentase pemutakhiran data ASN		



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya		
				Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	68. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
		Meningkatnya akuntabilitas, keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya penyusunan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai Ketentuan	69. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
				Tercapainya pelaksanaan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan		
				Tercapainya penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu		
				Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD	70. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
					Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD		
					Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD		
				Meningkatnya piutang pajak Daerah yang tertagih	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	71. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target		
				Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah		
				Meningkatnya penerimaan pajak daerah <i>official assessment</i>	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah <i>official assessment</i>		
				Meningkatnya penerimaan pajak daerah <i>self assessment</i>	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah <i>self assessment</i>		



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
		Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	72. Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
					Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N - 1		
	Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah	Penurunan intensitas emisi GRK*				
		Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*				



Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
		pelestarian lingkungan		Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Mutu Air	73. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
					Nilai Antara Kualitas Udara		
					Kualitas Tutupan Lahan		
				Menurunnya volume sampah yang tidak terkelola	Persentase Pengurangan Sampah yang masuk di TPA	74. Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	75. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **				



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	76. Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
				Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran yang terlaksana sesuai SPM	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM	77. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindungi Diri yang Sesuai Standar	Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar		



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Pencegahan Layanan Kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran		
		Meningkatnya Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pelestarian Kebudayaan				
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya				
				Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	78. Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
				Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya melalui registrasi provinsi	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi	79. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan



Visi	Misi	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Penanggung Jawab
							n Bidang Kebudayaan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pelestarian budaya di museum	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum	80. Program Pengelolaan permuseuman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sumber: Diolah, 2025



3.2.3 Dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap Arahkan Nasional

Kota Batam, termasuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, memperoleh penekanan khusus dalam dokumen RPJMN 2025–2029 sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan barat Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa arahan strategis yang perlu diakomodasi dalam RPJMD Kota Batam, dengan penekanan pada indikasi intervensi sebagai berikut:

Tabel III.8
Dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap *Highlight* Indikasi Intervensi RPJMN

Highlight Indikasi Intervensi RPJMN	Dukungan Kota Batam (Program Nomenklatur)	Urusan/Opd
Pengembangan Dan Penataan Kawasan Perkotaan Batam, Antara Lain Melalui:		
Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Perkotaan Dan Rencana Tata Ruang Yang Mengintegrasikan Potensi Dan Masalah Perkotaan Secara Terpadu.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan Layanan Dasar Air Minum, Penanganan Limbah Dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
Penyediaan Dan Peningkatan Layanan Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Sektor Ketenagakerjaan.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penataan Permukiman Kumuh Terpadu Perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Terintegrasi Jalan Tl Batam-Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengembangan Koridor Industry Batam-Bintan-Karimun (SeKtor Industri Prioritas: Industri Semikonduktor, Industri Mesin Dan Perlengkapan, Industri Dirgantara, Industri Transportasi Laut Dan Galangan Kapal, Hilirisasi Bauksit, Industry Logam, Besi, Dan Baja, Industri Berteknologi Tinggi, Industry Hijau, Dan Industri Halal)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian
Pengembangan Pelabuhan Batuampar	Program Pengelolaan Pelayaran	Perhubungan



Highlight Indikasi Intervensi RPJMN	Dukungan Kota Batam (Program Nomenklatur)	Urusan/Opd
Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjung Pinggir-Jodoh	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian
Pengembangan Kek Batam Aero Technic, Kek Nongsa, Kek Sekupang, Kek Tanjungsauh, Kek Galang Batang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian
Pembangunan Rumah Murah Bersanitasi Baik Bagi Pekerja, Mbr, Gen-Z, Dan Milenial Di Kawasan Perkotaan Batam-Bintan (Phtc)	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Closing Dam Piayu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum
Pembangunan Bendungan Estuari Galang- Galang Baru	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum
Pengembangan Cbd-Tod Teluk Tering-Batam Center	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum
Pengembangan Spam Regional Batam	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum
Pengembangan Batam Urban Dan Industrial Sewerage System Development Project	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Ruang
Perencanaan, Persiapan, Dan Pembangunan Lrt Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar Dan Brt Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang, Yang Terintegrasi Dengan Tod	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
Pembangunan Tpst Regional Batam	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Lingkungan
Pengembangan Kawasan Pariwisata Batam- Bintan (Pengembangan Kawasan Mice Dan Urban Tourism Batam Center, Pengembangan Kawasan Integrated Tourism Zone Lagoi, Revitalisasi Kawasan Budaya Pulau Penyengat Dan Pengembangan <i>Grey Tourism</i>	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Lingkungan
Pengembangan Politeknik Negeri Batam Menjadi Universitas/Institut Teknologi Bertaraf <i>World Class Research University</i> Berbasis Potensi Wilayah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan



Highlight Indikasi Intervensi RPJMN	Dukungan Kota Batam (Program Nomenklatur)	Urusan/Opd
Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum
Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Di Rsud Provinsi Dan Kab/Kota, Khususnya Pada Rsud Embung Fatimah Kota Batam (Phtc)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
Pembangunan Infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum
Pemenuhan Layanan Dasar Pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, Yaitu: Kota Batam: Belakang Padang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Permukiman
Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau, Terutama Di Batam (Kek Kesehatan Intemasional Batam/Kek Sekupang Dan Kek Nongsa)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Lingkungan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata

Sumber: Diolah, 2025

Terdapat arahan dari Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengakomodasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.9

Dukungan Kota Batam terhadap Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KOTA BATAM	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial



ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KOTA BATAM	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
	Sekolah rakyat	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Pendayagunaan penyuluh pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
Kesehatan untuk semua	Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informasi
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan KB



ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KOTA BATAM	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jaminan kesehatan nasional, dan penuntasan TBC, dan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
Perluasan akses pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi PAUD, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Makan Bergizi Gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KOTA BATAM	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
		Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup

Sumber: Diolah, 2025

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kota Batam

Ditinjau dari segi dokumen perencanaan spasial (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041), pada dasarnya Pemerintah Kota Batam telah menetapkan dalam RTRW pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Batam. Pusat pertumbuhan tersebut bersifat dedikatif, di mana direncanakan secara terstruktur maupun berdasarkan penetapan kawasan strategis baik proyeksi dari program nasional, regional maupun dari sudut pandang Pemerintah Kota Batam sendiri.

Dari sudut pandang RTRW, Kota Batam memiliki kedudukan strategis secara nasional dan regional. Dalam hierarki struktur pusat-pusat kegiatan, Kota Batam merupakan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Dalam kedudukannya sebagai kawasan perkotaan, penetapan rencana pusat kegiatan di wilayah Kota meliputi:

1. Pusat kegiatan di wilayah Kota berupa **Pusat Pelayanan Kota (PPK)** yang berada di **Batam Kota**, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa.
2. **Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)** yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah Kota terletak di:
 - a. **Lubuk Baja**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata;
 - b. **Sungai Beduk**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, olahraga, permukiman, serta perdagangan dan jasa;
 - c. **Batu Aji**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, permukiman, pariwisata, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;

- d. **Sekupang**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, kepelabuhanan, kesehatan, pemerintahan dan perdagangan jasa;
 - e. **Nongsa**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, pendidikan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;
 - f. **Kabil**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, permukiman, industri dan perdagangan jasa;
 - g. **Galang**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, perkebunan, dan perdagangan jasa; dan
 - h. **Rempang**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, dan perdagangan jasa.
3. **Pusat Lingkungan (PL)** yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman terletak di:
- a. Batu Besar;
 - b. Belian;
 - c. Bengkong Laut;
 - d. Duriangkang;
 - e. Kabil;
 - f. Kasu;
 - g. Pulau Buluh;
 - h. Rempang Cate;
 - i. Sambau;
 - j. Setokok;
 - k. Tanjung Pinggir;
 - l. Tanjung Sari;
 - m. Tanjung Sengkuang;
 - n. Tembesi;
 - o. Tiban Lama; dan
 - p. Tanjung uncang.

Lebih lanjut, pusat pertumbuhan wilayah di Kota Batam juga meliputi kawasan-kawasan yang diproyeksikan melalui Kawasan Strategis Nasional. Hal tersebut juga merupakan bagian integral dari identifikasi kawasan strategis yang terdapat di Kota Batam dan menjadi pusat pertumbuhan wilayah dari berbagai sudut pandang kepentingan khususnya kepentingan ekonomi.

Kawasan strategis nasional di Kota Batam, meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
2. Kawasan strategis tertentu dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan Kawasan strategis Kota, meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - . Kawasan pariwisata bahari Kota Batam; dan
 - . Kawasan pengembangan industri Kota Batam.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Sejarah Kamp Vietnam. kawasan cagar budaya meliputi:
 - . Tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor yang berada di Kecamatan Bulang;
 - . Bangunan peninggalan tentara Jepang yang berada di Kecamatan Galang
 - . Makam Nong Isa yang berada di Kecamatan Nongsa;
 - . Makam Haji Daeng Puang yang berada di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang; dan
 - . Lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam yang berada di Pulau Galang Kecamatan Galang.

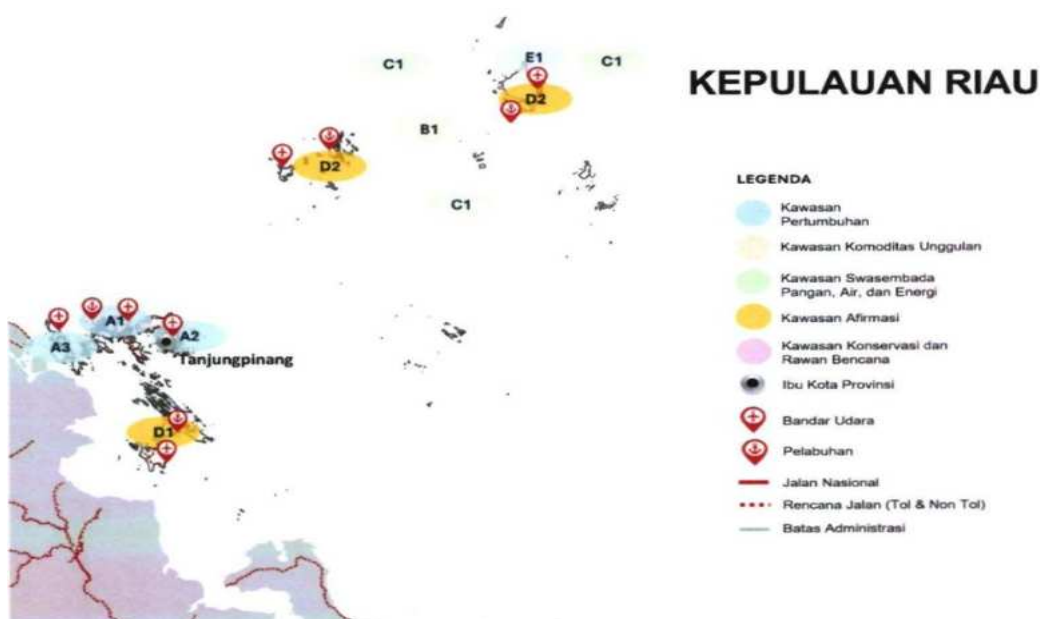
B. Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang berada di Kota Batam, yakni sebagai Kawasan Pertumbuhan. Lokasi prioritas pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Batam dan KPPBB Batam (A1), Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPPBB Bintan (A2), dan Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun dan KPPBB Karimun (A3)

- Kota Batam
- Kota Tanjungpinang
- Kab. Bintan
- Kab. Karimun

Gambar III.3

Pengembangan Kewilayahan di Kepulauan Riau Pada RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam, antara lain melalui:

1. Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
3. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
4. Penataan permukiman kumuh perkotaan
5. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan
6. Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: industri semikonduktor, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, industri logam, besi, dan baja, industri berbasis teknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal)
7. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil
8. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinang-Jodoh
9. Pengembangan Kawasan Terpadu *Ecocity*
10. Pengembangan Kawasan Terpadu Galang *Maritime City*



11. Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batam, KEK Bintang Aerospace, KI Bintang Inti *Industrial Estate*, dan KI-KI lainnya di BBK
12. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM (mesin presisi dan plastik) industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
13. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Batam-Bintan
14. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Batam (PHTC)
15. Pembangunan *Closing Dam* Piayu
16. Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru
17. Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center
18. Pengembangan SPAM Regional Batam
19. Pengembangan Batam *Urban and Industrial Sewerage System Development Project*
20. Perencanaan, persiapan, dan pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trase Batam Trase Batam Center-Tanjung Ugang, yang terintegrasi dengan TOD
21. Pembangunan TPST Regional dan SPALD-T Regional
22. Pengembangan kawasan pariwisata Batam-Bintan (Pengembangan Kawasan MICE dan *Urban Tourism* Batam Center, Pengembangan Kawasan *Integrated Tourism Zone* Lagoi, Revitalisasi Kawasan Budaya Pulau Penyengat dan Pengembangan *Grey Tourism*)
23. Pengembangan Politeknik Negeri Batam menjadi universitas/institut teknologi bertaraf *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah
24. Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang
25. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping-WNTS
26. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam (PHTC)
27. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan
28. Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kecamatan Belakang Padang.
29. Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau, terutama di Batam (KEK Kesehatan Internasional Batam/KEK Sekupang dan KEK Nongsa)

30. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah

C. Pengembangan Wilayah berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2024 (Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah merupakan suatu kawasan yang berada di jalur perdagangan internasional, sehingga menjadikan BBK sebagai jalur utama untuk masuknya investasi, barang, dan jasa serta pusat pertumbuhan dan penyaluran barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kawasan tersebut juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan industri yang sarat teknologi dengan penciptaan nilai tambah tinggi berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kawasan BBK dinilai sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang strategis dan menjanjikan dalam rangka mendorong perekonomian baik secara regional maupun nasional.

Percepatan pembangunan melalui pengintegrasian Kawasan BBK menjadi kebijakan yang krusial untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan Kawasan BBK yang terpadu dan terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun (KPBPB BBK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

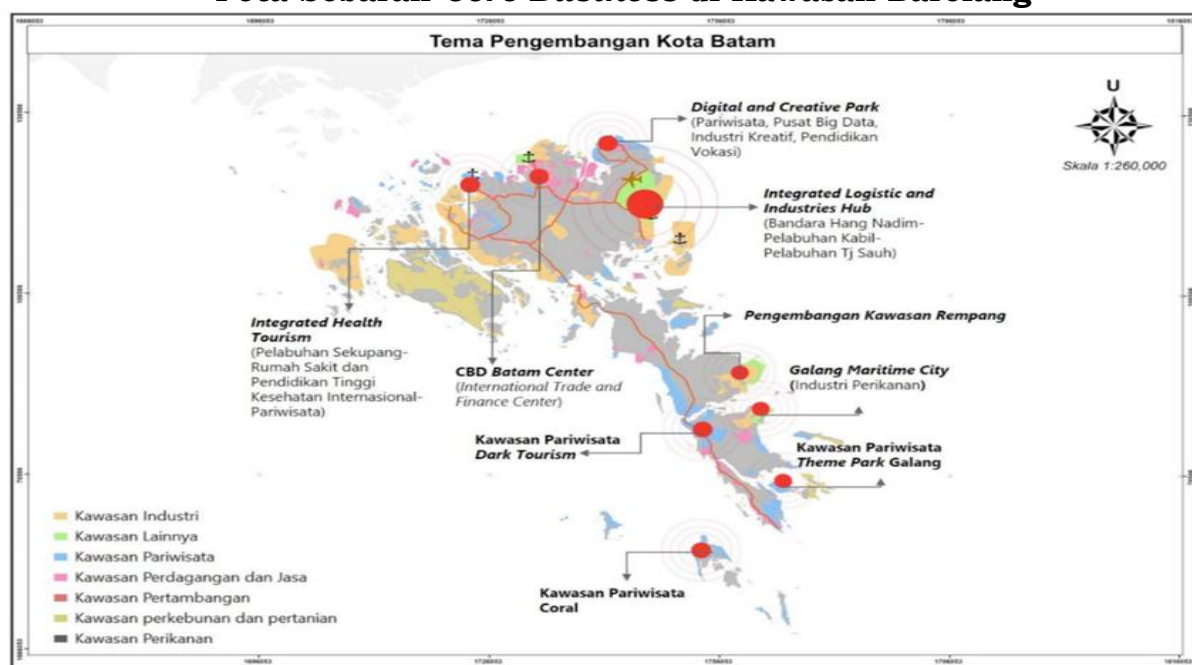
Di Kota Batam sendiri, proyeksi kawasan yang ditetapkan sebagai bagian dari BBK adalah Kawasan Batam yang terdiri dari Pulau Batam-Rempang-Galang (Barelang) dan pulau-pulau kecil disekitarnya merupakan suatu kawasan strategis yang berada di jalur pelayaran internasional dan memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kawasan Barelang memiliki potensi sebagai pusat logistik, pusat industri berteknologi tinggi, dan pusat perdagangan serta jasa. Berdasarkan potensi dan letak strategisnya bagi perdagangan dunia maka Kawasan Barelang difokuskan untuk dikembangkan dalam beberapa *core business* yaitu sebagai Hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri *Light and valuable*, industri digital dan kreatif, *International Finance Trade Center* dan *Integrated Health tourism*.

Arah pengembangan Kawasan Bareleng tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung rencana pengembangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pusat industri jasa dan kegiatan pendukungnya, terutama kegiatan pelayanan pelabuhan bebas.
2. Pengembangan simpul transportasi udara, laut dan penyeberangan untuk meningkatkan daya saing akses transportasi dan logistik.
3. Pengembangan pelabuhan internasional di Batam.
4. Pengembangan daya dukung perkotaan.
5. Pengembangan Wisata Kota, MICE, dan minat khusus.

Gambar III.5
Peta Sebaran Core Business di Kawasan Bareleng



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024

Tema utama pengembangan Kawasan Bareleng diharapkan menjadi pengungkit ekonomi regional maupun nasional melalui tingginya investasi yang masuk ke Kawasan Bareleng disamping kegiatan ekonomi lainnya yang sudah ada di Kawasan Bareleng. Penentuan tema dalam rencana pengembangan ini sangat penting karena dapat membantu pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan yang berkesinambungan dan dapat membantu dalam penentuan insentif dan kebijakan. Selain itu tema juga dapat menjadi patokan bersama dalam pembentukan jaringan rantai pasok dan rantai nilai.

Core Business Kawasan Batam akan dikembangkan dalam 3 tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dimana pada tahap awal akan dikembangkan untuk kawasan industri logistik, industri kedirgantaraan dan *Industry Light and valuable*, sedangkan dalam jangka



menengah akan dikembangkan secara berkelanjutan untuk Kawasan industri logistik, industri kedirgantaraan, *Industry Light and valuable* dan Industri Digital Kreatif. Sedangkan dalam jangka panjang secara berkelanjutan *core business* sebelumnya akan terintegrasi dan berkembang dengan *International Finance Trade Center* dan *Health tourism*. Penentuan tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan kesiapan lahan, tata ruang dan tingkat proyeksi permintaan serta perannya terhadap peningkatan investasi di Kawasan Batam. Selain *core business* tersebut terdapat beberapa industri pendukung lainnya yang dapat mendukung aktivitas bisnis di Kawasan Batam.

Berdasarkan potensi, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah maka rencana pengembangan kawasan prioritas di Barelang untuk 2025-2045 menitikberatkan pada kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Arah pengembangan Kawasan Batam-Rempang-Galang dapat dibagi dalam beberapa klaster wilayah pengembangan dan kegiatan industri yang akan dikembangkan. Pengembangan Industri di Kawasan Batam-Rempang-Galang harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam hal yang menjadi fokus penting dalam pengembangan industri :

1. Kesesuaian tata ruang wilayah dan dokumen rencana induk pengembangan Kawasan Batam-Rempang-Galang;
2. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan lapangan Kerja;
4. Pengusahaan alokasi ruang untuk Rencana Kawasan Industri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan suatu kawasan industri;
5. Pola penggunaan lahan eksisting dan tren pengembangan kawasan dalam konsep pemanfaatan ruang; dan
6. Mempertimbangkan mitigasi dampak baik fisik maupun sosial.

Berikut ini merupakan tabel Kawasan Prioritas sebagai pusat pertumbuhan dan arah pengembangan.

Tabel III.10
Kawasan Prioritas Kota Batam

No.	Kawasan Prioritas	Arah Pengembangan
1	Nongsa, Kabil dan Hang Nadim	• Pusat Logistik dan industri terpadu • Industri digital dan kreatif • Industri kedirgantaraan



No.	Kawasan Prioritas	Arah Pengembangan
		• <i>Aerocity</i>, MRO dan pergudangan perdagangan melalui sistem elektronik
2	Batam Kota	• Pusat perdagangan dan keuangan internasional • Pusat perdagangan dan jasa Batam Center
3	Batu Ampar	• Pelabuhan logistik internasional • Revitalisasi industri eksisting
4	Tanjung Uncang - Batu Aji	• Industri maritim (transformasi industri galangan kapal) • Industri ringan dan bernilai
5	Sekupang	• Wisata kesehatan terpadu • Revitalisasi kawasan industri eksisting • Pelabuhan penumpang Sekupang
6	Rempang	• Industri perikanan dan pengolahan • Industri <i>petrochemical</i> • Wisata pantai dan agrowisata • Ruang Terbuka Hijau
7	Galang dan Galang Baru	• Kota Maritim • Industri pengolahan • Pariwisata (taman hiburan, wisata sejarah, wisata alam) • Dam Estuari Galang-Galang Baru
8	Piayu	• Kawasan industri • Pasokan energi baru dan terbarukan
9	Setokok	• Kawasan industri • Pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)
10	Duriangkang	• Kawasan konservasi sumber air baku • Pembangkit listrik tenaga surya

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024

D. Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor sekunder-tersier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi,



serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Gambar III.6
Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang



Berdasarkan kebijakan pengembangan wilayah sesuai klaster, Kota Batam mengakomodir kebijakan provinsi Kepulauan Riau dengan melaksanakan program serta rencana aksi yang diakomodir masing-masing perangkat daerah. Hal tersebut terlihat pada dukungan Kota Batam terhadap arahan kebijakan kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau melalui tabel di bawah ini:

Tabel III.11
Dukungan Kota Batam terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi

No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan		
A	Pertanian dan Perkebunan		
	Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)	Program Penyuluhan Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
	Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan dan	Bidang Pertanian



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
		Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Distribusi bibit pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Jaminan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian		
	Bantuan permodalan bagi pelaku pertanian dan perkebunan Pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan		
B	Perikanan dan Kelautan		
	Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	- Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan - Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
C	Pariwisata Bahari		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota	Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
	Mendorong event pariwisata tematik bahari	Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	
	Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	
	Promosi dan kerjasama internasional	Program Pemasaran Pariwisata	
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)		
	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Berkualitas dan Peningkatan Investasi		
A	Pembangunan Kawasan FTZ, KEK, ekonomi biru Natuna Anambas		
	Mendorong implementasi FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang		
	Mendorong pertumbuhan KEK baru		
	Menjaga kondusifitas pembangunan kawasan		
B	Diversifikasi Ekonomi		
	Pembangunan industri pengolahan ikan dan industri pengolahan rumput laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Pengembangan industrialisasi perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Akselerasi pengembangan industri halal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
C	Tenaga Kerja		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Link and match Pendidikan dan Industri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Jaminan sosial bagi tenaga informal	Program Hubungan Industrial	
	Penciptaan lapangan kerja baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja		
	Perluasan area kompetensi teknis yang difasilitasi BLK		
D	Investasi		
	Insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah & retribusi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Promosi dan kerjasama	Program Promosi Penanaman Modal	
E	UMKM		
	Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen	Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Memperluas pelatihan, bimbingan managemen dan aksesibilitas pasar	Program Pemberdayaan UMKM	
		Program Pengembangan UMKM	
	Memperluas pemberian bantuan modal usaha UMKM		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM	Program Pengembangan UMKM	
	Memperluas melibatkan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi		
	Memperluas digitalisasi UMKM	Program Pemberdayaan UMKM	
	Pengembangan sentra ekonomi baru		
F	Ekonomi Kreatif		
	Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah		
A	Pembangunan Infrastruktur		
	Percepatan pembangunan jembatan Batam - Bintan (Babin)		
	KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan	Program Pengelolaan Pelayaran	
	Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, ro-ro, barang dan bongkar muat)		
	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pulau/wilayah		
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru		
	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan infrastruktur energi, Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
B	Konektivitas (transportasi antar pulau, konektivitas udara, konektivitas laut, rute)		
	Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk memperlancar arus orang dan barang	Program Pengelolaan Pelayaran	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah		
	Peningkatan Transportasi konektivitas udara		
	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang		
	Perbaiki sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk antar kabupaten/kota		
C	Pertambangan		
	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan		
	Mendorong melibatkan masyarakat dalam industri Pertambangan		
	Percepatan hilirisasi alumina		
	Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)		
	Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
E	Energi Terbarukan		
	Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)		
	Mendorong inovasi energi terbarukan		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi		
F	Ekonomi Kreatif		
	Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistika
	Infrastruktur digital untuk mendorong <i>digital coverage</i> (4G) di seluruh Kepri	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Produksi talenta digital		
4 A	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing Sarana dan Prasarana Pendidikan		
	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA, SMK dan SLB		
	Menambah unit sekolah baru	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Memperluas jaringan internet di sekolah		
	Pengembangan sekolah vokasi		
B	Layanan Pendidikan		
	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan		
	Memperluas penerima manfaat seragam gratis		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Memperluas penerima manfaat SPP Gratis		
	Memperluas penerima manfaat transportasi pendidikan		
	Memperkuat layanan literasi digital		
	Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi		
C	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
	Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Mendorong sertifikasi guru		
	Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru		
	Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi		
	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah		
	Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar		
	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh		
D	Sarana dan Prasarana Kesehatan		



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Menambah kapasitas sarana dan prasarana rumah singgah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan		
	Percepatan pembangunan sosial care Kepri		
E	Layanan Kesehatan		
	Memperluas penerima manfaat layanan rumah singgah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau		
	Memperluas penerima manfaat Jamkesda		
	Menambah layanan Kesehatan		
	Digitalisasi layanan kesehatan		
F	Tenaga Kesehatan		
	Peningkatan kerja sama dengan fakultas kedokteran Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan		
G	Kesehatan Masyarakat		
	Peningkatan gizi ibu dan anak	Program Pemenuhan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Penurunan angka stunting	Upaya Kesehatan	Pemerintahan
	Peningkatan sanitasi lingkungan	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
H	Pendidikan Karakter (Budaya Melayu)		
	Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut	Program Pembinaan dan Pengembangan	Perangkat Daerah Pengampu
	Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
I	Pemberdayaan Perempuan		
	Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
	Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik		
	Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita	Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
		Program Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	
J	Kepemudaan		
	Pengembangan minat dan bakat pemuda	Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Memperluas pendampingan <i>enterprenuer</i> muda		
5 A	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat Pengembangan Budaya		
	Penguatan destinasi wisata budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	
	Integrasi destinasi wisata Budaya dan sejarah	Program Pengembangan Kebudayaan	
	Pelaksanaan event wisata budaya dan sejarah		
	Revitalisasi peninggatan budaya dan sejarah	Program Pelestarian dan	



No	Highlight Program Unggulan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Program RPJMD Kota Batam	Pengampu
		Pengelolaan Cagar Budaya	
B	Kerukunan Umat Beragama		
	Harmonisasi antar umat beragama	Program Pembinaan dan	Perangkat Daerah
	Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	PengampuKesatuan Bangsa Dan Politik
	Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah
C	Sosial Kemasyaratan		
	Insentif RT/RW, Operasional Posyandu, BPD, LPM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan

Sumber: diolah, 2025



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM

BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MERINCI PROGRAM-PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DILENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA BESERTA TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN INDIKATIF, SERTA MEMUAT KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas fiskal yang tersedia dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, sementara belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai program strategis. Indikasi program yang disusun mencakup sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta layanan publik. Selain itu, pagu indikatif menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan besaran dana yang dapat dimanfaatkan untuk merancang dan mengimplementasikan program tahunan perangkat daerah.

Penentuan target kinerja program di setiap sektor pemerintahan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Batam, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan harus sejalan dengan upaya memperkuat daya saing daerah, mengingat Kota Batam memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi dan industri. Oleh karena itu, keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam memastikan program dapat dilaksanakan secara optimal.

Lebih lanjut, struktur pendanaan yang tersusun dengan baik tidak hanya menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan efektivitas kebijakan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung realisasi program pembangunan. Melalui sinergi antara kebijakan pendanaan, program pembangunan, dan strategi implementasi yang tepat, Kota Batam diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Tabel IV.1.

Program Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Per Urusan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.168.323.942.418		1.330.183.103.168		1.541.126.672.026		1.766.617.580.868		1.965.529.532.662		2.147.606.376.848		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				493.271.779.883		473.113.368.837		544.918.654.585		659.333.048.592		752.991.299.129		769.572.009.945		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					493.040.564.133		472.850.180.737		542.377.201.555		656.653.048.592		750.201.299.129		766.632.009.945	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (Dengan Satuan:Persentase)	69,17	57,03	48,20		49,83		51,83		54,43		57,03		60,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (Dengan Satuan:Persentase)	99,21	99,70	99,40		99,55		99,60		99,65		99,70		99,75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (Dengan Satuan:Persentase)	99,32	99,79	99,51		99,64		99,69		99,74		99,79		99,84		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Dengan Satuan:Persentase)	43,83	43,36	43,05		43,21		43,26		43,31		43,36		43,41		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SD	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD (Dengan Satuan:Nilai)	60,14	67,60	62,00		63,40		64,80		66,20		67,60		69,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP (Dengan Satuan:Nilai)	73,40	78,86	74,88		75,87		76,87		77,86		78,86		79,85		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Bidang Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					150.075.750		193.129.100		1.731.453.030		1.790.000.000		1.840.000.000		1.890.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persentase)	95,19	95,44	95,24		95,29		95,34		95,39		95,44		95,49		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persentase)	90,16	90,41	90,21		90,26		90,31		90,36		90,41		90,46		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					60.000.000		60.000.000		360.000.000		440.000.000		500.000.000		600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Terpenuhinya Rasio kebutuhan Pendidik danTenaga Kependidikan sesuai standar	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan (Dengan Satuan:Persentase)	56,35	66	58,35		60		62		64		66		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					21.140.000		10.059.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Legalitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				164.702.838.900		143.613.801.882		231.150.668.677		299.487.759.262		350.524.495.121		451.469.183.324		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					162.871.070.260		141.294.904.706		228.261.778.577		296.193.197.160		346.396.302.044		446.882.529.408	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kemudahan akses kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persentase)	97.94	98	98		98		98		98		98		98		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kinerja upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	96.89	97.50	96.99		97.20		97.30		97.40		97.50		97.60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Prevalensi stunting (Dengan Satuan:Persentase)	14	13.0	13.8		13.6		13.4		13.2		13.0		12.8		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kinerja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P 2 P) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	98.97	99.30	99.10		99.15		99.20		99.25		99.30		99.35		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes (Dengan Satuan:Indeks (Angka))	89.99	90.31	90.19		90.22		90.25		90.28		90.31		90.35		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.03	PROGRAMPENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.024.248.000		1.674.144.840		1.756.975.100		2.188.659.602		2.764.462.317		2.871.394.550	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Bidang Kesehatan	
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Rasio (per 1.000 pddk))	3,61:1000	3,62:1000	3,61:1000		3,61:1000		3,61:1000		3,62:1000		3,62:1000		3,62:1000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					604.997.400		323.066.100		641.395.000		676.252.500		812.960.760	1.051.909.366	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Meningkatnya efektivitas sediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Dengan Satuan:Persentase)	65	90	70		75		80		85		90		95	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Meningkatnya efektivitas sediaan makanan dan minuman	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	35	58	38		42		47		52		58		64	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					202.523.240		321.686.236		490.520.000		429.650.000		550.770.000	663.350.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (Dengan Satuan:Persentase)	62,60	80	65		66,1		67,9		69,7		80		81	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				342.681.659.934		462.012.106.112		571.168.664.657		606.633.751.794		652.184.088.260		704.077.142.187		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					56.972.774.813		86.338.101.000		54.329.469.178		55.268.647.895		57.229.094.920	60.211.379.231	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Dengan Satuan:Persentase)	50.77	59.53	52.92		54.57		56.23		57.88		59.53		61.18		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.171.646.400		5.851.481.200		5.498.170.672		5.560.115.792		5.726.919.266		5.998.726.844	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Persentase)	56.32	62.93	57.64		58.96		60.28		61.61		62.93		64.25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					57.781.822.143		71.474.085.670		54.602.790.317		62.749.916.544		67.779.039.909		69.619.085.064	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional, sesuai dengan standar	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.33	16.67		33.33		50		66.67		83.33		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					518.274.000		565.227.200		906.147.085		944.759.439		985.101.561		1.027.253.913	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, penerapan standar dan tata kelola yang baik, serta peningkatan kinerja	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.33	16.67		33.33		50		66.67		83.33		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persentase)	0	81.82	9.09		27.27		45.45		63.64		81.82		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.776.897.728		4.360.748.810		4.569.332.228		4.796.808.839		5.045.856.400		5.297.159.219	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.01	15.07		32.05		49.04		66.03		83.01		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					12.085.780.340		57.439.045.229		91.722.593.088		73.108.341.196		78.632.664.115		96.309.419.327	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Banjir melalui Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Optimal	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	0	92	33,33		67,17		75,37		83,58		91,79		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					39.485.632.692		50.011.589.504		84.000.000.000		74.000.000.000		78.500.000.000		80.600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Banjir melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Optimal	Persentase Luas Genangan yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	66	87	5		27		50		69		87		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					169.688.302.668		182.642.361.443		269.355.260.500		324.020.260.500		351.100.510.500		375.989.223.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Infrastruktur jalan kota yang aman dan nyaman	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	67	84	18		36		52		68		84		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.529.150		689.472.056		744.907.589		744.907.589		744.907.589		744.907.589	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Mutu Konstruksi	Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu (Dengan Satuan:Persentase)	67	100	10		70		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMDANPENGELOLAANPE RSAMPAHAN REGIONAL					0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun (Dengan Satuan:%)	25	75	25	Rp	37.5	Rp	50	Rp	62.5	Rp	75	Rp	100	Rp	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				129.965.272.218		179.611.382.558		119.163.462.975		125.039.677.162		130.737.079.891		136.067.688.290		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					17.875.347.990		19.470.217.584		19.100.072.600		19.928.499.482		20.846.467.313		21.895.980.764	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persentase)	85,43%	96.58%	85,43%		86.38%		89.78%		93.18%		96.58%		99.98%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					10.547.904.768		18.388.279.195		9.753.974.505		9.753.974.505		11.254.077.871		12.506.077.871	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sesuai kawasan kumuh yang ditetapkan	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	72.46%	94.50%	72.46%		77.97%		83.48%		88.99%		94.50%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0		646.980.000		1.001.793.921		3.049.581.225		4.677.631.307		5.982.629.655	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Menurunnya potensi munculnya kawasan kumuh baru	Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	0	75.00%	0		16.25%		33.75%		53.75%		75.00%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAMPENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					101.542.019.460		141.105.905.779		89.307.621.949		92.307.621.950		93.958.903.400		95.683.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Dengan Satuan:Persentase)	26.81%	38.11%	29.07%		31.33%		33.59%		35.85%		38.11%		40.37%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.179.216.400		36.180.255.501		40.020.025.205		39.674.506.548		39.997.797.639		44.846.186.732		
1.05.02	PROGRAMPENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.013.439.300		7.456.415.301		4.632.652.200		4.986.565.200		5.096.994.200		6.768.433.200	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp (Dengan Satuan:persentase)	0	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp	Persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar (Dengan Satuan:persentase)	63,19	39.97	19.57		23.41		28.93		34.45		39.97		45.48		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Terwujudnya penegakan perda dan perkara	Persentase perda perkara yang di tegakan (Dengan Satuan:persentase)	0	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan satlimas (Dengan Satuan:persentase)	0	100	9.09		31.82		54.55		77.27		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					491.084.600		869.202.600		2.351.982.920		1.608.637.212		1.769.500.933		2.946.451.026	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:Person)	0	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					674.692.500		27.854.637.600		33.035.390.085		33.079.304.136		33.131.302.506		35.131.302.506	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran yang Terlaksana Sesuai SPM	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindungi Diri yang Sesuai Standar	Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pencegahan Layanan Kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				33.523.175.083		35.652.188.278		34.705.195.927		36.448.837.510		39.094.772.622		41.574.166.370		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.376.808.000		1.073.731.000		1.947.452.326		2.119.022.549		3.305.341.042		5.231.192.512	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas kelembagaan dibidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan	Persentase SDM Kesejahtertaan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	70	95	75		80		85		90		95		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.359.339.200		2.687.630.874		3.405.701.588		3.766.271.746		4.157.898.921		6.595.022.054	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kualitas hidup bagi tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					10.638.224.000		16.268.621.300		11.265.049.499		12.391.554.449		13.630.709.894		15.630.709.894	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	90	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					575.832.000		500.029.800		1.601.016.422		1.847.812.064		2.060.287.271		3.210.287.271	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Menurunnya korban bencana alam dan/ non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					229.681.800		235.649.000		382.574.500		420.831.950		462.915.145		638.334.290	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				499.663.774.068		546.589.255.056		516.440.341.531		521.413.464.729		553.258.711.446		628.044.427.846		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				43.443.330.496		35.509.454.602		40.920.100.946		45.173.324.629		47.312.461.986		50.820.068.524		



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					118.310.000		0		0		0		0		350.648.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Tersusunnya profil ketenagakerjaan daerah yang akurat, mutakhir, dan sesuai standar	Presentase Data Sektoral Ketenagakerjaan yang tercakup dalam profil (Dengan Satuan:%)	0	-	100		0		0		0		0		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					41.829.540.012		32.172.789.502		36.763.185.646		40.828.299.329		42.778.358.686		44.675.222.824	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:%)	16.44	99.33	33.44		48.06		64.70		81.79		99.33		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					933.541.484		566.278.500		1.154.764.300		1.265.514.300		1.376.264.300		1.557.014.300	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya keterhubungan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan (Dengan Satuan:%)	52	78.00	72.00		73.50		75.00		76.50		78.00		79.50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					561.939.000		2.770.386.600		3.002.151.000		3.079.511.000		3.157.839.000		4.237.183.400	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan (Dengan Satuan:%)	100	79,55	7,25		24,11		41,83		60,31		79,55		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persentase)	0	78,90	0		19,56		39,14		58,92		78,90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.944.150.259		2.533.280.500		3.790.314.899		4.445.314.899		5.045.314.899		5.845.314.899		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.076.343.000		509.927.600		810.000.000		965.000.000		1.115.000.000		1.265.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	11.93	12.90	12.0		12.20		12.50		12.70		12.90		13.0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kompetensi SDM perempuan	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan:Persentase)	75	85,00	78		80		82		84		85		85		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					101.923.500		346.621.000		552.565.000		752.565.000		852.565.000		1.052.565.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAMPENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					2.237.817.759		828.636.900		1.128.674.899		1.228.674.899		1.328.674.899		1.428.674.899	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	4.49	5.0	4.6		4.7		4.8		4.9		5.0		5.2		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAMPENGLOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					17.223.000		45.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					187.748.000		480.000.000		650.000.000		750.000.000		850.000.000		1.050.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																n Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase capaian kluster kota layak anak (Dengan Satuan:Persentase)	70	82,00	72		75		78		80		82		85		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					323.095.000		323.095.000		504.075.000		604.075.000		754.075.000		904.075.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				755.839.800		1.128.143.000		1.278.000.000		1.424.000.000		1.559.000.000		1.732.528.268		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					628.895.000		889.250.100		1.105.000.000		1.239.000.000		1.359.000.000		1.521.528.268	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Dengan Satuan:kkal per kapita per hari)	2608	2.617,00	2609		2611		2613		2615		2617		2618		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					78.193.000		90.139.800		118.000.000		125.000.000		135.000.000		141.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Bidang Pangan
	Menurunnya daerah Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan (Dengan Satuan:Persen (%))	3,13	1,56	3,12		3,13		1,56		1,56		1,56		1,56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					48.751.800		148.753.100		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Dengan Satuan:Persen (%))	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.579.610.100		460.637.600		2.240.000.000		2.030.000.000		3.390.000.000		3.210.000.000		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0		8.138.800		75.000.000		90.000.000		150.000.000		200.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Terwujudnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	0	80,00	0		20		40		60		80		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0		132.000.000		1.225.000.000		900.000.000		1.500.000.000		1.200.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya legalitas tanah kawasan permukiman Kota Batam sesuai dengan kewenangan	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan fasilitas legalitas tanah (Dengan Satuan:Persentase)	36,61	97,22	52,78		66,67		77,78		88,89		97,22		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		113.340.000		270.000.000		320.000.000		620.000.000		650.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Terwujudnya basis data pertanahan di Kota Batam	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan (Dengan Satuan:Persentase)	0	91,67	0		25		50		75		91,67		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					1.579.610.100		207.158.800		670.000.000		720.000.000		1.120.000.000		1.160.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	Persentase Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	55,98	94,83	73,22		79,31		84,48		89,66		94,83		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				206.481.756.449		241.163.712.531		177.618.035.174		156.982.013.536		169.009.959.152		185.742.030.248		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					36.847.105.008		47.797.113.771		27.502.669.362		32.169.777.620		35.554.118.031		38.415.094.263	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Luas RTH Publik	Persentase Peningkatan luas RTH Publik (Dengan Satuan:Persentase)	5,88	6,10	5,92		5,96		6,01		6,05		6,10		6,14		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					307.949.000		213.776.000		300.000.000		300.000.000		752.000.000		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup sesuai perencanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					286.390.580		982.813.475		1.951.000.000		2.024.000.000		2.066.000.000		3.109.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Mutu Air (Dengan Satuan:Nilai)	2.18	3.4	3.0		3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Nilai Antara Kualitas Udara (Dengan Satuan:Nilai)	0.42	0.35	0.39		0.38		0.37		0.36		0.35		0.34		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:Indeks)	0.390	0.415	0.395		0.400		0.405		0.410		0.415		0.420		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					107.651.800		363.074.200		450.000.000		490.000.000		520.000.000		670.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan PPLH	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:%)	70	100,00	70		90		90		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					56.670.000		394.159.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	0	8,00	0		2		4		6		8		10		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					75.800.000		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	0	100		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					222.105.000		220.408.100		405.370.000		410.370.000		415.370.000		525.370.000	
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan lingkungan melalui mekanisme pengaduan publik	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	90	100	90		90		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					138.610.857.421		191.192.367.985		146.528.995.812		121.027.865.916		129.062.471.121		142.302.565.985	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Menurunnya volume sampah yang tidak terkelola	Persentase Pengurangan Sampah yang masuk di TPA (Dengan Satuan:%)	26	30	26		30		30		30		30		30		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.625.088,130		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Bengkong)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Bengkong	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8												Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAMPENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.388.205,000		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Nongsa)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Nongsa	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.129.219,960		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Batu Aji)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batu Aji	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.629.000,400		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Sekupang)



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sekupang	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.290.392.900		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Sungai Beduk)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sungai Beduk	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.016.090.040		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Batam Kota)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batam Kota	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.049.547.050		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Belakang Padang)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Belakang Padang	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.259.397.880		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Sagulung)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sagulung	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.794.906.040		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Batu Ampar)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batu Ampar	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.785.380.240		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Lubuk Baja)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Lubuk Baja	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.104.959.944		4.154.667.300		4.397.607.300		4.648.585.321		4.926.488.000		5.695.983.000		



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					4.735.677.500		3.884.133.000		4.014.725.300		4.263.575.321		4.528.878.000		4.984.773.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Dengan Satuan:Persentase)	54.50	67.67	57.33		60.00		62.33		65.00		67.67		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					292.238.444		213.432.200		275.274.000		276.874.000		278.474.000		580.074.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Dengan Satuan:Persentase)	99.41	99.56	99.44		99.47		99.49		99.52		99.56		99.58		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					34.282.200		22.700.400		46.024.000		46.024.000		56.024.000		66.024.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pemanfaatan dokumen dan informasi kependudukan oleh pemangku kepentingan secara tertib, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan.	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	89	44		56		67		78		89		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					42.761.800		34.401.700		61.584.000		62.112.000		63.112.000		65.112.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan oleh pemangku kepentingan secara optimaldan berkelanjutan.	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	0	98	73		77		84		91		98		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				22.568.489.000		23.756.754.950		24.867.234.310		27.293.957.741		30.173.353.516		32.484.499.154		
2.13.04	PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA					223.190.000		234.180.700		257.610.760		283.371.836		321.709.020		332.709.020	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya (Dengan Satuan:Persentase)	93,75	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2025		2026		2027		2028		2029			2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					22.345.299.000		23.522.574.250		24.609.623.550		27.010.585.905		29.851.644.496		32.151.790.134	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100			100			100		100			100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.224.514.800		7.504.229.200		7.854.229.200		8.004.229.200		9.214.229.200		11.609.229.200			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					324.720.000		354.600.000		454.600.000		454.600.000		514.600.000		759.600.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (Dengan Satuan:Persentase)	60	68	60		62		64		66		68		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.154.706.800		3.249.236.800		3.299.236.800		3.349.236.800		3.399.236.800		4.449.236.800	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (Dengan Satuan:Persentase)	81.58	81.80	81.60		81.65		81.70		81.75		81.80		82		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Unmeet Need (Dengan Satuan:Persentase)	11.1	10.6	11		10.9		10.8		10.7		10.6		10.5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.745.088.000		3.900.392.400		4.100.392.400		4.200.392.400		5.300.392.400		6.400.392.400	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	60	85	65		70		75		80		85		90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				127.197.777.741		126.587.424.868		142.438.277.467		162.663.704.404		165.638.905.407		193.028.506.169		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					39.955.241.510		42.112.719.950		13.375.000.000		10.247.000.000		11.179.000.000		13.895.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, dan Kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persentase)	65	83	16		33		49		66		83		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					81.065.369.383		72.803.996.710		107.618.527.419		129.800.360.556		131.549.561.559		145.517.162.321	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	57	93	63		71		80		87		93		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan darat oleh Trans Batam	Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Dengan Satuan:Persentase)	10	14	10		12		13		13		14		15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional kendaraan angkutan barangdan penumpang umum	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (Dengan Satuan:Persentase)	49	70	50		53		59		65		70		75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Dengan Satuan:Persentase)	5	10	5		5		5		10		10		15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					6.177.166.848		11.670.708.208		21.444.750.048		22.616.343.848		22.910.343.848		33.616.343.848	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	69	93	69		73		80		87		93		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan laut	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Dengan Satuan:Persentase)	27	3	130		24		9		3		3		3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.844.167.377		17.085.976.376		15.396.258.296		16.797.992.502		17.805.381.989		20.733.496.880		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					10.335.379.065		10.258.130.232		7.730.760.862		7.982.495.068		7.919.884.555		9.797.999.446	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:persentase)	79.68	74.59	74.59		74.59		74.59		74.59		74.59		74.59		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Cepat dan Tanggap	Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.508.788.312		6.827.846.144		7.665.497.434		8.815.497.434		9.885.497.434		10.935.497.434	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam pelayanan publik	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	95	96	95		95		95.5		95.5		96		96.5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Komunikasi Dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.939.003.620		9.733.772.240		10.646.294.912		11.182.187.181		11.888.943.521		16.191.838.728		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					37.437.000		83.695.400		391.900.461		431.090.507		474.199.557		521.619.512	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:%)	32,46	41,92	27,34		31,81		41,11		41,87		41,92		51,79		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					44.712.500		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya kesehatan lembaga koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat (Dengan Satuan:%)	83.33	0	88,89		0		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					92.344.250		317.116.000		172.538.665		189.792.531		208.771.784		529.648.962	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kompetensi SDM koperasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Dengan Satuan:%)	21.18	48,88	35,39		39,80		43,65		44,27		48,88		49,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					323.378.000		171.310.800		733.372.696		822.091.749		1.014.300.922		2.080.393.989	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (Dengan Satuan:%)	28.52	81	17,77		47,15		59,09		70,44		81,25		90,70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.465.951.870		3.622.840.540		3.653.746.902		3.655.002.588		4.075.502.845		5.983.053.127	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha (Dengan Satuan:%)	66.32	82	70,95		72,51		76,35		79,46		82,05		85,61		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					4.975.180.000		5.538.809.500		5.694.736.188		6.084.209.806		6.116.168.413		7.077.123.138	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha (Dengan Satuan:%)	43,24	85	57,19		58,07		68,91		77,75		85,10		91,31		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.896.968.000		1.046.904.200		2.199.203.851		2.096.950.000		2.492.450.000		3.076.045.000		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					194.763.800		79.173.000		522.000.000		282.000.000		580.000.000		960.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Rupiah)	25.462.030.732.730	32.496.720.367.992	28.071.888.882.835		28.071.888.882.835		29.475.483.326.977		30.949.257.493.326		32.496.720.367.992		34.121.556.386.392		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.216.252.600		700.968.300		980.000.000		1.020.000.000		1.071.500.000		1.225.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Dengan Satuan:Persentase)	-12.56%	0	1%		1%		2%		2%		2%		3%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					374.971.600		144.537.900		357.203.851		444.950.000		487.950.000		524.745.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	NA	80	80		80		80		80		80		80		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Penanaman Modal
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					28.850.000		39.300.000		250.000.000		260.000.000		263.000.000		276.300.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan	Persentase proyek investasi yang diawasi (Dengan Satuan:Persentase)	0,86	5	1		5		5		5		5		5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					82.130.000		82.925.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Pemanfatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	Persentase Pemanfatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				42.145.575.000		58.646.954.439		55.362.223.776		49.274.887.776		49.512.223.776		52.974.887.776		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.832.850.000		1.446.653.800		2.037.467.100		2.037.467.100		2.187.467.100		3.237.467.100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	0,07	0,16	0,08		0,13		0,14		0,15		0,16		0,17		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					39.312.725.000		55.324.133.339		39.824.756.676		44.137.420.676		42.824.756.676		44.137.420.676	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional (Dengan Satuan:Persentase)	44,44	25,53	25,53		89,36		23,40		34,04		25,53		89,36		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
		Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	42,86	42,86	42,86		28,57		42,86		42,86		42,86		42,86		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.000.000.000		1.876.167.300		13.500.000.000		3.100.000.000		4.500.000.000		5.600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas anggota pramuka di Kota Batam	Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam (Dengan Satuan:Persentase)	43,18	45,29	44,86		44,97		45,08		45,19		45,29		45,39		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				157.790.000		42.720.000		650.000.000		700.000.000		950.000.000		1.600.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					157.790.000		42.720.000		650.000.000		700.000.000		950.000.000		1.600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral yangdapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasipembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	40	80	45		45		45		45		80		90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				61.608.000		134.825.400		337.561.400		371.317.540		3.400.000.000		4.450.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					61.608.000		134.825.400		337.561.400		371.317.540		3.400.000.000		4.450.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	MeningkatnyaKesiapanPenganan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	297	302	300		301		301		302		302		302		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				10.682.101.072		15.731.821.000		23.425.000.000		25.125.000.000		27.350.000.000		33.100.000.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					6.703.068.072		13.568.300.600		18.100.000.000		19.450.000.000		21.150.000.000		23.300.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	6,67	33,33	12,50		22,22		27,27		28,57		33,33		37,50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					161.138.000		50.000.000		525.000.000		575.000.000		700.000.000		1.300.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya melalui registrasi provinsi	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	7,14	78,57	21,43	Rp	35,71	Rp	50,00	Rp	64,29	Rp	78,57	Rp	100	Rp	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3.817.895.000		2.113.520.400		4.800.000.000		5.100.000.000		5.500.000.000		8.500.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pelestarian budaya di museum	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum (Dengan Satuan:Persentase)	65,46	13,12	78,78		9,79		11,13		12,85		13,12		14,20		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				532.878.410		970.627.250		1.950.000.000		2.130.000.000		2.220.000.000		3.280.000.000		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					507.555.000		970.627.250		1.950.000.000		2.130.000.000		2.220.000.000		3.280.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya akses perpustakaan bagi masyarakat	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan daerah (Dengan Satuan:Persen)	52.46	50.27	52.46		51.84		51.30		50.76		50.27		49.80		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Persentase Perpustakaan yang dibina (Dengan Satuan:Persen)	26.17%	68.98%	26.17%		39.90%		49.59%		59.28%		68.98%		78.67%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat melalui Penguatan Layanan Perpustakaan	Persentase Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persen)	18.74	24.81	18.74		20.27		23.35		24.86		24.81		26.32		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					25.323.410		0		0		0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (Dengan Satuan:Persen)	0	0	80		90		0		0		0		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				103.254.000		397.349.600		1.070.000.000		1.070.000.000		1.370.000.000		2.470.000.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					57.646.000		326.947.600		835.000.000		810.000.000		1.070.000.000		2.110.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Menigkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tata kelola kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip (Dengan Satuan:Persen)	31	75	31		45		52		63		75		82		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					45.608.000		70.402.000		235.000.000		260.000.000		300.000.000		360.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip di lingkungan pemerintah Kota Batam	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:Persen)	0	11	20		4		6,5		9		11		13		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.479.297.487		30.409.204.599		48.048.112.300		47.907.783.958		54.113.755.499		63.307.194.001		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.509.995.500		8.985.509.780		13.588.392.300		10.646.668.958		11.368.205.785		15.138.184.001		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9.010.884.900		5.553.688.080		9.082.790.850		6.315.690.998		6.756.739.368		8.229.171.124	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya produksi nelayan kecil	Jumlah Produksi Nelayan Kecil (Dengan Satuan:Ton)	25532,39	26.834,80	25787,71		26045,59		26306,05		26569,11		26834,80		27103,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.837.069.000		2.465.511.500		3.035.601.450		2.870.258.215		3.071.176.290		4.284.716.441	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnyaproduksi pembudidaya ikan	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan (Dengan Satuan:Ton)	10055,49	10.004,66	9614,28		9710,43		9807,53		9905,61		10004,66		10104,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					662.041.600		966.310.200		1.470.000.000		1.460.719.745		1.540.290.127		2.624.296.436	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya produksi pengolah hasil perikanan	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	1450,78	1.524,78	1465,29		1479,94		1494,74		1509,69		1524,78		1540,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.478.081.450		7.260.112.876		14.675.000.000		14.975.000.000		17.287.487.214		20.575.000.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.062.885.000		1.166.456.200		1.550.000.000		1.650.000.000		2.662.487.214		3.450.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang sesuai dengan standar	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	21,17	66,71	27,80		36,10		44,96		55,53		66,71		80,11		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.805.257.450		1.574.918.000		7.375.000.000		7.375.000.000		7.875.000.000		8.375.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan (Dengan Satuan:Persentase)	13,24	90,11	32,91		57,35		88,31		89,57		90,11		97,19		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.609.939.000		4.518.738.676		5.750.000.000		5.950.000.000		6.750.000.000		8.750.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Dengan Satuan:Persentase)	10,89	12,99	11,16		12,05		12,54		12,74		12,99		13,25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.250.713.637		8.984.131.240		10.089.720.000		11.781.115.000		13.888.062.500		14.829.010.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.792.365.895		5.833.929.740		3.920.220.000		6.437.615.000		8.333.562.500		9.114.510.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui ketersediaan sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton)	1439,3	179,03	175,49		176,37		177,25		178,14		179,03		179,92		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan (Dengan Satuan:Ekor)	2	6	2		3		4		5		6		8		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					648.496.000		1.238.407.500		2.900.000.000		2.000.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak P a k a i (Dengan Satuan:Persen)	NA	83.6	61.5		65.5		79.0		81.0		83.6		85.5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.028.031.742		906.722.300		905.000.000		929.000.000		1.240.000.000		1.250.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya kesehatan dan produktivitas hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis (Dengan Satuan:Persen)	90	99	92		94		96		98		99		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					781.820.000		1.005.071.700		2.364.500.000		2.414.500.000		2.514.500.000		2.564.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Kapasitas Petani	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani (Dengan Satuan:Persen)	39.26	10	10		10		10		10		10		10		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7.240.506.900		5.179.450.703		9.695.000.000		10.505.000.000		11.570.000.000		12.765.000.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					9.218.000		53.636.000		225.000.000		265.000.000		335.000.000		385.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					828.690.900		642.138.898		1.050.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya (Dengan Satuan:Persen)	3.85	78.85	9.62		21.15		38.46		59.62		78.85		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					5.561.880.000		3.445.383.305		6.500.000.000		6.810.000.000		7.075.000.000		7.450.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dengan Satuan:Persen)	75.00	81.67	75.00		76.67		78.33		80.00		81.67		83.33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					159.691.000		310.240.200		850.000.000		1.050.000.000		1.400.000.000		1.650.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Nilai ekspor (Dengan Satuan:USD (Juta))	1654,6	1.400	1000		1100		1200		1300		1400		1500		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					681.027.000		647.977.900		870.000.000		930.000.000		1.090.000.000		1.400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Tertib Ukur (Dengan Satuan:Persen)	0	94.00	90.00		91.00		92.00		93.00		94.00		95.00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		80.074.400		200.000.000		250.000.000		320.000.000		380.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk L o k a l y a n g difasilitasi/dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	0	28.57	0		4.76		14.29		19.05		28.57		33.33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.647.349.500		3.377.083.050		3.530.000.000		3.620.000.000		5.560.000.000		6.130.000.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					5.647.349.500		3.327.083.050		3.470.000.000		3.550.000.000		5.480.000.000		6.040.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatnya realisasi dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah (Dengan Satuan:Persen)		70.00	52.00		58.00		61.00		66.00		70.00		75.00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatnyapemanfaatan informasi industri	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Persen)		55.00			40.00		45.00		50.00		55.00		60.00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				222.086.209.401		223.404.702.743		222.915.868.385		227.574.118.901		233.350.106.244		245.267.806.526		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				139.294.611.000		139.138.630.350		136.950.000.000		137.697.250.000		137.942.200.000		138.555.000.000		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					136.857.405.600		136.874.314.750		134.125.000.000		134.482.250.000		134.922.200.000		135.365.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Pencapaian SPM Kota Batam	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam (Dengan persatuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persen)	94	9600%	94		94.5		95		95.5		96		96.5		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kepuasan Layananan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka)	89.91	90.03	89.91		89.94		89.97		90.00		90.03		90.07		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif	Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU	Persentase MoU yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.437.205.400		2.264.315.600		2.825.000.000		3.215.000.000		3.020.000.000		3.190.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas (Dengan Satuan:Persentase)	0	98	95		95		96		97		98		99		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan J a s a . (Dengan Satuan:Angka)	85	89	85		86		87		88		89		90		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				82.791.598.401		84.266.072.393		85.965.868.385		89.876.868.901		95.407.906.244		106.712.806.526			
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					82.791.598.401		84.266.072.393		85.965.868.385		89.876.868.901		95.407.906.244		106.712.806.526		
	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Dengan Satuan:persentase)	88	94	89		91		93		94		94		97		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Dprd	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				43.993.682.681		71.945.017.509		83.305.223.969		87.292.694.651		94.548.336.160		105.959.765.073		
5.01	PERENCANAAN				1.999.737.900		2.024.742.400		2.621.882.050		2.683.976.172		3.325.572.524		3.944.364.128		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.532.044.900		1.674.480.400		1.923.873.700		1.940.288.000		2.517.964.000		3.019.543.000	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	Meningkatnyakeselarasanperencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
		Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					467.693.000		350.262.000		698.008.350		743.688.172		807.608.524		924.821.128	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang PPM	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan:Nilai)	22,05	25,94	23,22		24,03		24,88		25,31		25,94		26,15		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang perekonomian dan SDA	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:Nilai)	21,73	25,62	22,90		23,71		24,56		24,99		25,62		25,83		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Nilai)	21,94	24,44	22,44		22,94		23,44		23,94		24,44		24,94		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
5.02	KEUANGAN				34.933.325.783		63.156.516.009		71.628.331.194		75.257.454.558		82.134.865.065		92.649.032.200		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					20.094.988.783		50.489.411.709		52.315.485.384		54.126.515.082		56.677.544.779		61.528.574.476	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tercapainya penyusunan APBD yangsesuai ketentuan	Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Tercapainya pelaksanaan APBD yangsesuai ketentuan	Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Tercapainya penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					5.619.757.000		3.828.039.900		5.468.553.810		5.838.986.476		6.110.084.286		6.272.368.724	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efesien dan Akuntable	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD (Dengan Satuan: Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
		Ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD (Dengan Satuan: Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Meningkatnya piutang pajak Daerah yang tertagih	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (Dengan Satuan:Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		10		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (Dengan Satuan:Persentase)	98	98	98		98		98		98		98		98		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	20,81	11	25,98		4,96		13,55		12,20		10,76		9,69		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah <i>official assesment</i>	Persentase tingkat prtumbuhan pajak daerah official assesment (Dengan Satuan:Persentase)	12,12	6,50	16,73		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah <i>self assesment</i>	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assesment (Dengan Satuan:Persentase)	22,16	6,50	16,09		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
5.03	KEPEGAWAIAN				2.245.879.898		2.526.250.500		3.065.112.587		3.117.365.400		3.170.924.535		3.225.822.649		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.245.879.898		2.526.250.500		3.065.112.587		3.117.365.400		3.170.924.535		3.225.822.649	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya kinerja ASN Pemko Batam yang Berpredikat di Atas Ekspektasi	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik (Dengan Satuan: Persentase)	0,53%	0,45%	0,41%		0,42%		0,43%		0,44%		0,45%		0,46%		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan PNS	Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 (Dengan Satuan: Persentase)	80,37%	78,71%	80,42%		78,41%		78,51%		78,61%		78,71%		78,81%		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya Data ASN yang Berkualitas, Akurat, Terkini, dan Terpadu	Persentase pemutakhiran data ASN (Dengan Satuan: Persentase)	99,56 %	98,71%	98,27 %		98,38 %		98,49 %		98,60 %		98,71 %		98,82 %		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya Kompetensi ASN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	98,93 %	97,68%	97,24 %		97,35 %		97,46 %		97,57 %		97,68 %		97,79 %		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.397.735.000		5.136.251.000		7.323.780.188		7.506.874.693		7.694.546.560		7.886.910.224		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					6.397.735.000		5.136.251.000		7.323.780.188		7.506.874.693		7.694.546.560		7.886.910.224	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	93,89%	96%	95,30%	Rp	95,47%	Rp	95,65%	Rp	95,82%	Rp	95,99%	Rp	96,16%	Rp	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				416.742.000		1.126.000.000		1.288.000.000		1.411.000.000		1.548.000.000		2.198.000.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					416.742.000		970.018.000		724.116.000		807.116.000		899.116.000		1.499.116.000	Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
	Terwujudnya kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	0	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		155.982.000		563.884.000		603.884.000		648.884.000		698.884.000	Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
	Meningkatnya penerapan inovasi daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	0	85%	0		50%		65%		75%		85%		90%		Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6.000.955.900		3.847.252.200		3.250.500.000		3.575.550.000		3.933.105.000		4.326.415.500		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				6.000.955.900		3.847.252.200		3.250.500.000		3.575.550.000		3.933.105.000		4.326.415.500		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.415.467.200		985.456.200		1.413.500.000		1.554.850.000		1.710.335.000		1.881.368.500	Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N - 1 (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.585.488.700		2.861.796.000		1.837.000.000		2.020.700.000		2.222.770.000		2.445.047.000	Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
		Persentase pemenuhan pilar IEPK (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN				154.383.412.169		229.072.617.275		262.199.282.083		277.142.203.487		300.672.649.509		319.547.939.905		
7.01	KECAMATAN				154.383.412.169		229.072.617.275		262.199.282.083		277.142.203.487		300.672.649.509		319.547.939.905		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.556.297.900		100.498.500		133.920.565		140.616.593		147.647.423		155.029.794	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam P e r e n c a a n Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	100%	90%	75%		80 %		83 %		85 %		90 %		93 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.808.386.480		9.383.537.400		13.499.215.578		13.949.735.287		14.922.780.980		15.919.478.959	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bengkong	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	NA	48, 18 %	28,18%		33,18%		38,18 %		43, 18 %		48, 18 %		53,18 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		36.350.000		36.775.000		28.113.750		29.519.438		30.995.409	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bengkong	Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40%		60%		80%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.377.763.000		6.120.746.800		2.013.946.238		2.334.843.549		2.671.785.727		3.025.575.013	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	94.38%	96.28%	94,38%		94.85%		95.33%		95.80%		96.28%		96.76%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.877.996.000		145.264.300		198.771.930		208.710.527		219.146.053		230.103.355	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	100%	93%	80%		83%		85%		90%		93%		95%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.238.938.813		13.454.148.381		16.677.531.351		17.246.028.911		18.314.630.954		19.383.342.705	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nongsa	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) PadaPembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	37,01 %		39,02 %		41,05 %		43,15 %		45,03 %		47,20 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.543.996.000		5.342.041.300		1.965.703.595		3.371.445.194		6.171.997.095		6.487.769.810	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	92.60%	92.23%	91.15%		91.42%		91.69%		91.96%		92.23%		92.49%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.041.758.900		98.566.900		196.296.708		206.111.543		216.417.120		227.237.976	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	MeningkatnyaPartisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	100%	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.643.232.106		11.180.298.303		18.676.431.272		19.136.481.273		20.299.758.772		21.281.950.142	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batu Aji	Persentase tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada Pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	50 %		30 %		35 %		40 %		45 %		50 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		35.065.200		40.350.000		33.350.000		33.350.000		33.350.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.183.488.000		8.230.017.700		8.730.563.100		9.167.091.256		9.550.723.110		10.013.220.743	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	95.39%	95.13%	94.51%		94.66%		94.82%		94.98%		95.13%		95.45%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.676.469.200		69.166.500		72.624.825		76.256.066		80.068.869		84.072.313	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Galang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	88.77 %	89.09 %	88.97 %		89.00 %		89.03 %		89.06 %		89.09 %		89.13 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					13.769.758.227		19.218.546.839		27.667.635.637		28.957.768.680		30.812.408.375		32.734.780.054	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Galang	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna) pada pembangunan Tingkat Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	46.50	39.50		41.50		42.50		44.50		46.50		48.50		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		50.000.000		55.000.000		55.125.000		57.881.250		60.775.312	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Galang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.123.177.056		3.012.652.756		3.163.285.393		3.321.449.662		3.487.522.146		3.661.898.253	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	82.32%	84.66%	82.54%		83.07%		83.60%		84.13%		84.66%		85.19%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.453.447.000		186.775.800		387.635.000		437.635.000		437.635.000		537.635.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Sekupang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	80 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.067.825.858		21.930.867.379		28.218.671.700		29.058.671.700		31.333.671.700		33.513.671.700	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sekupang	Persentase Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM,PKK,POYANDU DAN KARANG TARUNA) pada pembangunan tingkat kecamatan Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	65%	47,51 %		50 %		55 %		60 %		65 %		70 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		45.357.200		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sekupang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.423.003.000		9.779.704.000		2.170.000.000		2.240.000.000		2.410.000.000		2.430.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	96.32%	94.85 %	94.24%		94.39 %		94.55 %		94.7 %		94.85 %		95.00 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.997.688.600		342.851.400		426.101.730		447.406.817		469.777.157		493.266.015	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.000.883.554		11.215.178.532		15.898.254.511		16.450.075.365		17.530.146.738		19.182.197.179	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Beduk	Persetase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPM,PKK,Posyandu, dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	37,30 %		39,30 %		41,30 %		43,30 %		45,30 %		47,30 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		40.000.000		33.350.000		33.350.000		33.350.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.225.069.000		6.074.939.000		2.217.716.234		2.328.602.046		2.445.032.148		2.567.283.755	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:persentase)	93.44 %	93.25 %	92.58 %		92.79 %		92.81 %		93.03 %		93.25 %		93.46 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.274.119.800		235.361.000		425.000.000		475.000.000		575.000.000		575.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	MeningkatnyaPartisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.434.043.711		10.263.461.657		18.714.054.190		19.704.054.190		20.724.054.190		21.524.054.190	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batam Kota	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota (Dengan Satuan:Persentase)	NA	54.95 %	46.24 %		48.44 %		50.84 %		52.82 %		54.95 %		56.25 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		53.365.200		55.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)		80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.137.605.000		8.545.208.000		2.357.936.000		2.407.936.000		2.807.936.000		3.407.936.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)	96.26 %	95.69 %	95.07%		95.22 %		95.38 %		95.53 %		95.69 %		95.84 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.182.345.608		230.000.000		173.177.070		190.494.777		209.500.000		230.450.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					12.710.253.138		16.663.154.823		25.108.343.912		26.487.485.820		30.604.760.372		33.983.543.926	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bulang	Persentase tingkat partisipasi Lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPM,PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		19.800.000		55.000.000		65.200.000		159.720.000		175.692.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.027.348.000		2.847.740.351		2.740.714.230		2.988.154.653		3.286.303.800		3.614.934.180	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	80.42 %	77.48 %	74.83 %		75.50 %		76.16 %		76.82 %		77.48 %		78.15 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.507.995.000		37.592.600		85.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.411.502.249		17.066.160.248		20.752.171.467		22.257.849.832		23.295.849.832		23.585.849.832	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belakang Padang	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW,LPM,PKK,Posyan du,Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	26%	22.92 %		23 %		24 %		25 %		26 %		27 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		50.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)		80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.026.276.680		2.678.163.400		1.621.460.000		1.661.460.000		1.861.460.000		1.911.460.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Persentase Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	82.79 %	84.38 %	82.59 %		83.04 %		83.48 %		83.93 %		84.38 %		84.82 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.982.127.000		188.758.900		158.723.000		258.723.000		258.723.000		258.723.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					9.583.923.211		18.995.710.892		24.595.982.150		24.595.982.150		25.095.982.150		25.595.982.150	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sagulung	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW,LPM,PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	NA	40.62%	32.62%		34.62%		36.62%		28.62%		40.62%		42.62%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		53.277.200		55.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sagulung	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.105.868.150		10.861.927.300		1.529.974.253		2.270.286.655		2.570.286.655		2.570.286.655	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	97.10%	96.50%	96.00%		96.13%		96.25%		96.38%		96.50%		96.63%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.890.378.000		101.825.700		3.165.989.715		3.324.289.201		3.490.503.661		3.665.028.844	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.528.106.420		3.240.720.252		7.100.820.361		7.311.503.259		8.034.820.301		8.769.303.198	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batu Ampar	Persentase tingkat partisipasi Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	NA	63%	59.26%		60,26 %		61,26 %		62,26 %		63,26 %		64,26 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		19.800.000		55.000.000		73.347.120		77.014.476		80.865.200	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar	Persentase koordinasi /sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.228.588.000		4.090.758.100		2.065.264.868		3.978.328.111		5.227.244.517		5.488.606.743	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	91.37 %	88.85 %	87.46 %		87.80 %		88.15 %		88.50 %		88.85 %		89.20 %		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.398.716.000		98.531.900		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	100%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.749.228.508		1.988.428.362		6.576.240.500		7.161.240.500		7.766.240.500		8.871.240.500	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Baja	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	NA	56%	48%		50%		52%		54%		56%		58%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		35.850.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)		80%			20 %		40 %		60 %		80 %		100%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.195.809.000		4.591.871.600		1.762.000.000		1.882.000.000		2.002.000.000		2.132.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam PeningkatanWawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	92.55%	88.99%	87.77%		88.07%		88.38%		88.69%		88.99%		89.30%		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				74.928.950.895		82.269.444.950		79.540.932.860		81.299.203.185		82.687.640.234		88.910.285.792		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				74.928.950.895		82.269.444.950		79.540.932.860		81.299.203.185		82.687.640.234		88.910.285.792		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.630.681.500		7.211.879.600		5.550.915.403		5.926.927.136		6.202.107.934		7.032.836.528	Perangkat Daerah PengampuKesatuan Bangsa Dan Politik



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	1	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					10.021.062.165		6.156.859.365		11.992.201.473		12.805.912.574		13.401.419.714		16.188.481.223	Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
	Terwujudnya pembinaan partai politik dan pendidikan politik kepada masyarakat secara efektif dan beretika	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		95		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASANORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.807.950.000		2.659.188.300		2.287.108.074		2.442.033.776		2.555.414.756		2.953.286.822	Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Persentase)	85	93	85		87		90		91		93		93		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					3.554.578.000		8.431.249.700		4.500.707.910		4.774.329.699		5.028.697.830		6.562.260.537	Perangkat Daerah Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan agama di masyarakat	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	95	98	95		95		96		97		98		100		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
		Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL					54.914.679.230		57.810.267.985		55.210.000.000		55.350.000.000		55.500.000.000		56.173.420.682	Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman stabilitas sosial	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	85	90	85		85		85		88		90		90		Perangkat Daerah PengampuKes atuan Bangsa Dan Politik
	NON URUSAN				2.216.760.916.321		2.341.745.541.425		2.420.783.655.388		2.501.403.490.801		2.615.860.923.071		2.698.241.859.730		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA					723.700.081.713		741.525.918.677		753.506.966.426		765.168.067.581		774.368.212.888		788.545.149.057	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,25	78,75	71,23		73,75		74,75		76,75		78,75		80,75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95,02	98,73	95,34		95,82		96,85		97,76		98,73		99,70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					437.678.527.335		433.528.310.061		479.769.115.612		497.941.544.740		539.854.648.308		559.043.340.309	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.17	82.40	70,63		76.10		78.20		80.30		82.40		84.50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.03. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.317.518. 024		35.608.482. 814		35.618.855. 764		36.629.751. 873		37.886.786. 862		39.210.240. 112	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang (CKTR)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Keseekretariatan	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.61	90.93	90.81		90.84		90.87		90.90		90.93		90.97		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.83	79.33	70,9		74.33		75.33		77.33		79.33		81.33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang
1.03. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.466.818. 650		73.543.337. 279		46.737.295. 472		46.646.515. 686		51.177.405. 112		50.989.522. 859	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang (BMSDA)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Keseekretariatan	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.37	78.87	71,27		73.87		74.87		76.87		78.87		80.87		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan BidangPekerj aan Umum Dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.068.737.814		37.370.061.339		28.484.294.489		29.805.222.340		30.406.223.920		30.712.299.655	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PERKIM)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	100	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71,65	80,17	72,87		75,17		76,17		78,17		80,17		81,17		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.200.890.029		80.557.069.746		87.018.994.667		91.277.742.804		95.817.876.948		100.493.818.853	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SATPOL)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.49	79.85	70,55		74.70		75.95		77.15		79.85		82.25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	85,01	95	87		89		91		93		95		97		



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.560.149.260		17.462.295.017		20.452.299.990		20.519.372.872		20.548.860.037		20.579.231.815	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90	100	92		94		96		98		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	74	82.40	71		76.10		78.20		80.30		82.40		82.40		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01	P R O G R A M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA					6.794.127.606		6.340.337.716		15.787.302.487		17.609.252.733		19.087.054.206		20.963.758.226	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	85	90	85		87		88		89		90		91		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,13	79	11,39		73		75		77		79		81		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.343.290.083		14.795.539.504		16.103.401.592		15.903.344.752		16.477.620.349		17.268.620.349	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	NILAI SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.15	82.40	70,22		76.10		78.20		80.30		82.40		82.40		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91.11	91.43	91.31		91.34		91.37		91.40		91.43		91.47		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.348.221.282		16.398.252.456		16.028.111.493		17.158.589.164		18.302.458.401		19.686.380.910	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.06	77	67,29		71,81		73,56		74,56		76,56		78,56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	92	82		86		88		90		92		95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.08. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.793.861. 780		14.299.753. 394		14.604.715. 195		15.324.045. 194		16.599.045. 194		16.774.045. 194	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Keseekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.87	79.37	72,75		74.37		75.37		77.37		79.37		81.37		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90	94	90		91		92		93		94		95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.691.000. 989		17.001.399. 859		16.167.485. 384		16.817.882. 029		17.345.447. 439		17.890.496. 787	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Keseekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.1	78.60	70,85		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		INDEKS PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:Nilai)	90	92.22	90.29		90.32		90.35		91.23		92.22		92.26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.137.102.974		9.214.714.825		8.844.510.471		9.795.441.080		8.928.662.088		9.339.830.975	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,07	78,57	70,01		73,57		74,57		76,57		78,57		80,57		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Poin)	90,11	92,06	90,13		90,16		90,19		91,07		92,06		92,10		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.932.693.812		26.124.841.576		22.687.131.658		23.821.488.242		25.012.562.653		26.263.190.784	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.21	78.71	72,32		73.71		74.71		76.71		78.71		80.71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.9	95.9	91.9		92.9		93.9		94.9		95.9		96.9		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.269.835.267		19.611.777.142		20.897.426.265		22.359.900.655		23.336.972.690		23.920.131.416	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.11	78.61	72,87		73.61		74.61		76.61		78.61		80.61		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.241.987.925		48.985.704.763		49.829.545.672		57.478.225.350		65.534.970.284		70.001.733.782	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	72,81		73,53		74,53		76,53		78,53		80,53		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,22	90,54	90,42		90,45		90,48		90,51		90,54		90,58		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.792.447.606		18.801.534.173		17.705.828.457		17.460.085.457		17.756.448.457		17.395.506.457	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:nilai)	76,61	78,61	76,61		77,11		77,61		78,11		78,61		79,11		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71.60	78.60	71,47		74.60		76.60		77.60		78.60		80.00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.998.046.863		12.108.207.681		20.889.483.558		21.835.162.641		23.184.580.505		24.613.241.533	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	78,55	72,49		73,55		74,55		76,55		78,55		80,55		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	100	86,80	84,80		85,3		85,8		86,3		86,80		87,3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.010.136.574		17.537.296.521		18.458.382.947		19.426.016.140		20.505.837.296		22.340.535.622	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.27	92.22	70,16		90.32		90.35		91.23		92.22		92.26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.04	78.54	71.79		73.54		74.45		76.54		78.54		80.54		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Penanaman Modal
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.076.515.676		12.565.443.413		11.120.685.740		11.220.685.740		11.320.685.740		11.420.685.740	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,06	78,56	71,12		73,56		74,56		76,56		78,56		80,56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.813.091.941		9.799.341.616		9.266.393.790		9.736.393.790		10.105.838.019		9.810.663.223	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	88.83	89.15	89.03		89.06		89.09		89.12		89.15		89.19		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.12	80.12	71,67		74.12		76.12		78.12		80.12		82.12		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.777.409.206		18.582.238.472		20.386.030.177		21.093.295.052		21.758.810.567		21.757.790.881	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.47	78.97	71,34		73.97		74.97		76.97		78.97		80.97		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	92	97	93		94		95		96		97		98		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.796.482.183		19.376.327.447		18.570.813.600		19.301.813.600		18.602.003.600		20.703.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	70,86		73,53		74,53		76,53		78,53		80,53		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,00	92,67	90,74		90,77		90,80		91,68		92,67		92,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.756.753.163		18.139.632.876		18.834.805.219		18.918.122.797		18.922.945.022		18.922.945.022	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)		94.72	92.79		92.82		92.85		93.73		94.72		94.76		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.23	78.73	70,58		73.73		74.73		76.73		78.73		80.73		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					124.284.515.049		131.671.706.677		147.137.168.564		145.111.838.079		148.563.380.761		151.103.389.672	Perangkat Daerah Pengampu



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.26	90.38	90.26		90.29		90.32		90.35		90.38		90.42		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah
	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	71.71	80.21	70,59	74.11		75.21		77.21		80.21		82.21		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Daerah		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84.283.201.818		91.162.467.835		98.234.098.855		101.533.096.700		107.672.557.638		108.718.904.249	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89	94,00	90		91		92		93		94		90		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Dprd
	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	82,40	70,32	76,10		78,20		80,30		82,40		82,40		Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat Dprd		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.288.358.228		18.619.528.706		18.972.798.910		20.101.044.001		21.666.976.401		22.409.020.801	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	73.53	82.03	75,21		77.03		78.03		80.03		82.03		84.03		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91	96,00	92		93		94		95		96		97		Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.158.416.184		30.785.518.128		30.572.776.958		32.610.156.619		34.101.194.573		34.993.758.979	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan (BPKAD)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.19	78.69	70,9		73.69		74.69		76.69		78.69		80.69		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.79	92.72	90.79		90.82		90.85		91.73		92.72		92.76		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.713.247.456		52.774.099.364		52.968.882.913		56.047.058.788		58.303.968.741		59.785.859.055	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan (BAPENDA)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,08	78,57	70,97		73,57		74,57		76,57		78,57		80,57		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,70	92,70	91,10		91,50		92,00		92,35		92,70		93,00		Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.499.774.838		16.014.309.752		16.035.027.407		16.463.593.994		16.911.166.744		17.388.953.811	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,38	78,88	71,01		73,88		74,88		76,88		78,88		80,88		Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95,00	100,00	96,00		97,00		98,00		99,00		100		100		
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.484.931.139		7.006.388.839		8.265.531.680		8.815.808.940		9.319.295.278		9.582.149.987	Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	78.62	22,68		72.17		74.32		76.47		78.62		80.77		Perangkat Daerah Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	85.24	85.12		85.15		85.18		85.21		85.24		85.28		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.187.681.695		45.322.302.450		44.991.846.400		48.497.336.200		53.275.355.070		56.475.782.113	Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	72.28	84,65	75,33		76,89		78,97		81,70		84,65		85,17		Perangkat Daerah Pengampu Inspektorat Daerah
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91,37	96,50	92,50		93,50		94,50		95,50		96,50		97,50		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.558.249.366		14.919.060.773		14.458.340.467		15.176.391.690		15.930.345.473		16.721.998.921	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BENGKONG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,08	92,58	90,58		91,08		91,58		92,08		92,58		93,08		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,12	78.62	70,14		73.62		74.62		76.62		78.62		80,62		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.832.360.111		15.939.573.969		16.030.539.774		16.924.265.828		17.918.713.987		18.995.940.358	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (NONGSA)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89.84	94.84	90.84		91.84		92.84		93.84		94.84		95.84		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.10	78.60	70,07		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.947.690.369		14.459.418.303		14.093.315.270		14.952.576.475		15.749.298.452		16.740.422.345	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BATU AJI)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89,84	94.84	90,84		91.84		92,84		93,84		94.84		95.84		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.01	78.51	70,07		73,51		74.51		76.51		78.51		80.51		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.259.906.980		22.819.311.912		24.084.777.507		25.283.016.382		26.541.167.197		27.862.225.556	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (GALANG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	88.77	92.60	88.97		89.00		90.01		91.06		92.60		93.00		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.06	78.56	63,72		73.56		74.56		76.56		78.56		80.56		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.434.886.315		23.113.335.357		21.911.361.772		23.148.161.630		24.540.301.481		25.699.798.325	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (SEKUPANG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.19	95.19	91.19		92.19		93.19		94.19		95.19		96.19		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.11	78.61	70,35		73.61		74.61		76.61		78.61		80.61		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.241.282.031		15.382.792.599		15.970.804.613		16.851.579.218		17.771.392.553		18.732.196.556	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	(SUNGAI BEDUK)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,05	95,05	91,05		92,05		93,05		94,05		95,05		96,05		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	78,55	70,05		73,55		74,55		76,55		78,55		80,55		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.606.875.663		19.819.792.846		20.649.166.115		21.406.280.002		22.525.749.583		23.604.992.643	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BATAM KOTA)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	88,89	93,89	89,89		90,89		91,89		92,89		93,89		94,89		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,13	78,63	70,51		73,63		74,63		76,63		78,63		80,63		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.972.114.586		18.862.047.062		20.389.488.060		22.424.488.310		24.662.986.141		27.122.040.679	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BULANG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95,00	100,00	70,02		97,00		98,00		99,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,02	78,52	71,77		73,52		74,52		76,52		78,52		80,52		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.804.939.340		19.151.812.682		18.505.859.115		19.024.939.788		19.822.936.777		21.030.593.576	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BELAKANG PADANG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100,00	96		97		98		99		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,07	78,57	70,02		73,57		74,57		76,57		78,57		80,57		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.728.514.384		17.589.208.547		23.689.778.486		25.588.079.017		27.558.622.597		30.558.622.597	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (SAGULUNG)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89,80	94,80	90,80		91,80		92,80		93,80		94,80		95,80		Perangkat Daerah



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan kinerja layanan Kesekretariatan																Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.07	78.57	70,26		73.57		74.57		76.57		78.57		80.57		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.833.363.875		15.612.613.341		16.210.714.451		17.015.925.422		17.851.346.044		18.748.989.540	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (BATU AMPAR)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89,92	94,92	90,92		91,92		92,92		93,92		94,92		95,92		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.10	78.60	70,08		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.565.601.959		19.820.045.690		17.223.464.742		17.708.500.000		18.236.300.000		18.850.299.804	Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan (LUBUK BAJA)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.15	95.15	91.15		92.15		93.15		94.15		95.15		96.15		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.02	78.52	70,33		73.52		74.52		76.52		78.52		80.52		Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.509.277.180		11.622.388.226		12.618.037.204		13.471.391.406		14.095.910.995		14.469.760.602	Perangkat Daerah PengampuKesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	95,00	95		95		95		95		95		95		Perangkat Daerah PengampuKesatuan Bangsa Dan Politik
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71,46	78,50	70,64		74,20		75,30		76,30		78,50		80,60		Perangkat Daerah PengampuKesatuan Bangsa Dan Politik
				TOTAL:	4.413.924.938.657,00		4.849.981.438.071,00		5.167.659.069.000,00		5.504.626.722.000,00		5.897.362.712.000,00		6.301.017.815.000,00		



Tabel IV.2
Program Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Per Perangkat Daerah

Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.01	DINAS PENDIDIKAN				1.216.971.861.596		1.214.639.287.514		1.298.425.621.011		1.424.501.116.173		1.527.359.512.017		1.558.117.159.002		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					723.700.081.713		741.525.918.677		753.506.966.426		765.168.067.581		774.368.212.888		788.545.149.057	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,25	78,75	71,23		73,75		74,75		76,75		78,75		80,75		
		Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	95,02	98,73	95,34		95,82		96,85		97,76		98,73		99,70		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					493.040.564.133		472.850.180.737		542.377.201.555		656.653.048.592		750.201.299.129		766.632.009.945	
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (Dengan Satuan:Persentase)	69,17	57,03	48,20		49,83		51,83		54,43		57,03		60,03		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (Dengan Satuan:Persentase)	99,21	99,70	99,40		99,55		99,60		99,65		99,70		99,75		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (Dengan Satuan:Persentase)	99,32	99,79	99,51		99,64		99,69		99,74		99,79		99,84		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Dengan Satuan:Persentase)	43,83	43,36	43,05		43,21		43,26		43,31		43,36		43,41		
	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SD	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD (Dengan Satuan:Nilai)	60,14	67,60	62,00		63,40		64,80		66,20		67,60		69,00		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP (Dengan Satuan:Nilai)	73,40	78,86	74,88		75,87		76,87		77,86		78,86		79,85		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					150.075.750		193.129.100		1.731.453.030		1.790.000.000		1.840.000.000		1.890.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persentase)	95,19	95,44	95,24		95,29		95,34		95,39		95,44		95,49		
		Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persentase)	90,16	90,41	90,21		90,26		90,31		90,36		90,41		90,46		
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					60.000.000		60.000.000		360.000.000		440.000.000		500.000.000		600.000.000	
	Terpenuhinya Rasio kebutuhan Pendidik danTenaga Kependidikan sesuai standar	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan (Dengan Satuan:Persentase)	56,35	66,00	58,35		60		62		64		66		70		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					21.140.000		10.059.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Legalitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		
1.02	DINAS KESEHATAN				602.381.366.235		577.142.111.943		710.919.784.289		797.429.304.002		890.379.143.429		1.010.512.523.633		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					437.678.527.335		433.528.310.061		479.769.115.612		497.941.544.740		539.854.648.308		559.043.340.309	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.17	82.40	70,63		76.10		78.20		80.30		82.40		84.50		
		Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100,00	96		97		98		99		100		100		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					162.871.070.260		141.294.904.706		228.261.778.577		296.193.197.160		346.396.302.044		446.882.529.408	
	Meningkatnya kemudahan akses kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persentase)	97.94	98,00	98		98		98		98		98		98		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kinerja upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	96.89	97.50	96.99		97.20		97.30		97.40		97.50		97.60		
		Prevalensi stunting (Dengan Satuan:Persentase)	14	13.0	13.8		13.6		13.4		13.2		13.0		12.8		
	Meningkatnya kinerja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	98.97	99.30	99.10		99.15		99.20		99.25		99.30		99.35		
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes (Dengan Satuan:Indeks (Angka))	89.99	90.31	90.19		90.22		90.25		90.28		90.31		90.35		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.024.248.000		1.674.144.840		1.756.975.100		2.188.659.602		2.764.462.317		2.871.394.550	
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Rasio (per 1.000 pddk))	3,61:1000	3,62:1000	3,61:1000		3,61:1000		3,61:1000		3,62:1000		3,62:1000		3,62:1000		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					604.997.400		323.066.100		641.395.000		676.252.500		812.960.760		1.051.909.366	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya efektivitas sediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Dengan Satuan:Persentase)	65	90,00	70		75		80		85		90		95		
	Meningkatnya efektivitas sediaan makanan dan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	35	58,00	38		42		47		52		58		64		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					202.523.240		321.686.236		490.520.000		429.650.000		550.770.000		663.350.000	
	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (Dengan Satuan:Persentase)	62,60	80,00	65		66,1		67,9		69,7		80		81		
1.03	DINAS Cipta Karya dan Tata Ruang				151.538.933.108		204.198.126.694		155.524.765.244		165.950.000.382		174.652.798.918		181.363.844.383		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.317.518.024		35.608.482.814		35.618.855.764		36.629.751.873		37.886.786.862		39.210.240.112	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Poin)	90.61	90.93	90.81		90.84		90.87		90.90		90.93		90.97		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Angka)	70.83	79.33	70,9		74.33		75.33		77.33		79.33		81.33		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					56.972.774.813		86.338.101.000		54.329.469.178		55.268.647.895		57.229.094.920		60.211.379.231	
	Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Dengan Satuan:Persentase)	50.77	59.53	52.92		54.57		56.23		57.88		59.53		61.18		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.171.646.400		5.851.481.200		5.498.170.672		5.560.115.792		5.726.919.266		5.998.726.844	
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Persentase)	56.32	62.93	57.64		58.96		60.28		61.61		62.93		64.25		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					57.781.822.143		71.474.085.670		54.602.790.317		62.749.916.544		67.779.039.909		69.619.085.064	
	Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional, sesuai dengan standar	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.33	16.67		33.33		50		66.67		83.33		100		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					518.274.000		565.227.200		906.147.085		944.759.439		985.101.561		1.027.253.913	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, penerapan standar dan tata kelola yang baik , serta peningkatan kinerja	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.33	16.67		33.33		50		66.67		83.33		100		
	Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Dengan Satuan:Persentase)	0	81.82	9.09		27.27		45.45		63.64		81.82		100		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.776.897.728		4.360.748.810		4.569.332.228		4.796.808.839		5.045.856.400		5.297.159.219	
	Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.01	15.07		32.05		49.04		66.03		83.01		100		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1,03	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				314.882.305.010		406.438.525.461		505.935.056.649		528.767.024.971		571.334.487.316		618.528.072.775		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.466.818.650		73.543.337.279		46.737.295.472		46.646.515.686		51.177.405.112		50.989.522.859	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100,00	96		97		98		99		100		100		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.37	78.87	71,27		73.87		74.87		76.87		78.87		80.87		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					12.085.780.340		57.439.045.229		91.722.593.088		73.108.341.196		78.632.664.115		96.309.419.327	
	Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Banjir melalui Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Optimal	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	0	91,79	33,33		67,17		75,37		83,58		91,79		100		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					39.485.632.692		50.011.589.504		84.000.000.000		74.000.000.000		78.500.000.000		80.600.000.000	
	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Banjir melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Optimal	Persentase Luas Genangan yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	66	87,00	5		27		50		69		87		100		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					169.688.302.668		182.642.361.443		269.355.260.500		324.020.260.500		351.100.510.500		375.989.223.000	
	Meningkatnya Infrastruktur jalan kota yang aman dan nyaman	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	67	84,00	18		36		52		68		84		100		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.529.150		689.472.056		744.907.589		744.907.589		744.907.589		744.907.589	
	Meningkatnya Mutu Konstruksi	Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu (Dengan Satuan:Persentase)	67	100,00	10		70		100		100		100		100		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					39.955.241.510		42.112.719.950		13.375.000.000		10.247.000.000		11.179.000.000		13.895.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Keselamatan, Keselamatan, dan Kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persentase)	65	83,00	16		33		49		66		83		100		
1.04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN				197.881.115.040		264.778.557.668		175.150.426.826		187.014.677.122		196.697.421.842		205.195.082.208		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.068.737.814		37.370.061.339		28.484.294.489		29.805.222.340		30.406.223.920		30.712.299.655	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	100,00	96		97		98		99		100		100		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71,65	80,17	72,87		75,17		76,17		78,17		80,17		81,17		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					17.875.347.990		19.470.217.584		19.100.072.600		19.928.499.482		20.846.467.313		21.895.980.764	
	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persentase)	85,43%	96.58%	85,43%		86.38%		89.78%		93.18%		96.58%		99.98%		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					10.547.904.768		18.388.279.195		9.753.974.505		9.753.974.505		11.254.077.871		12.506.077.871	
	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sesuai kawasan kumuh yang ditetapkan	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	72.46%	94.50%	72.46%		77.97%		83.48%		88.99%		94.50%		100%		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0		646.980.000		1.001.793.921		3.049.581.225		4.677.631.307		5.982.629.655	
	Menurunnya potensi munculnya kawasan kumuh baru	Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:Persentase)	0	75.00%	0		16.25%		33.75%		53.75%		75.00%		100%		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					101.542.019.460		141.105.905.779		89.307.621.949		92.307.621.950		93.958.903.400		95.683.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Dengan Satuan:Persentase)	26.81%	38.11%	29.07%		31.33%		33.59%		35.85%		38.11%		40.37%		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					36.847.105.008		47.797.113.771		27.502.669.362		32.169.777.620		35.554.118.031		38.415.094.263	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Luas RTH Publik	Persentase Peningkatan luas RTH Publik (Dengan Satuan:Persentase)	5,88	6,10	5,92		5,96		6,01		6,05		6,10		6,14		
1.05	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				17.234.841.760		45.316.932.617		53.487.690.075		53.598.677.008		53.680.162.543		55.710.534.321		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.560.149.260		17.462.295.017		20.452.299.990		20.519.372.872		20.548.860.037		20.579.231.815	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	90	100,00	92		94		96		98		100		100		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	74	82.40	70,63		76.10		78.20		80.30		82.40		82.40		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					674.692.500		27.854.637.600		33.035.390.085		33.079.304.136		33.131.302.506		35.131.302.506	
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran yang Terlaksana Sesuai SPM	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindungi Diri yang Sesuai Standar	Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Pencegahan Layanan Kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				70.214.329.329		88.013.485.047		91.651.646.867		96.264.308.004		100.914.871.148		107.262.252.053		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.200.890.029		80.557.069.746		87.018.994.667		91.277.742.804		95.817.876.948		100.493.818.853	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.49	79.85	70.55		74.70		75.95		77.15		79.85		82.25		
		Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:NILAI)	85,01	95	87		89		91		93		95		97		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.013.439.300		7.456.415.301		4.632.652.200		4.986.565.200		5.096.994.200		6.768.433.200	
	Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp (Dengan Satuan:persentase)	0	100	100		100		100		100		100		100		
	meningkatkan kualitas SDM anggota satpol pp	persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar (Dengan Satuan:persentase)	63,19	39.97	19.57		23.41		28.93		34.45		39.97		45.48		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Terwujudnya penegakan perda dan perkara	Persentase perda perkara yang di tegakan (Dengan Satuan:persentase)	0	100	100		100		100		100		100		100		
	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan satlimas (Dengan Satuan:persentase)	0	100	9.09		31.82		54.55		77.27		100		100		
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7.285.212.206		7.209.540.316		18.139.285.407		19.217.889.945		20.856.555.139		23.910.209.252		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.794.127.606		6.340.337.716		15.787.302.487		17.609.252.733		19.087.054.206		20.963.758.226		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	85	90	85		87		88		89		90		91		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	70,13	79	11,39		73		75		77		79		81		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				491.084.600		869.202.600		2.351.982.920		1.608.637.212		1.769.500.933		2.946.451.026		
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		100		
1.06	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				56.091.664.083		59.317.956.428		59.572.430.237		63.742.795.251		70.268.126.138		81.058.665.524		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.343.290.083		14.795.539.504		16.103.401.592		15.903.344.752		16.477.620.349		17.268.620.349		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	NILAI SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.15	82.40	70,22		76.10		78.20		80.30		82.40		82.40		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	91.11	91.43	91.31		91.34		91.37		91.40		91.43		91.47		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.376.808.000		1.073.731.000		1.947.452.326		2.119.022.549		3.305.341.042		5.231.192.512	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional , partisipasif , dan berkelanjutan	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	70	95	75		80		85		90		95		100		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.359.339.200		2.687.630.874		3.405.701.588		3.766.271.746		4.157.898.921		6.595.022.054	
	Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		
	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		
	Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		
	Meningkatnya kualitas hidup bagi tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	90	50		60		70		80		90		100		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					10.638.224.000		16.268.621.300		11.265.049.499		12.391.554.449		13.630.709.894		15.630.709.894	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	90	100	100		100		100		100		100		100		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					575.832.000		500.029.800		1.601.016.422		1.847.812.064		2.060.287.271		3.210.287.271	
	Menurunnya korban bencana alam dan/ non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					229.681.800		235.649.000		382.574.500		420.831.950		462.915.145		638.334.290	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					223.190.000		234.180.700		257.610.760		283.371.836		321.709.020		332.709.020	
	Meningkatnya kualitas Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya (Dengan Satuan:Persentase)	93,75	100	100		100		100		100		100		100		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					22.345.299.000		23.522.574.250		24.609.623.550		27.010.585.905		29.851.644.496		32.151.790.134	
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2.07	DINAS TENAGA KERJA				58.791.551.778		51.907.707.058		56.948.212.439		62.331.913.793		65.614.920.387		70.506.449.434		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.348.221.282		16.398.252.456		16.028.111.493		17.158.589.164		18.302.458.401		19.686.380.910	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	70,06	77	67,29		71,81		73,56		74,56		76,56		78,56		
		Indeks layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	0	92	82		86		88		90		92		95		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					118.310.000		0		0		0		0		350.648.000	
	Tersusunnya profil ketenagakerjaan daerah yang akurat, mutakhir, dan sesuai standar	Presentase Data Sektoral Ketenagakerjaan yang tercakup dalam profil (Dengan Satuan: Persentase)	0	0	100		0		0		0		0		100		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					41.829.540.012		32.172.789.502		36.763.185.646		40.828.299.329		42.778.358.686		44.675.222.824	
	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	16,44	99,33	33,44		48,06		64,70		81,79		99,33		100		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					933.541.484		566.278.500		1.154.764.300		1.265.514.300		1.376.264.300		1.557.014.300	
	Meningkatnya keterhubungan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan (Dengan Satuan: Persentase)	52	78,00	72,00		73,50		75,00		76,50		78,00		79,50		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					561.939.000		2.770.386.600		3.002.151.000		3.079.511.000		3.157.839.000		4.237.183.400	
	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan (Dengan Satuan: Persentase)	100	79,55	7,25		24,11		41,83		60,31		79,55		100		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persentase)	0	78,9	0		19,56		39,14		58,92		78,90		100		
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA				24.962.526.839		24.337.263.094		26.249.259.294		27.773.589.293		30.858.589.293		34.228.589.293		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.793.861.780		14.299.753.394		14.604.715.195		15.324.045.194		16.599.045.194		16.774.045.194	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.87	79.37	72,75		74.37		75.37		77.37		79.37		81.37		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90	94	90		91		92		93		94		95		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.076.343.000		509.927.600		810.000.000		965.000.000		1.115.000.000		1.265.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	11.93	12.90	12.0		12.20		12.50		12.70		12.90		13.0		
	Meningkatnya kompetensi SDM perempuan	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan:Persentase)	75	85	78		80		82		84		85		85		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					101.923.500		346.621.000		552.565.000		752.565.000		852.565.000		1.052.565.000	
	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					2.237.817.759		828.636.900		1.128.674.899		1.228.674.899		1.328.674.899		1.428.674.899	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	4.49	5.0	4.6		4.7		4.8		4.9		5.0		5.2		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					17.223.000		45.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					187.748.000		480.000.000		650.000.000		750.000.000		850.000.000		1.050.000.000	
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase capaian kluster kota layak anak (Dengan Satuan:Persentase)	70	82	72		75		78		80		82		85		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					323.095.000		323.095.000		504.075.000		604.075.000		754.075.000		904.075.000	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					324.720.000		354.600.000		454.600.000		454.600.000		514.600.000		759.600.000	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (Dengan Satuan:Persentase)	60	68	60		62		64		66		68		70		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.154.706.800		3.249.236.800		3.299.236.800		3.349.236.800		3.399.236.800		4.449.236.800	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (Dengan Satuan:Persentase)	81.58	81.80	81.60		81.65		81.70		81.75		81.80		82		
		Unmeet Need (Dengan Satuan:Persentase)	11.1	10.6	11		10.9		10.8		10.7		10.6		10.5		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.745.088.000		3.900.392.400		4.100.392.400		4.200.392.400		5.300.392.400		6.400.392.400	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	60	85	65		70		75		80		85		90		
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				25.697.554.426		27.113.674.099		27.535.205.384		30.022.997.029		32.792.509.939		34.452.035.055		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.691.000.989		17.001.399.859		16.167.485.384		16.817.882.029		17.345.447.439		17.890.496.787	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.1	78.60	70,85		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		
		Indek layanan kesekretariatanPD (Dengan Satuan:Nilai)	90	92.22	90.29		90.32		90.35		91.23		92.22		92.26		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					628.895.000		889.250.100		1.105.000.000		1.239.000.000		1.359.000.000		1.521.528.268	
	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Dengan Satuan:kkal per kapita per hari)	2608	2617	2609		2611		2613		2615		2617		2618		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					78.193.000		90.139.800		118.000.000		125.000.000		135.000.000		141.000.000	
	Menurunnya daerah Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan (Dengan Satuan:Persen)	3.13	1,56	3,12		3,13		1,56		1,56		1,56		1,56		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					48.751.800		148.753.100		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		100		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.792.365.895		5.833.929.740		3.920.220.000		6.437.615.000		8.333.562.500		9.114.510.000	
	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui ketersediaan sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton)	1439,3	179,03	175,49		176,37		177,25		178,14		179,03		179,92		
		Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan (Dengan Satuan:Ekor)	2	6	2		3		4		5		6		8		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					648.496.000		1.238.407.500		2.900.000.000		2.000.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	
	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (Dengan Satuan:Persen)	NA	83.6	61.5		65.5		79.0		81.0		83.6		85.5		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.028.031.742		906.722.300		905.000.000		929.000.000		1.240.000.000		1.250.000.000	
	Meningkatnya kesehatan dan produktivitas hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis (Dengan Satuan:Persen)	90	99	92		94		96		98		99		100		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					781.820.000		1.005.071.700		2.364.500.000		2.414.500.000		2.514.500.000		2.564.500.000	
	Meningkatnya Kapasitas Petani	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani (Dengan Satuan:Persen)	39.26	10	10		10		10		10		10		10		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10	DINAS PERTANAHAN				9.716.713.074		9.675.352.425		11.084.510.471		11.825.441.080		12.318.662.088		12.549.830.975		
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.137.102.974		9.214.714.825		8.844.510.471		9.795.441.080		8.928.662.088		9.339.830.975	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	70,07	78,57	70,01		73,57		74,57		76,57		78,57		80,57		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,11	92,06	90,13		90,16		90,19		91,07		92,06		92,10		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0		8.138.800		75.000.000		90.000.000		150.000.000		200.000.000	
	Terwujudnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	0	80	0		20		40		60		80		100		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0		132.000.000		1.225.000.000		900.000.000		1.500.000.000		1.200.000.000	
	Meningkatnya legalitas tanah kawasan permukiman Kota Batam sesuai dengan kewenangan	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan fasilitas legalitas tanah (Dengan Satuan:Persentase)	36,61	97,22	52,78		66,67		77,78		88,89		97,22		100		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		113.340.000		270.000.000		320.000.000		620.000.000		650.000.000	
	Terwujudnya basis data pertanahan di Kota Batam	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan (Dengan Satuan:Persentase)	0	91,67	0		25		50		75		91,67		100		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					1.579.610.100		207.158.800		670.000.000		720.000.000		1.120.000.000		1.160.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	Persentase Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	55,98	94,83	73,22		79,31		84,48		89,66		94,83		100		
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				164.600.117.613		222.131.434.336		178.242.491.470		154.073.718.158		164.908.397.774		181.870.114.769		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.932.693.812		26.124.841.576		22.687.131.658		23.821.488.242		25.012.562.653		26.263.190.784	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.21	78.71	72,32		73.71		74.71		76.71		78.71		80.71		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.9	95.9	91.9		92.9		93.9		94.9		95.9		96.9		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					307.949.000		213.776.000		300.000.000		300.000.000		752.000.000		0	
	Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup sesuai perencanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					286.390.580		982.813.475		1.951.000.000		2.024.000.000		2.066.000.000		3.109.000.000	
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Mutu Air (Dengan Satuan:Nilai)	2.18	3.4	3.0		3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		
		Nilai Antara Kualitas Udara (Dengan Satuan:Nilai)	0.42	0.35	0.39		0.38		0.37		0.36		0.35		0.34		
		Kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:Indeks)	0.390	0.415	0.395		0.400		0.405		0.410		0.415		0.420		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					107.651.800		363.074.200		450.000.000		490.000.000		520.000.000		670.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan PPLH	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Persen)	70	100	70		90		90		100		100		100		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					56.670.000		394.159.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000	
	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	0	8	0		2		4		6		8		10		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					75.800.000		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	0	100		0		0		0		0		0		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					222.105.000		220.408.100		405.370.000		410.370.000		415.370.000		525.370.000	
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan lingkungan melalui mekanisme pengaduan publik	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	90	100	90		90		100		100		100		100		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					138.610.857.421		191.192.367.985		146.528.995.812		121.027.865.916		129.062.471.121		142.302.565.985	
	Menurunnya volume sampah yang tidak terkelola	Persentase Pengurangan Sampah yang masuk di TPA (Dengan Satuan:Persen)	26	30	26		30		30		30		30		30		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun (Dengan Satuan:%)	25	75	25		37.5		50		62.5		75		100		
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				26.374.795.211		23.766.444.442		25.295.033.565		27.008.485.976		28.263.460.690		29.616.114.416		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.269.835.267		19.611.777.142		20.897.426.265		22.359.900.655		23.336.972.690		23.920.131.416	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	70.11	78.61	72,87		73.61		74.61		76.61		78.61		80.61		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					4.735.677.500		3.884.133.000		4.014.725.300		4.263.575.321		4.528.878.000		4.984.773.000	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Dengan Satuan:Persentase)	54.50	67.67	57.33		60.00		62.33		65.00		67.67		70		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					292.238.444		213.432.200		275.274.000		276.874.000		278.474.000		580.074.000	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persentase)	99.41	99.56	99.44		99.47		99.49		99.52		99.56		99.58		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					34.282.200		22.700.400		46.024.000		46.024.000		56.024.000		66.024.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya pemanfaatan dokumen dan informasi kependudukan oleh pemangku kepentingan secara tertib, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan.	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	89	44		56		67		78		89		100		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					42.761.800		34.401.700		61.584.000		62.112.000		63.112.000		65.112.000	
	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan oleh pemangku kepentingan secara optimal dan berkelanjutan.	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	0	98	73		77		84		91		98		100		
2.15	DINAS PERHUBUNGAN				127.484.524.156		133.460.409.681		178.892.823.139		209.894.929.754		219.994.875.691		249.135.239.951		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.241.987.925		48.985.704.763		49.829.545.672		57.478.225.350		65.534.970.284		70.001.733.782	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	72,81		73,53		74,53		76,53		78,53		80,53		
		Indeks layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:Nilai)	90,22	90,54	90,42		90,45		90,48		90,51		90,54		90,58		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					81.065.369.383		72.803.996.710		107.618.527.419		129.800.360.556		131.549.561.559		145.517.162.321	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	57	93,00	63		71		80		87		93		100		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan darat oleh Trans Batam	Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Dengan Satuan:Persentase)	10	14,00	10		12		13		13		14		15		
	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan kelayakan Koperasional kendaraan angkutan barang dan penumpang umum	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (Dengan Satuan:Persentase)	49	70,00	50		53		59		65		70		75		
	Meningkatnya kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Dengan Satuan:Persentase)	5	10,00	5		5		5		10		10		15		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					6.177.166.848		11.670.708.208		21.444.750.048		22.616.343.848		22.910.343.848		33.616.343.848	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	69	93,00	69		73		80		87		93		100		
	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan laut	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:Persentase)	27	3,00	130		24		9		3		3		3		
2.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI				34.856.012.983		36.065.055.949		34.089.648.153		35.329.395.499		39.911.830.446		44.179.003.337		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.792.447.606		18.801.534.173		17.705.828.457		17.460.085.457		17.756.448.457		17.395.506.457	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:nilai)	76,61	78,61	71,47		77,11		77,61		78,11		78,61		79,11		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71.60	78.60	72.60		74.60		76.60		77.60		78.60		80.00		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					10.335.379.065		10.258.130.232		7.730.760.862		7.982.495.068		7.919.884.555		9.797.999.446	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:persentase)	79.68	74.59	74.59		74.59		74.59		74.59		74.59		74.59		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Cepat dan Tanggap	Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100,00	100		100		100		100		100				
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.508.788.312		6.827.846.144		7.665.497.434		8.815.497.434		9.885.497.434		10.935.497.434	
	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam pelayanan publik	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	95	96,00	95		95		95.5		95.5		96		96.5		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					157.790.000		42.720.000		650.000.000		700.000.000		950.000.000		1.600.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	40	80,00	45		45		45		45		80		90		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					61.608.000		134.825.400		337.561.400		371.317.540		3.400.000.000		4.450.000.000	
	Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	297	302,00	300		301		301		302		302		302		
2.17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				22.937.050.483		21.841.979.921		31.535.778.470		33.017.349.822		35.073.524.026		40.805.080.261		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.998.046.863		12.108.207.681		20.889.483.558		21.835.162.641		23.184.580.505		24.613.241.533	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	78,55	72,49		73,55		74,55		76,55		78,55		80,55		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	100	86,80	84,80		85.3		85.8		86.3		86,80		87.3		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					37.437.000		83.695.400		391.900.461		431.090.507		474.199.557		521.619.512	
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:%)	32.46	41,92	27,34		31,81		41,11		41,87		41,92		51,79		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					44.712.500		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kesehatan lembaga koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat (Dengan Satuan:%)	83.33	0,00	88,89		0		0		0		0		0		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					92.344.250		317.116.000		172.538.665		189.792.531		208.771.784		529.648.962	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kompetensi SDM koperasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Dengan Satuan:%)	21.18	48,88	35,39		39,80		43,65		44,27		48,88		49,15		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					323.378.000		171.310.800		733.372.696		822.091.749		1.014.300.922		2.080.393.989	
	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (Dengan Satuan:%)	28.52	81,25	17,77		47,15		59,09		70,44		81,25		90,70		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.465.951.870		3.622.840.540		3.653.746.902		3.655.002.588		4.075.502.845		5.983.053.127	
	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha (Dengan Satuan:%)	66.32	82,05	70,95		72,51		76,35		79,46		82,05		85,61		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					4.975.180.000		5.538.809.500		5.694.736.188		6.084.209.806		6.116.168.413		7.077.123.138	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha (Dengan Satuan:%)	43,24	85,10	57,19		58,07		68,91		77,75		85,10		91,31		
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				17.907.104.574		18.584.200.721		20.657.586.798		21.522.966.140		22.998.287.296		25.416.580.622		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.010.136.574		17.537.296.521		18.458.382.947		19.426.016.140		20.505.837.296		22.340.535.622	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.27	92.22	90.29		90.32		90.35		91.23		92.22		92.26		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.04	78.54	70.16		73.54		74.45		76.54		78.54		80.54		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					194.763.800		79.173.000		522.000.000		282.000.000		580.000.000		960.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Rupiah)	25.462.030.732.730	32.496.720.367.992	28.071.888.882.835		28.071.888.882.835		29.475.483.326.977		30.949.257.493.326		32.496.720.367.992		34.121.556.386.392		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.216.252.600		700.968.300		980.000.000		1.020.000.000		1.071.500.000		1.225.000.000	
	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Dengan Satuan:Persentase)	-12.56%	0,02	1%		1%		2%		2%		2%		3%		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					374.971.600		144.537.900		357.203.851		444.950.000		487.950.000		524.745.000	
	Meningkatnya Kualitas Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	NA	80,00	80		80		80		80		80		80		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					28.850.000		39.300.000		250.000.000		260.000.000		263.000.000		276.300.000	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan	Persentase proyek investasi yang diawasi (Dengan Satuan:Persentase)	0,86	5,00	1		5		5		5		5		5		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL					82.130.000		82.925.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100%	1,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				53.222.090.676		71.212.397.852		66.482.909.516		60.495.573.516		60.832.909.516		64.395.573.516		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.076.515.676		12.565.443.413		11.120.685.740		11.220.685.740		11.320.685.740		11.420.685.740	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam (Dengan Satuan:Nilai)	70,06	78,56	71,12		73,56		74,56		76,56		78,56		80,56		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100,00	96		97		98		99		100		100		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.832.850.000		1.446.653.800		2.037.467.100		2.037.467.100		2.187.467.100		3.237.467.100	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	0,07	0,16	0,08		0,13		0,14		0,15		0,16		0,17		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				39.312.725.000				55.324.133.339				39.824.756.676				
	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional (Dengan Satuan:Persentase)	44,44	25.53	25,53		89,36		23,40		34,04		25,53		89,36		
		Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	42,86	42,86	42,86		28,57		42,86		42,86		42,86				
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.000.000.000		1.876.167.300		13.500.000.000		3.100.000.000		4.500.000.000		5.600.000.000	
	Meningkatnya kapasitas anggota pramuka di Kota Batam	Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam (Dengan Satuan:Persentase)	43,18	45,29	44,86		44,97		45,08		45,19		45,29		45,39		
2.22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				32.956.664.705		42.368.261.323		56.670.813.600		59.401.813.600		63.239.490.814		74.378.000.000		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.796.482.183		19.376.327.447		18.570.813.600		19.301.813.600		18.602.003.600		20.703.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	70,86		73,53		74,53		76,53		78,53		80,53		
		Indek layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,00	92,67	90,74		90,77		90,80		91,68		92,67		92,71		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					6.703.068.072		13.568.300.600		18.100.000.000		19.450.000.000		21.150.000.000		23.300.000.000	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	6,67	33,33	12,50		22,22		27,27		28,57		33,33		37,50		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					161.138.000		50.000.000		525.000.000		575.000.000		700.000.000		1.300.000.000	
	Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya melalui registrasi provinsi	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	7,14	78,57	21,43		35,71		50,00		64,29		78,57		100		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3.817.895.000		2.113.520.400		4.800.000.000		5.100.000.000		5.500.000.000		8.500.000.000	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pelestarian budaya di museum	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum (Dengan Satuan:Persentase)	65,46	13,12	78,78		9,79		11,13		12,85		13,12		14,20		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.062.885.000		1.166.456.200		1.550.000.000		1.650.000.000		2.662.487.214		3.450.000.000	
	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang sesuai standar dengan standar	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	21,17	66,71	27,80		36,10		44,96		55,53		66,71		80,11		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.805.257.450		1.574.918.000		7.375.000.000		7.375.000.000		7.875.000.000		8.375.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan (Dengan Satuan:Persentase)	13,24	90,11	32,91		57,35		88,31		89,57		90,11		97,19		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.609.939.000		4.518.738.676		5.750.000.000		5.950.000.000		6.750.000.000		8.750.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Dengan Satuan:Persentase)	10,89	12,99	11,16		12,05		12,54		12,74		12,99		13,25		
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				10.449.224.351		11.167.318.466		12.286.393.790		12.936.393.790		13.695.838.019		15.560.663.223		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.813.091.941		9.799.341.616		9.266.393.790		9.736.393.790		10.105.838.019		9.810.663.223	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatanPerangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	88.83	89.15	89.03		89.06		89.09		89.12		89.15		89.19		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.12	80.12	71,67		74.12		76.12		78.12		80.12		82.12		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					507.555.000		970.627.250		1.950.000.000		2.130.000.000		2.220.000.000		3.280.000.000	
	Meningkatnya akses perpustakaan bagi masyarakat	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan daerah (Dengan Satuan:Persen)	52.46	50.27	52.46		51.84		51.30		50.76		50.27		49.80		
		Persentase Perpustakaan yang dibina (Dengan Satuan:Persen)	26.17%	68.98%	26.17%		39.90%		49.59%		59.28%		68.98%		78.67%		
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat melalui Penguatan Layanan Perpustakaan	Persentase Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persen)	18.74	24.81	18.74		20.27		23.35		24.86		24.81		26.32		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					25.323.410		0		0		0		0		0	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (Dengan Satuan:Persen)	0	0,00	80		90		0		0		0		0		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					57.646.000		326.947.600		835.000.000		810.000.000		1.070.000.000		2.110.000.000	
	meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tata kelola kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip (Dengan Satuan:Persen)	31	75,00	31		45		52		63		75		82		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					45.608.000		70.402.000		235.000.000		260.000.000		300.000.000		360.000.000	
	Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip di lingkungan pemerintah Kota Batam	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:Persen)	0	11,00	20		4		6,5		9		11		13		
3.25	DINAS PERIKANAN				30.287.404.706		27.567.748.252		33.974.422.477		31.739.964.010		33.127.016.352		36.895.974.882		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.777.409.206		18.582.238.472		20.386.030.177		21.093.295.052		21.758.810.567		21.757.790.881	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.47	78.97	71,34		73.97		74.97		76.97		78.97		80.97		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	92	97,00	93		94		95		96		97		98		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9.010.884.900		5.553.688.080		9.082.790.850		6.315.690.998		6.756.739.368		8.229.171.124	
	Meningkatnya produksi nelayan kecil	Jumlah Produksi Nelayan Kecil (Dengan Satuan:Ton)	25532,39	26834,80	25787,71		26045,59		26306,05		26569,11		26834,80		27103,15		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.837.069.000		2.465.511.500		3.035.601.450		2.870.258.215		3.071.176.290		4.284.716.441	
	Meningkatnya produksi pembudidaya ikan	Jumlah Produksi pembudidaya Ikan (Dengan Satuan:Ton)	10055,49	10004,66	9614,28		9710,43		9807,53		9905,61		10004,66		10104,71		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					662.041.600		966.310.200		1.470.000.000		1.460.719.745		1.540.290.127		2.624.296.436	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	1450,78	1524,78	1465,29		1479,94		1494,74		1509,69		1524,78		1540,03		
3.30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				30.644.609.563		26.696.166.629		32.059.805.219		33.043.122.797		36.052.945.022		37.817.945.022		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.756.753.163		18.139.632.876		18.834.805.219		18.918.122.797		18.922.945.022		18.922.945.022	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)		94.72	92.79		92.82		92.85		93.73		94.72		94.76		
		Nilai Sakip Disperindag (Dengan Satuan:Nilai)	70.23	78.73	70,58		73.73		74.73		76.73		78.73		80.73		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					5.647.349.500		3.327.083.050		3.470.000.000		3.550.000.000		5.480.000.000		6.040.000.000	
	Meningkatnya realisasi dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (Dengan Satuan:Persen)		70.00	52.00		58.00		61.00		66.00		70.00		75.00		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Persen)		55.00			40.00		45.00		50.00		55.00		60.00		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					9.218.000		53.636.000		225.000.000		265.000.000		335.000.000		385.000.000	
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100,00	100		100		100		100		100		100		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					828.690.900		642.138.898		1.050.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya (Dengan Satuan:Persen)	3.85	78.85	9.62		21.15		38.46		59.62		78.85		100		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					5.561.880.000		3.445.383.305		6.500.000.000		6.810.000.000		7.075.000.000		7.450.000.000	
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dengan Satuan:Persen)	75.00	81.67	75.00		76.67		78.33		80.00		81.67		83.33		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					159.691.000		310.240.200		850.000.000		1.050.000.000		1.400.000.000		1.650.000.000	
	Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Nilai ekspor (Dengan Satuan:USD (Juta))	1654,6	1400,00	1000		1100		1200		1300		1400		1500		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					681.027.000		647.977.900		870.000.000		930.000.000		1.090.000.000		1.400.000.000	
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Tertib Ukur (Dengan Satuan:Persen)	0	94.00	90.00		91.00		92.00		93.00		94.00		95.00		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		80.074.400		200.000.000		250.000.000		320.000.000		380.000.000	
	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanak an (Dengan Satuan:Persen)	0	28.57	0		4.76		14.29		19.05		28.57		33.33		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				263.579.126.049		270.810.337.027		284.087.168.564		282.809.088.079		286.505.580.761		289.658.389.672		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					124.284.515.049		131.671.706.677		147.137.168.564		145.111.838.079		148.563.380.761		151.103.389.672	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan sekretariat	Indeks layanan sekretariat PD (Dengan Satuan:Poin)	90.26	90.38	90.26		90.29		90.32		90.35		90.38		90.42		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Angka)	71.71	80.21	70,59		74.11		75.21		77.21		80.21		82.21		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					136.857.405.600		136.874.314.750		134.125.000.000		134.482.250.000		134.922.200.000		135.365.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pencapaian SPM Kota Batam	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam (Dengan persatuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persen)	94	96,00	94		94.5		95		95.5		96		96.5		
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka)	89.91	90.03	89.91		89.94		89.97		90.00		90.03		90.07		
	Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif	Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	1,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU	Persentase MoU yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persentase)	100%	1,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.437.205.400				2.264.315.600				2.825.000.000				3.215.000.000
	Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	1,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas (Dengan Satuan:Persentase)	0	98,00	95		95		96		97		98		99		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan J a s a . (Dengan Satuan:Angka)	85	89,00	85		86		87		88		89		90		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	1,00	100%			100%		100%		100%		100%			
4.02	SEKRETARIAT DPRD				167.074.800.219		175.428.540.228		184.199.967.240		191.409.965.601		203.080.463.882		215.431.710.775		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84.283.201.818		91.162.467.835		98.234.098.855		101.533.096.700		107.672.557.638		108.718.904.249	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89	94,00	90		91		92		93		94		90		
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	82,40	70,320		76,10		78,20		80,30		82,40		82,40		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					82.791.598.401		84.266.072.393		85.965.868.385		89.876.868.901		95.407.906.244		106.712.806.526	
	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Dengan Satuan:persentase)	88	94,00	89		91		93		94		94		97		
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				19.288.096.128		20.644.271.106		21.594.680.960		22.785.020.173		24.992.548.925		26.353.384.929		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.288.358.228		18.619.528.706		18.972.798.910		20.101.044.001		21.666.976.401		22.409.020.801	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	73.53	82.03	75,21		77.03		78.03		80.03		82.03		84.03		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91	96,00	92		93		94		95		96		97		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.532.044.900		1.674.480.400		1.923.873.700		1.940.288.000		2.517.964.000		3.019.543.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya keselarasan Perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH					467.693.000		350.262.000		698.008.350		743.688.172		807.608.524		924.821.128	
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang PPM	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan:Nilai)	22,05	25,94	23,22		24,03		24,88		25,31		25,94		26,15		
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang perekonomian dan SDA	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:Nilai)	21,73	25,62	22,90		23,71		24,56		24,99		25,62		25,83		
	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan terukur di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Nilai)	21,94	24,44	22,44		22,94		23,44		23,94		24,44		24,94		
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			53.873.161.967			85.102.969.737		88.356.816.152		92.575.658.177		96.888.823.638		102.794.702.179		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.158.416.184		30.785.518.128		30.572.776.958		32.610.156.619		34.101.194.573		34.993.758.979	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP BPKAD (Dengan Satuan:Nilai)	70.19	78.69	70,9		73.69		74.69		76.69		78.69		80.69		
		Indeks layanan kesekretariatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam (Dengan Satuan:Nilai)	90.79	92.72	90.79		90.82		90.85		91.73		92.72		92.76		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					20.094.988.783		50.489.411.709		52.315.485.384		54.126.515.082		56.677.544.779		61.528.574.476	
	Tercapainya penyusunan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase penyusunan Anggaran yang sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Tercapainya pelaksanaan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100				
	Tercapainya penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					5.619.757.000		3.828.039.900		5.468.553.810		5.838.986.476		6.110.084.286		6.272.368.724	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD (Dengan Satuan: Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD (Dengan Satuan: Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH				56.931.827.456		61.613.163.764		66.813.174.913		71.339.011.788		77.651.204.741		84.633.948.055		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.713.247.456		52.774.099.364		52.968.882.913		56.047.058.788		58.303.968.741		59.785.859.055	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70,08	78,57	70,97		73,57		74,57		76,57		78,57		80,57		
		INDEKS layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,70	92,70	91,10		91,50		92,00		92,35		92,70		93,00		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000	
	Meningkatnya piutang pajak Daerah yang tertagih	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (Dengan Satuan:Persentase)	10	10,00	10		10		10		10		10		10		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (Dengan Satuan:Persentase)	98	98,00	98		98		98		98		98		98		
	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	20,81	10,76	25,98		4,96		13,55		12,20		10,76		9,69		
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah official assesment	Persentase tingkat prtumbuhan pajak daerah official assesment (Dengan Satuan:Persentase)	12,12	6,50	16,73		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya penerimaan pajak Daerah self assesment	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assesment (Dengan Satuan:Persentase)	22,16	6,50	16,09		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				23.143.389.736		23.676.811.252		26.423.920.182		27.087.834.087		27.776.637.839		28.501.686.684		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.499.774.838		16.014.309.752		16.035.027.407		16.463.593.994		16.911.166.744		17.388.953.811	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,38	78,88	71,01		73,88		74,88		76,88		78,88		80,88		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95,00	100	96,00		97,00		98,00		99,00		100		100		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.245.879.898		2.526.250.500		3.065.112.587		3.117.365.400		3.170.924.535		3.225.822.649	
	Meningkatnya kinerja ASN Pemko Batam yang Berpredikat di Atas Ekspektasi	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik (Dengan Satuan: Persentase)	0,53%	0,45%	0,41%		0,42%		0,43%		0,44%		0,45%		0,46%		
	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan PNS	Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 (Dengan Satuan: Persentase)	80,37%	78,71%	80,42%		78,41%		78,51%		78,61%		78,71%		78,81%		
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Meningkatnya Data ASN yang Berkualitas, Akurat, Terkini, dan Terpadu	Persentase pemutakhiran data ASN (Dengan Satuan: Persentase)	99,56 %	98,71%	98,27 %		98,38 %		98,49 %		98,60 %		98,71 %		98,82 %		
	Meningkatnya Kompetensi ASN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	98,93 %	97,68%	97,24 %		97,35 %		97,46 %		97,57 %		97,68 %		97,79 %		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					6.397.735.000		5.136.251.000		7.323.780.188		7.506.874.693		7.694.546.560		7.886.910.224	
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	93,89%	95,99%	95,30%		95,47%		95,65%		95,82%		95,99%		96,16%		
5.05	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				7.901.673.139		8.132.388.839		9.553.531.680		10.226.808.940		10.867.295.278		11.780.149.987		
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.484.931.139		7.006.388.839		8.265.531.680		8.815.808.940		9.319.295.278		9.582.149.987	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	78.62	22,68		72.17		74.32		76.47		78.62		80.77		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	85.24	85.12		85.15		85.18		85.21		85.24		85.28		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					416.742.000		970.018.000		724.116.000		807.116.000		899.116.000		1.499.116.000	
	Terwujudnya kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	0	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		155.982.000		563.884.000		603.884.000		648.884.000		698.884.000	
	Meningkatnya penerapan inovasi daerah	Persentase Produk inovasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	0	85%	0		50%		65%		75%		85%		90%		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				51.188.637.595		49.169.554.650		48.242.346.400		52.072.886.200		57.208.460.070		60.802.197.613		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.187.681.695		45.322.302.450		44.991.846.400		48.497.336.200		53.275.355.070		56.475.782.113	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	72,28	84,65	75,33		76,89		78,97		81,70		84,65		85,17		
		Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91,37	96,50	92,50		93,50		94,50		95,50		96,50		97,50		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.415.467.200		985.456.200		1.413.500.000		1.554.850.000		1.710.335.000		1.881.368.500	
	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N - 1 (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.585.488.700		2.861.796.000		1.837.000.000		2.020.700.000		2.222.770.000		2.445.047.000	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan pilar IEPK (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
7.01	KECAMATAN BENGKONG				27.925.784.876		30.560.193.473		30.142.197.848		31.629.700.869		33.702.079.041		35.853.078.096		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.558.249.366		14.919.060.773		14.458.340.467		15.176.391.690		15.930.345.473		16.721.998.921	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,08	93	90,58		91,08		91,58		92,08		92,58		93,08		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,12	78.62	70,14		73.62		74.62		76.62		78.62		80,62		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.556.297.900		100.498.500		133.920.565		140.616.593		147.647.423		155.029.794	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	100%	90%	75%		80 %		83 %		85 %		90 %		93 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.808.386.480		9.383.537.400		13.499.215.578		13.949.735.287		14.922.780.980		15.919.478.959	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bengkong	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	NA	48, 18 %	28,18%		33,18%		38,18 %		43, 18 %		48, 18 %		53,18 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		36.350.000		36.775.000		28.113.750		29.519.438		30.995.409	
	Meningkatnya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bengkong	Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40%		60%		80%		100%		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.377.763.000		6.120.746.800		2.013.946.238		2.334.843.549		2.671.785.727		3.025.575.013	
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan BENGKONG	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong (Dengan Satuan:Persentase)	94.38%	96.28%	94,38%		94.85%		95.33%		95.80%		96.28%		96.76%		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.625.088.130		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Bengkong	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	-	8												
7.01	KECAMATAN NONGSA				28.881.495.924		34.918.553.150		34.927.546.650		37.810.450.460		42.689.488.089		45.167.156.228		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.832.360.111		15.939.573.969		16.030.539.774		16.924.265.828		17.918.713.987		18.995.940.358	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89.84	94.84	90.84		91.84		92.84		93.84		94.84		95.84		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.10	78.60	70,07		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.877.996.000		145.264.300		198.771.930		208.710.527		219.146.053		230.103.355	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	100%	93%	80%		83%		85%		90%		93%		95%		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.238.938.813		13.454.148.381		16.677.531.351		17.246.028.911		18.314.630.954		19.383.342.705	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nongsa	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	37,01 %		39,02 %		41,05 %		43,15 %		45,03 %		47,20 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.543.996.000		5.342.041.300		1.965.703.595		3.371.445.194		6.171.997.095		6.487.769.810	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa (Dengan Satuan:Persentase)	92.60%	92.23%	91.15%		91.42%		91.69%		91.96%		92.23%		92.49%		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.388.205.000		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Nongsa	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	-	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN BATU AJI				30.945.389.335		34.003.366.406		41.736.956.350		43.495.610.547		45.849.547.454		48.296.181.206		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.947.690.369		14.459.418.303		14.093.315.270		14.952.576.475		15.749.298.452		16.740.422.345	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89,84	94.84	90,84		91.84		92,84		93,84		94.84		95.84		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.01	78.51	70,07		73,51		74.51		76.51		78.51		80.51		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.041.758.900		98.566.900		196.296.708		206.111.543		216.417.120		227.237.976	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	100%	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.643.232.106		11.180.298.303		18.676.431.272		19.136.481.273		20.299.758.772		21.281.950.142	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batu Aji	Persentase tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada Pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	50 %		30 %		35 %		40 %		45 %		50 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		35.065.200		40.350.000		33.350.000		33.350.000		33.350.000	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.183.488.000		8.230.017.700		8.730.563.100		9.167.091.256		9.550.723.110		10.013.220.743	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji (Dengan Satuan:Persentase)	95.39%	95.13%	94.51%		94.66%		94.82%		94.98%		95.13%		95.45%		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.129.219.960		0		0		0		0		0	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batu Aji	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN GALANG				37.829.311.463		45.169.678.007		55.043.323.362		57.693.615.790		60.979.047.837		64.403.751.488		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.259.906.980		22.819.311.912		24.084.777.507		25.283.016.382		26.541.167.197		27.862.225.556	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	88.77	92.60	88.97		89.00		90.01		91.06		92.60		93.00		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.06	78.56	63,72		73.56		74.56		76.56		78.56		80.56		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.676.469.200		69.166.500		72.624.825		76.256.066		80.068.869		84.072.313	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	88.77 %	89.09 %	88.97 %		89.00 %		89.03 %		89.06 %		89.09 %		89.13 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					13.769.758.227		19.218.546.839		27.667.635.637		28.957.768.680		30.812.408.375		32.734.780.054	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Galang	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna) p a d a pembangunan Tingkat Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	46.50	39.50		41.50		42.50		44.50		46.50		48.50		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		50.000.000		55.000.000		55.125.000		57.881.250		60.775.312	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Galang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.123.177.056		3.012.652.756		3.163.285.393		3.321.449.662		3.487.522.146		3.661.898.253	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang (Dengan Satuan:Persentase)	82.32%	84.66%	82.54%		83.07%		83.60%		84.13%		84.66%		85.19%		
7.01	KECAMATAN SEKUPANG				43.008.162.573		55.056.039.736		52.737.668.472		54.934.468.330		58.781.608.181		62.241.105.025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.434.886.315		23.113.335.357		21.911.361.772		23.148.161.630		24.540.301.481		25.699.798.325	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.19	95.19	91.19		92.19		93.19		94.19		95.19		96.19		
		Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.11	78.61	70,35		73.61		74.61		76.61		78.61		80.61		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.453.447.000		186.775.800		387.635.000		437.635.000		437.635.000		537.635.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sekupang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	80 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.067.825.858		21.930.867.379		28.218.671.700		29.058.671.700		31.333.671.700		33.513.671.700	
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sekupang	Persentase Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM,PKK,POYANDU DAN KARANG TARUNA) pada pembangunan tingkat kecamatan Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	65%	47,51 %		50 %		55 %		60 %		65 %		70 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		45.357.200		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	
	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sekupang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN					1.423.003.000		9.779.704.000		2.170.000.000		2.240.000.000		2.410.000.000		2.430.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang (Dengan Satuan:Persentase)	96.32%	94.85 %	94.24%		94.39 %		94.55 %		94.7 %		94.85 %		95.00 %		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.629.000.400		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sekupang	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	-	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN SUNGAI BEDUK				27.755.316.085		33.053.286.731		34.552.877.088		36.111.013.446		38.249.698.596		41.008.293.505		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.241.282.031		15.382.792.599		15.970.804.613		16.851.579.218		17.771.392.553		18.732.196.556	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,05	95,05	91,05		92,05		93,05		94,05		95,05		96,05		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.05	78,55	70,05		73,55		74,55		76,55		78,55		80.55		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.997.688.600		342.851.400		426.101.730		447.406.817		469.777.157		493.266.015	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.000.883.554		11.215.178.532		15.898.254.511		16.450.075.365		17.530.146.738		19.182.197.179	
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	NA	45%	37,30 %		39,30 %		41,30 %		43,30 %		45,30 %		47,30 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		40.000.000		33.350.000		33.350.000		33.350.000	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.225.069.000		6.074.939.000		2.217.716.234		2.328.602.046		2.445.032.148		2.567.283.755	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk (Dengan Satuan:persentase)	93.44 %	93.25 %	92.58 %		92.79 %		92.81 %		93.03 %		93.25 %		93.46 %		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.290.392.900		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sungai Beduk	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN BATAM KOTA				35.468.734.214		38.917.188.703		42.201.156.305		44.063.270.192		46.707.739.773		49.191.982.833		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.606.875.663		19.819.792.846		20.649.166.115		21.406.280.002		22.525.749.583		23.604.992.643	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	88.89	93.89	89.89		90.89		91.89		92.89		93.89		94.89		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.13	78.63	70,51		73.63		74.63		76.63		78.63		80.63		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.274.119.800		235.361.000		425.000.000		475.000.000		575.000.000		575.000.000	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	88%	80 %		82 %		84 %		86 %		88 %		90 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.434.043.711		10.263.461.657		18.714.054.190		19.704.054.190		20.724.054.190		21.524.054.190	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batam Kota	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat kecamatan batam kota (Dengan Satuan:Persentase)	NA	54.95 %	46.24 %		48.44 %		50.84 %		52.82 %		54.95 %		56.25 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		53.365.200		55.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)		80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.137.605.000		8.545.208.000		2.357.936.000		2.407.936.000		2.807.936.000		3.407.936.000	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota (Dengan Satuan:Persentase)	96.26 %	95.69 %	95.07%		95.22 %		95.38 %		95.53 %		95.69 %		95.84 %		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.016.090.040		0		0		0		0		0	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batam Kota	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN BULANG				31.892.061.332		38.622.742.236		48.466.723.272		52.155.823.560		58.923.270.313		65.126.660.785		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.972.114.586		18.862.047.062		20.389.488.060		22.424.488.310		24.662.986.141		27.122.040.679	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95.00	100.00	96.00		97.00	98.00		99.00		100.00	100.00	100.00		100.00	
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.02	78.52	70.02		73.52			74.52		76.52		78.52		80.52	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.182.345.608		230.000.000		173.177.070		190.494.777		209.500.000		230.450.000	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					12.710.253.138		16.663.154.823		25.108.343.912		26.487.485.820		30.604.760.372		33.983.543.926	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bulang	Persentase tingkat partisipasi Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		19.800.000		55.000.000		65.200.000		159.720.000		175.692.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.027.348.000		2.847.740.351		2.740.714.230		2.988.154.653		3.286.303.800		3.614.934.180	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang (Dengan Satuan:Persentase)	80.42 %	77.48 %	74.83 %		75.50 %		76.16 %		76.82 %		77.48 %		78.15 %		
7.01	KECAMATAN BELAKANG PADANG				30.800.260.319		38.971.254.130		41.014.490.582		43.064.249.620		45.115.246.609		46.667.903.408		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.804.939.340		19.151.812.682		18.505.859.115		19.024.939.788		19.822.936.777		21.030.593.576	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	100	96		97		98		99		100		100		
		Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.07	78.57	70,02		73.57		74.57		76.57		78.57		80.57		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.507.995.000		37.592.600		85.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.411.502.249		17.066.160.248		20.752.171.467		22.257.849.832		23.295.849.832		23.585.849.832	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belakang Padang	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW,LPM,PKK,Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	NA	26%	22.92 %		23 %		24 %		25 %		26 %		27 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		37.525.200		50.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	
	Meningkatnya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)		80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN					1.026.276.680		2.678.163.400		1.621.460.000		1.661.460.000		1.861.460.000		1.911.460.000	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Meningkatnya Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	Persentase Peran Kecamatan Dalam Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan:Persentase)	82.79 %	84.38 %	82.59 %		83.04 %		83.48 %		83.93 %		84.38 %		84.82 %		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.049.547.050		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Belakang Padang	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN SAGULUNG				40.659.830.625		47.688.882.839		50.029.457.889		52.773.070.822		55.583.614.402		59.083.614.402		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.728.514.384		17.589.208.547		23.689.778.486		25.588.079.017		27.558.622.597		30.558.622.597	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89.80	94.80	90.80		91.80		92.80		93.80		94.80		95.80		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.07	78.57	70,26		73.57		74.57		76.57		78.57		80.57		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.982.127.000		188.758.900		158.723.000		258.723.000		258.723.000		258.723.000	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	80%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					9.583.923.211		18.995.710.892		24.595.982.150		24.595.982.150		25.095.982.150		25.595.982.150	
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sagulung	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat kecamatan sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	NA	40.62%	32.62%		34.62%		36.62%		28.62%		40.62%		42.62%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		53.277.200		55.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sagulung	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20%		40%		60%		80%		100%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.105.868.150		10.861.927.300		1.529.974.253		2.270.286.655		2.570.286.655		2.570.286.655	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung (Dengan Satuan:Persentase)	97.10%	96.50%	96.00%		96.13%		96.25%		96.38%		96.50%		96.63%		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.259.397.880		0		0		0		0		0	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Sagulung	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN BATU AMPAR				21.275.342.335		23.065.717.393		28.597.789.395		31.703.393.113		34.680.928.999		36.752.793.525		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.833.363.875		15.612.613.341		16.210.714.451		17.015.925.422		17.851.346.044		18.748.989.540	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	89,92	94,92	90,92		91,92		92,92		93,92		94,92		95,92		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.10	78.60	70,08		73.60		74.60		76.60		78.60		80.60		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.890.378.000		101.825.700		3.165.989.715		3.324.289.201		3.490.503.661		3.665.028.844	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.528.106.420		3.240.720.252		7.100.820.361		7.311.503.259		8.034.820.301		8.769.303.198	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batu Ampar	Persentase tingkat partisipasi Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	NA	63%	59.26%		60,26 %		61,26 %		62,26 %		63,26 %		64,26 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		19.800.000		55.000.000		73.347.120		77.014.476		80.865.200	
	Meningkatnya koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	0	80%	0		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.228.588.000		4.090.758.100		2.065.264.868		3.978.328.111		5.227.244.517		5.488.606.743	
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar (Dengan Satuan:Persentase)	91.37 %	88.85 %	87.46 %		87.80 %		88.15 %		88.50 %		88.85 %		89.20 %		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.794.906.040		0		0		0		0		0	



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Batu Ampar	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0		
7.01	KECAMATAN LUBUK BAJA				23.694.735.707		26.534.727.552		25.966.705.242		27.211.740.500		28.519.540.500		30.423.540.304		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.565.601.959		19.820.045.690		17.223.464.742		17.708.500.000		18.236.300.000		18.850.299.804	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.15	95.15	91.15		92.15		93.15		94.15		95.15		96.15		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.02	78.52	70.33		73.52		74.52		76.52		78.52		80.52		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.398.716.000		98.531.900		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	100%	88%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.749.228.508		1.988.428.362		6.576.240.500		7.161.240.500		7.766.240.500		8.871.240.500	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Baja	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) p a d a pembangunan tingkat Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	NA	56%	48%		50%		52%		54%		56%		58%		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		35.850.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)		80%			20 %		40 %		60 %		80 %		100%			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.195.809.000		4.591.871.600		1.762.000.000		1.882.000.000		2.002.000.000		2.132.000.000		
	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja (Dengan Satuan:Persentase)	92.55%	88.99%	87.77%		88.07%		88.38%		88.69%		88.99%		89.30%			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.785.380.240		0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Lubuk Baja	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	10	0	8		0		0		0		0		0			
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			85.438.228.07593.891.833.17692.158.970.06494.770.594.59196.783.551.229103.380.046.394														
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.509.277.180		11.622.388.226		12.618.037.204		13.471.391.406		14.095.910.995		14.469.760.602		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks layanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	95	95	95		95		95		95		95		95		
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71,46	78,50	70,64		74,20		75,30		76,30		78,50		80,60		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				4.630.681.500		7.211.879.600		5.550.915.403		5.926.927.136		6.202.107.934		7.032.836.528		
	Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				10.021.062.165		6.156.859.365		11.992.201.473		12.805.912.574		13.401.419.714		16.188.481.223		
	Terwujudnya pembinaan partai politik dan pendidikan politik kepada masyarakat secara efektif dan beretika	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		95		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.807.950.000		2.659.188.300		2.287.108.074		2.442.033.776		2.555.414.756		2.953.286.822		
	Meningkatnya kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Persentase)	85	93	85		87		90		91		93		93		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3.554.578.000		8.431.249.700		4.500.707.910		4.774.329.699		5.028.697.830		6.562.260.537		



Kode	Perangkat Daerah/Program/Outcome Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan agama di masyarakat	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	95	98	95		95		96		97		98		100		
		Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					54.914.679.230		57.810.267.985		55.210.000.000		55.350.000.000		55.500.000.000		56.173.420.682	
	Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman stabilitas sosial	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	85	90	85		85		85		88		90		90		
	NON URUSAN				4.413.924.938.657		4.849.981.438.071		5.167.659.069.000		5.504.626.722.000		5.897.362.712.000		6.301.017.815.000		
				TOTAL:	4.413.924.938.657,00		4.849.981.438.071,00		5.167.659.069.000,00		5.504.626.722.000,00		5.897.362.712.000,00		6.301.017.815.000,00		



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Batam dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang disajikan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang ditetapkan dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kota Batam tahun 2025-2030.

Tabel IV.3.
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kota Batam Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	6,80-7,35	7,37-8,01	7,40-8,68	7,43-9,34	7,47-10,00	8,00-10,5
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63	5	5	5	5	5	5
3	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72,55	63,84	69,24	74,31	78,31	81,26	85,60
4	Rasio Konektivitas	Nilai	0,748	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,32	83,47	83,72	84,12	84,52	84,92	85,32
6	Tingkat Kemiskinan	%	4,85	4,56-4,79	4,41-4,55	4,19-4,40	4,03-4,18	3,90-4,02	3,59-3,72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,68	7,19	7,14	7,09	7,04	6,98	6,93
8	Rasio Gini	Nilai	0,348	0,334	0,332	0,330	0,328	0,326	0,324
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50
10	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0,51*	0,52	2,55	4,57	6,60	8,62	10,65
11	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Nilai	0,05	0,18	0,36	0,52	0,68	0,84	1,00

*Tahun 2023

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah ditetapkan untuk melihat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum.

IKD tidak hanya berperan sebagai alat ukur semata, tetapi juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya indikator yang terukur, pembangunan daerah dapat dijalankan dengan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, IKD menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan publik, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Indikator Kinerja Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. IKD memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil yang nyata, dapat diukur, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Penjelasan mengenai target-target IKD yang akan dipaparkan selanjutnya menjadi dasar penting dalam mengukur arah capaian pembangunan daerah pada periode perencanaan ini. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batam sebagaimana tertuang pada tabel berikut.



Tabel IV.4.
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi Dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88,83	88,90	89,00	89,10	89,20	89,30	89,40
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan^	%	7,87	7,87	7,80	7,75	7,70	7,68	7,65
3	Konsumsi Listrik Per Kapita^	kWh/ kapita	2772	3251	3480	3709	3937	4166	4395
4	Kapasitas Air Baku ^	l/detik	5,05*	5,3	5,43	5,56	5,68	5,81	5,93
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan^	%	90,80*	94,98	95,18	95,38	95,58	95,78	95,98
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Nilai	64,86	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman^	%	8,47*	25,99	27,69	29,39	31,09	32,79	34,49
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	Ton/Hari	NA	880,84	900,89	921,61	942,99	964,87	964,87
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah^	% RT	54,70*	84,76	85,52	86,29	87,05	87,81	88,57
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	0,51*	0,52	2,55	4,57	6,6	8,62	10,65
	a. Kumulatif	%	NA	1,96	2,58	3,21	3,83	4,45	5,07
	b. Tahunan	%	NA	5,6	7,11	8,62	10,12	11,63	13,14
11	Indeks Risiko Bencana^	Nilai	108,89	101,89	100,96	100,04	99,11	98,18	97,25
12	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1276,93	1296,96	1316,74	1336,25	1355,44	1374,37	1393,03



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,62	1,57	1,53	1,48	1,44	1,4	1,36
14	Rasio Penduduk	%	102,26	101,94	101,62	101,3	100,98	100,65	100,33
15	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1233	1253	1272	1291	1310	1328	1346
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	6,80-7,35	7,37-8,01	7,40-8,68	7,43-9,34	7,47- 10,00	8,00-10,5
2	Tingkat Kemiskinan^	%	4,85	4,56-4,79	4,41-4,55	4,19-4,40	4,03-4,18	3,90-4,02	3,59-3,72
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	182,51	194,01-214,01	205,27-225,27	216,24-236,27	226,95-246,95	237,4-257,4	284,28-293,82
4	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	7,68	7,19	7,14	7,09	7,04	6,98	6,93
5	Rasio Gini	Rasio	0,348	0,334	0,332	0,33	0,328	0,326	0,324
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,32	83,47	83,72	84,12	84,52	84,92	85,32
7	Indeks Kesehatan	Nilai	83,65	85,00	85,42	85,83	86,25	86,68	87,09
8	Usia Harapan Hidup^	Tahun	75,19	75,25	75,52	75,79	76,06	76,34	76,61
9	Jumlah Kematian Ibu^	Orang	24	22	21	20	19	18	17
10	Prevalensi Stunting^	%	14	13,80	13,60	13,40	13,20	13,00	12,80
11	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	0,00	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	70,00
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB success rate) (%)^	%	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	85,00
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	97,94*	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
14	Indeks Pendidikan	%	75,03	75,16	75,52	76,21	76,83	77,46	78,15
15	Rata-Rata Lama Sekolah^	Tahun	11,21	11,23	11,33	11,47	11,60	11,73	11,87
16	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13,56	13,58	13,59	13,67	13,74	13,81	13,89



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun^	%	69,17	48,20	49,83	51,83	54,83	57,03	60,03
18	Skor Kemampuan Literasi/Numerasi								
	Literasi Membaca^								
	Skor Kemampuan Literasi SD^	Nilai	69,29	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
	Skor Kemampuan Literasi SMP^	Nilai	78,81	81,00	81,94	82,88	83,82	84,76	85,70
	Numerasi^								
	Skor Kemampuan Numerasi SD^	Nilai	50,99	54,00	57,60	58,95	60,30	61,65	63,00
	Skor Kemampuan Numerasi SMP^	Nilai	67,98	68,75	69,80	70,85	71,90	72,95	74,00
19	Indeks Harmoni	Nilai	NA	84,32	84,69	85,05	85,42	85,79	86,15
20	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	%	5,65	19,05	38,10	53,57	69,05	84,52	100,00
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)^	%	71,96	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00
22	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Nilai	0,65	0,64	0,63	0,6	0,57	0,54	0,51
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)^	%	15,19*	24,22	25,77	27,33	28,88	30,43	31,98
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama^	Nilai	83,58*	84,32	84,69	85,05	85,42	85,79	86,15
25	Persentase potensi konflik terselesaikan (%)^	%	88,00*	89	89,55	90,1	90,65	91,2	91,75
26	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Nilai	0,05	0,18	0,36	0,52	0,68	0,84	1,00
27	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran^^	%	56,00	76,00	42,22	48,97	54,71	59,65	63,93



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan^	%	4,17	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00
29	Indeks Pembangunan Keluarga^	%	67,26	67,28	67,30	67,32	67,34	67,36	67,38
30	Indeks Ketimpangan Gender^	Nilai	0,1930	0,1928	0,1926	0,1924	0,1922	0,1920	0,1918
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan	%	41,82	41,6	41,42	41,29	41,22	41,22	41,34
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	56,38*	57,5	57,6	57,7	57,8	57,9	58
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	1,88	2,56	2,72	2,88	3,04	3,21	3,37
4	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	%	9,05	9,93	9,97	10,01	10,06	10,1	10,14
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	1.320.920	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.700.000
6	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	1.791.240	2.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
7	Rata- Rata Lama Tinggal	Hari	1,73	1,75	1,90	2,00	2,01	2,05	2,10
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota^	%	63,00	95,5	95,6	95,7	95,8	95,9	96
9	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)^	%	39,18*	39,28	39,38	39,47	39,57	39,66	39,76
10	Rasio Kewirausahaan^	%	4,10*	4,17	4,24	4,31	4,37	4,44	4,51
11	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0,21*	0,23	0,33	0,43	0,53	0,63	0,73
12	Return of Asset (ROA) BUMD (%)^	%	-21,12*	-12,82	-11,95	-11,09	-10,22	-9,35	-8,48



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,83	70,489	70,646	70,803	70,96	71,117	71,274
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan [^]	%	52,60*	53,73	54,32	54,91	55,49	56,08	56,67
15	Indeks Kapabilitas Inovasi [^]	Nilai	3,64*	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18
16	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet [^]	%	91,90*	92,5	92,88	93,25	93,63	94,00	94,38
17	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	58,18	59,00	65,01	67,35	70,72	74,25	77,97
18	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto [^]	%	45,59	45,10	44,54	43,98	43,43	42,87	42,31
19	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63	5	5	5	5	5	5
20	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	2,19	4,38	6,57	8,21	9,24	10,39	11,69
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72,55	63,84	69,24	74,31	78,31	81,26	85,60
22	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	%	71,24	56,63	62,25	67,88	73,50	77,36	82,95
23	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	73,31	55,35	68,06	77,54	83,85	90,16	100,00
24	Rasio Konektivitas	Rasio	0,748	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB [^]	Rasio	0,604	0,783	0,779	0,775	0,772	0,768	0,765
26	Tingkat Inflasi [^]	%	2,24	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5	1,5 – 3, 5
27	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85
IV	Aspek Pelayanan Umum								



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50
2	Indeks Reformasi Hukum^	Nilai	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik^/ Indeks Pemerintah Digital*	Nilai	3,47	3,77	*1,00	*1,10	*1,20	*1,30	*1,40
4	Indeks Pelayanan Publik^	Nilai	4,20	3,16	3,25	3,34	3,44	3,53	3,62
5	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)^	Indeks	68,70	72,70	74,50	75,50	76,80	77,90	78,10
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu^	%	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	77,00	77,00
7	Indeks Daya Saing Daerah^	Nilai	3,97	4,00	4,11	4,25	4,30	4,35	4,40
8	Nilai SAKIP	Nilai	68,85	70,3	72,8	74,3	76,6	78,3	80,3
9	Angka kriminalitas	Per 100.000 Penduduk	77,22	72,17	67,29	62,56	57,99	53,55	49,24
10	Opini Penilaian BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	5,15	5,19	5,21	5,23	5,25	5,27	5,28
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun	%	69,17	48,20	49,83	51,83	54,43	57,03	60,03
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun	%	99,21	99,40	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	%	99,32	99,51	99,64	99,69	99,74	99,79	99,84



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun	%	43,83	43,05	43,21	43,26	43,31	43,36	43,41
5	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	69,29	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	50,99*	54,00	57,60	58,95	60,30	61,65	63,00
7	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	78,81	81,00	81,94	82,88	83,82	84,76	85,70
8	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	67,98	68,75	69,80	70,85	71,90	72,95	74,00
9	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	55,82	58,25	63,38	64,88	66,38	67,88	69,38
10	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (DIV)	%	71,56	62,40	65,10	66,60	68,10	69,60	71,10
11	Indeks iklim keamanan jenjang SD	Nilai	73,18	74,16	76,59	78,09	79,59	81,09	82,59
12	Indeks iklim keamanan jenjang SMP	Nilai	71,68	72,20	74,12	75,62	77,12	78,62	80,12
13	Indeks iklim kebinekaan jenjang SD	Nilai	74,40	71,80	74,01	75,51	77,01	78,51	80,01
14	Indeks iklim kebinekaan jenjang SMP	Nilai	75,70	71,50	74,09	75,59	77,09	78,59	80,09
15	Indeks iklim inklusivitas jenjang SD	Nilai	56,59	57,75	61,17	62,67	64,17	65,67	67,17
16	Indeks iklim inklusivitas jenjang SMP	Nilai	60,14	60,80	62,97	64,47	65,97	67,47	68,97
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	24	22	21	20	19	18	17
2	Prevalensi Stunting	%	14	13,80	13,60	13,40	13,20	13,00	12,80
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	100,00	5,00	20,00	35,00	50,00	60,00	75,00
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	50,77	52,92	54,57	56,23	57,88	59,53	61,18
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	56,32	57,64	58,96	60,28	61,61	62,93	64,25
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	96,82	97,30	97,60	98,00	98,30	98,60	98,60
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	88,98	89,50	89,75	90,00	90,25	90,50	90,75



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	99,33	100,00
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	9,09	27,27	45,45	45,45	63,64	81,82	100,00
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	15	12	14	13	12	11	10
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	40	45	50	55	60	65
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	82,93	73,90	76,12	84,34	89,56	94,78	100,00



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0,00	2,30	2,27	2,91	3,66	4,42	5,36
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0,19	100	100	100	100	100	100
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	11	12	14	16	18	20	22
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	90	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	75	100	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	%	63,19	19,57	23,41	28,93	34,45	39,97	45,48
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	35	75	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	0	10	25	40	55	70	85
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	99,47	100	100	100	100	100	100
f. Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	70	80	90	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	70	80	90	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	70	80	90	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	70	80	90	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	70	75	80	85	90	95	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	60	60,6	61,21	61,82	62,44	63,06
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	90,00	100	100	100	100	100	100
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	25	26	27	28	29	30
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,57	73,81	77,05	80,29	83,52	86,76	90
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	31,19	34,33	37,46	40,6	43,73	46,87	50
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	98,87	99,06	99,25	99,44	99,62	99,81	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	81,47	82,89	84,31	85,74	87,16	88,58	90
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95,72	95,74	95,76	95,78	95,80	95,82	95,84
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,1930	0,1928	0,1926	0,1924	0,1922	0,1920	0,1918
3	Persentase ARG Daerah	%	11,93	11,93	12,20	12,50	12,70	12,90	13,00
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,80	7,80	7,75	7,70	7,65	7,60	7,58
c. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	91,00	91,00	91,20	91,30	91,40	91,50	91,60
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,13	3,12	3,13	1,56	1,56	1,56	1,56
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
d. Pertanian									



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	36,11	52,78	66,67	77,78	88,89	97,22	100,00
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	57,63	75,38	81,07	85,80	90,53	95,27	100,00
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	0	0	0	0	0	0
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	0	0	0	0	0	0
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	64,86	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	52,64	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	65,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4,32	4,39	5,26	6,13	7,01	7,88	8,75
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97,23	97,40	97,50	97,60	97,70	97,90	98,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	58,05	63,00	68,00	73,00	78,00	83,00	88,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	0	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	5,46	9,00	12,00	14,00	17,00	20,00	22,00
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	NA	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	NA	50	53,13	56,25	59,38	62,5	65,63
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	%	NA	50	53,1	56,3	59,4	62,5	65,6
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	100	100	100	100	100	100
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>modern Contraceptive</i> (mCPR)	%	81,58	81,58	81,65	81,70	81,75	81,80	82,00
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	%	11,10	11,10	10,90	10,80	10,70	10,60	10,50
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19)	%	19,60	18,73	17,84	16,96	16,07	14,30	8,87



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	67,26	67,28	67,30	67,32	67,34	67,36	67,38
i. Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,748	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	8,00	15,00	33,00	53,00	69,00	84,00	100,00
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	63	66	67	71	77	84	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	6	66	67	71	77	84	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	32,35	6	7	8	9	10	11
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	25,00	30,00	32,31	33,72	34,78	35,48	35,71
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	45,60	60,00	60,61	61,19	61,48	61,82	70,18
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	30,89	31,41	32,50	32,54	32,66	32,83	33,98
l. Penanaman Modal									



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	63	5	5	5	5	5	5
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	636,55	100	100	100	100	100	100
m. Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07	0,08	0,13	0,14	0,17	0,19	0,19
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	6,43	6,43	6,67	6,67	7,32	7,32	7,91
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	6	NA	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6
o. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	2,46	32,90	42,70	52,61	62,75	72,98	83,33
p. Kebudayaan									
1	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	%	5,65	19,05	38,10	53,57	69,05	84,52	100,00
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	30,09	46,34	37,78	49,49	60,69	71,49	81,97
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	20,83	17,39	22,73	27,27	31,82	36,36	40,91
q. Perpustakaan									



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,24	80,24	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	48,52	48,52	49,50	50,00	51,00	51,00	51,00
r. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	67,07	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25532,39	25787,71	26045,59	26306,05	26569,11	26834,80	27103,15
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10055,49	9614,28	9710,43	9807,53	9905,61	10004,66	10104,71
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	12,5	15	17,5	20	22,5	25
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	10,64	13,56	13,56	14,29	12,50	11,11	8,00
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	6,70	30,52	48,75	64,01	76,55	86,50	94,04
c. Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	4,28	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%							
3	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%							
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0	9,52	13,04	15,38	16,67	17,14	19,51



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	50	55	60	65	70	75
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	90,00	90,00	90,00	100	100	100	100
d. Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	75	76	77	78	79	80
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
e. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:								
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	5	5	5	5	5	5
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	NA	11,5	11,52	11,54	11,56	11,58	11,6
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	10,33	10,85	10,33	10,85	10,33	10,85



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	41,33	43,39	41,33	43,39	41,33	43,39
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	80	81	82	83	84	85
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	60	60,5	61	61,5	62	62,5
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	NA	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	NA	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	NA	80	85	90	95	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	37,23	37,83	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48,52	55,25	54,03	53,64	53,20	52,83	52,58
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95,34	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	27,00	34,64	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	NA	70	70,5	71	71,5	72	72,5
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	NA	70	72	74	76	78	80
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,216	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	NA	100	100	100	100	100	100
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	20	21	22	23	24	25	26
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20	20,50	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	63,2	65,04	66,88	68,72	70,56	72,4

*Tahun 2023; ^IUP RPJPD



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

BAB 5 PENUTUP

MENJELASKAN PEDOMAN TRANSISI UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA EMMBERIKAN PANDUAN PELAKSANAAN RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 AGAR TETAP KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam periode 2025-2045. RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam lima tahun ke depan agar selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kota Batam serta kerjasama dengan *stakeholders* lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kota Batam Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar

lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Batam maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 memuat proyeksi keuangan dan target kinerja serta pagu indikatif hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Batam serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;

2. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, Bappeda Kota Batam berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategi PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
4. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Batam yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappeda Kota Batam. Selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan PD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bappeda Kota Batam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; dan
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 maksimal dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Wali Kota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program yang dilakukan oleh Bappeda Kota Batam serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.



Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM

AMBAR ACHMAD

METADATA



METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perkembangan kondisi perekonomian di suatu negara untuk menjadi lebih baik selama jangka waktu tertentu. Perkembangan tersebut diharapkan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa.
Formula Perhitungan	$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ PDB = PDB tahun t PDB t-1= Produk domestik Bruto tahun sebelumnya t = periode
Intepretasi	Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota**

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
Satuan	%
Definisi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap dan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}$
Interpretasi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik - Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perikanan terhadap PDRB



Formulasi Perhitungan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto = Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi makan dan Minum /Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 %
Intepretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

4. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Nama Indikator	Pertumbuhan Realisasi Investasi
Satuan	%
Definisi Operasional	merujuk pada investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pihak domestik (PMD) maupun luar negeri (PMA) untuk kegiatan usaha di wilayah Indonesia. PMDN dan PMA bisa berasal dari individu, badan usaha, atau pemerintah Indonesia maupun luar negeri
Formulasi Perhitungan	$\frac{Investasi_n - Investasi_{n-1}}{Investasi_{n-1}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin besar nilai Investasi maka semakin besar dana/modal yang sudah ditanamkan oleh investor (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun Penanaman Modal Asing/PMA)
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

5. Tingkat Inflasi Daerah

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Satuan	%
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the $\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).



Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me- <i>release</i> data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan

6. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur = (IK1 x rasio konektivitas) + (IK2 x Bobot Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan) + (IK3 x Bobot Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman) Nilai Koefisien: IK 1 = 0,3 IK 2 = 0,6 IK 3 = 0,1
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Infrastruktur, maka semakin berhasil pelayanan infrastuktur bagi masyarakat.
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio Konektivitas

Nama Indikator	Rasio Konektivitas
Satuan	Angka
Definisi	Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan dalam suatu sistem, jaringan, atau infrastruktur perhubungan.
Rumus Perhitungan	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Rasio Konektivitas Kabupaten = (1 x 70) + (0.5 x 30) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) IK1 (Angkutan Jalan) = 70 IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) IK2 (ASDP) = 30 Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek



	perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin berhasil pelayanan angkutan. Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Sumber Data	Kementerian Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, infrastruktur Perkotaan. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah didukung oleh infrastuktur Perkotaan.
Formula si Perhitun gan	Rata-rata pencapaian keseluruhan sasaran indikator pekerjaan umum (K1 0,7 x Persentase pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum) + (0,3 x Indeks kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan tata ruang)
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan, maka semakin berhasil pelayanan infrastuktur Perkotaan bagi masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah didukung oleh infrastuktur perumahan dan permukiman.
Formulasi Perhitungan	Rata-rata pencapaian keseluruhan sasaran indikator perumahan dan permukiman
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Pemenuhan Infrastruktur perumahan dan permukiman, maka semakin berhasil pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman bagi masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

10. Tingkat Kemiskinan*

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	%
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)
Intepretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

11. Rasio Gini*

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	angka
Definisi Operasional	Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk
Formulasi Perhitungan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.
Intepretasi	suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan



12. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Satuan	%
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

13. Indeks Harmoni

Nama Indikator	Indeks Harmoni												
Satuan	Angka												
Definisi Operasional	Indeks Harmoni secara umum merujuk pada ukuran yang menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau wilayah.												
Formulasi Perhitungan	Mengukur indeks dengan aspek sebagai berikut: <table><tr><th>Aspek</th><th>Contoh Indikator</th></tr><tr><td>Kerukunan antar komunitas</td><td>Jumlah konflik sosial</td></tr><tr><td>Keamanan sosial</td><td>Persepsi rasa aman di lingkungan</td></tr><tr><td>Toleransi budaya dan etnis</td><td>Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya</td></tr><tr><td>Keharmonisan keluarga</td><td>Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga</td></tr><tr><td>Partisipasi sosial</td><td>Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif</td></tr></table>	Aspek	Contoh Indikator	Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial	Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan	Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya	Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga	Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif
Aspek	Contoh Indikator												
Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial												
Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan												
Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya												
Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga												
Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif												
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan kerukunan masyarakatnya												
Sumber Data	BPS												
Frekuensi	Tahunan												

14. Indeks Pembangunan Manusia*

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
Intepretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

15. Indeks Pendidikan

Nama Indikator	Indeks Pendidikan
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen utama dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah.
Formulasi Perhitungan	$\text{Indeks RLS} = \frac{RLS}{15}$ $\text{Indeks HLS} = \frac{HLS}{18}$ $\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{\text{Indeks RLS} \times \text{Indeks HLS}}$ • 15 tahun = batas maksimum RLS (SD-SMA + sedikit perguruan tinggi) • 18 tahun = batas maksimum HLS (SD-S3 ideal)
Intepretasi	Semakin tinggi nilai indeks pendidikan suatu daerah, menunjukkan pencapaian pendidikan masyarakatnya
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Kesehatan

Nama Indikator	Indeks Kesehatan
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Kesehatan adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah berdasarkan beberapa indikator utama yang merepresentasikan status kesehatan penduduk
Formulasi Perhitungan	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - 25}{85 - 25}$ • UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir • Batas bawah = 25 tahun • Batas atas = 85 tahun
Intepretasi	Semakin tinggi nilai indeks kesehatan suatu daerah, menunjukkan pencapaian umur kesehatan manusia
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Reformasi Birokrasi



Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi.												
Satuan	Angka												
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah , baik pusat maupun daerah. IRB disusun oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.												
Rumus Perhitungan	Mulai tahun 2023, IRB mengacu pada PermenPANRB No. 3 Tahun 2023, yang menyederhanakan penilaian ke dalam 3 area utama: <table><tr><td>Area Penilaian</td><td>Substansi yang Dinilai</td></tr><tr><td>Kontekstualisasi</td><td>Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi</td></tr><tr><td>Pelaksanaan RB</td><td>Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)</td></tr><tr><td>Hasil RB</td><td>Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik</td></tr></table>	Area Penilaian	Substansi yang Dinilai	Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi	Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)	Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik				
Area Penilaian	Substansi yang Dinilai												
Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi												
Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)												
Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik												
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Kategori dalam pencapaian reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Skor</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>≥ 90</td><td>Sangat Baik (AA)</td></tr><tr><td>80 – 89,99</td><td>Baik (A)</td></tr><tr><td>70 – 79,99</td><td>Cukup (BB)</td></tr><tr><td>60 – 69,99</td><td>Sedang (B)</td></tr><tr><td>< 60</td><td>Kurang (CC)</td></tr></table>	Skor	Kategori	≥ 90	Sangat Baik (AA)	80 – 89,99	Baik (A)	70 – 79,99	Cukup (BB)	60 – 69,99	Sedang (B)	< 60	Kurang (CC)
Skor	Kategori												
≥ 90	Sangat Baik (AA)												
80 – 89,99	Baik (A)												
70 – 79,99	Cukup (BB)												
60 – 69,99	Sedang (B)												
< 60	Kurang (CC)												
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.												
Frekuensi	Tahunan												

18. Indeks Pelayanan Publik**

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.



Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator Nilai per indikator: $(\frac{nilai\ F01 + Nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}) \times bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek: $\sum\ nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan Indeks Nilai indeks: $\sum\ (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>) 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) 4. Transparansi (<i>Transparency</i>) 5. Berdayaguna (<i>Useful</i>) 6. Aksesibilitas (<i>Assessibility</i>) Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

19. Nilai SAKIP

Nama Indikator	Penilaian SAKIP
Satuan	Indeks (angka)
Definisi	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan pemerintahan.



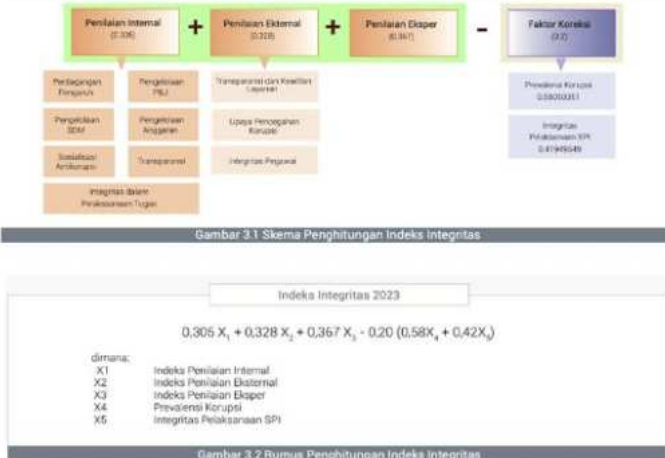
Rumus Perhitungan	Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen utama, antara lain: • Perencanaan Kinerja: Evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja instansi pemerintah daerah. • Pengukuran Kinerja: Penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan sistem pengukuran kinerja yang digunakan. KKP +2 • Pelaporan Kinerja: Evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah daerah, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). • Evaluasi Internal: Penilaian terhadap mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.																								
Interpretasi	Hasil penilaian SAKIP diberikan dalam bentuk skor dan predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Skor</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90–100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td><td>Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.</td></tr><tr><td>80–89,99</td><td>A (Memuaskan)</td><td>Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.</td></tr><tr><td>70–79,99</td><td>BB (Sangat Baik)</td><td>Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.</td></tr><tr><td>60–69,99</td><td>B (Baik)</td><td>Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.</td></tr><tr><td>50–59,99</td><td>CC (Cukup)</td><td>Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.</td></tr><tr><td>30–49,99</td><td>C (Kurang)</td><td>Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.</td></tr><tr><td>0–29,99</td><td>D (Sangat Kurang)</td><td>Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.</td></tr></table>	Skor	Predikat	Interpretasi	90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.	80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.	70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.	60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.	50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.	30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.	0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.
Skor	Predikat	Interpretasi																							
90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.																							
80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.																							
70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.																							
60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.																							
50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.																							
30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.																							
0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.																							
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																								
Frekuensi	Tahunan																								

20. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja tata kelola keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di daerah.

Rumus Perhitungan	 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIMENSI DAN INDIKATOR INDEKS PKD 1. KESesuaian DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (15) 1) Kesesuaian program RPJMD & RKPD 2) Kesesuaian program RKPD & KUA-PPAS 3) Kesesuaian Program KUA-PPAS & APBD 4) Kesesuaian Pagu RKPD & KUA-PPAS 5) Kesesuaian Pagu KUA-PPAS & APBD 2. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBD (20) 1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD 2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD 3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU 4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan 3. TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH (15) 1) Ketepatan waktu pengungkapan 2) Keteraksesan 4. PENYERAPAN ANGGARAN (20) 1) Belanja Transfer daerah 2) Belanja Operasional 3) Belanja Modal 4) Belanja tak terduga 5. KONDISI KEUANGAN DAERAH (15) 1. Kemandirian keuangan 2. Solvabilitas jangka panjang 3. Fleksibilitas keuangan 4. Solvabilitas syariah 5. Solvabilitas Operasional 6. Solvabilitas jangka pendek 6. OPINI BPK ATAS LKPD (15) Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut.
Interpretasi	Nilai IPKD berada pada skala 0–100, dengan klasifikasi: Sangat Baik: 80 – 100 Baik: 60 – 79 Sedang: 40 – 59 Kurang: < 40
Sumber Data	Laporan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

21. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas Nasional
Satuan	Indeks (angka)
Definisi	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).
Metode Survei	Responden dalam survei ini terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan margin of eror sebesar 5%
Rumus Perhitungan	 Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas
Interpretasi	Hasil berbentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokan dalam tiga kategori yaitu: 1. Rentan (indeks< 73) 2. Waspada (indeks antara 73-77) 3. Terjaga (indeks 78-100) Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.



Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

22. Penurunan Intensitas Emisi GRK*

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Satuan	%
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (<i>ton CO2e/2010 IDR</i>) $IEt = TEt / PDRBt$ IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO2e</i>) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun <i>t</i> (<i>2010 IDR miliar</i>) <i>t</i> = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IEt = (IEt - IEBt) / IEBt$ %IEt = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) IEBt = Intensitas emisi GRK <i>baseline</i> tahun <i>t</i> (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) <i>t</i> = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS.
Frekuensi	Tahunan

23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	angka
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)).



Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)		
Interpretasi			
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
	2	Baik	70 ≤ x < 90
	3	Sedang	50 ≤ x < 70
	4	Kurang	25 ≤ x < 50
	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun		

24. Indeks Risiko Bencana **

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Satuan	angka
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;

	(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Pelestarian Kebudayaan**

Nama Indikator	Indeks Pelestarian Kebudayaan**
Satuan	Nilai (indeks)
Definisi	Indeks Pelestarian Kebudayaan merupakan indikator yang memuat komposit dari pengembangan kebudayaan. Dimana kebudayaan terbagi menjadi 2 makna yaitu kebudayaan benda dan kebudayaan tak benda.
Rumus Perhitungan	Indeks Pelestarian Kebudayaan = (IK1 x 0,3) + (IK2 x 0,7) IK1: indikator kebudayaan benda IK2: indikatr kebudayaan tak benda
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks pelestarian kebudayan, maka semakin berhasil pelestarian kebudayaan.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

26. Persentase Warisan Budaya Yang Terjaga Kelestariannya

Nama Indikator	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya
Satuan	%
Definisi	Persentase warisan buda7ya yang terjaga kelestariannya adalah rata-rata dari Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan dan Persentase warisan budaya tak benda yang telah dilestarikan
Rumus Perhitungan	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan(A) Persentase warisan budaya tak benda yang telah dilestarikan Formula : A + B/2
Interpretasi	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya menunjukkan sejauh mana upaya pelestarian terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda, berhasil dipertahankan sesuai dengan standar perlindungan dan pengelolaan yang ditetapkan. Warisan budaya dimaksud mencakup situs, bangunan cagar budaya, manuskrip, tradisi lisan, seni pertunjukan, upacara adat, kerajinan tradisional, hingga



	pengetahuan lokal yang telah diakui oleh pemerintah daerah maupun nasional.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan



METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan dalam beberapa tabel sebagai berikut.

Aspek Geografi Dan Demografi

1.1 Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Formulasi Perhitungan	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

1.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan^

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase
Formulasi Perhitungan	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan $PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minumum Dietary Energy Requirement</i>)



	$f(x)$: Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya
Sumber Data	BPS

1.3 Konsumsi Listrik Per Kapita^

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Satuan	Kwh
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS

1.4 Kapasitas Air Baku ^

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku
Satuan	(m3/detik)



Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

1.5 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023
Formulasi Perhitungan	PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100% PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kinerja fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS PDAM

1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	angka
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan



	(IKTL)).																		
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah(PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2	Baik	70 ≤ x < 90	3	Sedang	50 ≤ x < 70	4	Kurang	25 ≤ x < 50	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Nomor	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																	
2	Baik	70 ≤ x < 90																	
3	Sedang	50 ≤ x < 70																	
4	Kurang	25 ≤ x < 50																	
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

1.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Formulasi Perhitungan	PSA = ((JRTST+JR TIPLT) : JR TS) x 100% PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JR TIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JR TS = Jumlah rumah tangga seluruhnya



Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR

1.8 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Satuan	%
Definisi Operasional	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: 1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dan sebagainya; 2. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank



	Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.

Formulasi Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) ST: Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA: Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) MFPD: Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA: Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS: Timbulan sampah (kg/hari) TP: Total populasi (orang) TPRT: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = $\frac{[(\text{Jumlah Pendaوران Ulang Sampah (data IIc)} + \text{Pengolahan (data IIIf)})}{\text{Timbulan Sampah (data I)}} \times 100$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
Sumber Data	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.9 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah^	
Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Satuan	% RT
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari



	dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTLTP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PRTLTP : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: ▪ Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan <i>Platform</i> Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023

Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kab/Kota.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

1.10 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Satuan	%
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (<i>ton CO2e/2010 IDR</i>) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e</i>) $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (<i>2010 IDR miliar</i>) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IE_{Bt}) / IE_{Bt}$ $\%IE_t$ = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) IE_{Bt} = Intensitas emisi GRK <i>baseline</i> tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010):BPS.
Frekuensi	Tahunan

1.11 Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Satuan	angka



Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

1.12 Jumlah Penduduk

Nama Indikator	Jumlah Penduduk
Satuan	orang
Definisi Operasional	Jumlah penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal di suatu wilayah administratif tertentu, seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau negara, pada waktu tertentu. Data ini merupakan salah satu indikator demografis utama yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan
Formulasi Perhitungan	Perhitungan penduduk yang mendiami suatu wilayah



Interpretasi	Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan infrastruktur lainnya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	tahunan

1.13 Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah indikator demografis yang menunjukkan persentase kenaikan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu , biasanya dihitung per tahun . LPP mencerminkan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi .	
Formulasi Perhitungan	$\text{LPP (\%)} = \left(\frac{P_t - P_0}{P_0} \right) \times \frac{1}{t} \times 100$ Keterangan: P_t = Jumlah penduduk pada akhir periode P_0 = Jumlah penduduk pada awal periode t = Jumlah tahun antara periode	
Interpretasi	LPP (%)	Kategori Pertumbuhan
	< 0,5%	Sangat Rendah
	0,5 – <1,0%	Rendah
	1,0 – <1,5%	Sedang
	1,5 – <2,0%	Tinggi
	≥ 2,0%	Sangat Tinggi
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	tahunan	

1.14 Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)

Nama Indikator	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah dan periode	



	tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan .	
Formulasi Perhitungan	$\text{Sex Ratio} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \right) \times 100$	
Interpretasi	Nilai Sex Ratio	Makna
	= 100	Jumlah laki-laki dan perempuan seimbang
	> 100	Jumlah laki-laki lebih banyak
	< 100	Jumlah perempuan lebih banyak
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	tahunan	

1.15 Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk	
Satuan	Jiwa/km	
Definisi Operasional	Kepadatan penduduk adalah indikator demografis yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk yang mendiami setiap satuan luas wilayah (biasanya per kilometer persegi). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah geografis	
Formulasi Perhitungan	$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$	
Interpretasi	Nilai Kepadatan	Makna
	Tinggi	Wilayah padat penduduk, biasanya kota atau pusat ekonomi
	Sedang	Wilayah dengan distribusi penduduk relatif seimbang
	Rendah	Wilayah dengan sebaran penduduk jarang, biasanya daerah pedesaan, pegunungan, atau perairan
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perkembangan kondisi perekonomian di suatu negara untuk menjadi lebih baik selama jangka waktu tertentu. Perkembangan tersebut diharapkan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa.



Formulasi Perhitungan	$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ PDB = PDB tahun t PDB t-1= Produk domestik Bruto tahun sebelumnya t = periode
Intepretasi	Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.2 Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	%
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhandasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapitaper bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuaiperhitungan BPS)
Intepretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.3 PDRB Per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten
Satuan	Juta Rupiah
Definisi Operasional	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Formulasi Perhitungan	PDRB Per Kapita = PDRB ADHB /populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode
Interpretasi	Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka



Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Satuan	%
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

1.5 Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	angka
Definisi Operasional	Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk
Formulasi Perhitungan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.
Intepretasi	suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
Intepretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.7 Indeks Kesehatan

Nama Indikator	Indeks Kesehatan
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Kesehatan adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah berdasarkan beberapa indikator utama yang merepresentasikan status kesehatan penduduk
Formulasi Perhitungan	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - 25}{85 - 25}$ • UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir • Batas bawah = 25 tahun • Batas atas = 85 tahun
Intepretasi	Semakin tinggi nilai indeks kesehatan suatu daerah, menunjukkan pencapaian umur kesehatan manusia
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.8 Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Formulasi Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
Intepretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Sumber Data	BPS

1.9 Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Jumlah Kasus Kematian Ibu
Satuan	Kasus
Definisi Operasional	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan
Formulasi Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama
Interpretasi	Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3. Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4. Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu; 5. Kesadaran Masyarakat: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Pelaporan MPDN (Dinkes)

1.10 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Satuan	%



Definisi Operasional	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Formulasi Perhitungan	1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%); 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting; 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting
Sumber Data	Survey Kesehatan Indonesia (SKI)

1.11 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Formulasi Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu

Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

1.12 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Formulasi Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

1.13 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Satuan	%
Definisi Operasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah
Formulasi Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan

	penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan
Sumber Data	BPJS Kesehatan

1.14 Indeks Pendidikan

Nama Indikator	Indeks Pendidikan
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen utama dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah.
Formulasi Perhitungan	$\text{Indeks RLS} = \frac{\text{RLS}}{15}$ $\text{Indeks HLS} = \frac{\text{HLS}}{18}$ $\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{\text{Indeks RLS} \times \text{Indeks HLS}}$ • 15 tahun = batas maksimum RLS (SD–SMA + sedikit perguruan tinggi) • 18 tahun = batas maksimum HLS (SD–S3 ideal)
Intepretasi	Semakin tinggi nilai indeks pendidikan suatu daerah, menunjukkan pencapaian pendidikan masyarakatnya
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.15 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Satuan	Tahun
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun.

	Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1.16 Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Satuan	tahun
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan Lama Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1.17 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Nama Indikator	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah; 2. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak- Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)
Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah DIBAGI Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun pada wilayah bersangkutan DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	BPS

1.18 Skor Kemampuan Literasi/Numerasi
Literasi Membaca SD/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: satdik min. SKM = Satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan



Literasi Membaca SMP/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas VIII, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Numerasi SD/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Numerasi
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen



	Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Numerasi SMP/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Numerasi
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas VIII, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus



	2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

1.19 Indeks Harmoni

Nama Indikator	Indeks Harmoni												
Satuan	Angka												
Definisi Operasional	Indeks Harmoni secara umum merujuk pada ukuran yang menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau wilayah.												
Formulasi Perhitungan	Mengukur indeks dengan aspek sebagai berikut: <table><tr><th>Aspek</th><th>Contoh Indikator</th></tr><tr><td>Kerukunan antar komunitas</td><td>Jumlah konflik sosial</td></tr><tr><td>Keamanan sosial</td><td>Persepsi rasa aman di lingkungan</td></tr><tr><td>Toleransi budaya dan etnis</td><td>Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya</td></tr><tr><td>Keharmonisan keluarga</td><td>Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga</td></tr><tr><td>Partisipasi sosial</td><td>Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif</td></tr></table>	Aspek	Contoh Indikator	Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial	Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan	Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya	Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga	Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif
Aspek	Contoh Indikator												
Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial												
Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan												
Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya												
Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga												
Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif												
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan kerukunan masyarakatnya												
Sumber Data	BPS												
Frekuensi	Tahunan												

1.20 Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya

Nama Indikator	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya
Satuan	%
Definisi	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya adalah rata-rata dari Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan dan Persentase warisan budaya tak benda yang telah dilestarikan
Rumus Perhitungan	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan(A) Persentase warisan budaya tak benda yang telah dilestarikan Formula : $A + B/2$
Interpretasi	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya menunjukkan sejauh mana upaya pelestarian terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda, berhasil dipertahankan sesuai dengan standar perlindungan dan pengelolaan yang ditetapkan. Warisan budaya dimaksud mencakup situs, bangunan cagar budaya, manuskrip, tradisi lisan, seni pertunjukan, upacara adat, kerajinan tradisional, hingga pengetahuan lokal yang telah diakui oleh pemerintah daerah maupun nasional.



Sumber Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

1.21 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun)
Formulasi Perhitungan	(Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah semesta penduduk bekerja) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan

1.22 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Nama Indikator	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)
Satuan	%
Definisi	Tingkat Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) adalah indikator yang menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan . Indikator ini tidak hanya menghitung jumlah orang miskin (seperti Headcount Index/P0), tetapi juga mengukur intensitas kemiskinan .
Rumus Perhitungan	$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)$
Interpretasi	Menunjukkan intensitas kemiskinan : makin tinggi nilainya, makin dalam kemiskinan yang dialami
Sumber Data	BPS

1.23 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)^

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)



Satuan	%
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\Sigma PD_{formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Dimana : PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i>, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

1.24 Indeks Kerukunan Umat Beragama^

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Satuan	Angka
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama

	D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.
Sumber Data	Balitbang, Kemenag

1.25 Persentase potensi konflik terselesaikan (%)^

Nama Indikator	Persentase Potensi Konflik Terselesaikan
Satuan	%
Definisi Operasional	Banyaknya potensi konflik di masyarakat yang bisa diselesaikan
Formulasi Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100$ Pembilang : banyaknya potensi konflik yang bisa diselesaikan.....(A) Penyebut : Jumlah potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat.....(B) Konstanta 100
Interpretasi	Semakin tinggi angka presentase potensi konflik terselesaikan semakin baik
Nama Indikator	Persentase Potensi Konflik Terselesaikan

1.26 Indeks Pelestarian Kebudayaan

Nama Indikator	Indeks Pelestarian Kebudayaan**
Satuan	Nilai (indeks)
Definisi	Indeks Pelestarian Kebudayaan merupakan indikator yang memuat komposit dari pengembangan kebudayaan. Dimana kebudayaan terbagi menjadi 2 makna yaitu kebudayaan benda dan kebudayaan tak benda.

Rumus Perhitungan	Indeks Pelestarian Kebudayaan = (IK1 x 0,3) + (IK2 x 0,7) IK1: indikator kebudayaan benda IK2: indikatr kebudayaan tak benda
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks pelestarian kebudayaan, maka semakin berhasil pelestarian kebudayaan.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

1.27 Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran^^

Nama Indikator	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran^^
Satuan	%
Definisi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total yang didaftar
Rumus Perhitungan	Pembilang : Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan.....(A) Penyebut : benda, bangunan, struktur, situs dan kawsaan cagar budaya yang telah didaftar Konstanta : 100 Formula : A/B x 100
Interpretasi	Semakin persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawsan cagar budaya yang ditetapkan semakin baik.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	

1.28 Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan^

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan; 2. Definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB)
Formulasi Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya DIKALI 100%

Interpretasi	1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; 3. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

1.29 Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia
Formulasi Perhitungan	Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga: 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor disetiap dimensi; 3. menghitung IBangga
Interpretasi	Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2. IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; 3. IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70
Sumber Data	BKKBN

1.30 Indeks Ketimpangan Gender^

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Satuan	angka
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.



Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p G_L MTF MHPK20 PR_p PR_L SE_p SE_L TPAK_p TPAK_L HARM(G_p, G_L) IKR IP IPK G_{p,L} IKG = Indeks Perempuan = Indeks Laki-laki = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun =Persentase perempuan di legislatif = Persentase laki-laki di legislatif = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik = Indeks dimensi kesehatan reproduksi = Indeks dimensi pemberdayaan = Indeks dimensi pasar tenaga kerja = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik = Indeks Ketimpangan Gender



Frekuensi	Tahunan

Aspek Daya Saing Daerah

1.1 Angka Ketergantungan

Nama Indikator	Angka Ketergantungan
Satuan	%
Definisi Operasional	Angka Ketergantungan adalah indikator demografis yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (yaitu penduduk usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini menunjukkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk mendukung kelompok usia yang tidak bekerja atau belum mandiri secara ekonomi.
Formulasi Perhitungan	$\text{Dependency Ratio} = \left(\frac{\text{Penduduk usia 0–14} + \text{usia 65 ke atas}}{\text{Penduduk usia 15–64}} \right) \times 100$
Interpretasi	Jika Angka Ketergantungan = 50 , artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 50 orang usia non-produktif . Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi pada kelompok usia kerja
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	Rasio PDRB Industri Pengolahan = Nilai Tambah Lapangan Usaha Industri Pengolahan/Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 %
Interpretasi	Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	BPS

1.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Satuan	%



Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan AKmamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor,yang mencerminkan nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang dalam PDRB, semakin tinggi nilai ekonominya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Satuan	Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan mancanegara
Formulasi Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di daerah
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

1.6 Jumlah Tamu Wisatawan Domestik



Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik
Satuan	Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu.
Formulasi Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan domestik (di setiap hotel berbintang di daerah tertentu)</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

1.7 Rata- Rata Lama Tinggal

Nama Indikator	Rata- Rata Lama Tinggal
Satuan	hari
Definisi Operasional	Rata-rata lama tinggal (length of stay) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah selama kunjungan wisatanya
Formulasi Perhitungan	$\text{Rata-rata Lama Tinggal (hari)} = \frac{\text{Jumlah total malam wisatawan menginap}}{\text{Jumlah wisatawan yang menginap}}$
Interpretasi	Rata-rata lama tinggal (length of stay) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah selama kunjungan wisatanya
Sumber Data	BPS

1.8 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota^

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
Satuan	%
Definisi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap dan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro



	dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik - Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.9 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)^

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Satuan	%
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik - Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.10 Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Formulasi Perhitungan	$(\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah} / \text{total angkatan kerja daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota)

1.11 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB



Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun
Formulasi Perhitungan	$(\text{Volume Usaha Koperasi Daerah} / \text{PDRB ADHB}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota

1.12 Return on Aset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Aset (ROA) BUMD
Satuan	%
Definisi Operasional	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Formulasi Perhitungan	$(\text{Agregat laba bersih seluruh BUMD} / \text{Agregat aset seluruh BUMD}) \times 100\%$ Catatan: BUMD dalam hal ini adalah seluruh BUMD yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dan tidak termasuk BUMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan Keuangan BUMD, BPS

1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi , baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran)	
Formulasi Perhitungan	$\text{TPAK (\%)} = \left(\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)}} \right) \times 100$	
Interpretasi	Nilai TPAK (%)	Interpretasi
	≥ 70%	Sangat tinggi (aktif secara ekonomi)
	60–69%	Tinggi
	50–59%	Sedang
	< 50%	Rendah
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

1.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas	
Formulasi Perhitungan	(Jumlah angkatan kerja perempuan/Jumlah penduduk perempuan usia 15 th keatas) x 100%	
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial	
Sumber Data	Sakernas BPS	

1.15 Kapabilitas Inovasi



Nama Indikator	Kapabilitas Inovasi
Satuan	Angka
Definisi Operasional	1. Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kapabilitas Inovasi; 2. Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang
Formulasi Perhitungan	Sesuai perhitungan BRIN
Interpretasi	1. Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi; 2. Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ
Sumber Data	BRIN

1.16 Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet^

Nama Indikator	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet^
Satuan	%
Definisi Operasional	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah setiap saat
Formulasi Perhitungan	Pembilang: Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet.... (A) Penyebut: jumlah rumah tangga Konstanta: 100 Formula: $A/B \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat
Sumber Data	BPS

1.17 Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Satuan	indeks
Definisi Operasional	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran kuantitatif yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



	Indeks ini digunakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan	
Formulasi Perhitungan	Kategori	Subkategori 
	1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi birokrasi, perizinan, pelayanan administratif
	2. Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi kesehatan, pendidikan, sosial, dan layanan langsung ke masyarakat
	3. Inovasi Daerah Lainnya	Ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dll.
Interpretasi	Nilai IID	Kategori Daerah
	≥ 60	Sangat Inovatif
	51–59	Inovatif
	≤ 50	Kurang Inovatif
Sumber Data	Kemendagri	
Frekuensi	Tahunan	

1.18 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto^

Nama Indikator	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto^
Satuan	%
Definisi Operasional	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kab/Kota
Formulasi Perhitungan	$\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: PMTB = Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) <i>PDRB ADHK</i> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber

	daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

1.19 Pertumbuhan Realisasi Investasi

Nama Indikator	Pertumbuhan Realisasi Investasi
Satuan	%
Definisi Operasional	merujuk pada investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pihak domestik (PMD) maupun luar negeri (PMA) untuk kegiatan usaha di wilayah Indonesia. PMDN dan PMA bisa berasal dari individu, badan usaha, atau pemerintah Indonesia maupun luar negeri
Formulasi Perhitungan	$\frac{Investasi_n - Investasi_{n-1}}{Investasi_{n-1}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin besar nilai Investasi maka semakin besar dana/modal yang sudah ditanamkan oleh investor (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun Penanaman Modal Asing/PMA)
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.20 Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Net Ekspor Barang dan Jasa
Satuan	%
Definisi Operasional	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi disefiniskan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi untuk periode waktu yang lama umurnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basisi akrual Dimana untukm barang dicatat sat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaan, sednagkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kab/Kota
Formulasi Perhitungan	$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%PDRB) = \frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap PDB suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestic di pasar intgernaional.

	Meningkatkan penjualan dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan maka pendapatan negara juga mengalami peningkatan karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.21 Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur = (IK1 x rasio konektivitas) + (IK2 x Bobot Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan) + (IK3 x Bobot Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman) Nilai Koefisien: IK 1 = 0,3 IK 2 = 0,6 IK 3 = 0,1
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Infrastruktur, maka semakin berhasil pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

1.22 Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, infrastruktur Perkotaan. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah didukung oleh infrastruktur Perkotaan.
Formula Perhitungan	Rata-rata pencapaian keseluruhan sasaran indikator pekerjaan umum (K1 0,7 x Persentase pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum) + (0,3 x Indeks kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan tata ruang)
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan, maka semakin berhasil pelayanan infrastuktur Perkotaan bagi masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.23 Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat pembangunan dan kesiapan wilayah didukung oleh infrastuktur perumahan dan permukiman.
Formulasi Perhitungan	Rata-rata pencapaian keseluruhan sasaran indikator perumahan dan permukiman
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Pemenuhan Infrastruktur perumahan dan permukiman, maka semakin berhasil pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman bagi masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.24 Rasio Konektivitas

Nama Indikator	Rasio Konektivitas
Satuan	Angka
Definisi	Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan dalam suatu sistem, jaringan, atau infrastruktur perhubungan.
Rumus Perhitungan	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Rasio Konektivitas Kabupaten = (1 x 70) + (0.5 x 30) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) IK1 (Angkutan Jalan) = 70 IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) IK2 (ASDP) = 30 Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)



	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin berhasil pelayanan angkutan. Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Sumber Data	Kementerian Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

1.25 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan; 3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Formulasi Perhitungan	$(\text{Penerimaan pajak daerah} / \text{PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

1.26 Tingkat Inflasi^

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Satuan	%



Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the $\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ <i>Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 4. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 5. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 6. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak <i>me-release</i> data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan

1.27 Indeks Zakat Nasional

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional
Satuan	angka
Definisi Operasional	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur komprehensif yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menilai kinerja perzakatan secara nasional maupun daerah, baik dari sisi pengelolaan maupun dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.
Formulasi Perhitungan	$IZN = \frac{(IPZ + IKM)}{2}$ Indeks ini terdiri dari 2 dimensi utama: 1. Indeks Pengelolaan Zakat (IPZ) → Menilai tata kelola dan kinerja organisasi pengelola zakat.



	2. Indeks Kesejahteraan Mustahik (IKM) → Menilai dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
Interpretasi	Mengukur dan membandingkan kinerja lembaga zakat antar daerah dan tahun
Sumber Data	Basnaz

Aspek Pelayanan Umum

1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi.												
Satuan	Angka												
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah , baik pusat maupun daerah. IRB disusun oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.												
Rumus Perhitungan	Mulai tahun 2023, IRB mengacu pada PermenPANRB No. 3 Tahun 2023, yang menyederhanakan penilaian ke dalam 3 area utama: <table><tr><td>Area Penilaian</td><td>Substansi yang Dinilai</td></tr><tr><td>Kontekstualisasi</td><td>Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi</td></tr><tr><td>Pelaksanaan RB</td><td>Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)</td></tr><tr><td>Hasil RB</td><td>Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik</td></tr></table>	Area Penilaian	Substansi yang Dinilai	Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi	Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)	Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik				
Area Penilaian	Substansi yang Dinilai												
Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi												
Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)												
Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik												
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Kategori dalam pencapaian reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Skor</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>≥ 90</td><td>Sangat Baik (AA)</td></tr><tr><td>80 – 89,99</td><td>Baik (A)</td></tr><tr><td>70 – 79,99</td><td>Cukup (BB)</td></tr><tr><td>60 – 69,99</td><td>Sedang (B)</td></tr><tr><td>< 60</td><td>Kurang (CC)</td></tr></table>	Skor	Kategori	≥ 90	Sangat Baik (AA)	80 – 89,99	Baik (A)	70 – 79,99	Cukup (BB)	60 – 69,99	Sedang (B)	< 60	Kurang (CC)
Skor	Kategori												
≥ 90	Sangat Baik (AA)												
80 – 89,99	Baik (A)												
70 – 79,99	Cukup (BB)												
60 – 69,99	Sedang (B)												
< 60	Kurang (CC)												
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.												
Frekuensi	Tahunan												

1.2 Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Satuan	Angka



Definisi Operasional	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional
Formulasi Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%; 4. Penataan database PUU, dengan bobot 15%
Interpretasi	Kategori Nilai/Angka Predikat 1. AA: >90 - 100 Istimewa 2. A: >80 - 90 Sangat Baik 3. BB : >70 - 80 Baik 4. B: >60 - 70 Cukup Baik 5. CC: >50 - 60 Cukup 6. 6. C: >30 - 50 Buruk 7. D: 0 - 30 Sangat Buruk
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM

1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik^/ Indeks Pemerintah Digital*

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Definisi SEB Buku I: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE: 1. Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; 2. Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: a. Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; b. Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; c. Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator;



	3. Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu: a. Aspek Penerapan Manajemen, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator; b. Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator; 4. Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu: a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator.
Formulasi Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan: 1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/skor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5
Interpretasi	Ukuran Tingkat Kematangan: 1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); 2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); 3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); 4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan 5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks: 1. Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut; 2. Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut; 3. Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.



	Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00% Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: 1. 4,2 – 5,0 Memuaskan 2. 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 3. 2,6 – < 3,5 Baik 4. 1,8 – < 2,6 Cukup 5. < 1,8 Kurang
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmen PAN RB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

1.4 Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator: } \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek: } \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks: } \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>) 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) 4. Transparansi (<i>Transparency</i>)

	5. Berdayaguna (Useful) 6. Aksesibilitas (Assessibility) Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

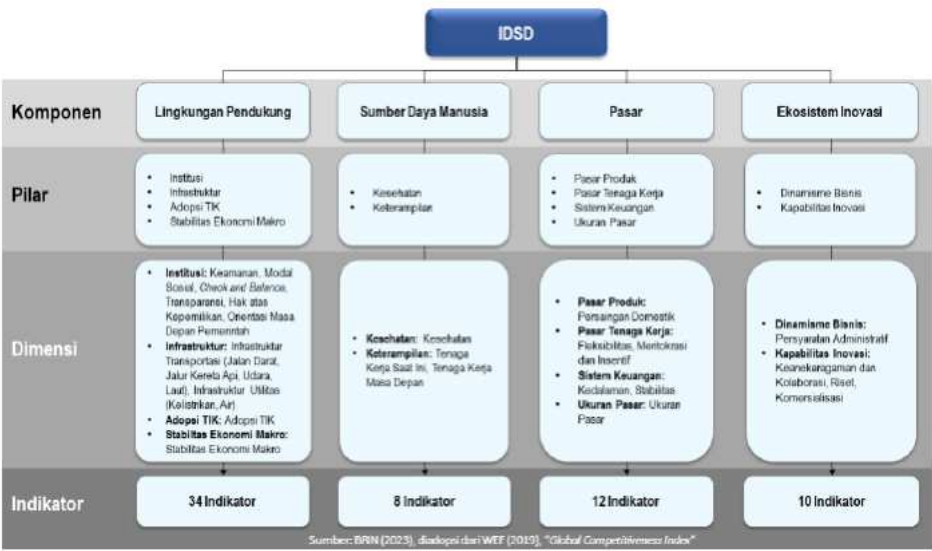
1.5 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)^

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas Nasional
Satuan	Indeks (angka)
Definisi	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).
Metode Survei	Responden dalam survei ini terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan margin of eror sebesar 5%
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0-300) Persepsi Fungsional Pengawasan PBL Pengawasan SDM Integritas Arbitrasi Integritas dalam Penyelaksanaan Tugas Penilaian Eksternal (0-325) Transparansi dan Kualitas Layanan Upaya Pencegahan Korupsi Integritas Pegawai Penilaian Ekspert (0-300) Faktor Koreksi (0,0) Prevalensi Korupsi (0,0000001) Integritas Penilaian SPI (0,01905048) Indeks Integritas 2023 $0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20 (0,58 X_4 + 0,42 X_5)$ dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Ekspert X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas
Interpretasi	Hasil berbentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokan dalam tiga kategori yaitu: 4. Rentan (indeks< 73) 5. Waspada (indeks antara 73-77) 6. Terjaga (indeks 78-100) Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

1.6 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu^

Nama Indikator	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu^
Satuan	%
Definisi	1. Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu Pilpres/Pileg dan Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota. 2. Angka Partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak pilih Angka partisipasi keseluruhan pada periode 5 berkenaan dihitung dari rata-rata angka partisipasi dari pemilu presiden/legislatif dan Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota
Rumus Perhitungan	Pembilang : Jumlah penduduk yang memilih dalam pemilu (pilpres dan pileg) ditambah jumlah penduduk yang memilih pada pilkada (Gubernur/Bupati/Walikota)....(A) Penyebut : jumlah jumlah penduduk yang berhak pilhi dalam pemilu (pilpres dan pileg) ditambah jumlah penduduk yang berhak pilih pada pilkada (Gubernur/Bupati/Walikota)....(B) Formula : A/B x 100
Interpretasi	Semakin tinggi angka partisipasi penduduk dalam Pemilihan Umum baik pilpres, pileg maupun pilkada semakin baik
Sumber Data	KPUD
Frekuensi	%

1.7 Indeks Daya Saing Daerah^

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Formulasi Perhitungan	 Sumber: BRIN (2023), diadaptasi dari WEF (2019), "Global Competitiveness Index"
Interpretasi	IDSD diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di daerah
Sumber Data	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)



1.8 Nilai SAKIP

Nama Indikator	Penilaian SAKIP																								
Satuan	Indeks (angka)																								
Definisi	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan pemerintahan.																								
Rumus Perhitungan	Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen utama, antara lain: • Perencanaan Kinerja: Evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja instansi pemerintah daerah. • Pengukuran Kinerja: Penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan sistem pengukuran kinerja yang digunakan. KKP +2 • Pelaporan Kinerja: Evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah daerah, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). • Evaluasi Internal: Penilaian terhadap mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.																								
Interpretasi	Hasil penilaian SAKIP diberikan dalam bentuk skor dan predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Skor</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90–100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td><td>Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.</td></tr><tr><td>80–89,99</td><td>A (Memuaskan)</td><td>Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.</td></tr><tr><td>70–79,99</td><td>BB (Sangat Baik)</td><td>Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.</td></tr><tr><td>60–69,99</td><td>B (Baik)</td><td>Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.</td></tr><tr><td>50–59,99</td><td>CC (Cukup)</td><td>Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.</td></tr><tr><td>30–49,99</td><td>C (Kurang)</td><td>Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.</td></tr><tr><td>0–29,99</td><td>D (Sangat Kurang)</td><td>Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.</td></tr></table>	Skor	Predikat	Interpretasi	90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.	80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.	70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.	60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.	50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.	30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.	0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.
Skor	Predikat	Interpretasi																							
90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.																							
80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.																							
70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.																							
60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.																							
50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.																							
30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.																							
0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.																							
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																								
Frekuensi	Tahunan																								

1.9 Angka kriminalitas

Nama Indikator	Angka kriminalitas
Satuan	angka
Definisi	Angka kriminalitas adalah indikator yang menunjukkan jumlah tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah per periode tertentu , biasanya dihitung per 100.000 penduduk agar bisa dibandingkan antar wilayah atau waktu.



Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Kriminal}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100.000$
Interpretasi	Menilai tingkat keamanan suatu daerah .
Sumber Data	BPS Provinsi

1.10 Opini Penilaian BPK

Nama Indikator	Opini Penilaian BPK										
Satuan	opini										
Definisi	Opini BPK adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (LKPD, LKPP, atau LKKL) berdasarkan hasil pemeriksaan.										
Rumus Perhitungan											
Interpretasi	<table><thead><tr><th>Jenis Opini</th><th>Penjelasan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</td><td>Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai SAP</td></tr><tr><td>Wajar Dengan Pengecualian (WDP)</td><td>Secara umum wajar, tetapi terdapat beberapa hal yang dikecualikan dan berdampak terbatas</td></tr><tr><td>Tidak Wajar (Adverse)</td><td>Laporan keuangan mengandung salah saji material secara menyeluruh</td></tr><tr><td>Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)</td><td>BPK tidak cukup mendapatkan bukti yang memadai untuk menyatakan pendapat</td></tr></tbody></table>	Jenis Opini	Penjelasan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai SAP	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Secara umum wajar, tetapi terdapat beberapa hal yang dikecualikan dan berdampak terbatas	Tidak Wajar (Adverse)	Laporan keuangan mengandung salah saji material secara menyeluruh	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)	BPK tidak cukup mendapatkan bukti yang memadai untuk menyatakan pendapat
Jenis Opini	Penjelasan										
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai SAP										
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Secara umum wajar, tetapi terdapat beberapa hal yang dikecualikan dan berdampak terbatas										
Tidak Wajar (Adverse)	Laporan keuangan mengandung salah saji material secara menyeluruh										
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)	BPK tidak cukup mendapatkan bukti yang memadai untuk menyatakan pendapat										
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan										
Frekuensi	Tahunan										

1.11 Indeks Akses Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah
Satuan	angka
Definisi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu daerah. Ini mencakup aspek seperti kepemilikan rekening bank, penggunaan layanan kredit, tabungan, dan asuransi
Rumus Perhitungan	Indeks Akses Keuangan Daerah 1 Aspek pengukuran: Penggunaan, ketersediaan titik akses, dan kedalaman produk dan layanan sektor keuangan 2 Ketersediaan: Sampai dengan wilayah kabupaten/kota 3 Pendekatan & Sumber Data: Agregasi data lembaga sektor keuangan dan data lainnya



Interpretasi	Mengukur seberapa inklusif sistem keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Ombudsman

METADATA INDIKATOR KINERJA KUNCI

Metadata Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan deskripsi rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penyusunan metadata ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, konsisten, dan terukur terkait definisi, metodologi, serta mekanisme pengumpulan data indikator kinerja.

Dengan adanya metadata, setiap indikator kinerja kunci dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pihak yang terlibat, baik manajemen internal, auditor, maupun pemangku kepentingan eksternal. Metadata juga menjadi instrumen penting dalam memastikan validitas, reliabilitas, serta keterbandingan data kinerja dari waktu ke waktu.

Urusan Pendidikan

1.1 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$

1.2 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$

1.3 Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$

1.4 Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$

1.5 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)

1.6 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan

1.7 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)

1.8 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan

1.9 Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B

Nama Indikator	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
Satuan	%
Rumus Perhitungan	

1.10 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (DIV)

Nama Indikator	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (DIV)
Satuan	%
Rumus Perhitungan	

1.11 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar

1.12 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar

1.13 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar

1.14 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar

1.15 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD



Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.

1.16 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar

Urusan Kesehatan

1.1 Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Jumlah Kasus Kematian Ibu
Satuan	Kasus
Formulasi Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama

1.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%); 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

1.3 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.4 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.5 Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.7 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$

1.8 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar



Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$

1.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$

1.10 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.11 Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar
Satuan	%



Formulasi	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$

1.12 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
Satuan	%
Formulasi	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.13 Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar
Satuan	%
Formulasi	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$

1.14 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar
Satuan	%
Formulasi	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

1.1 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$

1.2 Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$

1.3 Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota

Nama Indikator	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$

1.4 Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota

Nama Indikator	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$

1.5 Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota

Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$

1.6 Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Nama Indikator	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$

1.7 Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Permohonan PBG \& SLF yang diproses terhadap permohonan PBG \& SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG \& SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG \& SLF yang telah diterbitkan}} \times 100\%$

1.8 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{Panjang Jalan Kondisi Baik} + \text{Panjang Jalan Kondisi Sedang}) \text{ panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}}{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}} \times 100\%$

1.9 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis



Nama Indikator	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota}} \times 100\%$

1.10 Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nama Indikator	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk})}{3} \times 100\%$

1.11 Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah
Satuan	HARI
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNPB KKPR-nya oleh pemohon}}{\text{Hari}}$

1.12 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota

Nama Indikator	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun}} \times 100\%$

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni

Nama Indikator	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni
Satuan	%



Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$

1.2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Nama Indikator	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$

1.3 Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani

Nama Indikator	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$

1.4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Nama Indikator	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$

1.5 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$



Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.1 Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$

1.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$

1.3 Jumlah PPNS pada Satpol PP

Nama Indikator	Jumlah PPNS pada Satpol PP
Satuan	orang
Formulasi Perhitungan	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS

1.4 Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas

Nama Indikator	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan} = 10} \times 100\%$

1.5 Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Nama Indikator	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
Satuan	%

Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan} = 4} \times 100\%$

1.6 Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar

Nama Indikator	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP}} \times 100\%$

1.7 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$

1.8 Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Nama Indikator	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$

1.9 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Nama Indikator	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Satuan	%

Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$

1.10 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Nama Indikator	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} \times 100\%$

1.11 Persentase penanganan pra bencana

Nama Indikator	Persentase penanganan pra bencana
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$

1.12 Persentase penanganan pasca bencana

Nama Indikator	Persentase penanganan pasca bencana
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P}} \times 100\%$

1.13 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Nama Indikator	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n}} \times 100\%$

1.14 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$

Urusan Tenaga Kerja

1.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Nama Indikator	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$

1.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$

1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Satuan	Rp/Orang
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$

1.4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Satuan	%



Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelolakerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$

1.5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten

Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yangditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Satuan	Indeks
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Penggabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender

1.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Satuan	angka
Formulasi Perhitungan	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ Keterangan: HARM (GF ,GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan



	$G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$ GF, M : Indeks dimensi Rumus Indeks Kesehatan adalah: $Kesehatan = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}}\right)}{2}$ Rumus Indeks pemberdayaan adalah: $Pemberdayaan = (\sqrt{PR_F \cdot S_F} + \sqrt{PR_M \cdot S_M})/2$ Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah $IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$ Dimana: Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan: indeks pemberdayaan IPK : Indeks Pasar Kerja Indeks Perempuan dihitung dengan formula: $G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot S_F) \cdot TPAK_F}$ formula untuk Indeks Laki-laki: $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$ Keterangan G_F : Indeks Perempuan G_M:Indeks Laki-laki Faskes:Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP: Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_F: Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR_M: Persentase perempuan yang duduk di parlemen SE_F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA SE_M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA TPAK_F : Persentaseangkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen TPAK_M : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja

1.3 Persentase ARG Daerah

Nama Indikator	Persentase ARG Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG

1.4 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif



Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif x 100% Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban.

1.5 Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif

Nama Indikator	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif x 100% Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO

Urusan Pangan

1.1 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota x 100% Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023)

1.2 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota
Satuan	Nilai 0-100

Formulasi	1. Pengelompokkan pangan
Perhitungan	2. Konversi bentuk, jenis dan satuan
	3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan
	4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan
	5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen)
	6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE)
	7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan.
	8. Menghitung skor AKE
	9. Menghitung Skor PPH
	Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan

1.3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Nama Indikator	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Satuan	%
Formulasi	Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten}}{\text{Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten}} \times 100\%$

1.4 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan

Nama Indikator	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan
Satuan	%
Formulasi	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kewanamanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%

Urusan Pertanahan

1.1 Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran

Nama Indikator	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran
Satuan	%
Formulasi	Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee
Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}} \times 100\%$

1.2 Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran

Nama Indikator	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat

	yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$

1.3 Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran

Nama Indikator	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah.}}{\text{target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}} \times 100\%$

1.4 jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran

Nama Indikator	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} \times 100\%$

1.5 terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$

1.6 Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas

Nama Indikator	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas}}{\text{jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota}} \times 100\%$

1.7 Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} \times 100\%$

1.8 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

1.9 Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB

Nama Indikator	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

Urusan Lingkungan Hidup

1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota



Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1.2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH 2. SDM PENGELOLA SAMPAH 3.SARANA DAN PRASARANA (PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH) 4. ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH 5. SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PENGELOLAAN SAMPAH 6. ACCEPTABILITY & IMPLEMENTASI 7. CAPAIAN TERHADAP TARGET DAN KAPASITAS 8. EFISIENSI ANGGARAN (RASIO INCREMENTAL CAPAIAN DAN TARGET PER KELAS ANGGARAN) 9. KOTA BERSIH (PENILAIAN ADIPURA) 10. NILAI IKA (INDEKS KUALITAS AIR), KOMPONEN DARI IKLH.

1.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota

Nama Indikator	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung}} \times 100\%$

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.1 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$

1.2 Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan



Nama Indikator	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$

1.3 Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$

1.4 Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan

Nama Indikator	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$

1.5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100\%$

1.6 Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun

Nama Indikator	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\%$

1.7 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$



	Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1 Persentase peningkatan status desa mandiri

Nama Indikator	Persentase peningkatan status desa mandiri
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_n - \text{jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}} \times 100\%$ Note: Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM, sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes.

1.2 Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$

1.3 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}} \times 100\%$

1.4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah LKD yang terfasilitasi}}{\text{jumlah LKD}} \times 100\%$

1.5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat



Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah LAD dan LMHA yang terfasilitas}}{\text{jumlah LAD dan LMHA}} \times 100\%$

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

Nama Indikator	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Kabaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$

1.2 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)

Nama Indikator	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Banyaknya Peserta KB aktif modern}}{\text{Banyaknya pasangan usia subur}} \times 100\%$ (PUS) PA Modern: Peserta KB Aktif modern PUS: Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun

1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Nama Indikator	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$

1.4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Nama Indikator	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Satuan	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun

Formulasi	[[ASFR]] (15-19)=K_(15-19)/P_(15-19) × 1000
Perhitungan	

1.5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Satuan	Nilai 0-100
Formulasi Perhitungan	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga: iBangga = 1 / 3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100

Urusan Perhubungan

1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
Satuan	Rasio
Formulasi Perhitungan	$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%

1.2 Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$

1.3 Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen

keselamatan

Nama Indikator	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum}} \times 100\%$

Urusan Komunikasi dan Informatika

1.1 Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$

1.2 Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota}} \times 100\%$

1.3 Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1.1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi



Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$

1.2 Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Nama Indikator	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\Sigma \text{ Jumlah UMKM}} \times 100\%$

1.3 Pertumbuhan Wirausaha

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\Sigma \text{ Wirausaha tahun berjalan} - \Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya})}{\Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$

Urusan Penanaman Modal

1.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{jumlah nilai investasi tahun } n-1) \text{ di kab/kota}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n-1 \text{ di kab/kota}} \times 100\%$

1.2 Realisasi Total terhadap Target Investasi

Nama Indikator	Realisasi Total terhadap Target Investasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi Kab/Kota}}{\text{Target Investasi Kap/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$

Urusan Kepemudaan dan Olahraga



1.1 Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat

Nama Indikator	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota}} \times 100\%$

1.2 Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi

Nama Indikator	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$

Urusan Statistik

1.1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Satuan	Poin
Formulasi Perhitungan	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.

Urusan Persandian

1.1 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah

Nama Indikator	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$

Urusan Kebudayaan

1.1 Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan
Satuan	%



Formulasi	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$
Perhitungan	

1.2 Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan
Satuan	%
Formulasi	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb}} \times 100\%$
Perhitungan	

1.3 Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan
Satuan	%
Formulasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Kebudayaan}} \times 100\%$
Perhitungan	

Urusan Perpustakaan

1.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Satuan	Nilai
Formulasi	$TGM = 0.3 \text{ TFM} + 0.3 \text{ TDM} + 0.3 \text{ TJB} + 0.05 \text{ FAI} + 0.05 \text{ DAI}$ Keterangan: TGM = Nilai Tingkat Kegemaran Membaca TFM= Tingkat Frekuensi Membaca TDM= Tingkat Durasi Membaca TJB = Jumlah buku dibaca FAI = Frekuensi Akses Internet DAI= Durasi Akses Internet
Perhitungan	

1.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Satuan	Nilai
Formulasi	Keterangan: UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan; UPLM2 = Ketercukupan Koleksi Perpustakaan;
Perhitungan	



	UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; UPLM4 =Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan; UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar; UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Perpustakaan; UPLM7 = Anggota Perpustakaan; AM = Aspek Masyarakat

Urusan Indeks Kearsipan

1.1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	$IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi$ IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal, NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Urusan Kelautan dan Perikanan

1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Nama Indikator	Produksi Perikanan Tangkap
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$

1.2 Produksi Perikanan Budi Daya

Nama Indikator	Produksi Perikanan Budi Daya
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Perikanan Budi Daya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budi Daya}} \times 100\%$

Urusan Pariwisata

1.1 Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Nama Indikator	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N} - \text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}}{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}} \times 100\%$

1.2 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)



Nama Indikator	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun N)} - (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun N-1}))}{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)})} \times 100\%$

1.3 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual

Nama Indikator	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$

Urusan Pertanian

1.1 Peningkatan produksi tanaman pangan

Nama Indikator	Peningkatan produksi tanaman pangan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun ini} - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$

1.2 Peningkatan Produksi Hortikultura

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Hortikultura
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Holtikultura Tahun ini} - \text{Produksi hortikultura Tahun Kemarin}}{\text{Produksi hortikultura tahun kemarin}} \times 100\%$

1.3 Peningkatan Produksi komoditas Peternakan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan
Satuan	%

Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun ini} - \text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}} \times 100\%$

1.4 Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun N} - \text{Produksi Perkebunan Tahun N-1}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin} - \text{Produksi Perkebunan tahun N-1}} \times 100\%$

1.5 Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nama Indikator	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{luas terkena DPI yang ditangani tahun ini}}{\text{Di bagi luas terkena DPI total}} \times 100\%$

1.6 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)

Nama Indikator	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$

Urusan Perdagangan

1.1 Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota

Nama Indikator	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota
Satuan	%
Formulasi	
Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}}{\text{Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}} \times 100\%$

1.2 Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Nama Indikator	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Satuan	%



Formulasi	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$

Urusan Perindustrian

- 1.1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:
- 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
 - 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota
 - 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
 - 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
 - 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

	Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% dan seterusnya 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dan seterusnya Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%

1.2 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor

Nama Indikator	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%

1.3 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.

Nama Indikator	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%

1.4 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.

Nama Indikator	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah



	Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%
1.5 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	
Nama Indikator	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%

Urusan Perencanaan

1.1 Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	
Nama Indikator	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang di dukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$

Urusan Keuangan

1.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	
Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan uru yang dialokasikan Melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$
1.2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
1.3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Nama Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Satuan	%



Formulasi	Realisasi Anggaran Belanja
Perhitungan	$\frac{\text{Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}} \times 100\%$

1.4 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Satuan	%
Formulasi	Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset
Perhitungan	$\frac{\text{Tetap Tahun N} - 1}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N-1}} \times 100\%$

1.5 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Satuan	%
Formulasi	Alokasi Belanja Infrastruktru Pelayanan Publik
Perhitungan	$\frac{\text{Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa}}{\text{Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa}} \times 100\%$

1.6 Persentase Penurunan SILPA

Nama Indikator	Persentase Penurunan SILPA
Satuan	%
Formulasi	Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA
Perhitungan	$\frac{\text{Tahun N} - 1}{\text{Nilai SILPA Tahun N} - 1} \times 100\%$

Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1.1 Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN

Nama Indikator	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN
Satuan	indeks
Formulasi	Kategori penilaian:
Perhitungan	A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20

Urusan Penelitian dan Pengembangan

1.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah



Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah}} \times 100\%$

1.2 Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah

Nama Indikator	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Satuan	Rasio
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan}}$

Urusan Fungsi Pengawasan

1.1 Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)

Nama Indikator	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)
Satuan	Kategori / Opini
Formulasi Perhitungan	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adverse opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

1.2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Satuan	Nilai (1-5)
Formulasi Perhitungan	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah



1.3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Satuan	Nilai (2-5)
Formulasi Perhitungan	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah

1.4 Manajemen Risiko Indeks

Nama Indikator	Manajemen Risiko Indeks
Satuan	Nilai (1-5)
Formulasi Perhitungan	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.

1.5 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Nama Indikator	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}} \times 100\%$

Urusan Fungsi Pengadaan

1.1 Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Nama Indikator	Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Satuan	poin
Formulasi Perhitungan	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1.2 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Nama Indikator	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Satuan	poin
Formulasi Perhitungan	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

1.3 Tingkat Kematangan UKPBJ



Nama Indikator	Tingkat Kematangan UKPBJ
Satuan	poin
Formulasi Perhitungan	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Urusan Hubungan dengan Perwakilan Daerah

1.1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Nama Indikator	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N
Satuan	Tepat/Tidak Tepat
Formulasi Perhitungan	1. Tepat 2. Tidak Tepat

1.2 Persentase Penetapan RanPerda Tahun N

Nama Indikator	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$

Urusan Pelayanan Publik

1.1 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N

Nama Indikator	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
Satuan	Nilai
Formulasi Perhitungan	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N